

Asep Nurjaman

PARTAI DAN PEMILU



**Perilaku Politik di Aras Lokal
Pasca Orde Baru**



Asep Nurjaman

PARTAI DAN PEMILU

Perilaku Politik di Aras Lokal Pasca Orde Baru



Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

PARTAI DAN PEMILU

Perilaku Politik di Aras Lokal Pasca Orde Baru

Hak Cipta © Dr. Asep Nurjaman, M.Si., 2019
Hak Terbit pada UMM Press

Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telepon 0877 0166 6388, (0341) 464318 Psw. 140
Fax. (0341) 460435
E-mail: ummpress@gmail.com
<http://ummpress.umm.ac.id>
Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

Cetakan Pertama, Maret 2019
ISBN: 978-979-796-381-1

xii; 285 hlm: 16 x 23 cm

Setting & Layout, Desain cover: AH. Riyantono

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PARTAI DAN PEMILU

Perilaku Politik di Aras Lokal Pasca Orde Baru

PRAKATA

Buku ini ditulis dalam rangka memenuhi kebutuhan literatur untuk mata kuliah “Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia” khususnya terkait dengan praktek pemilu di tingkat lokal. Buku ini diberi judul “*PARTAI dan PEMILU: Perilaku Politik Di Aras Lokal Pasca Orde Baru*”. Pada saat ini literatur yang terkait dengan praktek pemilu di tingkat lokal masih sangat sedikit. Umum buku-buku yang ditulis lebih banyak mengulas praktek pemilu di tingkat nasional, dan data yang disuguhkan lebih banyak merupakan data agregat yang berupa data sekunder, bukan merupakan hasil penelitian lapangan. Buku ini merupakan kajian hasil penelitian lapangan penulis yang meliputi tiga kali pemilu yaitu pemilu 1999, 2004, dan 2009 di tiga Daerah, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Khalayak pengguna buku ini diutamakan untuk mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya program studi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan baik S1 maupun S2. Namun demikian karena buku ini sarat dengan data dan analisa yang berguna terkait dengan perilaku politik, maka buku ini bisa juga dimanfaatkan oleh kalangan peneliti, politisi, maupun masyarakat umum yang *concern* dengan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kami sangat menyadari, bahwa dalam penyelesaian buku ajar ini tidak lepas dari adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah kami berterima kasih kepada orang-orang yang telah banyak memberikan kontribusi yang tidak ternilai dalam menyelesaikan buku ini. Kepada rekan-rekan sejawat yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan rekan-rekan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, kami mengucapkan terima kasih atas toleransinya yang besar kepada kami.

Ucapan terima kasih juga harus kami sampaikan kepada semua fungsionaris partai dan Anggota Dewan di Malang Raya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, yang telah sudi untuk diwawancarai

dan memberi data serta informasi yang tak ternilai harganya. Kepada semua yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian buku ajar ini, dengan segala kerendahan hati, sekali lagi kami mengucapkan terimakasih, semoga Allah membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan. *Aamiin...*

Pada akhirnya kami harus menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua kami atas do'a yang selalu dipanjatkannya, juga kepada istri, Elly Melyawati Effendy dan anak-anak kami (Adelya Ayu Musthafa, Nenden Anita, Muhammad Ridwan Nurjaman, dan Muhammad Gilang Nurjaman) yang selama menyelesaikan buku ajar ini sering terabaikan. Untuk itu, sudah sepantasnyalah buku ajar ini dipersembahkan kepada mereka.

Malang, Januari 2019

Dr. Asep Nurjaman, M.Si.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| PRAKATA | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II. KAJIAN TEORITIK | 9 |
| A. Demokrasi Defisit dan Partisipasi Politik | 9 |
| B. Representasi | 14 |
| C. Sistem Kepartaian | 16 |
| D. Sistem Pemilu | 22 |
| E. Jenis Pemilih: Aliran Politik Geertz | 25 |
| F. Fenomena Politik Kepartaian | 29 |
| BAB III. KEADAAN SOSIAL, BUDAYA DAN POLITIK MASYARAKAT | 35 |
| A. Pendahuluan | 35 |
| B. Karakter Budaya | 37 |
| C. Geo Politik | 46 |
| BAB IV. TIPOLOGI PEMILIH | 73 |
| A. Social Cleavages Pemilih | 73 |
| B. Varian Keagamaan Pemilih dan Afiliasi Politik | 81 |
| C. Pemilih Santri dan Abangan | 89 |
| D. Proses Sosialisasi dan Identifikasi Diri | 100 |
| E. Pola Patronasi | 109 |

| | |
|---|-----|
| BAB V. PARTAI DAN SISTEM KEPARTAIAN | 119 |
| A. Sistem Kepartaian Era Multipartai | 119 |
| B. Peta Ideologi Partai Politik Indonesia | 123 |
| C. Partai Sektarian | 135 |
| D. Kecenderungan Ideologi Partai Politik Di Era Multipartai | 158 |
| BAB VI. MAKNA PARTAI POLITIK BAGI PEMILIH | 165 |
| A. Makna Partai: Sebuah Gambaran Umum | 165 |
| B. Makna Ideologis | 168 |
| C. Makna Sosial Kemasyarakatan | 181 |
| D. Makna Ekonomi | 190 |
| BAB VII. PARTAI DAN PEMILIH DI ERA MULTI PARTAI | 199 |
| A. Kinerja Partai Politik | 199 |
| B. Strategi Partai Politik dalam Meraih Simpati Pemilih | 208 |
| C. Perilaku Voting di Era Multipartai | 227 |
| BAB VIII. KESIMPULAN | 245 |
| A. Eksistensi Politik Aliran Belum Hilang | 248 |
| B. Berkembangnya Massa Mengambang dan Swings Voters | 250 |
| C. Perluasan Makna Partai | 252 |
| D. Partai Mengejar Kepentingan Jangka Pendek | 253 |
| E. Diskusi Teoritik | 256 |
| DAFTAR FUSTAKA | 263 |
| GLOSARIUM | 277 |
| INDEKS | 281 |
| TENTANG PENULIS | 285 |

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu di bawah rezim Orde Baru, yang dikenal dengan rezim *authoritarian*,¹ telah menempatkan Golkar sebagai pemenang mayoritas. Sementara dua partai lainnya (PPP dan PDI) hanya sebagai partai pendamping yang tidak boleh besar namun juga tidak boleh mati. Kemenangan Golkar dalam setiap pemilu masa Orde baru tidak lepas dari proses rekayasa pemerintah untuk mengeksploitasi suara pada setiap pemilu seperti dilakukannya fusi partai, membuat massa mengambang (*floating mass*), dan penetapan azas tunggal Pancasila (*monolitik*). Di samping itu trauma politik (peristiwa G.30.S/PKI) pada tahun 1965, juga dijadikan senjata oleh rezim Orde Baru untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat khususnya di pedesaan memilih Golkar karena takut dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI.

Sementara dua partai lain (PPP dan PDI) tidak diberi kebebasan untuk melakukan manuver politik, karena gerak langkahnya selalu diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bagi PPP agar bisa *survive* hanya bisa mengandalkan sentimen keagamaan (khususnya pemilih Islam), karena PPP merupakan satu-satunya partai Islam. Begitu pun PDI tidak lebih hanya mengandalkan kharisma Bung Karno sebagai pendiri PNI, itu pun selalu direkayasa agar keluarga Soekarno tidak terlibat dalam pimpinan PDI. Dengan demikian partai ini (PDI) menjadi

¹ Sejalan dengan pergerakan politik Indonesia pasca tahun 1957 ke arah otoritarianisme, banyak para sarjana mencoba untuk membuat model bangunan sistem politik Soekarno maupun Soeharto. Fokus perhatian mereka di arahkan pada konflik elit dan budaya politik. Berbagai istilah yang dipergunakan oleh mereka, namun semuanya punya makna sama yang menrangkan sebuah fenomena otoritarian. Mereka memberikan karakter pada rezim Soeharto, dan sebagian lagi, pada rezim Soekarno sebagai "neo-patrimonial regime" (Wilner, 1966; Benedic Anderson, 1972; Harold Crouch, 1979); "Repressive-Developmentalist Regime" (Herbert Feith, 1979); "Bureaucratic Poliy" (Karl D. Jackson, 1978); "Personal Rule" (William Liddle, 1985); "Tecnocratic State" (J.J. Mc. Dougall, 1989); "Beamtenstaat" (Harry J. Benda, 1966; Ruth Mc. Vey, 1982); "State Corporatism" (Mohtar Mas' oed, 1989).

partai yang paling “tertidas” di masa Orde Baru, dan ini menjadi berkah (*blessing indisgize*) bagi PDI-P karena masyarakat yang merasa tertidas oleh kebijakan Orde Baru menjadi pendukung fanatik pada pemilu 1999.

Melihat kenyataan tersebut di atas, para pemilih, baik itu yang memilih Golkar, PPP, maupun PDI mempunyai kesadaran subyektif sendiri-sendiri sesuai dengan pemaknaan mereka terhadap partai yang dipilihnya. Golkar sebagai partai pemerintah, dengan mempergunakan instrumen birokrasi, melakukan berbagai cara agar masyarakat memilih Golkar baik dengan janji-janji maupun intimidasi. Oleh karena itu banyak pemilih di pedesaan yang umumnya petani memilih Golkar dengan alasan cari aman dari intimidasi aparat birokrasi. Termasuk pegawai negeri sipil tidak berani memilih selain Golkar, karena apabila tidak memilih Golkar berarti karier sebagai PNS-nya akan terancam.

Bagi PPP yang cenderung berharap dari pemilih Islam, khususnya kalangan Islam tradisional (waga NU) mengalami kesulitan, karena Pemerintah dan Golkar juga melakukan ekspansi besar-besaran kedalam pemilih Islam dengan berbagai cara. Pemerintah berupaya memisahkan PPP dari basis pemilihnya dengan cara mengintervensi setiap pergantian pucuk pimpinan PPP adalah orang yang kooperatif dan tidak punya legitimasi kuat di kalangan NU.² Dengan demikian, pemilih PPP umumnya berasal dari pemilih Islam Konservatif yang cenderung radikal dan berangan-angan untuk memperjuangkan syariat Islam atau pendirian negara Islam. Khusus PDI yang selama Orde Baru mendapat tekanan dari pemerintah, para pemilihnya datang dari masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Mereka umumnya datang dari kelompok miskin perkotaan, kaum buruh, atau dari keluarga yang dulunya pengagum berat Bung Karno maupun keturunan dari keluarga yang dianggap terlibat partai terlarang yang tidak punya akses untuk berkembang di era Orde Baru.

² Pucuk pimpinan PPP dalam beberapa periode dipimpin oleh Idham Chalid yang merupakan pimpinan puncak NU, namun secara geografis dia bukanlah kelahiran Jawa karena dia lahir di Setui, Kalimantan Selatan pada tahun 1921. Setelah itu PPP dipimpin oleh Jaelani Naro, Hasan Materium yang keduanya orang Sumatra. Sampai pada akhirnya terjadi upaya pengembosan kepada PPP yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU, khususnya pada tahun 1987. Menurut Bruinessen, pengaruh pengembosan NU atas perolehan suara PPP dalam pemilu ternyata dramatis. Pada tiga pemilu sebelumnya, suara PPP tetap kurang lebih stabil. Pada pemilu 1971 keempat Partai Islam memperoleh 27,1 % (dua pertiga diantaranya untuk NU), pada tahun 1977 pun ada penambahan tipis menjadi 27,8%, dan pada tahun 1982 turun sedikit. Akan tetapi, pada tahun 1987, perolehan suara PPP menurun menjadi 16 %.

Setelah Orde Baru bubar, proses demokratisasi berkembang pesat seiring dengan reformasi yang terus dilakukan dari tahun 1998 sampai sekarang. Hal ini menjadi momentum bagi masyarakat (pemilih) untuk merubah kesadaran mereka tentang realitas kepartaian yang dihadapi. Apalagi di era reformasi masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan partai sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hampir 140 calon partai lebih tercatat setelah tujuh bulan Presiden Habibie berkuasa, dan kemudian 48 partai dapat ikut pada pemilu Juni 1999. Pada pemilu 2004, 2009, dan 2014 berturut turut tercatat ada 24, 38, dan 14 partai politik yang dapat mengikuti kompetisi untuk memperebutkan suara pemilih.

Dalam pemilu Juni 1999, menjadi anti tesis pemilu era Orde Baru. Kebebasan dan keterbukaan menjadi kesadaran baru bagi pemilih yang pada saat Orde Baru merasa terkungkung dan terintimidasi. Masyarakat memilih sesuai dengan makna partai yang ada dalam pemahaman mereka sendiri. Hasilnya partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang selama Orde Baru menjadi partai tertindas mendapatkan suara tertinggi yaitu 33,76 %. Partai Golkar yang masih mendapat dukungan dari pemilih dari keluarga PNS mendapatkan suara 22,46 %, sementara PPP mendapatkan suara 12,62 % dari pemilih Islam Konservatif. Sementara partai-partai lain yang mendapatkan suaradi atas 3 % merupakan kelanjutan dari politik aliran seperti dalam pemilu 1955. Partai Kebangkitan bangsa (PKB) yang identik dengan partai NU mendapatkan suara sebesar 12,62 %, di sisi lain Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang dianggap representasi dari Masyumi masing-masing meperoleh suara 7,12 dan 1,94 %.

Setelah lima tahun berlalu, dan masuk ke pemilu berikutnya tahun 2004 pemilih telah belajar dan mengevaluasi partai-partai yang mereka pilih pada pemilu tahun 1999. Pada umumnya pemilih banyak yang kecewa terhadap partai-partai yang mereka pilih karena apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan selama lima tahun, partai-partai tidak bermakna seperti apa yang ada dalam pandangan mereka. PDI P sebagai partai yang dimaknai sebagai partai pembebas dan partai pembela *wong cilik* pada kenyataannya justru ketika Megawati menjadi Presiden banyak menggusur orang-orang kecil. PAN yang oleh pemilihnya disimbolkan sebagai partai Islam Modernis yang memperjuangkan *amal ma'ruf nahi munkar*, tidak mampu memenuhi harapan konstituennya yang umumnya

berasal dari kelompok Islam Modernis (Muhammadiyah). Hal ini telah mengakibatkan sebahagian masyarakat mensikapi persoalan tersebut dengan mengembangkan perilaku *praktis pragmatis*, yang bisa dilihat dari banyaknya praktik *money politics* yang terjadi pada pemilu 2004.

Di samping itu, faktor lain yang ikut mendorong terjadinya kekecewaan masyarakat terhadap partai adalah rendahnya kinerja partai politik, Dewan, dan integritas moral para wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan dengan tidak berjalannya fungsi organisasi, dimana partai politik hanya dikendalikan oleh sekelompok elit parpol baik yang ada di pusat maupun di daerah, termasuk rendahnya kualitas maupun tanggung jawab dari parpol dan anggota legislatif terhadap para pemilihnya (*constituency*). Kondisi ini bisa dibuktikan dari kinerja para wakil rakyat baik itu yang ada di pusat maupun di daerah, umumnya mereka terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang seharusnya diperjuangkan di era reformasi ini. Hasil temuan Greg Fealy (Lloyd G. dan Smith S., 2001) juga membuktikan bahwa:

".....most of the major parties are not, to quote the 1999 statute, 'in the hand of the people' but rather are controlled by small numbers of elites, both at the national and local levels. Major parties tend to have poor internal communications: branches generally receive scant information about policy issues or higher-level decision making, and there is little consultation with rank and file members on such matters. ...This lack of grassroots input allows local officials to control party appar with only minimal accountability to members".

Munculnya perilaku politik praktis pragmatis dalam pemilu 2004, telah menjadi fenomena tersendiri dalam politik Indonesia karena mendorong pemilih untuk melakukan rekonseptualisasi atas pemaknaan subyektifnya pada partai politik. Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan, cenderung membangun kesadaran akan "makna ekonomi" dari partai politik bagi kepentingan pemilih. Oleh karena itu jual beli suara pada pelaksanaan pemilu menjadi realitas politik yang tidak bisa dibantah. Menjelang pemilu 2004, partai (pengurus partai) dan pemilih terlibat transaksi untuk mendukung salah satu partai dengan imbalan bantuan baik itu untuk kepentingan kampung maupun untuk kepentingan kelompok. Dengan demikian posisi antara partai dan pemilih lebih mirip sebagai penjual dan pembeli, yang melakukan transaksi setiap lima tahun sekali. Kondisi ini sebenarnya telah berkembang sejak jaman Orde Baru, dimana Golkar selalu memberi iming-iming bantuan infra

struktur baik itu jalan, penerangan maupun bantuan lainnya agar pemilih mau mencoblos.

Akibat pola hubungan antara partai dan pemilih yang bersifat transaksional, partai harus “menghidupi” para anggotanya (*constituency*) dengan berbagai bantuan yang bisa dirasakan secara langsung. Hal ini telah menyebabkan partai politik termasuk kader-kadernya terprogram untuk berlomba mencari *income* dari proses politik agar dapat memenuhi kepentingan, keinginan dan harapan konstituennya tersebut. Akibat dari keadaan demikian para kader, anggota dewan, sampai pengurus partai politik yang tertanam dalam benaknya adalah bagaimana memperbanyak “gizi” politik. Kondisi ini telah mendorong partai untuk menjadikan para wakil rakyat sebagai mesin uang. Semakin produktif para kader “menghidupi” partai, maka akan semakin kuat legitimasi anggota dewan tersebut di partainya. Oleh karena itu sangat logis apabila korupsi di Indonesia ini sangat susah untuk diberantas, walaupun pemerintah berusaha keras untuk memerangnya. Bahkan dalam masyarakat sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak anggota dewan menjadi “makelar” berbagai proyek dan program bantuan baik itu DPR Pusat maupun di Daerah. Boleh dikatakan, tidak ada pekerjaan dewan yang tidak dijadikan sumber uang, baik dari mulai rapat, sidang, turba, studi banding, sampai pilkada. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila James E. Alt dan K. Alic Chrystal (1983) mengatakan bahwa “*the love of money is the root of evil*”, seperti yang ditunjukkan dalam drama politik yang dilakukan elit. Para elit politik sering melakukan “barter” idealisme politiknya dengan “setumpuk uang”, di sisi lain sebahagian rakyat mem-barter hak politik dengan “selembar uang”.

Realitas politik di atas menjadi lebih jelas kalau melihat konsep Hans Morgenthau mengenai politik, yaitu sebagai upaya perebutan kekuasaan (*struggle for power*), dan uang sebagai *the mother's milk of politics*. Oleh karena itu, dalam perebutan kekuasaan untuk menjadi wakil rakyat baik Pusat maupun Daerah, politik uang menjadi dominan, walaupun tidak terungkap tuntas secara hukum. Kondisi ini didukung oleh perilaku memilih, yaitu perilaku politik praktis-pragmatis dengan logika sederhana “saya akan memilih kalau saya diberi uang”. Dampak yang terjadi dari wakil rakyat yang terpilih karena politik uang adalah rendahnya akuntabilitas anggota Dewan terpilih. Mereka merasa tidak lagi punya kewajiban moral terhadap rakyat yang memilihnya. Akibat

tidak ada ikatan bathin antara pemilih dan wakilnya, para pemilih tidak merasa diwakili dan sebaliknya para wakil tidak merasa mewakili.

Di samping fenomena tersebut, faktor lain yang turut memperparah kondisi politik kita adalah budaya politik masyarakat yang patrimonial. Masyarakat cenderung untuk patuh dan taat pada pemimpin atau tokoh yang tidak hanya menyangkut kehidupan keseharian, namun juga dalam kehidupan politik. Maka tidak heran apabila tokoh masyarakat kadang jadi tokoh politik sekaligus, kalau pun tidak, mereka sering menjadi sasaran kunjungan politik dari tokoh politik. Dengan demikian bukan rahasia umum apabila banyak tokoh politik yang berebut pengaruh dikalangan pesantren dengan melakukan kunjungan atau lebih halus silaturahmi, sowan atau apapun namanya, namun yang jelas tujuannya sama yaitu untuk mendapatkan dukungan. Dan jelas dukungan ini tidak bisa di dapat dengan begitu saja, janji maupun bantuan kongkrit mesti dikeluarkan. Banyak para tokoh agama menyampaikan secara langsung kepada para elit politik bahwa mereka *tidak butuh hadist tapi butuh hadast*.³

Kondisi tersebut di atas diasumsikan sebagai penyebab terjadinya pergeseran politik dalam pemilu 2004 yang mengakibatkan turunnya perolehan suara partai-partai besar yang lulus electoral threshold. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dalam pemilu 1999 memperoleh sekitar 33,67 %, dalam pemilu 2004 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi 19,58 %. Berikutnya partai-partai yang mengalami penurunan suara dari pemilu 1999 ke 2004, secara berurutan adalah Partai Golongan Karya dari 22,46 % menjadi 21,58 %, Partai Kebangkitan Bangsa dari 12, 62% menjadi 11, 98 %, Partai Persatuan Pembangunan dari 10,72% menjadi 8,32%, dan Partai Amanat Nasional dari 7,12% menjadi 6,47%.⁴

Menurut Riswanda Imawan (2004), berubahnya perolehan suara partai-partai dalam pemilu 2004 tersebut sangat ditentukan oleh tiga

³ Secara tidak langsung mereka (para tokoh agama) ingin menyampaikan bahwa mereka tidak membutuhkan ceramah, tapi membutuhkan bantuan kongkrit yang mereka bisa rasakan secara langsung berupa bantuan barang atau pun uang untuk keperluan mengelola pesantren pendidikan dan lain sebagainya.

⁴ Penurunan suara partai-partai yang lulus electoral threshold ini merupakan rata-rata secara nasional. Di tingkat lokal (Kabupaten dan Kota) menunjukkan kecenderungan yang sama, khususnya di Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) PDI-P, P. Golkar, PKB, PPP, PAN mengalami penurunan suara yang cukup besar.

faktor baru yang muncul yaitu: *Civic disengagement*, *swing votes*, dan *spilt voting*. *Civic disengagement* adalah kemampuan rakyat mengambil jarak dengan proses politik, sehingga mampu mereorientasi konsep dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat. *Swing votes*, adalah suara pindah dari satu ke lain partai. *Spilt voting* adalah pola memberi suara yang tidak hanya kesatu parpol untuk berbagai kesempatan memilih yang tersedia.

Dalam pemilu 2004, selain terjadi fenomena pergeseran politik, juga muncul fenomena meningkatnya simpati pemilih kepada partai politik tertentu sehingga mendapatkan suara yang cukup signifikan. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera secara nasional masing-masing memperoleh suara 7,45% dan 7,34 %, sementara di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, Partai Demokrat memperoleh suara 7,76%, 14,55%, 13,80%, dan Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara 3,05%, 7,16%, 12,60%. Di sisi lain ada partai yang mengalami penurunan pemilih (lihat tabel 1).

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu 1999 dan 2004 di Malang Raya

| No | Nama Partai | Kabupaten Malang | | | Kota Malang | | | Kota Batu | | |
|-----|-------------|------------------|--------|------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|
| | | 1999 | 2004 | 2009 | 1999 | 2004 | 2009 | 1999 | 2004 | 2009 |
| 01. | PDI-P | 39,66% | 19,88% | | 41,22% | 25,84% | | 38,47% | 18,97% | |
| 02. | P. Golkar | 23,98% | 20,62% | | 16,04% | 12,35% | | 18,32% | 19,67% | |
| 03. | PKB | 20,36% | 13,19% | | 19,60% | 17,36% | | 29,57% | 12,59% | |
| 04. | PPP | 2,84% | 2,51% | | 2,80% | 2,36% | | 3,46% | 4,51% | |
| 05. | PAN | 5,82% | 5,91% | | 10,53% | 6,77% | | 2,93% | 5,64% | |
| 06. | PBB | 1,31% | 1,12% | | 2,41% | 1,28% | | 0,74% | 1,03% | |

Sumber: Data Hasil Pemilihan Umum 1999 dan 2004 KPU D Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, yang telah diolah penulis.

Berdasarkan data yang ada di tabel 1, partai politik yang mengalami penurunan cukup besar di Malang Raya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan rata-rata penurunan sebesar 14,98 %, dan hal ini merupakan penurunan suara PDI-P di atas rata-rata secara nasional sebesar 14,09 %. Sementara partai-partai yang konstituennya banyak dari pemilih Islam seperti PKB, PPP, dan PAN, juga mengalami penurunan jumlah suara dalam pemilu 2004 walaupun tidak mengalami penurunan sebesar PDI-P. Asumsi sementara yang berkembang dalam masyarakat, penurunan suara PDI-P diakibatkan oleh larinya dukungan pemilih ke

partai politik lain, khususnya Partai Demokrat. Begitupun para pemilih yang mencoblos PKB, PPP, dan PAN pada pemilu 1999, diasumsikan sebagian pemilihnya menyeberang ke partai lain khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Memahami pola hubungan antara partai dan pemilih akan sangat berguna untuk memprediksikan kehidupan politik ke depan. Sebab dalam proses pembangunan politik punya hubungan yang sangat erat dengan berbagai perubahan sosial (*social changes*) yang terjadi dalam masyarakat (Finkle J. L. Dan Gable R. W., 1971). Termasuk dalam konteks ini perubahan pemaknaan pemilih pada partai politik, oleh karena itu "makna partai bagi pemilih" menjadi menarik dan penting untuk diteliti. Berkenaan dengan upaya untuk memahami hubungan antara partai dan pemilih di Indonesia, maka diperlukan sebuah kajian yang berdasarkan pada penelitian empiris. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena pergeseran pemilih Indonesia, khususnya di Malang Raya.

Bab II

KAJIAN TEORETIK

A. Demokrasi dan Partisipasi Politik

Istilah demokrasi berasal dari dua akar kata Yunani: *demos* yang berarti rakyat, dan *kratis* yang berarti kewenangan/kekuasaan. Kata tersebut dipergunakan oleh bangsa Athena untuk mengartikan pemerintahan yang dikelola oleh banyak orang, yang dilawankan dengan pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang (*oligarchy*) atau oleh satu orang (*autocracy*). Ketika itu demokrasi hanya diartikan sebagai *Direct or pure democracy* yang dipergunakan di beberapa negara kota (*city-states*) Yunani, atau mungkin bisa kita lihat dalam pembuatan peraturan di kota Inggris, dimana semua warga negara ikut bagian dalam pembuatan undang-undang. Namun sekarang ini, demokrasi lebih diartikan sebagai *a representative democracy*—atau istilah Plato, *republik*—dimana rakyat tidak secara nyata membuat aturan hukum atau mengatur mereka akan tetapi memilih seseorang yang bisa melakukannya (MacGregor Burns : 1989).

Sebenarnya, aspek utama dari demokrasi adalah pandangan bahwa seluruh rakyat diperlakukan sama. Seperti apa yang dikemukakan oleh Dahl (1989). "*all the members of the association are adequality qualified to participate on an equal voting with the others in the process of governing the association*" Kekuasaan rakyat itu sendiri bisa dengan berbagai bentuk, bisa kekuasaan langsung atau kekuasaan tidak langsung. Hal yang paling penting adalah bentuk dari kekuasaan harus tetap berdasar pada kontrol rakyat dan kesamaan politik baik demokrasi langsung maupun tidak langsung. Namun paling tidak ada tiga komponen untuk menunjukkan bagaimana demokrasi itu berjalan dalam praktek, yaitu *pertama*, adanya kompetisi antara individu dan atau kelompok untuk semua posisi pemerintahan; *kedua*, adanya partisipasi politik dalam upaya menseleksi pemimpin dan kebijakan; dan *ketiga*, adanya kebebasan politik dan sipil seperti kemerdekaan berekspresi dan kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam sebuah organisasi (Diamond, Linz & Lipset 1990).

1. Demokrasi Defisit

Demokrasi sebagai *a representative democracy* terimplementasikan dalam parlemen sebagai kumpulan orang-orang dari partai politik yang terpilih lewat pemilihan umum. Dengan demikian, pemilu dan partai politik menjadi kunci utama dalam demokrasi perwakilan. Pemilu merupakan sarana bagi partai politik untuk memperebutkan kekuasaan (*struggle for power*) dengan cara menempatkan perwakilannya baik di legislatif maupun eksekutif. Sementara partai politik secara umum mempunyai fungsi-fungsi pokok seperti: (1). Menterjemahkan kepentingan dan cita-cita konstituen mereka tentang kehidupan masyarakat dalam program-program politik; (2). Memberikan informasi kepada konstituen mengenai isu-isu politik, solusi yang memungkinkan terhadap masalah tersebut dan konsekuensi dari solusi yang ditawarkan; (3). membangun, memperbaharui dan mengkomunikasikan ideologi bersama (*common ideology*) tentang urusan publik dan berusaha mencapai atau memelihara kepentingan rakyat untuk ideologi bersama tersebut; (4). Merekrut dan mendidik kandidat anggota perwakilan sesuai dengan ideologi atau program partai yang bersangkutan di parlemen dan membuat daftar kandidat tersebut sehingga publik bisa memilihnya; (5). Memotivasi warga negara melalui kampanye, publikasi media dan metode lain sehingga publik terpicat memilih mereka dan wakil-wakil mereka secara kontinyu dalam pemilu.

Dalam perjalanannya, demokrasi tidak selamanya berjalan linier dengan perkembangan politik di suatu negara. Adakalanya suatu negara dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi mengalami kemandegan ataupun berjalan dengan tanpa gairah. Kondisi ini secara konseptual dinamakan defisit demokrasi.¹ Berkaitan dengan persoalan defisit demokrasi, kasus yang terjadi di Eropa menunjukkan: (1). Penurunan jumlah anggota partai; (2). Penurunan hubungan mereka dengan konstituen yang stabil; (3). Penurunan partisipasi rakyat dalam pemilu; (4). Penurunan orang yang berminat menjadi kandidat dalam aktivitas publik dan politik; (5). Bertambahnya massa mengambang (*floating mass*) yang menyebabkan peningkatan ketidakstabilan elektoral; dan (6). Pemilih lebih suka figur dari pada kemampuan kandidat yang berfokus pada muatan politik. (Nugent, 2003).

¹ Wacana demokrasi defisit bisa dianalisis dalam dua level. *Pertama*, melalui analisis terhadap tingkat partisipasi warga negara dalam demokrasi elektoral atau pemilu (*input legitimacy*). *Kedua*, analisis bisa difokuskan pada tingkat pengambilan keputusan dan kontrol nasional atau rakyat secara langsung dalam proses tersebut (*output legitimacy*).

Kondisi yang terjadi di Indonesia, konsepsi demokrasi sebagai wujud partisipasi politik rakyat dipolakan dalam bentuk *indirect democracy* (demokrasi perwakilan). Pada taraf perwakilan inilah aspirasi/partisipasi politik rakyat bertarung dengan kepentingan dan kecenderungan keberpihakan elit politik yang mewakili rakyat. Sampai atau tidaknya, diperjuangkan atau tidak aspirasi di tingkat pengambilan keputusan sangat bergantung pada sikap dan kecenderungan politik sang wakil. Walaupun pemilu tahun 1999 dinilai sebagai pemilu yang demokratis, namun keluaran dari kedua Pemilu tersebut tidak membawa kehidupan ketatanegaraan yang lebih baik sesuai dengan harapan rakyat. Ini setidaknya ditunjukkan oleh situasi Indonesia dimana penyelenggaraan Pemilu 2004 sampai sekarang masih berada dalam *political gray zone* (zona politik abu-abu). Dalam konteks *political gray zone*, seorang peneliti dari *Carnegie Endowment for International Peace*, Thomas Carothers, sebagaimana dikutip Bara Hasibuan, mengatakan bahwa negara dalam zona abu-abu ini menganut sindrom *feckless pluralism* yang berarti, bahwa walaupun di permukaan negara-negara ini kelihatan demokratis, namun di dalamnya kualitas kehidupan politiknya ternyata bobrok. (Kompas, 2003).

Para elite politik termasuk juga parpol dinilai korup dan hanya mendahulukan kepentingan sendiri dan tidak peduli dengan nasib rakyat dan negara. Publik, walaupun masih percaya terhadap demokrasi, namun kecewa dan tidak percaya terhadap elite politik, partai politik (parpol), serta institusi publik lainnya. Politik dilihat sebagai sesuatu yang kotor, busuk dan didominasi segelintir orang yang tidak peduli dengan nasib bangsa. Pemerintahan baru yang demokratis pun dinilai tidak mampu untuk menangani berbagai masalah seperti korupsi dan kejahatan. Kenyataan ini tentu berlawanan dengan kosepsi perwakilan yang sesungguhnya, dimana perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Tetapi realitasnya, perwakilan politik di Indonesia dipandang tidak memuaskan rakyat, bahkan eksistensinya digugat dari waktu-kewaktu.

Digugatnya peran lembaga legislatif (DPR-DPRD) sudah diperkirakan banyak pengamat selang belasan tahun yang lalu, tidak terkecuali terhadap DPR-DPRD hasil Pemilu 1999. Hal ini setidaknya tampak dari datangnya berbagai kelompok masyarakat yang mencari penyelesaian

langsung ke badan legislatif. Bahkan setelah era reformasi pun peran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat masih menjadi isu sentral. Rakyat datang ke DPR tidak lagi sekedar menuntut peran DPR menyelesaikan masalah-masalah mereka, tetapi justru menggugat eksistensi dan tindakan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Buruknya kinerja lembaga perwakilan (DPR/DPRD), tidak lepas dari proses pemilu yang dijalankan di Indonesia yang tidak bersih dari politik uang yang berakibat pada rendahnya akuntabilitas anggota Dewan pada konstituennya. Riswanda Imawan (2004) menyebutkan bahwa Pemilu 2004 benar-benar menjadi pemilu kapitalis. Politik uang yang sebelum kampanye demikian menakutkan sehingga harus diberantas, justru dilakukan secara terang-terangan di arena kampanye.

Satu gejala muncul dimana korupsi atas nama demokrasi sedang berlangsung di arena kampanye Pemilu 2004. Kalaupun tidak korupsi, proses pembodohan terhadap rakyatlah yang sedang berlangsung. Kampanye dengan metode sinterklas sangat bertolak belakang dengan keinginan kita untuk menumbuhkan civil society sebagai pilar demokrasi, sebab dengan metode ini rakyat sama sekali tidak diajari mengenal masalah dan memecahkannya dengan "modal" yang ada pada diri mereka. Tetap saja rakyat dibuat bergantung pada para elite dengan buaian materi sesaat. Ini patut disesalkan. Sebab, Pemilu 2004 dirancang untuk mengubah supporter menjadi voter. Mengubah orang yang menentukan pilihan dengan perasaan menjadi menentukannya dengan pertimbangan pikiran yang rasional (Kompas, 2004).

Tampaknya, melihat perkembangan yang terjadi, kehendak kita untuk memberantas KKN masih sebatas cita-cita. Para elite masih belum bergeser dari konsep kekuasaan politik yang menggabungkan "ketaatan dan hadiah" (Anderson, 1972). Kekuasaan di Indonesia merupakan penyatuan kekuatan politik dan ekonomi.

2. Partisipasi Politik

Verba dan Nie (1972) mendefinisikan partisipasi politik sebagai "berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara yang kurang-lebih secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan aparat pemerintahan dan/atau aksi yang mereka ambil". Pengarang *Partisipation in America* ini telah melakukan pengujian dengan multiple korelasi untuk mengidentifikasi antara tingkat partisipasi, preferensi, siapa yang memilih, orientasi warga negara, dan faktor-faktor

lain. Kesimpulan dari evaluasinya kondisi sosial individu adalah, bahwa kelompoknya dalam lembaga dimana seseorang berada, dan kombinasinya mempengaruhi sikap seseorang. Sementara Kaase dan Marsh (1979, dalam Mujani 2007) menyatakan bahwa partisipasi politik terkait dengan unsur-unsur pemerintahan demokratis lainnya, seperti rasionalitas, kontrol, *responsiveness*, fleksibilitas, legitimasi, dan resolusi konflik. Namun semua definisi partisipasi politik, menurut Brady (1999, *ibid*), mencakup empat konsep dasar: aktivitas atau aksi, warga negara biasa, politik, dan pengaruh.

Partisipasi politik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif dalam aktifitas politik. Partisipasi dalam politik dapat mengambil bentuk yang aktif atau yang pasif, yang aktif mulai dari menduduki jabatan sampai pemberian suara di pemilu. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah dilakukan. Di samping mereka yang aktif berpartisipasi dalam politik, ada juga mereka yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik.

Michael Rush dan Phillip Althoff (1986) melukiskan secara berbedabeda terhadap mereka yang tidak mau berpartisipasi dalam politik. Mereka yang tidak berpartisipasi bisa dikategorikan sebagai apatis, sinis, alienasi (terasing), dan anomie (terpisah). Akan tetapi masing-masing kategori itu mempunyai latar belakang, motif, atau ciri yang berbedabeda kenapa melakukan tindakan tidak partisipatif. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Althoff, Angus Campbell (dalam Dreyer, 1976) menyebutkan,

".....however, that there is a different kind of individual whose orientation toward the world of politics is not simply one of detachment, but of suspicious, distrust, hostility, and cynicism. These people believe that political office holders are corrupt, self-seeking, and incompetent, that the whole political process is a fraud and a betrayal of the public trust."

Sikap apatis atau masa bodoh secara sederhana bisa didefinisikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala pada umumnya atau pada khususnya. Morris Rosenberg (1954) menilai ada tiga alasan kenapa apati politik itu bisa terjadi dalam masyarakat, antara lain: *pertama*, adanya konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik; *kedua*, individu menganggap aktivitas politik sebagai sia-sia saja; *ketiga*, tidak adanya rangsangan untuk berpolitik.

Sinisme, hampir mirip dengan apati sebagai suatu kepasipan atau ketidakaktifan. Robert Agger mendefinisikan sinisme sebagai kecurigaan yang buruk dari sifat manusia. Dengan demikian sinisme bisa dikatakan sebagai perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan rasa kecurigaan. Dalam kehidupan politik sinisme menampilkan diri dalam bentuk perasaan bahwa politik itu adalah suatu urusan kotor, bahwa para politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi bulan-bulanan dari kelompok yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan dilaksanakan oleh orang-orang yang tanpa muka, dan lain sebagainya.

Hasil dari studi yang dilakukan terhadap masyarakat Inggris, terungkap bahwa para politisi menjadi bagian dari sikap sinis masyarakat. Beberapa ungkapan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut: bahwa kebanyakan politisi akan menjanjikan sesuatu untuk mendapatkan suara, kebanyakan politisi lebih mementingkan partai sendiri dari pada negara, para politisi cuma berbicara melulu dan tanpa tindakan, kebanyakan para politisi masuk kedalamnya untuk mendapatkan sesuatu, sekali mereka menjadi anggota parlemen, mereka melupakan pemilih-pemilihnya.

Sementara alinensi didefinisikan oleh Robert Lane (1959) sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan, masyarakat kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain, mengikuti sekumpulan aturan yang tidak adil.² Sementara anomie dilukiskan oleh Lane sebagai perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah, dalam mana individu mengalami perasaan ketidakaktifan dan bahwa penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari pada tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

B. Representasi

Menurut Mark M. Amastutz (1982), ada dua fungsi dari legislatif, yaitu: *Pertama, making laws*. Fungsi ini merupakan fungsi utama dari legislatif. *Kedua, representation*. Fungsi kedua dari legislatif ini merupakan manifestasi dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Perwakilan berbeda dengan demokrasi, dimana representasi dipahami sebagai pembeda antara pemerintah dan yang diperintah,

² Robert Lane, Political Ideology dalam Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1986, hlm. 151.

sementara demokrasi dipahami sebagai sebuah keinginan untuk menghilangkan perbedaan ini dengan membangun pemerintahan rakyat. Demokrasi perwakilan paling tidak merupakan bentuk tidak langsung dari demokrasi, representasi menghubungkan pemerintah dengan yang diperintah dimana berbagai pandangan masyarakat dapat dijalankan secara efektif, atau kepentingan mereka dapat terjamin (Heywood, 2000).

Menurut Gilbert Abcarian (Max Boboy, 1994), ada empat tipe mengenai hubungan antara sang wakil dengan yang diwakilinya, yaitu: 1). Sang wakil bertindak sebagai wali (*trustee*). Dalam hal ini sang wali bebas mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan yang diwakilinya. 2). Sang wakil bertindak sebagai utusan (*delegate*). Maksudnya adalah bahwa sang wali bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, artinya sang wakil senantiasa selalu mengikuti perintah atau instruksi serta petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya. 3). Sang wakil bertindak sebagai "*politico*". Artinya bahwa sang wakil dalam hal ini kadang-kadang bertindak sebagai wali (*trustee*), dan ada kalanya juga bertindak sebagai utusan (*delegate*). Tugasnya ini bergantung pada materi (*issue*) yang akan dibicarakan. 4). Sang wakil bertindak sebagai "partisan". Dalam hal ini sang wakil bertindak sesuai dengan kehendak atau program dari organisasi (partai) sang wakil. Setelah sang wakil dipilih oleh pemilihnya atau yang diwakilinya, maka lepaslah hubungannya dengan pemilih tersebut selanjutnya mulailah hubungannya dengan organisasi (partai) yang mencalonkan dalam pemilihan tersebut.

Di sisi lain, Wahlke, dkk. (1962) menyebutkan bahwa di dalam literatur dibedakan antara 3 wakil rakyat. "*Delegate*" (utusan) dalam menentukan pendiriannya mengikuti keinginan para pemilihnya, "*trustee*" (kuasa) dipimpin oleh pertimbangan sendiri, dan "*politico*" (gembong politik) menentukan pendiriannya, bergantung pada situasi, kadang-kadang berdasar pertimbangan para pemilih, kadang-kadang menurut pertimbangan sendiri.

Bagaimana pun menurut Heywood (1997) tidak ada satu kesepakatan mengenai teori representasi. Paling tidak istilah representasi mempunyai empat implikasi: *Pertama*, mewakili berarti sebuah kepercayaan, seseorang yang ditetapkan tanggung jawab formal bagi kepentingan orang lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Edmund Burke (1729-1797), yang berpendapat bahwa perwakilan melayani konstituen mereka dengan cara

memikirkan diri mereka dengan mempergunakan pertimbangan matang sendiri. *Kedua*, representasi merupakan delegasi, yaitu seseorang yang dipilih untuk bertindak mewakili orang lain atas dasar arahan yang jelas. Delegasi merupakan penyambung tidakan atau pandangan orang lain tanpa dimasuki atau dipengaruhi pendapat pribadi. *Ketiga*, wakil adalah orang yang membawa mandat, yang telah dijanjikan dalam sebuah pemilu. Dalam teori ini lebih menunjuk pada partai politik dari pada politisi secara individu yang merupakan agen dasar dalam perwakilan. *Keempat*, mewakili mirip seperti sebuah kelompok atau orang yang menyatakan diri sebagai wakil, yang umumnya datang dari kelompok mereka sendiri. Pandangan ini diwujudkan dalam ide mengenai "*representative cross-section*", dan secara tidak langsung bahwa sebuah pemerintahan atau parlemen yang mewakili merupakan miniatur dari masyarakat yang lebih luas, yang berisikan anggota-anggota yang menggambarkan dari semua kelompok atau bagian dari masyarakat, dan dalam segi jumlah mewakili secara proporsional berdasarkan besarnya kelompok dalam masyarakat secara keseluruhan.

Perwakilan dipandang secara luas sebagai bentuk nyata dari demokrasi dalam dunia modern. Kepentingan dalam hal ini berkembang sejalan dengan meluasnya penggunaan pemilihan umum sebagai prinsip dasar dalam rekrutmen politik. Kegunaan dari perwakilan adalah tersedianya mekanisme bagi pergantian para politisi yang tidak populer atau pemerintahan yang tidak baik. Dengan demikian, perwakilan akan menjamin pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan lebih baik, mempunyai keahlian dan pengalaman yang luas.

C. Sistem Kepartaian

Konsep partai politik dipergunakan untuk pertama kalinya pada abad sembilan belasan dalam sistem politik yang kompetitif. Konsep tersebut ditujukan kepada kelompok politik yang berkompetisi untuk menggapai kekuasaan dalam sebuah kompetisi terbuka. Partai politik, menurut definisi tradisional ini, hanya akan ada dalam sebuah kehidupan politik yang kompetitif. Dengan demikian, menurut para ahli, partai politik itu membutuhkan kompetisi, sehingga yang namanya partai politik dengan satu sistem (partai hanya satu) merupakan hal yang kontradiktif. Selanjutnya istilah partai dipergunakan secara kaku yaitu hanya untuk menunjukkan organisasi politik yang menghubungkan orang-orang dengan pemerintahan, masyarakat dengan negara (Amastutz, 1982).

Partai politik dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang diorganisir untuk tujuan mendapatkan kekuasaan pemerintahan, dengan melalui pemilihan atau dengan cara lain (Hey wood, 1992). Sementara tipologi partai politik dan sistem kepartaian banyak ragamnya. Namun paling tidak, secara umum tipologi partai politik menurut Roy C. Macridis (1968) dapat digolongkan kedalam: otoriter dan demokratis; integratif dan representatif (perwakilan); ideologis dan pragmatis; agamis (religius) dan sekuler; demokratis dan revolusioner; massa dan elit; demokratis dan oligarki. Sementara tipologi sistem kepartaian dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah partai; sifatnya yang tertutup atau kompetitif; agregatif dan ideologis; pluralis atau monopolitis; berorientasi pada isu (*issue-oriented*) berlawanan dengan orientasi pada pengikut (*clientele-oriented*); integratif dan representatif.

Dalam sistem kepartaian yang kompetitif, tipologi partai dapat digolongkan ke dalam lima tipe, yaitu: Proto partai, partai kader, partai massa, partai diktator, dan partai *catch-all*.

Tabel 2: Karakteristik Tipologi Partai Politik

| | Proto-Parties | Cadre Parties | Mass Parties | Dictatorial Parties | Catchall Parties |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Social appeal | Upper Class and Aristocracy | Upper Classes and middle classes | Lower classes: workers and peasants | Diverse: Worker in communism | Nearly all social and group |
| Level of Ideology | Very low | Very low | High | Very high | Low |
| Ratio of Member to Voters | Low | Low | High | Medium to high | Medium to high |
| Articulation | Weak | Weak | Strong | Very strong | Moderate |
| Centralization | Low | Low | High | Very high | Medium |
| Membership | Tiny | Small | Large | medium | Medium to large |
| Leadership | Aristocrat and notables | notables | New men and upper-class trailer to their class | New men and upper-class trailer to their class | Middle class and lower middle class |

Sumber: Mark N. Hagovian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978.

Dalam pembahasannya, Giovanni Sartori (1959)³ mengklasifikasikan sistem kepartaian yang memberi ruang bagi tumbuhnya demokrasi menjadi 4 macam, yaitu Sistem 2 (dua) Partai, Pluralisme Moderat, Pluralisme Terpolarisasi dan Sistem Partai Berkuasa. Sartori membagi keempat sistem kepartaian tersebut berdasarkan ideologi yang dianut masing-masing partai serta banyaknya partai yang diakui dan ikut dalam setiap pemilihan umum. Sistem dua partai ditandai oleh adanya 2 partai yang terus bersaing di dalam setiap pemilu serta paling memiliki pendukung luas. Kedua partai tersebut dapat saja memiliki ideologi yang berbeda ataupun isu-isu politik yang kontras. Contohnya di Amerika Serikat di mana Partai Republik dan Partai Demokrat yang bersaing. Partai Republik membawakan kepentingan pengusaha, kalangan militer, dan golongan konservatif. Partai Demokrat, kerap dicitrakan sebagai lebih dekat ke kalangan pekerja, gerakan sosial bernuansa hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial.

Pluralisme Moderat adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ideologi tersebut tidak begitu tajam sehingga dapat saja para pemilih suatu partai “berpindah” dari partai yang satu ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi tetap dapat menjalin koalisi jika memang diperlukan guna “menggolkan” suatu kebijakan. Pluralisme Terpolarisasi adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Perbedaan ideologi tersebut terkadang cukup fundamental sehingga sulit bagi pemilih partai yang satu untuk berpindah ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, perbedaan ideologi tersebut membuat sulitnya tercipta koalisi akibat perbedaan ideologi yang cukup tajam tersebut.

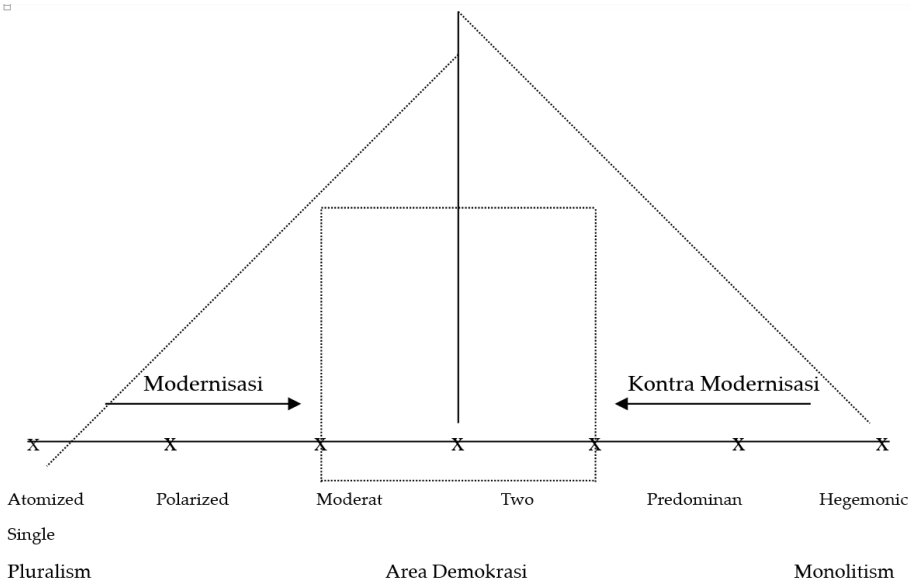
³ Geovanni Sartori nampaknya ingin meninggalkan kajian klasik mengenai partai politik yang berdasarkan pada jumlah (*numerical*) partai politik, satu, dua, tiga partai atau lebih. Menurutnya pendekatan dalam mengkaji partai politik berdasarkan *numerical* sudah tidak memadai lagi. Menurut Sartori, hal yang perlu kita ketahui bukanlah jumlah partai politik, namun bagaimana kekuatan partai terkait dengan jumlahnya tersebut. Kekuatan partai terkait dengan *electoral strength*, suara ditranslasikan kedalam sejumlah kursi dan jumlah kursi partai akan menunjukkan kekuatan partai di Parlemen. Dari sinilah akan dapat diteliti partai-partai yang punya potensi untuk memerintah, hal ini terkait dengan potensi berkoalisi dari masing-masing partai.

Tabel 3: Karakteristik Sistem Kepartaian

| | Kutub | Jarak Ideologi | Pergerakan | Tipe Pemerintahan |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------------|
| Sistem Dua Partai | 2 | Sangat Kecil | Ke Pusat | Pemerintahan alternatif |
| Sistem Multipartai Moderat | 3-5 | Kecil | Ke Pusat | Koalisi alternatif |
| Sistem Multipartai Ekstrim | 6- lebih Besar | Ke Kutub | (ekstrim kanan atau Kiri) | Marginal turnover |

Sumber: Mark N. Hagovian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978.

Sistem Partai Berkuasa adalah sistem kepartaian di mana di suatu negara terdapat sejumlah partai, tetapi ada sebuah partai yang selalu memenangkan pemilihan umum dari satu periode ke periode lain. Partai yang selalu menang tersebut menjadi dominan di antara partai-partai lainnya, dilihat dari sisi basis massa, dukungan pemerintah, maupun kemenangan kursi mereka di setiap pemilihan umum. Contoh dari satu Sistem Partai Berkuasa ini adalah Malaysia, Indonesia di era Orde Baru, ataupun India. Di Malaysia, UMNO merupakan partai yang kerap memenangkan pemilu dari periode ke periode. Di Indonesia era Orde Baru, Golkar selalu memimpin suara di tiap pemilu 1971, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Di India, Partai Kongres adalah partai berkuasa yang di setiap pemilu mereka seringkali memenangkan kursi terbanyak untuk parlemen.



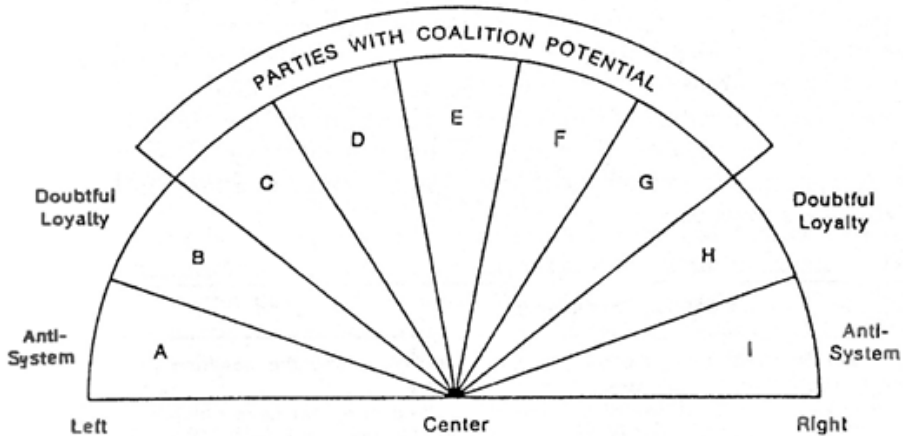
Gambar 1. Sistem Kepartaian Versi Giovanni Sartori

Sumber: Geovanni Sartori, *Party and Party Systems, A Framework for analysis*, New York: Cambridge University Press, 1959, dalam Riswanda Imawan 2004.

Dengan mendasarkan pada sistem kepartaian yang dikembangkan Giovanni Sartori, Riswanda (2004), membuat gambaran mengenai dikotomi antara kedua kutub ideologis yaitu, partai yang pluralis dan monolitis. Partai yang tergolong pluralis adalah model partai atomis, polaris, dan moderat, sementara yang tergolong monolitis adalah model partai *single*, *hegemonic*, dan *predominant*. Menurut Giovanni Sartori, perbedaan penting secara politik adalah antara sistem dua partai, sistem multipartai moderat di satu sisi, dan sistem multipartai ekstrim di sisi lain. Walaupun Sartori memasukan empat partai sebagai bagian dari sistem yang kompetitif. Keempat system partai tersebut merupakan kutub dalam sistem kepartaian, jarak ideologi dalam kepartaian, kecenderungan pergerakan ideologi (*centrist* atau *extremist*), dan hubungan antara pemerintah dan oposisi.

Pola system kepartaian dengan corak *high pluralism* atau plurarisme ekstrim dimana jumlah partai politik lebih dari enam akan punya dampak pada sulitnya membangun koalisi akibat spectrum ideologis yang tinggi. Dengan meminjam penjelasannya Gunar Sjoblon, Sartori (1976)

melukiskan rumitnya interaksi yang dilakukan dalam bangunan system kepartaian dengan fondasi multipartai yang terpolarisasi.



Gambar 2: Marginal Turnover dalam Sistem Multipartai yang Ekstrim

Sumber: Mark N. Hagovian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978

Apa bila ada dua partai dalam sebuah Negara, maka interkasi yang terjadi hanya satu yang bersifat resiprokal; kalau ada tiga partai, maka interkasi yang terjadi ada tiga arah yang membentuk segitiga; ada empat partai akan ada enam arah interkasi; ada lima partai akan ada 10 interkasi; kalau ada enam partai akan ada 15 arah interkasi; ada 7 partai akan ada 21 interkasi dan seterusnya.

Di samping itu tipologi partai politik dan sistem kepartaian dapat juga dilihat dari karakteristik: sumber dukungan partai; organisasi internal; fungsi yang dilakukan serta cara-cara tindakannya (*mode of action*). Didasarkan pada sumber dukungan partai politik dapat dilacak dari apakah partai politik tersebut dukungannya bersifat komprehensif atau sektarian? Suatu partai politik dapat dikatakan komprehensif apabila partai politik tersebut berorientasi pada pengikut (*clientele-oriented*), yaitu suatu partai politik yang berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin dari setiap warga negara. Sedangkan partai politik yang dapat dikategorikan sebagai partai sektarian apabila kelas, daerah, atau ideologi dipakai sebagai daya tariknya, yang termasuk dalam kategori partai sektarian adalah partai sosialis dan partai agama. (Ichlasul Amal, 1988).

Realitas kepartaian Indonesia di era multipartai, baik dari sisi tipologi maupun sistem kepartaian, maka dapat kita kategorikan sebagai berikut: dilihat dari sistemkepartaian, partai politik Indonesia baik pada pemilu 1999, 2004, 2009, maupun 2014 dengan jumlah partai politik lebih dari enam, maka sistem kepartaiannya tergolong sistem multipartai ekstrim; secara tipologis, partai-partai yang berkembang baik pemilu 1999, 2004, 2009, maupun 2014 kalau dilihat dari sisi sumber dukungannya, maka umumnya partai didukung oleh pemilih dengan basis ideologi, dimana agama, khususnya Islam, menjadi menjadi basis material dalam pembentukan partai. Oleh karena itu, partai-partai di era multipartai dapat dikatakan tergolong kedalam tipe atau jenis partai sektarian.

D. Sistem Pemilu

Sistem pemilu berbeda dengan aturan atau perundang-undangan pemilu. Aturan pemilu merupakan peraturan pemerintah mengenai proses pemilu, sementara sistem pemilu merupakan mekanisme dalam menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam pemilu (David M. Farrell, 1997). Oleh karenanya Farrell membuat definisi mengenai pemilu sebagai berikut: *“electoral systems determine the means by which votes are translated into seats in the process of elcting politicians into office.”*⁴

Dalam peraturan pemilu diatur siapa yang akan memilih (misal berdasarkan usia, status kewarganegaraan, status perkawinan, dan lain-lain); penentuan calon yang akan jadi kandidat (misal dapat dukungan tanda tangan berapa, punya tabungan berapa); proses kampanye (apakah boleh kampanye dengan cara konvoi, berapa dana yang harus dikeluarkan untuk kampanye di media, dimana letak pemasangan poster yang dibolehkan, dan lain-lain). Dalam sistem pemilu ada tiga elemen penting, yaitu (1). besar distrik, (2). struktur kertas suara, (3). electoral formula.

1. Besar Distrik

Distrik adalah wilayah geografis suatu negara yang batas-batasnya dihasilkan melalui suatu pembagian untuk tujuan pemilihan umum. Dengan demikian luas sebuah distrik dapat sama besar dengan besar wilayah administrasi pemerintahan, dapat pula berbeda.

⁴ Untuk lebih jelasnya lihat David M. Farrell, *Comparing Electoral Syatem*, London: MacMillan Press Ltd., 1997.

Sementara besaran distrik adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik bukan berarti berapa jumlah pemilih yang ada dalam distrik tersebut. Berdasarkan definisi tersebut maka kita dapat membedakan distrik menjadi distrik beranggota tunggal (*single member district*) dan distrik beranggota jamak (*multi member district*).

2. Struktur Kertas Suara

Yang dimaksud dengan struktur kertas suara adalah cara penyajian pilihan di atas kertas suara. Cara penyajian pilihan ini menentukan bagaimana pemilih kemudian memberikan suara.

Tabel 4. Sistem Pemilu Berdasar Struktur Suara

| | Kandidat | Partai | Keduanya |
|-------------|---|---|---|
| Kategorikal | FPTP (Kanada) SNTV (Jordania) Proporsional Daftar Terbuka (Finlandia) | Party Block (Singapura) Proporsional Daftar Tertutup (Namibia) | Parallel Vote (Jepang) Proporsional Daftar Terbuka (Denmark) MMP (Jerman) |
| Ordinal | AV (Australia) SDP (Perancis) Block Vote (Maladewa) STV (Irlandia) | SDP (Mali) | SDP (Ukraina) Proporsional Daftar Bebas (Swiss) |
| Keduanya | | | STV (Senat Australia) |

Sumber: *The International IDEA Handbook of Electoral System Design*, (Stockholm, Swedia, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 1997)

Jenis pilihan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kategorikal dimana pemilih hanya memilih satu partai atau calon, dan ordinal dimana pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya. Kemungkinan lain adalah gabungan dari keduanya. Tabel 4 menunjukkan contoh pembagian sistem pemilu berdasarkan struktur kertas suara.

3. Electoral Formula

Electoral Formula adalah bagian dari sistem pemilihan umum yang membicarakan penerjemahan suara menjadi kursi. Termasuk di dalamnya adalah rumus yang digunakan untuk menerjemahkan perolehan suara menjadi kursi, serta batas ambang pemilihan (*electoral threshold*).

Secara umum ada tiga keluarga besar dari sistem pemilihan (*electoral formula*), yaitu *plurality-majority*, *semi-proportional*, dan *proportional*. Dari ketiganya terdapat sembilan turunan, yaitu: yang masuk *plurality-majority* adalah *First Past The Post* (FPTP), *Block Vote* (BV), *Alternative Vote* (AV), *Two-Round System* (TRS); yang masuk *semi-proportional* adalah *Parallel System*, dan *Single Non-Transferable Vote* (SNTV); yang masuk *proportional* adalah, *List Proportional*, *Mixed Member Proportional* (MMP), dan *Single Transferable Vote* (STV). Gambaran ringkas mengenai beberapa jenis sistem pemilihan umum bisa dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5. Gambaran Umum Jenis-Jenis Pemilihan Umum

| Sistem | Ukuran Distrik | Tipe | Deskripsi |
|---|----------------|-------------------|--|
| Single Member District Plurality (SMDP) | tunggal | pluralitas | kandidat yang memperoleh suara terbanyak yang terpilih, walaupun tidak mencapai mayoritas sederhana. |
| Sistem Dua Putaran (SDP) | tunggal | mayoritas | Jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas sederhana, diadakan pemilihan pemilihan lanjutan di antara dua kandidat dengan suara terbanyak. Pemenang pemilihan lanjutan yang akan terpilih. |
| Majority Preferential Voting (MPV) | tunggal | mayoritas | Pemilih menentukan pilihan sesuai urutan preferensi. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas berdasarkan preferensi pertama, maka calon dengan preferensi pertama paling sedikit disingkirkan dan didistribusikan sesuai pilihan keduanya. Proses diulangi sampai ada calon dengan suara mayoritas. |
| Multi Member District Plurality (MMDP) | jamak | pluralitas | Pemilih memberikan pilihan sebanyak jumlah kursi tersedia. Jika tersedia n kursi, maka n orang kandidat dengan suara terbanyak yang terpilih. |
| Single Non Transferable Vote (SNTV) | jamak | semi proporsional | Pemilih memberikan satu pilihan. Jika tersedia n kursi, maka n orang kandidat dengan suara terbanyak yang terpilih. |

| | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|--|
| Single Transferable Vote (STV) | jamak | proporsional | Pemilih menentukan pilihan sesuai urutan preferensi. Kandidat dengan pilihan pertama mencapai quota akan terpilih. Calon dengan preferensi pertama paling sedikit disingkirkan dan didistribusikan sesuai pilihan keduanya. Proses diulangi sampai diperoleh n calon yang mencapai quota. |
| Parallel Vote | campuran | semi proporsional | Legislatur terdiri dari mereka yang terpilih lewat pluralitas atau mayoritas dalam distrik beranggota tunggal ditambah mereka yang terpilih secara proporsional dalam distrik beranggota banyak. Kursi proporsional diberikan terlepas dari hasil yang dihasilkan dari pemilihan lewat distrik beranggota tunggal. |
| Mixed Member Proportional (MMP) | campuran | proporsional | Legislatur terdiri dari mereka yang terpilih lewat pluralitas atau mayoritas dalam distrik beranggota tunggal ditambah mereka yang terpilih secara proporsional dalam distrik beranggota banyak. Kursi proporsional diberikan untuk mengkompensasi efek disproportional yang timbul dari hasil distrik beranggota tunggal. |
| Party List | jamak | proporsional | Pemilih memilih dari daftar yang disediakan, kursi diberikan sesuai proporsi suara yang diterima oleh partai. Kandidat terpilih berdasarkan urutannya dalam daftar. |

http://www.geocities.com/benjuinotm/artikel/sistem_pemilu/index.html

E. Jenis Pemilih: Aliran Politik Geertz

Istilah "politik aliran" pada dasarnya merujuk pada analogi aliran sungai dengan cabang-cabang anak sungai yang mengalir mengikutinya. Cabang sungai dimaksud ialah kelompok sosial termasuk ormas, sedangkan aliran sungai besarnya adalah partai politik. Basis pendekatan teori ini pada dasarnya mereferensikan pola pengelompokan (orientasi) sosial politik berdasarkan pengaruh sistem kepercayaan/ideologi/agama.

Setidaknya ada dua karya terpenting sering jadi rujukan jika membicarakan teori ini dalam konteks Indonesia. *Pertama*, *The Religion of Java* karya Clifford Geertz yang didasarkan studi di Mojokuto, sebuah

desa kecil di Jawa Tengah. *Kedua*, *Indonesia Political Thinking* karya Herbert Feith dan Lance Castles yang mengacu pada koleksi tulisan sejumlah tokoh Indonesia. Kedua karya tersebut ditulis sekitar tahun 1950-1960-an. Hasil studi Geertz intinya mengungkapkan temuan trikotomi politik aliran, yaitu: *Abangan*, *Santri*, dan *priyayi*. *Abangan* adalah ciri kelompok masyarakat yang berbasis pertanian (pedalaman) dengan orientasi keagamaan tidak ketat. *Santri* adalah berbasis pada perdagangan (perkotaan) dengan orientasi keagamaan yang kuat.⁵ Sedangkan *priyayi* yang berbasiskan birokrasi berorientasi lebih kental pada warisan tradisi aristokrat atau pamong.

Belum tumbuhnya kesadaran politik yang bersifat *material-based* menjadikan konsep aliran punya peranan penting dalam dalam memahami dan menganalisa kecenderungan dan dinamika politik Indonesia. Dunia politik modern bagi masyarakat Indonesia, walaupun merdeka sudah cukup lama, masih belum bisa berjalan dengan baik akibat belum terbangunnya struktur sosial yang didasarkan pada *material-based* tersebut.⁶ Oleh karena itulah, untuk memasuki kancah dunia politik, masyarakat masih memerlukan simbol-simbol yang dikenalnya sebagai perantara yang menstrukturkan sistem tindakan dan cara mereka menginterpretasikan realitas politik tersebut. Dalam konteks inilah aliran memberikan solusi

⁵ Hasil studi terkini yang dilakukan Liddle dan Saeful Mujani mengenai pembilahan sosial, khususnya dalam pemahaman tentang Keislaman, dalam masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa adanya perubahan dari pakem yang telah dikembangkan terlebih dahulu oleh Geertz berupa Santri versus Abangan. Menurut Mujani dan Liddle, Santri atau yang disebutnya sebagai Ortodok Muslim terbagi kedalam dua bagian yaitu Satri Tradisional dan Santri Modernis. Santri Tradisional diwakili oleh kalangan Nahdliyin dengan kyai dan pesantreannya, sementara kelompok Modernis berasal dari kalangan masyarakat perkotaan, dan mereka yang telah mengenyam pendidikan Barat. Kelompok modern terbagi lagi ke dalam dua bagian yaitu kelompok Liberal dan Konservatif. Kelompok Islam (modern) Liberal dicirikan dengan penerimaan agama lain (kristen) atau non Muslim sebagai bagian yang sama dari masyarakat Indonesia, sementara kelompok Konservatif dicirikan dengan pemahamannya terhadap Alqur'an secara literal dan punya kecurigaan yang tinggi terhadap non-Muslim. Kelompok Konservatif ini berusaha mendesak pemerintah untuk mendirikan bank-bank yang Islami serta mendesak pemerintah untuk mewajibkan perempuan memakai jilbab. Melihat kenyataan tersebut, dalam masyarakat Indonesia pertentangan yang muncul kepermukaan sekarang ini bukan lagi antara Santri dan Abangan karena Abangan juga Islam atau Muslim versus Nasionalis, juga tidak benar adanya pertentangan antara Muslim dan non-Muslim. Yang terjadi sekarang ini adalah pertentangan antara non-Muslim, Abangan Muslim, Tradisionalis, dan Liberal Modernis Muslim "melawan" Konservatif modern Muslim. Feith mengemukakan lima aliran dalam pemikiran politik di Indonesia yang merupakan hasil pengamatannya selama beberapa dekade, yaitu Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme. Pada tahun 1926 Soekarno menulis tentang Nasionalisme, Islam, dan Marxisme sebagai tiga rumpun ideologi utama yang menaungi seluruh organisasi politik di Indonesia.

⁶ Fachri Ali mengatakan bahwa pengaruh aliran dalam politik Indonesia adalah suatu produk sejarah sosial-politik dan ekonomi yang khas. Bahwa kendatipun masyarakat Indonesia telah

bagi ketiadaan sistem nilai baru itu. Dengan demikian dinamika dan bangunan afiliasi politik lebih ditentukan oleh adanya persamaan atau perbedaan budaya didalam kelompok-kelompok masyarakat Indonesia.

Berdasar pada kenyataan di atas, untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang perilaku politik orang Indonesia perlu kiranya membuat gambaran mengenai budaya politik masyarakat. Untuk kepentingan ini, konsep aliran menjadi sangat relevan.

Berkenaan dengan konsep aliran, Clifford Geertz memperkenalkannya dalam beberapa buku (sebagai contoh 1959; 1960), dan pengaruhnya terhadap analisis politik Indonesia sangat besar. Hal ini bisa terlihat dalam karya-karya ahli Indonesia seperti karyanya Robert Tay (1963:1969), Liddle (1970;1972), Young Mung Cheong (1973), dan Emmerson (1976). Walaupun menurut Afan Gaffar karya terakhirnya Liddle (1977) mempertanyakan mengenai peran pentingnya konsep aliran, juga mencatat bahwa “aliran merupakan kekuatan laten yang mungkin muncul ke depan dengan kekuatan baru” (Gaffar, 1992).

Berkenaan dengan Aliran politik ini, Geertz (1960)—mendasari konsepnya itu melalui hasil penelitian lapangan di Mojokuto (pare)—mengatakan:

“Alat pelembagaan bagi integrasi cara baru ini adalah sistem aliran. Aliran, yang secara harfiah berarti aliran sungai atau arus, sudah diperluas dalam Indonesia masa Republik hingga memberi makna yang biasa disebut gerakan sosial (dalam bahasa inggris) atau kelompok/fraksi politik yang ditentukan secara ideologis dan yang terdorong cita-cita moral yang agak jauh jangkauannya. Secara khusus, aliran terdiri dari suatu partai politik yang dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa sodalirities—yaitu organisasi sukarela—yang terkait pada partai secara resmi atau tidak resmi. Dalam Mojokuto setelah perang, keempat partai yang ada adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Masyumi (Partai Islam

mengalami proses kapitalisasi sejak abad ke-19, namun sumber-sumber material belum tertransformasikan menjadi alat politik dan daya pendorong bagi terciptanya afiliasi politik yang efektif bagi masyarakat Indonesia. Ini terjadi karena proses kapitalisasi modern itu berada dalam di dalam kontrol tangan-tangan asing. Dalam arti kata lain, absennya kontrol kaum pribumi terhadap sumber-sumber material berbanding lurus dengan absennya kesadaran politik yang bersifat *material-based* di kalangan masyarakat Indonesia. Dia mencontohkan, gagalnya anggota Sarekat Islam untuk berkembang menjadi kelas ekonomi yang sadar—walau pada mulanya lahir dengan kesadaran itu—antara lain, menunjukkan kecenderungan kegagalan di atas. Di samping itu kegagalan PKI mengembangkan politik kelas yang cenderung membuat kompromi-kompromi ideologis dalam realitas dan politik Indonesia. Lihat Fachri Ali, Pengaruh Aliran Dalam Politik Indonesia, unpublished paper, 1996.

Pembaharu/Reformis) dan Nahdatul Ulama (NU) yakni partai Islam konservatif. Bila salah satu partai menjadi inti, maka satu aliran berarti suatu perangkat organisasi Nasionalis—perkumpulan wanita, kelompok pemuda, pandu, yayasan, koperasi, perkumpulan peminjaman, sekolah swasta, perkumpulan atletik, organisasi agama, serikat buruh tani, kelompok seni, dan organisasi dagang—semuanya mengikuti arah perangkat ideologis yang serupa serta kesetiaan pada pimpinan yang sama bagi seluruh Indonesia. Ada organisasi petani PNI, Organisasi petani PKI, organisasi petani Masyumi, dan NU dan seterusnya, taman kanak-kanak pun mengikuti pembagian ini.“

Geertz (1960) sampai pada sebuah kesimpulan bahwa *“an aliran is more than a political party, certainly more than a mere ideology; it is a comprehensive pattern of social integration”*. Dalam pandangan Afan Gaffar, konsep aliran merujuk pada cara pandang (*state of mind*) dari masyarakat secara individual di Indonesia, khususnya di Jawa, didasarkan pada kenyataan pola religio-kultural. Dalam kontek masyarakat Jawa, pola religio-kultural tercermin dalam tiga pemisahan yang terkenal yaitu *Santri, Abangan, dan priyayi*.

Orang Santri Jawa sangat menekankan pada doktrin Islam. Bagi mereka, seorang Muslim adalah mereka yang harus menganut Islam secara sungguh-sungguh, dan menjalankan Islam secara penuh agar menjadi Muslim yang sebenarnya. Mereka meyakini bahwa semangat kekeluargaan dalam Islam, dan ekspresi kekeluargaan dapat ditemukan dalam bentuk partai dan organisasi keagamaan. Mereka tertarik dengan anggapan Islam sebagai *“a superior ethical for modern man, as a workable social doctrine for modern society, and as a fertile source of social values for modern culture”* (dalam Gaffar, 1992). *Abangan*, di sisi lain, hanya tertarik dalam aspek ritual Islam, seperti perkawinan dan acara keagamaan lainnya. Mereka merupakan Muslim nominal yang meyakini agama Jawa atau kejawan, *“a blend of animism and mysticism, partly Hindu in origin, with a thin Islamic overlay,”* seperti yang dijelaskan Liddle (1974).

Dari analisis di atas, kita dapat melihat bahwa aliran di dalam masyarakat Jawa menjadi satu dengan pembelahan politik dan sosial karena ini dapat menjadi dasar dalam pengelompokan sosial, ini membentuk perasaan kebersamaan di antara orang-orang yang punya sudut pandang yang sama, dan hubungannya dengan partai politik nampaknya tidak terelakan. Dalam memahami politik seperti halnya perilaku memilih di orang desa Jawa, oleh karena, ini sangat signifikan karena membuka seluruh kerangka sosio-kultural dalam masyarakat Jawa.

Kasus yang terjadi di negara kita, walaupun telah berkali-kali melakukan pemilu, namun realitas pemilih tidak berubah sejak pemilu 1955. Masyarakat tetap menyalurkan aspirasi politiknya dengan basis ideologi, sedangkan kelompok masyarakat yang rasional hanya sekitar 20 persen. Menurut Pratikno (2004) perilaku pemilih ini dapat disimak pada pemilu legislatif 5 April 2004.

Sejumlah partai memperebutkan suara dari kelompok masyarakat pemilih yang sama, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar yang memperebutkan kaum Nasionalis, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) mencari suara kaum Islam modern, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperebutkan suara kelompok Islam Tradisional. "Meski mekanisme pemilu sudah berubah, tetapi sikap pemilih masih sama,". (Kompas, 2004).

Di sisi lain menurut Lambang Trijono (2004), politik aliran ditandai dengan kuatnya fanatisme pada figur tertentu dan munculnya eskapisme di kalangan masyarakat bawah. "Masyarakat akan tetap memilih sosok tertentu, tanpa memedulikan program apa yang ditawarkan tokoh tersebut dan bagaimana konsepnya dalam mengatasi masalah bangsa. Eskapisme muncul seiring dengan kerinduan pada mitos ratu adil, pemimpin kuat, dan impian negeri yang adil makmur," (Kompas, 2004).

Bukti bahwa politik aliran masih eksis, menurut Ichlasul Amal (2004) bisa dilihat dari hasil pemilu legislatif. Hasil pemilu menunjukkan dengan jelas asal-muasal suara yang diperoleh empat besar partai pemenang pemilu, Golkar, PDI-P, PKB, dan PPP. Keempat partai itu mendulang suara dari kelompok Islam dan Nasionalis. Masyarakat masih mencoblos partai berdasarkan aliran, budaya, dan agama.

F. Fenomena Politik Kepartaian

Teori-teori sosial yang termasuk rumpun penelitian kualitatif banyak ragamnya. Para pakar tidak seragam dalam memberikan batasan/konsep masing-masing teori, bahkan sering *over lapping* satu dengan yang lain. Ketidakteragaman ini bukan merupakan kelemahan metode kualitatif, melainkan sebagai perwujudan kelenturan metode kualitatif dalam melihat realitas sosial yang kompleks dan multi paradigmatis. Di antara teori-teori sosial itu penulis cenderung mempergunakan teori fenomenologi. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata

fenomena, sedang kata fenomena berasal dari kata Yunani *phainesthai* yang berarti menampak. Dari kata itu muncul bentukan kata kerja yang berarti nampak. Dengan demikian fenomenon berarti suatu yang tampak (Driyarkara, 1978). Jadi secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan diri.

Sejak Edmund Husserl menggunakan istilah fenomenologi, jadilah fenomenologi sebagai suatu cara baru untuk berfilsafat. Bagi Husserl, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena, tentang obyek-obyek, bagaimana obyek-obyek itu dialami atau menghadirkan dirinya dalam kesadaran manusia (Bertens, 1981). Di sini Husserl telah menggunakan kata "fenomenologi" untuk dua maksud, baik sebagai ajaran maupun metode.

Metode fenomenologi dirintis oleh Husserl (1859-1938) dengan semboyan: *Zuruck Zu den sachen selbst* (kembali kepada hal-hal-hal itu sendiri) (DisterOfm,1999). Maksudnya, kalau kita ingin memahami sebuah fenomena, seperti "memilih partai", jangan hanya puas mempelajari pendapat orang tentang itu atau memahaminya berdasarkan teori-teori, tetapi kembalikan kepada subjek secara langsung (pemilih). Dalam memahami sesuatu, fenomenologi menghendaki keaslian (*dasariah*), bukan kesemuan dan kepalsuan. Untuk menemukan keaslian (kebenaran *dasariah*) fenomenologi menyarankan dua langkah atau *reduction* (penjabaran). *Pertama*, fenomena diselidiki hanya sejauh disadari secara langsung dan spontan sebagai keseluruhan (*lived world*), tanpa dijadikan objek ilmiah yang terbatas. Sebagai pendekatan/perspektif penelitian kualitatif, fenomenologi dipakai dalam berbagai bidang kajian.

Dalam bekerja, fenomenologi menerapkan metodologi ilmiah dalam meneliti fakta yang bersifat subjektif seperti pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, ide-ide, emosi-emosi, maksud-maksud, pengalaman, dan sebagainya dari seseorang yang diungkapkan dalam tindakan luar (perkataan dan perbuatan). Bagaimana untuk mengetahui bahwa sebuah fakta subjektif tertentu sebagai bentuk ungkapan pilihan partai seseorang, bukan sebagai manifestasi struktur atau kepentingan lain? Misalnya fenomena pemakaian kaos bergambar parpol, bisa jadi memang fenomena afiliasi politik, bisa pula merupakan keterpaksaan struktural atau ketakberdayaan ekonomi. Untuk menjawab pertanyaan di atas, peneliti fenomenologi tidak mempelajari tentang masyarakat (*to learn about the people*), melainkan belajar kepada masyarakat (*to learn from the*

people) sebagaimana dikemukakan di atas. Dalam rangka *to learn from the people*, peneliti harus memahami bahasa, kebiasaan, dan watak orang-orang yang semua itu membutuhkan pemahaman, verifikasi, klarifikasi tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada subyek yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan di muka, fakta pilihan partai dalam penelitian fenomenologi bersifat subjektif, persoalan yang muncul kemudian adalah masalah bagaimana caranya mengatasi subjektivitas oleh subjek yang diteliti ataupun peneliti itu sendiri. Perlu diingat bahwa dalam perspektif fenomenologi, masalah objektifitas berarti membiarkan fakta berbicara untuk dirinya sendiri. Untuk mengungkapkan fakta pilihan partai yang bersifat subjektif menjadi fenomena objektif, Dhavamony menyarankan dua hal: *epoche* dan *eidetik*, atau etik dan emik menurut Pike (Moleong, 1994).

Menurut Dhavamoni, *epoche*, dalam fenomenologi pilihan partai, berarti penilaian yang dikonsepskan sebelumnya harus ditunda sampai fenomena itu sendiri bicara untuk dirinya. Seorang fenomenolog harus mempertanyakan hakikat yang sebenarnya, tanpa harus terlibat untuk merumuskan baik-buruknya pilihan itu. Adapun yang dimaksud *eidetik* adalah pemahaman makna partai yang diperoleh hanya lewat pemahaman ungkapan-ungkapan. Ungkapan-ungkapan ini meliputi kata-kata dan tanda-tanda, apa pun jenisnya, dan tingkah laku yang ekspresif seperti arak-arakan kampanye, pembakaran kaos parpol, bahkan cap jempol darah dan lain-lain. Hanya melalui ekspresilah kita menangkap pikiran-pikiran orang lain mengenai partai, dan hanya dengan memikirkan serta mengalaminya kembali, dengan empati atau wawasan imajinatif, kita memasuki pikiran mereka. Pemahaman yang empati berarti memperlihatkan pemahaman terhadap tingkah laku orang lain yang meliputi pengalaman, pikiran, emosi, ide-ide orang lain berdasarkan pengalaman dan tingkah laku dirinya sendiri. Itulah sebabnya penelitian fenomenologi sangat mengandalkan metode partisipatif agar peneliti dapat memahami tindakan pemilih dari dalam. Sebab, kalau tidak demikian, hanya akan memberi kesan seolah kita memasuki pikiran orang lain lewat suatu proses misterius (Dhavamoni, 1995).

Dalam konteks fenomenologi ini, Weber menerapkan metode *Verstehen* yaitu pemahaman empatik (*nir* pemihakan, sikap yang tidak jatuh pada simpati atau antipati) atau kemampuan menyerap dan

mengungkapkan lagi perasaan-perasaan, motif-motif, dan pemikiran-pemikiran yang ada di balik tindakan orang lain (dalam Bodgan dan Taylor, 1993). Dikaitkan dengan teori tersebut di atas, maka pilihan partai seseorang dalam masyarakat sering dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti : faktor sosial, faktor ekonomi, faktor religius/ideologi. Pandangan dan pemahaman yang berkaitan dengan partai politik meliputi pikiran-pikiran manusia tentang peranan partai dalam kehidupan sosial, keyakinan agama, pemilihan dan penolakan partai. Sebagai fenomena sosial budaya di Indonesia, khususnya Malang Raya, partai tidaklah hanya produk masyarakat secara rasional yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat semata, tetapi partai diartikan juga dalam hubungannya dengan kehidupan sosial yang lebih luas. Berbagai partai yang akan dipilih oleh masyarakat dalam suatu kelompok tertentu sering memerlukan legitimasi ideologis agar dapat diterima. Banyak individu pemilih dalam masyarakat meskipun dalam kondisi bagaimana pun, tidak memilih partai “tertentu” karena berbagai alasan seperti alasan agama, budaya, dan ideologi. Sedangkan partai dalam konsep Ideologi adalah pernyataan yang menjelaskan bahwa berbagai pembagian kelompok, organisasi, maupun partai akan mengikuti arah perangkat ideologis (Geertz, 1986). Jadi jelas bahwa dalam konsep kebudayaan unsur nilai dan kepercayaan masuk di dalamnya sehingga muncul penggolongan tentang apa yang dimaksud dengan partai. Pengelompokan partai berdasarkan pada aliran politik/ideologi merupakan fenomena yang umum bagi masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya setiap individu akan selalu berpegang teguh pada ideologi yang dianutnya. Walaupun tidak ada larangan dari kelompok aliran politik untuk tidak memilih partai tertentu, akan tetapi bagi masyarakat akan mendatangkan kepuasan batin tersendiri atau ketenangan apabila tidak memilih partai yang tidak sesuai alirannya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemilih dalam memaknai partai politik di Malang Raya. Pelaksanaan penelitian ini dilandasi oleh metode dan teknik penelitian kualitatif, yaitu metode dan teknik yang merupakan strategi untuk mendapatkan data atau keterangan deskriptif mengenai mengenai pemahaman, tindakan, serta simbol-simbol yang terkait dengan makna parpol bagi pemilih.

Dalam kaitan inilah metode interpretatif memiliki pertautan erat dengan metode kualitatif dalam penelitian sosial. Metode kualitatif

sebagai mana konsep Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau dijadikan sumber informasi. Dalam penelitian kualitatif penggunaan data dan analisis deskriptif dipilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan “mengapa”, alasan apa, dan bagaimana terjadinya dalam suatu fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dari proses interpretasi tersebut diperoleh suatu gambaran tentang fenomena masyarakat dalam memilih partai politik atau karakter pemilih, proses, dan dinamika perkembangan, konteks dan kecenderungan-kecenderungannya. Metodologi interpretatif dalam sosiologi merupakan aspek utama dan penting untuk memahami kehidupan manusia (*human life*) sebagaimana dikembangkan oleh Weber, Schut, Manheim, Gadamar, Scheller, Berger, dan para sosiolog penganut paham/mazhab *interpretation science* yang tujuan utamanya untuk meneliti pemahaman-pemahaman intersubjektif mengenai sistem, simbol dan derivasinya.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Bab III

KEADAAN SOSIAL, BUDAYA, DAN POLITIK MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Mulai tahun 2001, Malang mempunyai tiga wilayah pemerintahan yaitu, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Kota Batu merupakan Daerah yang baru terbentuk sebagai pecahan dari Kabupaten Malang.¹ Sebelum menjadi pemerintahan sendiri, Kota Batu merupakan dari Daerah Administratif dari pemerintahan Kabupaten Malang. Namun Karena mempunyai potensi dan kekhasan sendiri sebagai daerah wisata, maka Kotatif Batu dirubah statusnya menjadi Kotamadya Batu berdasarkan UU No 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Sementara, Kabupaten Malang, walaupun telah melepaskan salah satu daerahnya (Batu), namun dari segi wilayah masih merupakan Daerah yang mempunyai luas wilayah terbesar khususnya di Malang.

Sebagaimana umumnya Daerah di wilayah di Propinsi Jawa Timur, Malang memiliki banyak pondok pesantren. Pesantren ini pun banyak ragamnya dari mulai Tradisional sekali sampai pesantren modern, termasuk juga dalam pengelolaannya. Pesantren tidak hanya tempat untuk melakukan transfer ilmu keagamaan, namun juga sekaligus

¹ Sejarah Terbentuknya Kota Batu: 6 Maret 1993, Kota administrasi Batu dibentuk dan diresmikan (sebelumnya merupakan kecamatan bagian wilayah Kabupaten Malang). 10 April 1995, Surat persetujuan DPRD Kab. Malang dan bupati Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi kotamadya Batu. 11 April 1995, Pengusulan kepada gubernur tentang peningkatan status kotif menjadi kotamadya. 6 Juni 1996, Dengan persetujuan DPRD kota Malang dan surat bupati Malang disertai surat Pembantu Gubernur di Malang, Batu mengusulkan peningkatan status dari Kotif menjadi kotamadya ke gubernur Jawa Timur. 12 Januari 2001, Melalui proses yang panjang, maka setelah pemilu 1999 terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD propinsi dan Kabupaten/Kota. 28 Februari 2001, Keputusan Menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah pada tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten / Kota. 21 Juni 2001, Batu resmi menjadi Kota berdasarkan UU No 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu

mewariskan kultur kepada Santri dan masyarakat di lingkungan pesantren itu. Dalam kultur pesantren, kyai merupakan tokoh sentral sekaligus figure kharismatik yang segala perkataan dan perbuatan menjadi contoh dan panutan masyarakat. Legitimasi religius yang dimiliki oleh sosok kyai, secara sosial sangat penting dalam menjamin ketertiban dalam masyarakat, namun karena sifat kepemimpinannya yang *fatron-client* sangat sulit untuk menumbuhkan kehidupan demokratis yang menjamin adanya kebebasan.

Walaupun kultur masyarakat Santri kelihatan semarak, namun sisi lain masyarakat Malang Raya masih banyak sekali perilaku abangan. Bahkan dalam realitasnya, antara mereka yang tergolong Santri dibanding dengan Abangan, secara kuantitatif masih sedikit lebih banyak masyarakat yang teridentifikasi sebagai abangan. Bukti nyata dari besarnya kaum Abangan ini, ketika pemilu, mayoritas dari masyarakat memilih partai Nasionalis, Khususnya PDIP dalam pemilu 1999, 2004, 2009, maupun 2014. Sementara, kalau dilihat dari sisi kultur, Santri yang banyak di temui Di Malang Raya adalah Santri Tradisional yang umumnya berafiliasi dengan partai-partai yang punya kedekatan secara sosiologis maupun historis dengan organisasi Islam Tradisional yaitu NU.

Dilihat dari kondisi sosiologisnya, Malang Raya tergolong multi-etnik. Masyarakat Malang saat ini ditempati oleh berbagai keturunan seperti Arab, Cina, Madura, Sunda, bugis makasar, termasuk etnis utamanya yaitu Jawa. Walau Malang terdiri dari beragam etnis, namun benturan-benturan antar etnis boleh dibilang jarang terjadi. Walaupun demikian, masih terdapat sekat-sekat yang membatasi komunikasi sosial dan politik antar etnis ini. Dan, hingga saat ini wacana multi-kulturalisme masih belum cukup berkembang di Malang.

Di samping mempunyai tingkat keragaman sosial, ekonomi, budaya, suku/ras, dan agama yang tinggi, Malang juga mempunyai letak geografis yang strategis bagi pertahanan dan keamanan serta faktor historis politis yang penting khususnya masa Orde Lama. Oleh karena itu Malang menjadi tolak ukur keamanan dan ketertiban baik di tingkat regional Jawa Timur maupun Nasional. Kondisi tersebut membawa Malang menjadi tempat bagi lokasi penempatan Kekuatan militer dan pemusatan latihan.

B. Karakter Budaya

Sekarang ini Malang mempunyai tiga wilayah pemerintahan yaitu, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Kota Batu merupakan Daerah yang baru terbentuk sebagai pecahan dari Kabupaten Malang.² Sebelum menjadi pemerintahan sendiri, Kota Batu merupakan dari Daerah Administratif dari pemerintahan Kabupaten Malang. Namun Karena mempunyai potensi dan kekhasan sendiri sebagai daerah wisata, maka Kotatiff Batu dirubah statusnya menjadi Kotamadya Batu berdasarkan UU No 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Sementara, Kabupaten Malang, walaupun telah melepaskan salah satu daerahnya (Batu), namun dari segi wilayah masih merupakan Daerah yang mempunyai luas wilayah terbesar khususnya di Malang.

Malang Raya³ merupakan bagian dari wilayah provinsi Jawa Timur. Berdasarkan karakter budaya yang dimilikinya, provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi 10 wilayah kebudayaan, yaitu tlatah kebudayaan besar ada empat; Jawa Mataraman, Arek, Madura kepulauan, Pandalungan. Sementara tlatah yang kecil terdiri atas Jawa Ponoragan, Samin (sedulur Sikep), Tengger, Osing (Using), dan Madura Kangeran (Ayu Sutarto, 2004). Masing-masing kelompok etnik tersebut memiliki identitas masing-masing, Di samping keunggulan atau kelebihan baik yang terkait dengan produk maupun kinerja kulturalnya.

Tlatah kebudayaan Jawa Mataraman berada di sebelah barat. Wilayahnya paling luas, membentang dari perbatasan Provinsi Jawa

² Sejarah Terbentuknya Kota Batu: 6 Maret 1993, Kota administrasi Batu dibentuk dan diresmikan (sebelumnya merupakan kecamatan bagian wilayah Kabupaten Malang). 10 April 1995, Surat persetujuan DPRD Kab. Malang dan bupati Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi kotamadya Batu. 11 April 1995, Pengusulan kepada gubernur tentang peningkatan status kotif menjadi kotamadya. 6 Juni 1996, Dengan persetujuan DPRD kota Malang dan surat bupati Malang disertai surat Pembantu Gubernur di Malang, Batu mengusulkan peningkatan status dari Kotif menjadi Kotamadya ke Gubernur Jawa Timur. 12 Januari 2001, Melalui proses yang panjang, maka setelah pemilu 1999 terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota. 28 Februari 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten / Kota. 21 Juni 2001, Batu resmi menjadi Kota berdasarkan UU No 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu

³ Pada awal mulanya Malang hanya satu wilayah wilayah Kabupaten Malang, namun perkembangan berikutnya menjadi tiga yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Semenjak itu ada kesepakatan tidak tertulis untuk menyebutkan ketiga wilayah itu menjadi Malang Raya.

Tengah hingga kabupaten Kediri. Wilayah ini mendapat pengaruh kuat dari kerajaan Mataram, baik pada masa Hindu-Budha maupun era kesultanan Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta dan Surakarta. Karena itu wilayah ini mempunyai kemiripan dengan budaya masyarakat Yogyakarta dan Surakarta. Wilayah Budaya Mataraman dibagi lagi menjadi Mataraman Kulon, Mataraman Wetan, dan Mataraman Pesisir. Pembagian ini didasarkan pada jejak sejarah dan budaya lokal yang berkembang. Ciri yang paling mudah untuk mengenali ketiga wilayah Mataraman ini bisa dikenali melalui bahasa yang dipergunakan. Dari segi kedekatan budaya dengan Jawa Tengah, Mataraman Kulon lebih kuat. Bahasa Jawa yang dipergunakan lebih halus jika dibanding dengan bahasa Jawa Mataraman Wetan, yang wilayahnya bekas Keresidenan Madiun.

Samping Timur Mataraman merupakan tlatah budaya Arek. Sisi Timur Kali Brantas menjadi batas antara wilayah Mataraman dan Arek. Tlatah budaya Arek membentang dari utara ke Selatan, dari Surabaya hingga Malang. Setelah industrialisasi masuk, menjadi tempat tujuan bagi pendatang yang menjadikannya daerah ini sebagai tempat peleburan budaya di Jatim. Meski luas wilayahnya hanya 17 % dari keseluruhan luas Jatim, hampir 49 % aktivitas ekonomi Jatim ada di wilayah arek (Kompas, 21 Juli 2008). Dengan demikian budaya Arek ini merupakan sentuhan dari aneka kultur baik lokal maupun asing, dan membentuklah komunitas Arek. Masyarakat yang berkultur Arek ini terkenal dengan semangat juang tinggi, mempunyai solidaritas kuat, terbuka terhadap perubahan, mau mendengarkan saran orang lain, dan mempunyai tekad dalam menyelesaikan segala persoalan melalui cara *yok opo enake*, sama-sama senang.

Komunitas budaya terbesar ke tiga adalah Madura. Wilayahnya adalah Madura. Karakteristik kultur warganya pun berbeda dengan masyarakat di tlatah Mataraman. Menurut Kuntowijoyo (2002), keunikan Madura adalah bentukan ekologis tegal yang khas, yang berbeda dari ekologis sawah di Jawa. Pola pemukiman terpencar, tidak memiliki solidaritas Desa, sehingga membentuk ciri hubungan sosial terpusat pada individual, dengan keluarga inti sebagai dasarnya. Karakteristik lingkungan dan budaya inilah yang membuat banyak orang Madura bermigrasi ke daerah lain, terutama Jawa Timur bagian Timur. Oleh karena itu dari Jawa Timur bagian timur ini bisa dikatakan sebagai tanah tumpah darah kedua orang Madura Pulau. Lingkungan bermukim orang

Madura yang berdampingan dengan orang Jawa, kawasannya disebut Pandalungan. Menurut Prawiroatmojo (1985), kata pandalungan berasal dari kata dasar “*dhalung*” artinya periuk besar. Wadah bertemunya budaya sawah dengan budaya tegal atau budaya Jawa dengan budaya Madura, yang membentuk budaya Pandalungan. Hasilnya, masyarakat yang berciri agraris-egaliter, bekerja keras, agresif, ekspansif, dan memiliki solidaritas yang tinggi, tetapi masih menempatkan pemimpin agama Islam sebagai tokoh sentral. Daerahnya meliputi Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, dan Jember.

Sementara wilayah di ujung Timur, yaitu Banyuwangi. Daerah ini merupakan pertemuan tiga budaya yaitu Jawa, Madura, dan Osing. Budaya Osing merupakan warisan kebudayaan Kerajaan Blambangan (abad ke-12) merupakan sentuhan dari budaya Jawa Kuno dan Bali. Orang-orang Osing dikenal sebagai petani rajin dan seniman andal. Tari Gandrung merupakan simbol dari budaya Osing. Komunitas budaya lainnya adalah Tengger dan Samin. Orang Tengger tinggal di dataran tinggi Tengger dekat gunung Bromo. Mereka mempertahankan adat istiadat Hindunya, sedangkan orang Samin tinggal di daerah Bojonegoro yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Menurut Denys Lombard (1996), pengaruh budaya luar yang ikut mempengaruhi budaya Jawa adalah India, Islam, China, lalu disusul Eropa yang merupakan unsur budaya modern.

Dalam peta budaya masyarakat Malang masuk dalam wilayah “mataraman” akan tetapi secara kultural lebih banyak dan dekat dengan budaya “Arek”. Menurut sejarah kerajaan, Malang masuk dalam daerah kekuasaan Kerajaan Mataram. Oleh karena itu masyarakat Malang memiliki produk kebudayaan yang tidak jauh berbeda dari komunitas Jawa yang tinggal di Surakarta dan Yogyakarta yang juga merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Mataram. Masyarakat Jawa Mataraman ini pada umumnya masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Ngawi, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro.

Dilihat dari pola kehidupan sehari-harinya masyarakat Malang mempunyai sebagaimana pola kehidupan seperti orang Jawa pada umumnya. Pola bahasa Jawa yang digunakan, meskipun tidak sehalus

masyarakat Surakarta dan Yogyakarta, mendekati kehalusan dengan masyarakat Jawa yang terpengaruh kerajaan Mataram di Yogyakarta. Begitu pula pola cocok tanam dan sistem sosial yang dianut sebagaimana pola masyarakat Surakarta dan Yogyakarta. Pola cocok tanam dan pola hidup di pedalaman Jawa Timur, di sebagian besar, memberi warna budaya Mataraman tersendiri bagi masyarakat ini. Sedangkan selera berkesenian masyarakat ini sama dengan selera berkesenian masyarakat Jawa pada umumnya. Dalam masyarakat Jawa Mataraman ini banyak jenis kesenian seperti ketoprak, wayang purwa, campur sari, tayub, wayang orang, dan berbagai tari yang berkait dengan keraton seperti tari Bedoyo Keraton.

Sementara, sebagai masyarakat yang mempunyai kultur areknya, masyarakat Malang dikenal mempunyai semangat juang tinggi, terbuka terhadap perubahan, dan mudah beradaptasi. Komunitas Arek juga dikenal sebagai komunitas yang berperilaku *bandha nekat*. Perilaku *bandha nekat* ini di satu sisi bisa mendorong munculnya perilaku patriotik, tetapi di sisi lain juga menimbulkan sikap destruktif. Malang juga merupakan kota tujuan dari daerah lain seperti Gresik, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Blitar, probolinggo, Jember, dan sebagainya.

Melihat kenyataan tersebut di atas, Kerajaan Majapahit dan Mataram menjadi penting dalam membicarakan masyarakat Malang yang mempunyai kultur "arek". Kerajaan Majapahit memberikan kontribusi pada tiga hal: *Pertama*, bahasa tunggal yang tidak memiliki tingkatan dalam berbahasa yang digunakan dalam wilayah budaya Arek. *Kedua*, pola kekuasaan yang dipimpin atau diserahkan pada warga lokal. *Ketiga*, wilayah budaya Arek merupakan jangkar bagi Majapahit untuk menguasai wilayah lainnya di Jawa Timur dan sekitarnya. Kerajaan Mataram juga memberikan kontribusi, seperti munculnya ragam bahasa bertingkat karena munculnya raja-raja baru yang mendorong posisi mereka yang berbeda dari rakyat jelata, terlepas dari dampak baik atau buruk.

Dalam peta wilayah budaya Jawa Timur, budaya Arek terletak di sisi timur Kali Brantas. Dengan demikian, budaya Arek meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, Malang termasuk Kediri dan Blitar yang dibatasi oleh Pare ke timur. Meski tidak bersifat matematis, kedelapan wilayah tersebut--aliran Kali Brantas ke timur-- menentukan lahirnya budaya Arek. Surabaya dan Malang dianggap sebagai pusat

pusat budaya Arek, kedua wilayah tersebut memiliki beberapa kesamaan. Pada masa pemerintahan kolonial, Belanda memperlakukan konstruksi arsitekturnya secara sama dalam beberapa hal, misalnya bentuk-bentuk bangunan dan nama daerah.

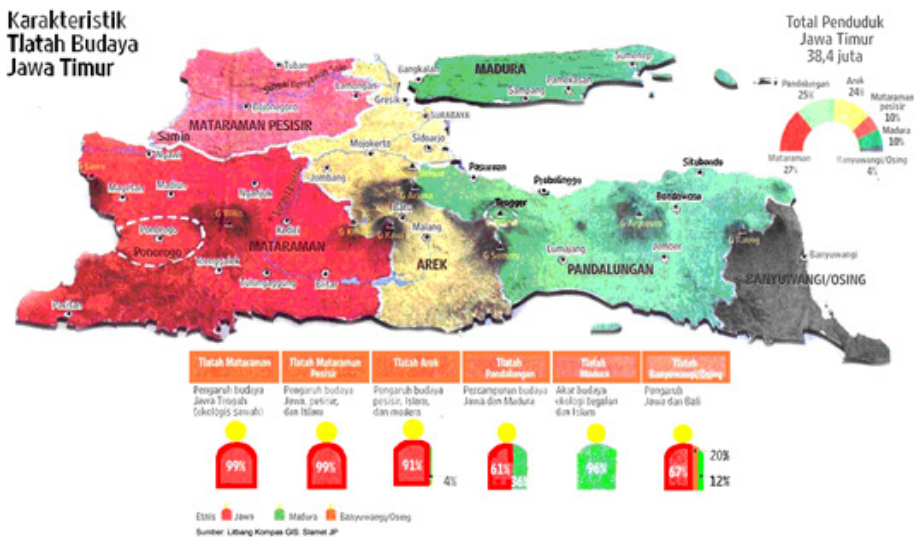
Posisi Malang Raya menjadi pintu gerbang bagi arus informasi, pendidikan, perdagangan dari luar Malang, hal ini menyebabkan masyarakat Malang Raya relatif terbuka dan heterogen. Yang menarik komunitas Arek ini dengan sikap keterbukaannya itu bisa menerima berbagai model dan jenis kesenian apa pun yang masuk ke wilayah ini. Berbagai kesenian Tradisional hingga modern cepat berkembang di wilayah ini. Kesenian Tradisional (rakyat) yang banyak berkembang di sini adalah Ludruk, Srimulat, wayang purwa Jawa Timuran (Wayang Jek Dong), wayang Potehi (pengaruh kesenian China), Tayub, tari jaranan, dan berbagai kesenian bercorak Islam seperti dibaan, terbang, dan sebagainya. Sementara kesenian modern berbagai gaya, corak, dan paradigma berkembang pesat di Malang Raya. Seni rupa bergaya realisme, naturalisme, surialisme, ekspresionisme, pointilisme, dadaisme, dan instalasi berkembang pesat di wilayah ini. Begitu pula model teater, tari, musik, dan sastra kontemporer sangat pesat perkembangannya di wilayah Arek ini. Sikap keterbukaan, egalitarian, dan solidaritas tinggi itu mendorong berbagai kesenian macam apa pun bisa berkembang di Malang Raya sebagai wadah budaya Arek.

Di sisi lain, agama Islam menjadi nilai dasar sosial yang penting di Malang Raya. Dimana dalam struktur sosial masyarakat Malang Raya, kyai ditempatkan menjadi aktor penting sekali dalam kehidupan masyarakat. Sistem pendidikan pesantren dan tradisi pendidikan pesantren, seperti sorogan dalam pelajaran di pesantren menempatkan kyai menjadi agen penting dari kehidupan sosial sosio-ekonomi masyarakat Malang Raya. Oleh karena itu tidak heran apabila kesenian yang berkembang di wilayah Malang Raya banyak diwarnai nilai-nilai Islam. Mulai dari tari Zafin, Sandur, Dibaan, dan sebagainya.

Karena kyai dan pesantren ditempatkan sebagai posisi strategis dalam sistem sosial masyarakat Malang Raya, maka kyai dan pesantren seringkali menjadi agen penting dalam masyarakat. Bahkan dalam banyak hal kyai dan pesantrennya, secara kultural, bisa pula sebagai agen pembaharuan dalam masyarakat Malang Raya. Oleh karena itu banyak sastra modern yang dipengaruhi sastra Timur Tengah berkembang di

sekitar pesantren dan kyai ini. Para penyair modern dan sajak sajak modernnya berkembang di sekitar komunitas Santri ini.

Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila pola hubungan sosial politik masyarakat Malang mempunyai corak yang dilandasi magis-religius, hal ini menjadikan wajah politik di wilayah Malang Raya secara keseluruhan dapat diidentikkan dengan langgam kekuasaan yang cenderung Tradisional, meskipun terjadi transformasi kekuasaan yang berulang akan tetapi mentalitas kultur kekuasaan masih dalam frame kekuasaan hamba – kawula. Kekuasaan yang seharusnya dilihat sebagai relasi antar manusia selalu dipandang sebagai hak/nasib adi kodrati sehingga memunculkan banyak paradoks kekuasaan yang banyak mengadopsi struktur pemerintahan modern, yang oleh Weber dilukiskan sebagai neo-patrimonial. Banyak fenomena pemimpin yang mengklaim memiliki hubungan genetik dengan raja-raja kuno, pemakaian gelar-gelar kuno juga banyak dilakukan untuk mendapatkan legitimasi kosmologis. Meskipun tidak seental masyarakat "tapal kuda" masyarakat Malang Raya juga meletakkan para pemimpin agama dan tokoh sebagai pemilik kekuasaan sosial secara informal.



Sumber: Kompas, Senin 21 Juli 2008

Gambar 3. Karakteristik Budaya Jawa Timur

Mayoritas penduduk Malang secara riil beragama Islam. Ke-Islaman mereka terbagi ke dalam dua kelompok, *pertama* adalah kelompok Islam nominal dan *kedua* Islam yang taat, atau meminjam istilah Geertz (1960) sebagai Islam Abangan dan Islam Santri. Walau kedua kelompok ini sama-sama Islam namun dikarena kultur keberagamaannya berbeda, maka dalam afiliasi politiknya pun tidak sama. Kelompok Islam Santri memilih partai Islam, sementara kelompok Islam Abangan memilih partai Nasionalis. Dengan kata lain, realitas aktualisasi aspirasi politik umat Islam Malang pada tataran empirik memperlihatkan sosok fenomena keberagaman kultur. Sepanjang perjalanan sejarah perkembangan partai-partai politik dan pengalaman pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), realitas ekspresi penyaluran aspirasi politik umat Islam tidak terkonsentrasi ke dalam satu wadah tunggal partai Islam, akan tetapi menyebar secara bervariasi ke berbagai saluran partai politik yang ada di panggung arena politik nasional.

Dilihat dari segi pendidikan, masyarakat Malang Raya yang berpendidikan dan yang kurang berpendidikan prosentasenya kurang berimbang. Masyarakat yang terdidik adalah masyarakat yang berada di kawasan sekitar Kota Malang, sedangkan masyarakat yang berada di pinggiran umumnya kurang mengetahui tentang apa tujuan serta visi dan misi partai yang dipilihnya terkesan seperti mereka sekedar ikut-ikutan. Kyai dan tokoh masyarakat masih menjadi simpul pengendali terhadap pilihan politik masyarakat. Kondisi ini merupakan bagian dari ciri khas dari kultur masyarakat Jawa yang patrimonial dengan pola sosial *patron-clien*. Maraknya kultur patrimonial dalam masyarakat Malang telah berimplikasi pada kehidupan politik yang cenderung sentralistik karena kurang ada ruang dari masyarakat untuk mengekspresikan politiknya secara bebas.

Kyai atau ulama-ulama sebagai Patron yang dihormati dan sekaligus menjadi panutan dalam kehidupan spiritualnya, merupakan bentuk pengejawantahan nilai-nilai penting dalam kehidupan pesantren. Hal ini secara tidak langsung diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi yang terus diperkuat dan dikohkan oleh berbagai macam ritual yang sekaligus sebagai pembeda dari kelompok lain. Mulai dari acara tahlilan, yasinan, dibaan, maupun acara khusus seperti wali-wali (ziarah ke makam wali-wali), istighosah dan khususiya (doa bersama), ataupun kunjungan tetap tiap bulannya

ke pesantren tertentu sekedar *sowan* (baca : bertamu) pada kyai-nya menjadi tradisi yang melembaga dari kerajaan kyai. Dilihat dari sisi politik, kondisi ini merupakan lahan yang potensial bagi partai politik untuk menjadikannya sebagai basis pendukung partai. Oleh karena itu sering kali menjadikan kyai dan para ulama dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk menggiring massanya ke partai politik tertentu.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pola afiliasi politik seperti apa yang di kemukakan Geertz, dimana pemilih Santri memilih partai Islam, pemilih Abangan memilih partai Nasionalis, dan pemilih priyayi memilih Golkar masih tampak. Golongan masyarakat Abangan di Malang cukup banyak, walaupun Malang ini terkenal dengan masyarakat yang Islamnya cukup besar. PDI-P memiliki pendukung yang cukup banyak yang dibuktikan dengan suara PDIP hasil pemilu 1999, 2004, 2009, maupun 2014 yang signifikan dan hampir merata di setiap daerah (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu). Di Daerah Kabupaten Malang PDI-P meraih 510.450 suara (38,47%) pada pemilu 1999 dan 357.008 suara (28,97%) pada pemilu 2004.

Dengan demikian, walau kultur pesantren cukup kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat Malang, namun tidak serta merta menjadikan Malang sebagai basis partai Islam. Karakteristik Masyarakat Malang yang heterogen dengan kultur arek yang keras dan egalitarian telah menjadi tembok tebal bagi sebagian warga Malang dalam menahan pengaruh politik Islam yang datang dari kultur pesantren. Oleh karena itu, walaupun mereka dalam kehidupan kesehariannya mereka bersatu padu dalam menjalankan ritual yang bercirikan Islam Tradisional seperti tahlilan, Yasinan ataupun yang lainnya, namun dalam hal aspirasi politik mereka berbeda. Dalam sisi ritualitas keagamaan, masyarakat Malang Raya, di permukaan memperlihatkan ciri-ciri masyarakat Islam, khususnya Islam Tradisional. Akan tetapi, dalam realitas politik mereka cenderung mengidentifikasikan dirinya ke partai Nasionalis, khususnya pada pemilu 1999 dan 2004 mereka berafiliasi ke PDIP. Kenyataan seperti ini tidak salah apabila Malang dikatakan sebagai daerah "semangka", yaitu daerah yang di permukaannya hijau (Islam), namun di dalamnya merah (Nasionalis).

Dalam lingkup yang lebih luas, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa perilaku pemilih di Indonesia masih belum berubah dari pola

yang berkembang sejak Pemilu 1955 (Pratikno, 2004). Masyarakat tetap menyalurkan aspirasi politiknya dengan basis ideologi, sedangkan kelompok masyarakat yang rasional hanya sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai konsep, visi, dan *platform* yang ditawarkan menjadi tidak punya arti. Pada pemilu legislatif 5 April 2004, sejumlah partai memperebutkan suara dari kelompok masyarakat pemilih yang sama, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar yang memperebutkan kaum Nasionalis, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) mencari suara kaum Islam modern, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperebutkan suara kelompok Islam Tradisional. Hal ini dikuatkan oleh pandangan Ichlasul Amal (2004), bahwa hasil pemilu legislatif menunjukkan dengan jelas asal-muasal suara yang diperoleh empat besar partai pemenang pemilu, Golkar, PDI-P, PKB, dan PPP. Keempat partai itu mendulang suara dari kelompok Islam dan Nasionalis. Masyarakat masih mencoblos partai berdasarkan aliran, budaya, dan agama.

Tabel 6. Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu 2004 di Malang Raya

| No | Nama Partai | Kabupaten Malang | | Kota Malang | | Kota Batu | |
|----|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | Perolehan suara | Prosen tase | Perolehan suara | Prosen tase | Perolehan suara | Prosen tase |
| 1 | PDI-P | 357.008 | 28,97% | 101.732 | 25,84% | 22.110 | 20,62% |
| 2 | PKB | 316.665 | 25,72% | 68.321 | 17,36% | 21.317 | 19,88% |
| 3 | P. Golkar | 205.505 | 16,68% | 57.278 | 14,55% | 14.148 | 13,19% |
| 4 | P. Demokrat | 95.670 | 7,76% | 48.612 | 12,35% | 4.517 | 11,74% |
| 5 | PPP | 55.597 | 4,51% | 28.182 | 7,16% | 6.336 | 5,91% |
| 6 | PKS | 37.534 | 3,05% | 26.663 | 6,77% | 3.311 | 2,95% |
| 7 | PAN | 32.099 | 2,61% | 16.517 | 4,20% | 2.688 | 2,51% |
| 8 | PDS | 13.261 | 1,08% | 9.271 | 2,36% | 2.731 | 2,43% |
| 9 | PBB | 11.482 | 0,93% | 5.050 | 1,28% | 1.196 | 1,12% |

Sumber: Data Hasil Pemilihan Umum 2004 KPU D Malang Raya yang telah diolah penulis.

Di Jawa Timur, termasuk wilayah Malang Raya, ciri sosial dan budaya berpengaruh terhadap pola afiliasi politik. Masyarakat Tlatah Mataraman dari sejak 1955 hingga 2014 selalu loyal kepada partai yang Nasionalis. Orang Mataraman tidak suka yang mencolok, misalnya Islam yang terlalu Islam, karena mereka anggap tidak Nasionalis. (Kompas, 21 Juli 2008). Sebaliknya, mayoritas tlatah Madura dan Pandalungan lebih loyal kepada partai yang berbasis massa Islam Tradisional, NU (Orla), PPPP (orba), Partai Kebangkitan Bangsa. (Orde Reformasi). Daerah dengan kultur Madura dan Pandalungan menempatkan Ulama dan Kyai dalam stratifikasi sosial tertinggi dan masih sekaligus menjadi panutan yang pengaruhnya ikut merembes ranah politik. Bagi wilayah Arek, daerah ini sering disebut daerah abu-abu karena pertimbangan antara pendukung partai-partai Nasionalis dan partai Islam. Dalam pemilu 1999 dimenangi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang “merah”, dan lima tahun kemudian, dalam pemilu 2004 PKB yang “hijau” unggul.

C. Geopolitik Malang Raya

1. Kabupaten Malang



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Jawa Timur

Gambar 4. Daerah Pemilihan Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan Daerah dengan luas wilayah terbesar di Malang Raya, dengan jumlah Kecamatan sebanyak 33 Kecamatan. Dengan demikian untuk menyesuaikan jumlah pemilih dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malang, maka KPUD menetapkan dapil-dapil dengan penggabungan beberapa Kecamatan dalam satu dapil, dengan keseluruhan berjumlah 7 Daerah Pemilihan.⁴

Berdasarkan ketetapan KPUD Provinsi Jatim, untuk Kabupaten Malang, Daerah Pemilihan Malang (dapil) 1 meliputi: Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Pagelaran, Tajinan dan Kepanjen. Daerah Pemilihan Malang 2 meliputi: Kecamatan Lawang, Pakis dan Singosari. Daerah Pemilihan 3 meliputi: Kecamatan Jabung, Poncokusumo, Tumpang dan Wajak. Daerah Pemilihan 4 meliputi: Kecamatan Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo dan Turen. Daerah Pemilihan 5 meliputi: Kecamatan Bantur, Donomulyo, Gedangan, Pagak dan Sumbermanjing Wetan. Daerah Pemilihan 6 meliputi: Kecamatan Kalipere, Kromengan, Ngajum, Pakisaji, Sumberpucung dan Wonosari. Daerah Pemilihan 7 meliputi: Kecamatan Dau, Karangploso, Kesambon, Pujon, Ngantang dan Wagir.

a. Perolehan Suara

Dari hasil perolehan hasil suara yang dikeluarkan KPU Kabupaten Malang, Dapil 4 merupakan hasil perolehan suara PDIP terbesar, hal ini menunjukkan adanya dukungan kuat dari pemilih terhadap PDIP. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo dan Turen. Secara keseluruhan dari keempat wilayah tersebut PDIP mendapatkan suara sebanyak 81.364 pemilih. Perolehan suara terbesar PDIP berikutnya ada di dapil enam yang meliputi Kecamatan Kalipare, Kromengan, Ngajum, Pakisaji, Sumberpucung dan Wonosari dengan jumlah suara sebesar 69.226 pemilih. Sementara dapil satu, dua, tiga, lima dan tujuh perolehan suara PDIP relatif tidak jauh berbeda di antara kisaran 4 ribu dan lima ribuan suara. Walaupun demikian, perolehan suara di kelima

⁴ Jumlah Daerah Pemilihan (DP) yang ada di Kabupaten Malang berdasarkan Rakernis yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada hari rabu tanggal 1 oktober 2003 sebanyak 7 daerah pemilihan dengan alokasi kursi 6 (enam) hingga 7 (tujuh) setiap Daerah Pemilihan (DP).

dapil tersebut masih di atas rata-rata perolehan suara partai lain kecuali PKB yang menguasai dapil satu, dua dan tiga.

Peringkat kedua peroleh suara terbesar di Kabupaten Malang pada Pemilu 2004 ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Selisih suara antara PDIP dan PKB hanya sekitar 35.626 atau sekitar 2,6 % dari total suara pemilih yang sah. Kantung-kantung suara PKB ada di lima dapil yaitu dapil satu, dua, tiga, empat dan lima. Perolehan suara di kelima dapil tersebut hampir merata, kecuali di dapil enam dan tujuh yaitu masing-masing 36.182 dan 31.225 suara pemilih. Alasan kenapa di kedua dapil tersebut PKB lemah, karena dalam dapil enam merupakan wilayah agak maju dan masyarakatnya pun banyak yang secara ekonomi mapan, sehingga pemilih sedikit punya rasionalitas dan independensi dalam menentukan pilihan politiknya. Dapil 6 terdiri dari Kecamatan Kalipare, Kromengan, Ngajum, Pakisaji, Sumberpucung dan Wonosari dengan jumlah suara sebesar 69.226 pemilih. Dari data yang ada menunjukkan bahwa dapil enam merupakan wilayah abu-abu yang pilihan politiknya tersebar ke hampir semua partai politik. Sementara rendahnya suara yang diperoleh PKB di dapil tujuh, karena dapil ini merupakan basis massa yang terbesar dari PDIP. Dapil tujuh terdiri dari Kecamatan Dau, Karangploso, Kesambon, Pujon, Ngantang dan Wagir, wilayah ini merupakan wilayah paling pinggir di Kabupaten Malang dan secara ekonomi tergolong menengah ke bawah.

Secara nasional pada pemilu 2004 partai Golkar mengalami kenaikan, namun kasus di wilayah Kabupaten Malang justru partai Golkar mengalami penurunan dari 18,32% pada pemilu 1999 menjadi 16,84% pada pemilu 2004. Dengan demikian ada sekitar 1,48% Golkar kehilangan suaranya. Basis suara Golkar ada di wilayah dapil tujuh dan empat, dan paling tinggi ada di dapil tujuh yang meliputi Kecamatan Dau, Karangploso, Kesambon, Pujon, Ngantang dan Wagir. Di wilayah ini Partai Golkar mendapatkan suara sebesar 45.685 pemilih. Daerah ini merupakan daerah yang secara ekonomi maju akibat kebijakan orde Baru yang mendorong untuk pengembangan budi daya sapi perah dengan dibentuknya koperasi susu yang sangat membantu perekonomian warga di daerah tersebut. Sementara dapil empat yang meliputi Kecamatan Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo dan Turen perolehan suara Partai Golkar sebesar 37.562 pemilih.

Sementara partai demokrat yang merupakan pendatang baru, justru mengalahkan partai-partai lama yang lulus *electoral threshold* seperti PPP dan PAN. Partai Demokrat memperoleh total suara dalam pemilu 2004 di Kabupaten Malang sebesar 7,8%. Untuk dapil tertentu seperti dapil dua yang terdiri dari wilayah Kecamatan Lawang, Pakis dan Singosari demokrat mendapatkan 29.184 suara pemilih. Sementara dapil satu, tiga, empat, enam dan tujuh perolehan suara Partai Demokrat relatif hampir sama yaitu sekitar 14 dan 15 ribuan. Paling rendah Partai Demokrat memperoleh suara di wilayah dapil lima yaitu wilayah Kecamatan Bantur, Donomulyo, Gedangan, Pagak dan Sumbermanjing Wetan. Perolehan suara Partai Demokrat di wilayah ini hanya sekitar 6.246 suara pemilih.

Partai Islam atau yang punya basis pemilih kalangan Islam, di wilayah Kabupaten Malang, selain PKB, hanya PPP yang cukup mendapatkan apresiasi dari pemilihnya. Partai ini mendapatkan suara sekitar 59.748 suara pemilih atau sekitar 4,5% dari total suara sah pemilu 2004 di Kabupaten Malang. Perolehan suara ini mengalahkan dua partai Islam lainnya seperti PKS dan PAN. Bahkan di Kabupaten Malang karena suara PAN sangat kecil, partai ini tidak mendapat wakil satu pun yang duduk di DPRD. Bahkan PAN harus tertinggal dari PKS dalam perolehan suara, padahal dalam pemilu 1999 suara PAN jauh melebihi suara PKS (yang masih bernama Partai Keadilan) yaitu 38.891 (PAN) dan 5.261 (PK). Dengan demikian bisa diasumsikan bahwa banyak pemilih PAN pada pemilu 1999 yang berpindah ke PKS pada pemilu 2004. Perpindahan pilihan politik dari PAN ke PKS sangat cair, hal ini dikarenakan basis massa di kedua partai ini sama, yaitu masa pemilih Islam Modernis. Walaupun demikian, kedua partai ini dalam AD/ART-nya punya asas yang berbeda, PKS mencantumkan asas Islam dan PAN asas Pancasila. Perbedaan ini juga yang menyebabkan sebagian kalangan pemilih Islam dari PAN, khususnya yang fundamentalis, menyeberang ke PKS.

Secara lengkap hasil perolehan suara di masing-masing daerah pemilihan di Kabupaten Malang bisa dilihat dalam tabel 7.

Tabel 7. Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 Kabupaten Malang Pada Masing-Masing Dapil

| NO | NAMA PARTAI POLITIK | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK | | | |
|----|---------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|
| | | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PNI Marhaneisme | 683 | 1,463 | 891 | 2,137 |
| 2 | Partai Buruh Sosial Demokrat | 485 | 910 | 651 | 835 |
| 3 | Partai Bulan Bintang | 1,228 | 2,93 | 3,297 | 1,266 |
| 4 | Partai Merdeka | 500 | 1,285 | 314 | 508 |
| 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 13,384 | 7,757 | 4,977 | 11,695 |
| 6 | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 833 | 366 | 1,771 | 788 |
| 7 | Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 188 | 455 | 328 | 296 |
| 8 | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 929 | 1,683 | 874 | 1,521 |
| 9 | Partai Demokrat | 15,592 | 29,184 | 10,138 | 13,011 |
| 10 | Partai Keadilan & Persatuan Indonesia | 978 | 756 | 717 | 500 |
| 11 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 946 | 1,174 | 1,043 | 1,837 |
| 12 | Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 881 | 1,081 | 574 | 524 |
| 13 | Partai Amanat Nasional | 6,087 | 5,706 | 3,497 | 4,905 |
| 14 | Partai Karya Peduli Bangsa | 3,899 | 4,114 | 2,552 | 2,909 |
| 15 | Partai Kebangkitan Bangsa | 72.480 | 56,769 | 55,995 | 41.010 |
| 16 | Partai Keadilan Sejahtera | 8,183 | 9,109 | 6,311 | 4.298 |
| 17 | Partai Bintang Reformasi | 3,849 | 1,411 | 881 | 1.108 |
| 18 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 48,83 | 40,267 | 49,835 | 81.364 |
| 19 | Partai Damai Sejahtera | 1,286 | 2,859 | 554 | 2.597 |
| 20 | Partai Golongan Karya | 18,247 | 31,807 | 31,454 | 37.562 |
| 21 | Partai Patriot Pancasila | 1,254 | 1,147 | 2,01 | 176 |
| 22 | Partai Serikat Indonesia | 452 | 722 | 37 | 342 |
| 23 | Partai Persatuan Daerah | 0 | 451 | 348 | 231 |
| 24 | Partai Pelopor | 615 | 594 | 192 | 1.207 |

| NO | NAMA PARTAI POLITIK | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK | | | | |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|-----------|------|
| | | DP5 | DP6 | DP7 | JUMLAH | |
| | | | | | SUARA SAH | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PNI Marhaneisme | 2.042 | 2.083 | 850 | 10.149 | 0,8 |
| 2 | Partai Buruh Sosial Demokrat | 1.247 | 1.171 | 770 | 6.089 | 0,5 |
| 3 | Partai Bulan Bintang | 1.031 | 1.808 | 1.586 | 12.309 | 0,9 |
| 4 | Partai Merdeka | 255 | 259 | 3.505 | 6.626 | 0,5 |
| 5 | Partai Persatuan Pembangunan | 6.246 | 3.189 | 12.500 | 59.748 | 4,5 |
| 6 | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 421 | 1.154 | 590 | 5.923 | 0,4 |
| 7 | Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 222 | 46 | 232 | 1.767 | 0,1 |
| 8 | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 2.896 | 1.312 | 1.744 | 10.959 | 0,8 |
| 9 | Partai Demokrat | 6.165 | 14.814 | 14.815 | 103.719 | 7,8 |
| 10 | Partai Keadilan & Persatuan Indonesia | 222 | 365 | 918 | 4.456 | 0,3 |
| 11 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 1.185 | 2.518 | 1.596 | 10.299 | 0,8 |
| 12 | Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 459 | 557 | 724 | 4.800 | 0,4 |
| 13 | Partai Amanat Nasional | 2.782 | 4.165 | 6.993 | 34.135 | 2,6 |
| 14 | Partai Karya Peduli Bangsa | 3.048 | 2.619 | 7.718 | 26.857 | 2,0 |
| 15 | Partai Kebangkitan Bangsa | 53.098 | 36.182 | 31.225 | 346.719 | 26,0 |
| 16 | Partai Keadilan Sejahtera | 3.076 | 4.422 | 6.345 | 41.744 | 3,1 |
| 17 | Partai Bintang Reformasi | 1.415 | 917 | 833 | 10.414 | 0,8 |
| 18 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 56.466 | 69.226 | 56.357 | 382.345 | 28,6 |
| 19 | Partai Damai Sejahtera | 2.743 | 2.147 | 1.812 | 13.996 | 1,0 |
| 20 | Partai Golongan Karya | 29.163 | 29.754 | 45.685 | 223.672 | 16,8 |
| 21 | Partai Patriot Pancasila | 189 | 2.487 | 2.103 | 9.366 | 0,7 |
| 22 | Partai Serikat Indonesia | 369 | 793 | 378 | 3.093 | 0,2 |
| 23 | Partai Persatuan Daerah | 250 | 234 | 799 | 2.343 | 0,2 |
| 24 | Partai Pelopor | 203 | 326 | 610 | 3.747 | 0,3 |
| JUMLAH | | 175.191 | 182.528 | 200.688 | 1.335.257 | 100 |

Sumber: KPUD Kabupaten Malang periode 2004.

Jumlah hasil suara yang diperoleh masing-masing partai politik, setelah dibagi BP (bilangan pembagi), maka masing-masing partai memperoleh kursi sebagaimana terlihat dalam tabel 8.

Tabel 8. Hasil Perolehan Kursi Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Malang Tahun 2004

| NO | NAMA PARTAI | JUMLAH |
|--------|--|----------|
| 1. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 15 kursi |
| 2. | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 13 kursi |
| 3. | Partai Golongan Karya (Golkar) | 7 kursi |
| 4. | Partai Demokrat | 6 kursi |
| 5. | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 3 kursi |
| 6. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 1 kursi |
| JUMLAH | | 45 kursi |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

b. Partisipasi Pemilih

Dari jumlah penduduk Kabupaten Malang sebanyak 2.338.689 jiwa, jumlah orang yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 lalu sebanyak 1.693.181 jiwa. Jumlah pemilih tersebut tersebar dalam 33 kecamatan. Dilihat dari segi jumlah penduduk, Kecamatan Singosari merupakan wilayah yang paling padat penduduknya dengan jumlah pemilih sebesar 10.330 disusul Kecamatan Dampit 84.387 pemilih dan Pakisaji 81.008 pemilih. Adapun jumlah pemilih yang paling kecil ada di Kecamatan Pagak dengan 33.153 pemilih, Kecamatan Kromengan dengan 28.860 pemilih, dan Kesambon dengan 21.193 pemilih. Secara lengkap jumlah pemilih pada masing-masing kecamatan bisa dilihat dalam tabel 9:

Tabel 9. Daftar Jumlah Pemilih Pemilu 2004 Di Tiap Kecamatan

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Pemilih |
|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | Kesambon | 21.193 |
| 2 | Pujon | 43.341 |
| 3 | Ngantang | 39.659 |
| 4 | Kepanjen | 69.473 |
| 5 | Sumberpucung | 38.657 |
| 6 | Kromengan | 28.860 |
| 7 | Pakisaji | 53.581 |
| 8 | Wagir | 50.678 |
| 9 | Ngajum | 34.249 |
| 10 | Wonosari | 30.278 |
| 11 | Pagak | 33.153 |
| 12 | Donomulyo | 49.054 |
| 13 | Bantur | 50.130 |
| 14 | Kalipare | 49.944 |
| 15 | Gedangan | 41.850 |
| 16 | Turen | 79.559 |
| 17 | Dampit | 84.387 |
| 18 | Sembermanjing Wetan | 64.129 |
| 19 | Ampelgading | 39.732 |
| 20 | Tirtoyodo | 42.249 |
| 21 | Bululawang | 47.520 |
| 22 | Gondanglegi | 55.263 |
| 23 | Tajinan | 35.089 |
| 24 | Wajak | 57.142 |
| 25 | Pagelaran | 45.808 |
| 26 | Tumpang | 52.538 |
| 27 | Jabung | 48.100 |
| 28 | Poncokusumo | 64.769 |
| 29 | Pakisaji | 81.008 |
| 30 | Singosari | 105.330 |
| 31 | Lawang | 68.744 |
| 32 | Karangploso | 46.712 |
| 33 | Dau | 41.102 |
| Jumlah | | 1.693.181 |

Sumber: KPU D Kabupaten Malang 2004.

Dari hasil data yang diperoleh dari KPUD, angka non partisipan Kabupaten Malang lebih rendah dari Kota Malang. Jumlah angka non partisipan 334.189 pemilih yang diperoleh dari Jumlah pemilih dikurangi dengan jumlah pemilih yang mempergunakan hak suara yaitu 1.693.181 dikurangi 1.358.992, maka jumlah non partisipan yang ada di Kabupaten Malang kalau diprosentasekan yaitu sekitar 27,34 persen. Dari seluruh Kecamatan yang ada, angka nonpartisipan tertinggi ada di Kecamatan Donomulyo yaitu 28,70 %. Sementara yang terendah adalah 11,93 yang ada di Kecamatan Wagir.

Rendahnya angka nonpartisan yang ada di Kabupaten Malang, lebih diakibatkan oleh pemahaman sebagian besar pemilih terhadap Pemilu. Umumnya mereka menganggap pemilu sebagai sebuah kewajiban, sehingga harus datang ke TPS. Di samping itu, dorongan mereka untuk mendatangi TPS, karena adanya faktor sosial, terutama himbauan kyai yang kadang mendukung partai tertentu.

Tabel 10. Jumlah Nonpartisipan Pada Pemilu 2004 Di Kabupaten Malang

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Pemilih | Partisipan | Non Partisipan | % |
|----|----------------|----------------|------------|----------------|-------|
| 1 | Kesambon | 21.193 | 17.232 | 3.961 | 18,69 |
| 2 | Pujon | 43.341 | 36.069 | 7.362 | 16,99 |
| 3 | Ngantang | 39.659 | 34.039 | 5.620 | 14,17 |
| 4 | Kepanjen | 69.473 | 57.001 | 12.472 | 17,95 |
| 5 | Sumberpucung | 38.657 | 31.276 | 7.381 | 19,09 |
| 6 | Kromengan | 28.860 | 23.094 | 5.766 | 19,98 |
| 7 | Pakisaji | 53.581 | 45.986 | 7.597 | 14,18 |
| 8 | Wagir | 50.678 | 44.639 | 6.048 | 11,93 |
| 9 | Ngajum | 34.249 | 26.579 | 7.670 | 22,39 |
| 10 | Wonosari | 30.278 | 24.665 | 5.613 | 18,54 |
| 11 | Pagak | 33.153 | 25.374 | 7.779 | 23,46 |
| 12 | Donomulyo | 49.054 | 34.974 | 14.080 | 28,70 |
| 13 | Bantur | 50.130 | 37.360 | 12.770 | 24,47 |
| 14 | Kalipare | 49.944 | 36.528 | 13.416 | 26,86 |
| 15 | Gedangan | 41.850 | 29.396 | 12.454 | 29,76 |
| 16 | Turen | 79.559 | 62.032 | 17.527 | 22,03 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 17 | Dampit | 84.387 | 65.045 | 19.342 | 22,92 |
| 18 | Sembermanjing Wetan | 64.129 | 51.628 | 12.501 | 19,49 |
| 19 | Ampelgading | 39.732 | 31.532 | 8.200 | 20,64 |
| 20 | Tirtoyodo | 42.249 | 33.436 | 8.813 | 20,86 |
| 21 | Bululawang | 47.520 | 38.901 | 8.619 | 18,14 |
| 22 | Gondanglegi | 55.263 | 42.412 | 12.851 | 23,25 |
| 23 | Tajinan | 35.089 | 29.808 | 5.281 | 15,05 |
| 24 | Wajak | 57.142 | 47.138 | 10.004 | 17,51 |
| 25 | Pagelaran | 45.808 | 36.260 | 9.548 | 20,84 |
| 26 | Tumpang | 52.538 | 44.596 | 7.942 | 15,12 |
| 27 | Jabung | 48.100 | 37.983 | 10.117 | 21,03 |
| 28 | Poncokusumo | 64.769 | 53.682 | 11.087 | 17,12 |
| 29 | Pakisaji | 81.008 | 62.982 | 18.026 | 22,25 |
| 30 | Singosari | 105.330 | 87.127 | 18.203 | 17,28 |
| 31 | Lawang | 68.744 | 55.061 | 13.683 | 19,89 |
| 32 | Karangploso | 46.712 | 40.550 | 6.162 | 13,19 |
| 33 | Dau | 41.102 | 34.117 | 6.985 | 16,99 |
| Jumlah | | 1.693.181 | 1.358.992 | 334.189 | 19,74 |

Sumber: KPUD Kabupaten Malang 2004.

Dari hasil suara pemilih pemilu 2004 yang menggunakan hak pilih di Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa PDIP mendapat suara mayoritas dengan jumlah suara 357.008 atau sekitar 28,97%, yang diikuti oleh PKB dengan perolehan suara 316,665 atau sekitar 25,72%. Secara lengkap perolehan suara partai peserta pemilu di Kabupaten Malang dapat dilihat dalam tabel 11.

Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 1999 dan 2004 di Kabupaten Malang

| No. Urut | Nama Partai | Perolehan Suara | | Prosentase | |
|----------|--------------------------|-----------------|---------|------------|--------|
| | | 1999 | 2004 | 1999 | 2004 |
| 1 | PNI Marhaenisme | | 9.215 | | 0,75% |
| 2 | PBSD | | 5.078 | | 0,41% |
| 3 | PBB** | 9.875 | 11.482 | 0,74% | 0,93% |
| 4 | Partai Merdeka | | 6.119 | | 0,50% |
| 5 | PPP** | 45.939 | 55.597 | 3,46% | 4,51% |
| 6 | PPDK | | 5.700 | | 0,46% |
| 7 | PPIB | | 1.598 | | 0,13% |
| 8 | PNBK | | 9.959 | | 0,81% |
| 9 | Partai Demokrat | | 95.670 | | 7,76% |
| 10 | PKDPI | | 3.90 | | 0,32% |
| 11 | PPDI | | 9.563 | | 0,78% |
| 12 | PPNU | | 4.458 | | 0,36% |
| 13 | PAN** | 38.891 | 32.099 | 2,93% | 2,61% |
| 14 | PKPB | | 24.142 | | 1,96% |
| 15 | PKB** | 392.472 | 316.665 | 29,57% | 25,72% |
| 16 | PKS | | 37.534 | | 3,05% |
| 17 | PBR | | 9.730 | | 0,97% |
| 18 | PDI PERJUANGAN** | 510.450 | 357.008 | 38,47% | 28,97% |
| 19 | PDS | | 13.261 | | 1,08% |
| 20 | GOLKAR** | 243.110 | 205.505 | 18,32% | 16,68% |
| 21 | Partai Patriot Pancasila | | 9.195 | | 0,75% |
| 22 | PSI | | 2.868 | | 0,23% |
| 23 | PPD | | 2.324 | | 0,19% |
| 24 | Partai Pelopor | | 3.487 | | 0,28% |

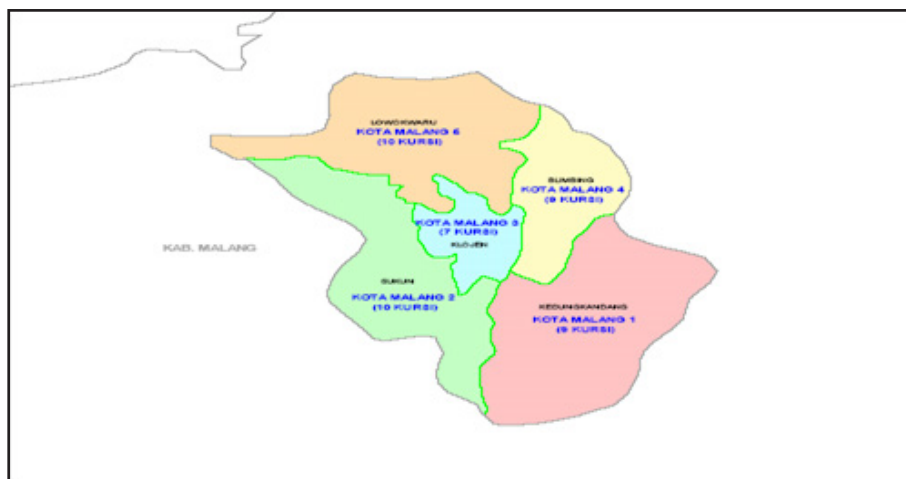
Keterangan: ** (Lulus *Electoral Threshold* 3% pada pemilu 1999)

Sumber: KPU Kabupaten Malang yang telah diolah penulis.

2. Kota Malang

a. Perolehan Suara Partai

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Kota Malang, delapan besar peringkat perolehan suara tertinggi pada pemilu 2004 di Kota Malang secara berturut-turut PDIP, PKB, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PDS, dan PBB. Dilihat dari sisi geopolitik, yang merupakan basis pemilih dari PDIP dengan perolehan suara di atas 20 ribu terletak di Kecamatan Sukun dengan total suara sebesar 32.072 pemilih, disusul Kecamatan Blimbing dengan suara 22.983 pemilih, dan Kecamatan Lowokwaru dengan suara 21.5633 pemilih. Bagi PKB yang menempati peringkat kedua, basis massanya ada di sekitar Kecamatan Kedungkandang dengan suara sebesar 21.268 pemilih, disusul oleh Kecamatan Sukun dan Kecamatan Blimbing yang memperoleh suara masing-masing sebesar suara 15.178 pemilih dan 14.14.527 pemilih.



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Timur

Gambar 5. Daerah Pemilihan Kota Malang

Sementara wilayah yang merupakan basis pemilih Partai Golkar berada di Kecamatan Sukun dengan peroleh suara sebesar 12.597 pemilih disusul oleh Kecamatan Kedungkandang sebesar 10.722 suara pemilih dan Kecamatan Lowokwaru dengan peroleh suara sebesar 9.442 pemilih. Untuk peringkat keempat peroleh suara terbesar partai politik di Kota Malang ditempati oleh Partai Demokrat. Partai ini merupakan partai pendatang baru yang mengubah peta politik secara nasional. Para

pendukung Partai Demokrat berada di sekitar Kecamatan Blimbing dengan total perolehan suara sebesar 16.843 pemilih, disusul Kecamatan Lowokwaru dengan total suara sebesar 13.194 pemilih dan Kecamatan Sukun sebesar 12.269 pemilih.

Tabel 12. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2004 (KPU Kota Malang)

| No | Nama Partai Politik | Jumlah Perolehan Suara | | | | | | |
|----|---|------------------------|--------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| | | Kedungkandang | Sukun | Klojen | Blimbing | Lowokwaru | Kota Malang | Prosentase |
| 1 | PARTAI NASIONAL MARHAENISME | 303 | 403 | 183 | 288 | 211 | 1.388 | 0.33% |
| 2 | PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT | 506 | 297 | 159 | 365 | 257 | 1.584 | 0.37% |
| 3 | PARTAI BULAN BINTANG | 1.191 | 1.062 | 725 | 991 | 1.444 | 5.413 | 1.28% |
| 4 | PARTAI MERDEKA | 406 | 418 | 207 | 379 | 172 | 1.582 | 0.37% |
| 5 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 2.994 | 1.789 | 1.29 | 1.706 | 2.13 | 9.909 | 2.33% |
| 6 | PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN | 148 | 249 | 131 | 416 | 210 | 1.154 | 0.27% |
| 7 | PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU | 108 | 124 | 207 | 247 | 328 | 1.014 | 0.24% |
| 8 | PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN | 411 | 570 | 187 | 401 | 204 | 1.773 | 0.42% |
| 9 | PARTAI DEMOKRAT | 10.463 | 12.269 | 8.988 | 16.843 | 13.194 | 61.757 | 14.55% |
| 10 | PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia | 250 | 246 | 290 | 600 | 480 | 1.866 | 0.44% |
| 11 | PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA | 812 | 458 | 475 | 506 | 461 | 2,712 | 0.64% |
| 12 | PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH IND. | | | | | | 1,948 | 0.46% |
| 13 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5,437 | 4,702 | 5,130 | 5,932 | 7156 | 28,357 | 6.68% |
| 14 | PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | 1,125 | 620 | 440 | 714 | 1,015 | 3,914 | 0.92% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 15 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 21,268 | 15,178 | 12,397 | 14,527 | 11,105 | 74,475 | 17.54% |
| 16 | PARTAI Keadilan Sejahtera | 4,656 | 5,050 | 4,927 | 5,549 | 10,300 | 30,482 | 7.18% |
| 17 | PARTAI BINTANG REFORMASI | 685 | 384 | 313 | 485 | 432 | 2,299 | 0.54% |
| 18 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 19,215 | 32,072 | 14,339 | 22,983 | 21,563 | 110,172 | 25.95% |
| 19 | PARTAI DAMAI Sejahtera | 2,417 | 4,345 | 3,615 | 4,104 | 3,241 | 17,722 | 4.17% |
| 20 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 10,722 | 12,597 | 7,312 | 12,595 | 9,442 | 52,668 | 12.41% |
| 21 | PARTAI PATRIOT PANCASILA | 687 | 598 | 550 | 937 | 1,496 | 4,268 | 1.01% |
| 22 | PARTAI SARIKAT INDONESIA | 369 | 384 | 85 | 179 | 243 | 1,260 | 0.30% |
| 23 | PARTAI PERSATUAN DAERAH | 611 | 215 | 123 | 293 | 117 | 1,359 | 0.32% |
| 24 | PARTAI PELOPOR | 2,511 | 717 | 1,327 | 453 | 459 | 5,467 | 1.29% |
| Jumlah Sah | | 87,649 | 95,062 | 63,733 | 91,750 | 86,349 | 424,543 | 100% |
| Jumlah Kursi DPRD Kota Malang | | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 45 | |
| BPP | | 9,739 | 9,506 | 9,105 | 10,194 | 8,635 | | |

Sumber: KPUD Kota Malang 2004

Peringkat ke lima dan keenam yaitu PKS dan PAN dukungan pemilih pada kedua partai ini cukup berimbang di setiap Kecamatan, kecuali dukungan pemilih yang ada di Kecamatan Lowokwaru dimana pemilih pendukung PKS lebih besar dibanding dengan PAN. Dari hasil peroleh suara KPUD Kota Malang menunjukkan bahwa perolehan suara untuk PKS sebesar 10.300 pemilih, sementara untuk PAN sebesar 7.156 suara pemilih. Dengan demikian ada selisih sekitar 3.144 suara pemilih.

Perolehan suara PKS dan PAN untuk wilayah-wilayah lainnya, baik itu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, maupun Blimbing jumlah perolehan suara kedua partai itu relatif seimbang, walaupun ada selisih namun tidak melebihi jumlah ribuan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua partai ini mempunyai pendukung yang relatif seimbang.

b. Partisipasi Pemilih

Dari data yang ada diketahui bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2004 di empat kecamatan bisa diketahui sebagai berikut: Kecamatan Lowokwaru 86.349 dari total 141.727 pemilih (60,93%), Sukun 95.062 dari total 127.080 pemilih (74,80%), Kedungkandang 87.541 dari total 117.608 pemilih (74,43%), Blimbing 91.750 dari total 123.488 pemilih (74,29%) dan Klojen 63.733 dari total 93.129 pemilih (68,44%). Secara keseluruhan, rata-rata partisipasi dalam pemilu di Kota Malang adalah 424.435 dari total pemilih 603.029 pemilih (70,38%).

Tabel 13. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Malang Dalam Pemilu Legislatif 2004 Di Tiap Kecamatan

| No | Kecamatan | Jumlah Pemilih | Jumlah Pemilih yang Memilih | Tingkat Partisipasi (%) |
|--------|---------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Lowokwaru | 141.724 | 86.349 | 60,93 |
| 2 | Sukun | 127.080 | 95.062 | 74,80 |
| 3 | Kedungkandang | 117.608 | 87.541 | 74,43 |
| 4 | Blimbing | 123.488 | 91.750 | 74,29 |
| 5 | Klojen | 93.129 | 63.733 | 68,44 |
| Jumlah | | 603.029 | 424.435 | 70,38 |

Sumber : Data skunder KPUD Kota Malang yang telah diolah

Keterangan: Data akumulasi perolehan suara untuk DPRD Kota Malang

Sebaliknya, jika diketahui tentang data tingkat partisipasi dalam voting masyarakat kota pada pemilu legislatif tahun 2004, maka data tentang non-voting juga bisa diketahui, berikut ini tingkat pemilih golput di Kota Malang : Kecamatan Kedungkandang sebesar 25,57%, Kecamatan Sukun 25,20%, Kecamatan Blimbing 25,71%, Kecamatan Klojen 31,56% dan Kecamatan Lowokwaru 39,07%. Secara akumulatif non-voting di Kota Malang sebesar 29,62%.

Surat suara yang rusak atau tidak dicoblos saat pemilu di Kota Malang sangat besar. Wilayah yang mempunyai pemilih dengan tingkat pendidikan yang cukup besar ini menunjukkan punya potensi non partisipan dalam pemilu cukup besar. Salah satu alasan mereka tidak mau ikut dalam aktivitas pemilu adalah ketidakpercayaan mereka kepada partai. Hal ini bisa dipahami karena mereka relatif lebih banyak menerima

informasi dan sangat sadar akan pilihan yang mereka lakukan. Dengan kinerja partai politik yang tidak memuaskan termasuk para anggota dewan telah melegitimasi mereka untuk tidak memilih. Patut diketahui, di Kota Malang banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dalam pandangan pemilih kurang populer seperti perubahan RUTRW Kota Malang yang dianggap hanya untuk memenuhi kepentingan pemilik modal sehingga merusak dan menghabiskan lahan yang diperuntukkan konservasi hutan kota. Salah satu kebijakan yang cukup mendapat atensi masyarakat adalah dibangunnya MATOS (*Malang Town Square*) yang menurut para pemerhati lingkungan lahan yang dipakai merupakan daerah resapan air.

Tabel 14. Tingkat Pemilih Non-Voting Masyarakat Kota Malang dalam Pemilu Legislatif 2004

| No | Kecamatan | Jumlah Pemilih | Non-Voting (Angka) | Non-Voting (%) |
|--------|---------------|----------------|--------------------|----------------|
| 1 | Lowokwaru | 141.724 | 55.375 | 39,07 |
| 2 | Sukun | 127.080 | 32.018 | 25,20 |
| 3 | Kedungkandang | 117.608 | 30.067 | 25,57 |
| 4 | Blimbing | 123.488 | 31.738 | 25,71 |
| 5 | Klojen | 93.129 | 29.396 | 31,56 |
| Jumlah | | 603.029 | 178.594 | 29,62 |

Sumber : Data skunder KPUD kota Malang yang diolah

Keterangan: Data akumulasi perolehan suara untuk DPRD Kota Malang

Berbagai kebijakan kontroversial ini terjadi pada masa sebelum pemilu 2004. Oleh karena itu pada pemilu 2004, Kota Malang menunjukkan adanya trend naiknya angka nonpartisipan pemilih dalam pemilu. Dari data yang ada di KPU D Kota Malang, tercatat 29,62 persen surat suara yang rusak termasuk golput di Kota Malang. Data itu didapat dari jumlah pemilih di Kota Malang dikurangi jumlah pencoblos partai yaitu 603.029 dikurangi 424.435, maka jumlah orang yang golput adalah 178.594 pemilih. Dari data statistik, 5 daerah pemilihan, mulai dari DP 1 sampai DP 5 sama-sama menyumbang secara rata jumlah pemilih yang surat suaranya tidak sah atau pun golput. DP Kedungkandang menjadi basis pemilih Tradisional menempati urutan terendah dalam hal golput yaitu sebanyak 30.067 orang. Sementara pemilih yang golput paling tinggi berada di DP Lowok Waru yang berjumlah 55.375 orang, daerah pemilihan ini banyak orang-orang terpelajar dan paham politik.

Tingginya angka golput pada pemilu 2004 yang mencapai 29,62 persen atau 178.594 dari total suara pemilih, di Kota Malang itu disebabkan pemilih tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada sebagian masyarakat yang merasa tidak mempunyai manfaat secara langsung yang mereka rasakan, mereka lebih memilih tinggal di rumah dari pada pergi ke TPS untuk mencoblos. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kepercayaan masyarakat pada partai politik. Sebagaimana juga hasil kajian Asfar (2004), mengenai non-voting menunjukkan bahwa di negara kita perilaku tidak memilih ini merupakan sikap protes terhadap pemerintah, partai yang sedang berkuasa atau partai politik dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Perilaku tidak memilih di Malang raya juga menunjukkan pada dua bentuk, antara lain: *Pertama*, orang tidak menghadiri tempat memilih; *kedua*, pemilih menghadiri tempat suara tapi tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, seperti merusak kartu suara. Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap kiprah partai politik menjadi kecenderungan yang mengarah pada delegitimasi parpol. Tidak hanya pemerintah, publik pun menyetujui dikurangnya peran parpol dalam pemilu, meskipun disertai sejumlah kekhawatiran.

Semakin berkurangnya kepercayaan publik pada partai menjadi titik balik dari eforia demokrasi tahun 1998. Terbukanya keran kebebasan politik setelah rezim Soeharto berganti, reformasi membuka kebebasan politik rakyat untuk menyatakan pendapat, antara lain dengan mendirikan parpol. Pemilu 1999 dan 2004 yang diikuti banyak partai, 48 dan 24 parpol, menunjukkan kebebasan politik itu sudah diraih rakyat.

3. Kota Batu

Kota Batu yang merupakan Daerah Baru, hasil pecahan dari Kabupaten Malang, merupakan wilayah yang relatif sedikit jumlah penduduknya, oleh karenanya jumlah perwakilan yang ada di DPRD hanya berjumlah 25 orang wakil. Kota Batu terdiri dari tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji. Kecamatan Batu yang sekaligus sebagai Daerah Pemilihan (dapil) merupakan dapil yang paling banyak wakilnya, yaitu 12 kursi, sementara Bumiaji dan Junrejo berjumlah 7 dan 6 kursi. Melihat kenyataan geopolitik Kota Batu yang tidak luas, walaupun ada konsentrasi pemilih di wilayah

Kecamatan Batu, namun pertarungan dalam memperebutkan pemilih sangat ketat hampir di setiap daerah pemilihan, bahkan untuk tingkat desa sekalipun. Tidak ada satu desa pun, yang ketika musim kampanye tiba, lepas dari hiruk pikuknya kegiatan kampanye, termasuk bendera partai yang menghiasi hampir setiap ruas jalan di desa-desa.

a. Perolehan Suara Partai

Peringkat tertinggi pertama yang menjadi pilihan politik pemilih di Kota Batu ditempati oleh partai Golkar, diikuti PDIP, PKB, dan Partai Demokrat. Perolehan suara masing-masing partai yaitu sebesar 19,67% untuk Partai Golkar, diikuti oleh PDIP 18,97%, Partai Demokrat 11,74%, PKB 13,19%, PKS, 5,95%, PAN 5,91%.



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Timur 2004

Gambar 6. Daerah Pemilihan Kota Batu

Dari sisi geopolitik, Kecamatan Batu menjadi basis masa pemilih terbesar PDIP dengan perolehan suara sebesar 11.043 suara atau sekitar 22,75% dari total suara sah di Kecamatan Batu, perolehan suara terbesar kedua ditempati Partai Golkar dengan perolehan suara 9.450 suara atau sekitar 19,47%, disusul PKB dengan jumlah suara 7.105 atau sekitar 14,64% dan Partai Demokrat 5.859 atau sekitar 12,05%. Untuk Kecamatan Junrejo, Partai Golkar dan PDIP punya dukungan sama kuat yaitu dalam kisaran 19 ribuan atau sekitar 19%nan. Sementara PKB dan PSI mendapat suara hampir sama juga yaitu 2.839 (11,14%), 2.583 (10,14%).

Tabel 15. Data Perolehan Suara Pemilu 2004 DPRD Kota Batu

| No | Nama Parpol | Kec. Batu | | Kec. Junrejo | | Kec. Bumiaji | |
|----|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Jumlah Suara | % | Jumlah Suara | % | Jumlah Suara | % |
| 1 | PNI MARHAENISME | 592 | 1,22 | 424 | 1,66 | 1690 | 5,08 |
| 2 | PBSD | 543 | 1,12 | 44 | 0,17 | 315 | 0,95 |
| 3 | PBB | 638 | 1,31 | 240 | 0,94 | 318 | 0,96 |
| 4 | P. MERDEKA | 233 | 0,48 | 190 | 0,75 | 277 | 0,82 |
| 5 | PPP | 1.501 | 3,09 | 632 | 2,48 | 551 | 1,66 |
| 6 | PPDK | 152 | 0,31 | 106 | 0,42 | 237 | 0,71 |
| 7 | PPIB | 81 | 0,17 | 124 | 0,49 | 23 | 0,07 |
| 8 | PNBK | 464 | 0,98 | 78 | 0,31 | 2394 | 7,20 |
| 9 | P. DEMOKRAT | 5.849 | 12,05 | 2.831 | 11,11 | 4.517 | 13,59 |
| 10 | PKPI | 352 | 0,73 | 106 | 0,42 | 81 | 0,24 |
| 11 | PPDI | 124 | 0,26 | 836 | 3,28 | 113 | 0,34 |
| 12 | PPNUI | 264 | 0,54 | - | - | 364 | 1,10 |
| 13 | PAN | 3.388 | 6,98 | 1.360 | 5,34 | 1.638 | 4,93 |
| 14 | PKPB | 1.350 | 2,78 | 1.351 | 5,30 | 1314 | 3,95 |
| 15 | PKB | 7.105 | 14,64 | 2.839 | 11,14 | 4.204 | 12,65 |
| 16 | PKS | 1.864 | 3,84 | 778 | 3,05 | 669 | 2,01 |
| 17 | PBR | 415 | 0,86 | 175 | 0,69 | 331 | 1,00 |
| 18 | PDI-P | 11.043 | 22,75 | 4.975 | 19,53 | 5.299 | 15,94 |
| 19 | PDS | 1.843 | 3,80 | 529 | 2,08 | 368 | 1,11 |
| 20 | P. GOLKAR | 9.450 | 19,47 | 4.920 | 19,31 | 7.740 | 23,29 |
| 21 | PP PANCASILA | 615 | 1,27 | 71 | 0,28 | 201 | 0,60 |
| 22 | PSI | 471 | 0,97 | 2.583 | 10,14 | 345 | 1,04 |
| 23 | PPD | 93 | 0,19 | - | - | 130 | 0,39 |
| 24 | P. PELOPOR | 108 | 0,22 | 283 | 1,11 | 117 | 0,35 |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu tahun 2004

Wilayah Bumiaji menjadi daerah yang paling terpragmentasi dalam hal pilihan politik pemilih. Wilayah ini tidak ada satu pun partai yang menang telak, dari keempat besar perolehan suara tertinggi, mereka mendapatkan suara yang tidak lebih dari 8 ribuan. Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat dan PKB memperoleh suara masing-masing 7.740 (23,29%), 5.299 (15,94%), 4.517 (13,59%), 4.204 (12,65%).

Dari data-data yang terdapat di atas bisa disimpulkan empat besar partai pemenang pemilu, yakni :

- 1). Partai Golkar : 22.100 suara, dengan perincian Kecamatan Batu: 9.450, Kecamatan Junrejo: 4.920 dan Kecamatan Bumi Aji: 7.740.
- 2). Partai PDI-P : 21.317 suara, dengan perincian Kecamatan Batu: 11.043, Kecamatan Junrejo: 4.975 dan Kecamatan Bumi Aji: 5.299
- 3). Partai PKB : 14.148 suara, dengan perincian Kecamatan Batu: 7.105, Kecamatan Junrejo 2.839 dan Kecamatan Bumi Aji: 4.204
- 4). Partai Demokrat : 13.197 suara, dengan perincian Kecamatan Batu: 5.849, Kecamatan Junrejo: 2.831 dan Kecamatan Batu: 4.51

Walaupun demikian, dalam konteks politik lokal kondisi sosiologi politik masing-masing kecamatan yang terdapat di Kota Batu tidak bisa disamakan, hal ini disebabkan secara geografis terdapat sifat masyarakat yang berbeda secara menyolok antara Kecamatan Junrejo, Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumi Aji. Untuk wilayah yang lebih bisa dikatakan bersifat kota (*urban*), yakni Kecamatan Batu, memiliki ciri yang menonjol, seperti : bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki urusan politik secara langsung, mereka kebanyakan mengidentifikasikan dirinya sebagai pekerja.

Sebaliknya, yang memiliki tingkat kepentingan politik tinggi, mereka akan menempatkan dirinya sebagai kelompok kritis yang bersifat oposisi dengan pemerintah. Terbukti, berkumpulnya tokoh-tokoh kritis Kota Batu, menjadikan Kecamatan Batu sebagai “markas” mereka. Andai pun ada, berkumpulnya pihak-pihak yang kritis tersebut, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari sepak terjang orang lama yang termasuk “frustasi”. Baik frustasi dikarenakan gagal berkompetisi ketika pilkada, artinya, ia dikalahkan oleh walikota terpilih pada waktu pilkada. Atau, frustasi dikarenakan tidak puas dengan “pembagian” kekuasaan.

Ada juga kalangan yang frustasi akibat keuntungan ekonomis yang diperoleh dari elit politik belum memuaskan. Dengan kata lain, sekalipun tidak menutup kemungkinan orang baru muncul, misalnya dari partai politik, tetapi juga bisa dinyatakan bahwa pelaku-pelaku oposisi terhadap pemerintah adalah tidak jauh dari orang itu-itulah saja, dikarenakan secara historis memiliki sebab-sebab yang jelas.

Sementara itu, karakter Kecamatan Bumi Aji dan Kecamatan Junrejo, benar-benar beda berbeda dengan Kecamatan Batu. Kecamatan Bumi Aji

terkenal dengan kekayaan berupa potensi wisata yang dimiliki. Sekalipun sulit dikategorikan sebagai wilayah desa (*rural*) atau kota (*urban*) secara kaku, tetapi dapat dikatakan bahwa letaknya yang berdekatan dengan kantor pemerintah Kota, membuat kecamatan ini lebih terlihat lebih maju dibandingkan dengan Kecamatan Junrejo. Budaya bertani, terutama petani apel dan sayur-sayuran menggambarkan bahwa watak kecamatan ini lebih bersifat agraris.

Kondisi kedua kecamatan tersebut akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi sosiologis Kecamatan Junrejo. Karena secara geografis, Kecamatan Junrejo jauh dari lokasi kantor pemerintah Kota, bukan berarti secara politik justru tidak diperhitungkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Camat Junrejo, bahwa justru Junrejo dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk menggempur pemkot. Misalnya, dengan mempengaruhi warga Junrejo untuk “protes” kepada kepala desa-kepala desa.

Sebagaimana ditulis di muka bahwa membicarakan sosiologi politik Kota Batu, sebenarnya tonggak dinamika politik terjadi tidak bisa dilepaskan dari perubahan status Kota Batu yang sebelumnya berstatus Kota Administratif, yang masih bergabung dengan Kabupaten Malang. Bisa diakui bahwa perjuangan untuk melakukan perubahan status Kota Batu tidak dilakukan secara sendirian. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menggambarkan tentang dinamika politik yang terjadi di Kota Batu bisa digambarkan dari adanya data-data yang membicarakan mengenai hasil pemilu maupun hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana yang telah dilakukan di kota-kota di Indonesia.

Sebagai Daerah, Kota Batu memiliki modal politik yang cukup baik. Hasil perolehan suara pada pemilu 2004 tidak menunjukkan adanya partai politik dominan, sehingga memberikan peluang untuk terjadinya *bargaining power* yang seimbang untuk menciptakan kehidupan politik demokratis. Paling tidak ada empat partai politik yang punya kekuatan seimbang, yaitu Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Demokrat. Keempat partai politik tersebut menjadi pilar kekuatan politik di Kota Batu. Berikut ini data-data tentang partai-partai politik dan daerah-daerah yang dimenangkannya.

Tabel 16. Partai Pemenang Pemilu 2004 di Kecamatan Junrejo

| No | Nama Desa | 3 Partai Pemenang Pemilu | Jumlah Pemilih | Prosentase |
|----|------------|--------------------------|----------------|------------|
| 1. | Tlekung | 1). Partai Golkar | 583 | 27,8% |
| | | 2). PKB | 284 | 13,5% |
| | | 3). PDI-P | 241 | 11,5% |
| 2. | Junrejo | 1). PDI-P | 1.160 | 25% |
| | | 2). Partai Golkar | 927 | 20% |
| | | 3). PKB | 487 | 10,5% |
| 3. | Mojorejo | 1). PDI-P | 726 | 28,4% |
| | | 2). PKB | 380 | 14,8% |
| | | 3). Partai Golkar | 376 | 14,7% |
| 4. | Torongrejo | 1). PDI-P | 1.037 | 30,7% |
| | | 2). Partai Gokar | 664 | 19,6% |
| | | 3). PPDI | 446 | 13,2% |
| 5. | Beji | 1). PDI-P | 1.089 | 25,3% |
| | | 2). Partai Golkar | 913 | 21,2% |
| | | 3). Partai Demokrat | 580 | 13,5% |
| 6. | Pendem | 1). PKB | 1.087 | 20,5% |
| | | 2). Partai Demokrat | 1.083 | 20,4% |
| | | 3). Partai Golkar | 817 | 15,4% |
| 7. | Dadaprejo | 1). Partai Golkar | 541 | 18,6% |
| | | 2). PDI-P | 522 | 18,0% |
| | | 3). Partai Demokrat | 493 | 17,0% |

Sumber: KPUD Kota Batu 2004 yang telah diolah penulis.

Hasil pemilu di Kecamatan Junrejo bisa disimpulkan bahwa partai politik pemenang, mayoritas dipegang oleh PDI-P (4 desa, yakni Junrejo, Mojorejo, Torongrejo dan Beji), partai Golkar (2 desa, yakni Tlekung dan Dadaprejo) sementara satu desa yakni di Pendem dimenangkan oleh PKB. Khusus untuk kasus di Pendem inipun, selisih angka yang didapatkan juga tidak besar, hanya 4 orang.

Tabel 17. Partai Pemenang Pemilu Pada Pemilu 2004 di Kecamatan Batu

| No | Nama Desa | 3 Partai Pemenang Pemilu | Jumlah Pemilih | Prosentase |
|----|--------------|--------------------------|----------------|------------|
| 1. | Oro-Oro Ombo | 1). PDI-P | 1.515 | 33,2% |
| | | 2). Partai Golkar | 1.111 | 24,3% |
| | | 3). Partai Demokrat | 576 | 12,6% |
| 2. | Temas | 1). Partai Golkar | 1.554 | 20,7% |
| | | 2). PDI-P | 1.366 | 18,1% |
| | | 3). PKB | 1.173 | 15,6% |
| 3. | Sisir | 1). PDI-P | 2.201 | 86,3% |
| | | 2). PKB | 2.019 | 79,1% |
| | | 3). Partai Demokrat | 1.999 | 78,3% |
| 4. | Pesanggrahan | 1). Partai Golkar | 1.367 | 40,5% |
| | | 2). PDI-P | 1.256 | 37,2% |
| | | 3). PKB | 1.013 | 30% |
| 5. | Ngaglik | 1). PDI-P | 1.182 | 27,5% |
| | | 2). Partai Golkar | 1.167 | 27,1% |
| | | 3). Partai Demokrat | 1.131 | 26,3% |
| 6. | Songgokerto | 1). PDI-P | 920 | 17,3% |
| | | 2). Partai Golkar | 757 | 14,2% |
| | | 3). Partai Demokrat | 659 | 12,4% |
| 7. | Sumberejo | 1). Partai Golkar | 1.557 | 53,7% |
| | | 2). PDI-P | 1.101 | 37,9% |
| | | 3). Partai Demokrat | 491 | 16,9% |
| 8. | Sidomulyo | 1). PDI-P | 1.265 | 27,4% |
| | | 2). PKB | 854 | 18,5% |
| | | 3). Partai Golkar | 661 | 14,3% |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu tahun 2004

Untuk Wilayah Kecamatan Batu menunjukkan bahwa partai politik pemenang, mayoritas dipegang oleh PDI-P (5 desa, yakni Oro-Oro Ombo, Sisir, Ngaglik, Songgokerto, dan Sidomulyo), Partai Golkar (3 desa, yakni Temas, Pesanggrahan dan Sumberejo).

Tabel 18 Partai Pemenang Pemilu Pada Pemilu 2004 di Kecamatan Bumi Aji

| No | Nama Desa | 3 Partai Pemenang Pemilu | Jumlah Pemilih | Prosentase |
|----|-------------|--------------------------|----------------|------------|
| 1. | Pandanrejo | 1). PDI-P | 771 | 23,4% |
| | | 2). Partai Golkar | 585 | 17,8% |
| | | 3). Partai Demokrat | 529 | 16,1% |
| 2. | Bumi Aji | 1). Partai Demokrat | 636 | 16,5% |
| | | 2). Partai Golkar | 1.366 | 35,6% |
| | | 3). PDI-P | 1.173 | 30,5% |
| 3. | Bulukerto | 1). Partai Demokrat | 2.201 | 60,9% |
| | | 2). PDI-P | 2.019 | 55,9% |
| | | 3). Partai Golkar | 1.999 | 55,3% |
| 4. | Gunungsari | 1). Partai Golkar | 1.242 | 30,4% |
| | | 2). PDI-P | 869 | 21,2% |
| | | 3). PKB | 525 | 12,8% |
| 5. | Punten | 1). Partai Golkar | 741 | 23,9% |
| | | 2). PDI-P | 530 | 17,1% |
| | | 3). Partai Demokrat | 487 | 15,7% |
| 6. | Tulungrejo | 1). Partai Golkar | 2.191 | 29,2% |
| | | 2). Partai Demokrat | 1.326 | 17,7% |
| | | 3). PNBK | 942 | 12,5% |
| 7. | Sumbergondo | 1). Partai Golkar | 881 | 37,6% |
| | | 2). Partai Demokrat | 430 | 18,3% |
| | | 3). PDI-P | 303 | 12,9% |
| 8. | Giripurno | 1). Partai Golkar | 1.183 | 21,8% |
| | | 2). PKB | 1.131 | 20,8% |
| | | 3). Partai Golkar | 1.048 | 19,3% |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu tahun 2004

Sementara untuk wilayah Kecamatan Bumi Aji, Golkar menguasai 5 desa yang terdapat di Kecamatan Bumi Aji (Giripurno, Sumbergondo, Tulungrejo, Punten dan Gunung Sari), sementara itu hanya 2 desa yang

dimenangkan oleh Partai Demokrat (Desa Bumiaji dan Bulukerto) dan PDI-P (Desa Pandanrejo). Di sisi lain PKB, untuk wilayah Bumi Aji tidak ada satu daerah pun yang menjadi mayoritas atau pemenang dalam pemilu 2004. Dilihat dari sisi sosial dan kemasyarakatan, wilayah Bumi Aji merupakan kondisi masyarakat yang sudah relatif maju secara ekonomi.

Tabel 19. Perolehan Suara dan Kursi Partai Peserta Pemilu 2004 di Kota Batu

| No | Nama Partai | Pemilu 2004 | | | |
|--------------|-------------|--------------|------------|-------|------------|
| | | Jumlah Suara | Prosentase | Kursi | Prosentase |
| 1. | P. Golkar | 22.110 | 19,67% | 5 | 20% |
| 2. | PDI-P | 21.317 | 18,97% | 5 | 20% |
| 3. | PKB | 14.148 | 12,59% | 4 | 16% |
| 4. | P. Demokrat | 13.197 | 11,74% | 4 | 16% |
| 5. | PAN | 6.336 | 5,64% | 2 | 8% |
| 6. | PSI | 3.399 | 3,02% | 1 | 4% |
| 7. | PKS | 3.311 | 2,95% | 1 | 4% |
| 8. | PNBK | 2.936 | 2,61% | 1 | 4% |
| 9. | PDS | 2.731 | 2,43% | 1 | 4% |
| 10. | PNI Marhaen | 2.706 | 2,41% | 1 | 4% |
| 11. | PPP | 2.684 | 2,39% | - | - |
| 12. | PBB | 1.155 | 1,03% | - | - |
| 13. | Lain-Lain | 16.349 | 14,55% | - | - |
| Jumlah Suara | | 112.379 | 100% | 25 | 100% |

Sumber: KPU D, Data dan Potensi tahun Tahun 2005 yang telah diolah penulis.

Catatan: Jumlah pemilih ini tidak termasuk mereka yang golput atau suara yang tidak sah.

Dari suara yang didapat masing masing partai, maka pembagian kursi DPRD Kota Batu yang jumlahnya 25 (dua puluh lima orang) sebagai berikut: Partai Golkar 5 kursi, PDIP 5 Kursi, Partai Demokrat 4 Kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 4 Kursi, PAN 2 Kursi, PSI 1 Kursi, PKS 1 kursi, PNBK 1 Kursi, PDS 1 Kursi, PNI Marhaen 1 Kursi.

b. Partisipasi Pemilih

Jumlah pemilih yang menempati peringkat pertama terbesar di Kota Batu berada di Kecamatan Batu, yang berjumlah 61.548 pemilih atau sekitar 46,38 % dari jumlah pemilih secara keseluruhan, dengan jumlah terbesar terdapat di Desa Sisir 14. 861, disusul Temas 9.782, kemudian Ngaglik 8.180 Sedangkan di Kecamatan Bumi Aji, jumlah pemilih sebesar 39.273 dengan jumlah tertinggi terdapat di Desa Tulungrejo 8.942 kedua di Desa Giripurno 6.531 dan ketiga, di desa Bumiaji 4.562. Sementara, di Kecamatan Junrejo Jumlah pemilih sebesar 31.887, dengan jumlah tertinggi di desa-desa tertinggi di Desa Pendem 6.882, kemudian Desa Junrejo 5.936 dan ketiga di Desa Beji 5.328.

Tabel 20. Pemilih Terdaftar Pada Pemilu 2004 Di Kota Batu

| No | Nama Kecamatan/ Desa | Pemilih Terdaftar | | |
|----|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Batu | 30.831 | 30.753 | 61.584 |
| | 1. Songgokerto | 2.397 | 2.448 | 4.845 |
| | 2. Ngaglik | 3.999 | 4.181 | 8.180 |
| | 3. Sisir | 7.361 | 7.500 | 14.861 |
| | 4. Temas | 4.921 | 4.861 | 9.782 |
| | 5. Pesanggrahan | 4.031 | 3.989 | 8.020 |
| | 6. Sumberejo | 2.389 | 2.335 | 4.724 |
| | 7. Sidomulyo | 2.817 | 2.688 | 5.505 |
| | 8. Oro-Oro Ombo | 2.916 | 2.751 | 5.667 |
| | | | | |
| 2. | Bumi Aji | 19.835 | 19.438 | 39.273 |
| | 1. Bumi Aji | 2.336 | 2.226 | 4.562 |
| | 2. Sumber Gondo | 1.353 | 1.345 | 2.698 |
| | 3. Bulukerto | 2.154 | 2.101 | 4.255 |
| | 4. Pandanrejo | 1.853 | 1.923 | 3.776 |
| | 5. Giripurno | 3.289 | 3.242 | 6.531 |
| | 6. Punten | 1.875 | 1.859 | 3.734 |
| | 7. Gunungsari | 2.412 | 2.363 | 4.775 |
| | 8. Tulungrejo | 4.563 | 4.379 | 8.942 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|---------------|--------|--------|--------|
| 3. | Junrejo | 15.076 | 16.811 | 31.887 |
| | 1. Tlekung | 1.406 | 1.426 | 2.832 |
| | 2. Junrejo | 2.967 | 2.969 | 5.936 |
| | 3. Mojorejo | 1.648 | 1.806 | 3.454 |
| | 4. Torongrejo | 1.953 | 1.954 | 3.907 |
| | 5. Beji | 2.133 | 3.195 | 5.328 |
| | 6. Pendem | 3.135 | 3.747 | 6.882 |
| | 7. Dadaprejo | 1.834 | 1.714 | 3,548 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu tahun 2004

Prosentase jumlah pemilih yang ada memang tidak menunjukkan otomatis partisipasi politik. Berdasarkan data hasil pemilu baik pada tahun 1999 maupun 2004, banyak dari pemilih yang sudah terdaftar tidak menggunakan hak pilih mereka dengan berbagai macam alasan. Akan tetapi pada umumnya, ketidak hadiran mereka di TPS (Tempat Pengutan Suara) ketika pemilu dilaksanakan diakibatkan karena para pemilih merasa tidak ada pengaruhnya adanya pemilu maupun tidak adanya. Bahkan sebagian lagi menyatakan bahwa pemilu hanya untuk meningkatkan derajat seseorang saja, dan ketika sudah terpilih akan lupa terhadap mereka yang memilih. Kondisi ini jamak terjadi, tidak hanya di Kota Batu, tetapi juga pemilih yang ada di Kabupaten maupun Kota Malang. Angka non partisipan di Kecamatan Bumiaji berjumlah 5.759 atau sekitar 17,28 %. Sedangkan Kecamatan Junrejo dengan jumlah pemilih 31.887, yang tidak ikut dalam pencobolosan adalah 6.412 pemilih atau sekitar 19,48 %.

Bab IV

TIPOLOGI PEMILIH

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Bab III pasal 13 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun tau sudah/ pernah kawin. Sementara untuk dapat menggunakan hak pilih harus terdaptar sebagai pemilih, dan untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: *pertama*, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; *kedua*, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan tersebut di atas hanya sebatas ketentuan legal-formal yang hanya punya konsekuensi hukum, sehingga tidak punya implikasi terhadap perilaku dan kecenderungan dan afiliasi pemilih. Oleh karena itu diperlukan sebuah kajian lebih mendalam (*deepenning*) yang menyangkut karakter pemilih agar bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan analisis mengenai berbagai kecenderungan pemilih, khususnya hubungan pemilih dengan partai politik. Untuk keperluan tersebut, dalam bab IV ini penulis akan membahas persoalan yang berkaitan dengan karakteristik pemilih yang merupakan basis massa dari beragam partai politik yang berkembang. Pembahasan ini dimulai dengan menguraikan pembelahan sosial politik pemilih (*social cleavages*), dilanjutkan dengan karakteristik pemilih Santri, karakteristik pemilih Abangan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi pemilih. Hal ini penting dikemukakan untuk dapat memahami kenapa seorang pemilih mengidentifikasi diri atau menjadi partisan dari partai politik tertentu.

A. Social Cleavages Pemilih

Indonesia merupakan bangsa yang plural, dimana agama, etnik, bahasa, budaya, maupun geografis menjadi sekat-sekat sosial (*social cleavages*) dalam masyarakat. Sekat-sekat sosial ini membawa implikasi pada kehidupan yang lebih luas seperti ekonomi, sosial dan politik.

Pembelahan masyarakat ini oleh Liddle (1992) disebut sebagai Sungai Budaya. Sungai Budaya ini merupakan formulasi dinamis dalam sebuah percakapan dramatis dari masyarakat yang bergumul dalam budaya itu. Oleh karena itu, interpretasi mengenai pembelahan masyarakat Indonesia bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu yang tidak pernah berhenti, terus bergerak, deras dan lambat. Di dalam aliran itu, banyak aliran yang mengalir terpisah tetapi suatu saat mereka bertemu dan berpisah kembali.

Kenyataan akan adanya pluralitas sosial masyarakat ini, mendorong banyak para ahli melakukan penelitian untuk mencari kategorisasi agar dapat menjadi rujukan dalam memahami fenomena masyarakat tersebut. Kategorisasi masyarakat Indonesia yang umum menjadi rujukan adalah kategorisasi yang dikemukakan oleh C. Poensen (1886), Snouck Hurgronje (1899-1906), Clifford Geertz (1960), Allan A. Samson (1973 dan 1978), Karl D. Jackson, Donald K. Emmerson (1978), Syafii Ma'arif (1985) dan Endang Saefuddin Anshari (1981), dan terakhir, Liddle dan Saiful Mujani (2004).

C. Poensen (1886) dan Snouck Hurgronje (1899-1906), telah memopulerkan istilah Abangan dan Putih yang menjadi dasar sarjana Barat dalam melihat polarisasi masyarakat Jawa. Melalui pendekatan Budaya, Clifford Geertz (1960) dalam penelitiannya di Mojokuto Jawa Timur, menyusun kategorisasi masyarakat kedalam trikotomi yaitu Santri, Priyayi, dan Abangan. Penelitian jenis antropologi yang dilakukan Geertz di Mojokuto mulai Mei 1953 sampai September 1954¹ ini menghasilkan konstruksi nalar Jawa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan

¹ Pengamatan Geertz tentang Mojokuto terkait profesi penduduk setempat, penggolongan penduduk menurut pandangan masyarakat Mojokuto berdasarkan kepercayaan, preferensi etnis dan pandangan politik, dan ditemukannya tiga inti struktur sosial yakni desa, pasar dan birokrasi pemerintah yang mencerminkan tiga tipe kebudayaan: Abangan, Santri dan Priyayi. Struktur sosial desa biasanya diasosiasikan kepada para petani, pengrajin dan buruh kecil-- yang penuh dengan tradisi animisme seperti upacara slametan, kepercayaan terhadap makhluk halus, tradisi pengobatan, sihir dan magis menunjuk kepada seluruh tradisi keagamaan Abangan. Sementara pasar terlepas dari penguasaan etnis Cina yang tidak menjadi pengamatan Geertz-- diasosiasikan kepada petani kaya dan pedagang besar dari kelompok Islam berdasarkan kondisi historis dan sosial di mana agama Timur Tengah berkembang melalui perdagangan, dan kenyataan yang menguasai ekonomi Mojokuto. Mereka itulah yang memunculkan subvarian keagamaan Santri. Terakhir adalah subvarian Priyayi. Varian ini menunjuk pada elemen Hinduisme lanjutan dari tradisi Keraton Hindu-Jawa. Sebagaimana halnya Keraton (simbol pemerintahan birokratis), maka Priyayi lebih menekankan pada kekuatan sopan santun yang halus, seni tinggi, dan mistisisme intuitif dan potensi sosialnya yang memenuhi kebutuhan kolonial Belanda untuk mengisi birokrasi pemerintahannya. Metode kerja yang dipakai Geertz dalam pengumpulan data-data selama penelitiannya di Mojokuto, kota kecil di Jawa Timur, adalah penguasaan bahasa lokal, pemanfaatan banyak informan local, pembagian tugas dengan tim peneliti lain, pendalaman topik-topik tertentu yang membutuhkan detail, dan pengumpulan

sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Trikotomi Agama Jawa itulah yang sampai sekarang terus disebut-sebut dalam wacana sosial, politik, dan budaya di Indonesia dan menjadikannya referensi induk atas upaya ilmuwan sosial di belakangnya yang membedah tentang Jawa. Kekuatan utama Geertz mengungkap fenomena Agama Jawa adalah kemampuan mendeskripsikan secara detail ketiga varian tersebut dan menyusun ulang dalam konklusi hubungan konflik dan integrasi yang logis dan utuh atas ketiga varian tersebut.

Hasil perenungan Geertz sampai pada kesimpulan bahwa Santri adalah kelompok Muslim yang taat dalam menjalankan perintah agama. Bagi Santri pada tahun 1950-an, taat terhadap agama berarti mengupayakan agar Islam menjadi landasan atau asas bagi pengelompokan politik, seperti parpol dan negara. Karena itu, mereka mendirikan parpol berbasis Islam, dan pada tahun 1950-an mereka juga mengupayakan agar Indonesia berasaskan Islam. Sebaliknya, Abangan adalah kelompok Muslim yang tidak taat menjalankan kewajiban agama Islam, apalagi memperjuangkan agar negara berasaskan Islam. Bagi Kelompok Abangan, Islam tidak penting dalam kehidupan sosial-politik. Dengan demikian tidak heran apabila kemudian kelompok Abangan lebih terbuka terhadap ideologi politik lain yang dominan di dunia pada waktu itu, yakni komunisme. Sementara Priyayi adalah kelompok Muslim yang secara kultural dekat dengan Abangan, namun yang membedakan mereka adalah dari cara berperilaku yang lebih halus dan datang dari pegawai pemerintah.

Dari hasil temuan di lapangan, dikotomi yang terjadi antara Santri (tradisional) dan Abangan, dalam praktiknya keseharian tidaklah ekstrim, karena ada titik temu di antara kedua kutub tersebut. Baik Santri maupun Abangan, kedua-duanya adalah Islam, sehingga dalam kehidupan praktis keagamaan ada momen dan aktivitas yang mempersatukan mereka terutama pada kelompok Santri Islam Tradisional (warga Nahdliyin).²

data-data statistik. Dan bagian terbesarnya digunakan untuk kegiatan observasi-partisipatif. Prinsip kerjanya berdasarkan proposisi bahwa ahli etnografi itu mampu mencari jalan keluar dari datanya, untuk membuat dirinya sendiri jelas agar para pembaca dapat melihat sendiri bagaimana tampaknya fakta-fakta itu, dan dengan demikian bisa menilai kesimpulan dan generalisasi ahli etnografi itu sesuai dengan persepsi aktualnya sendiri (hal. 9). Meskipun Jawa adalah Jawa yang stereotip penunjukannya jelas, namun perhatian Geertz mengungkap adanya varian agama Jawa lebih kepada adanya kompleksitas masyarakat Jawa.

² Peneliti melakukan observasi kedalam masyarakat yang merepresentasikan dari kelompok Abangan dan Santri. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa baik mereka yang Abangan maupun yang Santri pada acara ritual keagamaan seperti acara tahlilan, yasinan, kajatan, acara

Lebih Jauh Karl D. Jacktion (1978) menempatkan varian Santri ke dalam dikotomi Modernis Ortodok dan Tradisionalis ortodok, dan varian lainnya ditempatkan sebagai sinkretis. Dalam hal ini kelompok Modernis Ortodok secara politik direpresentasikan oleh Masyumi, PMI (Partai Muslimin Indonesia), dan Muhammadiyah, sementara Tradisionalis ortodok direpresentasikan oleh Nahdatul Ulama (Jackson dan Lucian W. Pye, 1978).

Dikotomi yang sama dengan Jackson, dilakukan Allan A. Syamson (1978) yang membelah masing-masing kelompok ke dalam tiga belahan. Kelompok Modernis terbelah oleh perbedaan strategi dalam bersikap terhadap penguasa, yaitu sebagai Fundamentalis, reformis, dan akomodasionis, dan kelompok Tradisional terbelah oleh perbedaan kepentingan individual yaitu kyai, politisi, dan birokrat.³ Sementara Endang Saifudin Anshari menempatkan polarisasi masyarakat ke dalam dikotomi Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler (Anshari, 1981). Demikian juga Ahmad Syafi'i Ma'arif (1985). Di sisi lain Donald K. Emmerson (1978) membaginya ke dalam Priyayi Abangan dan Santri akomodasionis. Yang terbaru, datang dari Saeful Mujani dan Liddle (2004) yang membelah masyarakat ke dalam non Muslim, Abangan Muslim, Tradisionalis, dan Liberal Modernis Muslim vs. Konservatif Modernis Muslim.

kematian mereka bersatu. Apalagi dalam acara kematian, baik yang Abangan maupun yang Santri melakukan kerja sama dan sebenarnya masyarakat Abangan secara tidak langsung dalam acara-acara seperti kematian dan perkawinan mau tidak mau harus bekerja sama dengan yang Santri untuk mengurus upacaranya. Yang membedakan mereka adalah pada pelaksanaan ajaran Islam seperti shalat, puasa atau naik haji. Bagi yang Abangan, umumnya mereka tidak menjalankan shalat dan puasa dalam bulan Ramadhan, apalagi melakukan ibadah Haji. NU mampu menciptakan mekanisme inklusi sosial yang *smooth*. Orang Abangan masuk dalam komunitas Santri secara halus tanpa harus melepas identitasnya semula. Sebab pada praktiknya di desa-desa, mereka hampir tidak pernah mempermasalahakan secara vulgar apakah sholat lima waktu atau tidak; puasa penuh di bulan ramadhan atau tidak. Meski hampir selalu ada ceramah agama di dalam forum tahlilan, namun tidak dalam seruan yang keras.

³ Menurut Allan A. Syamson, Fundamentalis merupakan kelompok Modernis Islam yang dicirikan sebagai kaku, puristic dalam menginterpretasikan Islam, berlawanan dengan pemikiran sekuler dan pengaruh Barat begitu juga dengan sinkretisme dari keyakinan para Tradisionalis, dan menekankan pada keutamaan agama di atas politik. Reformis secara teoretik menekankan pada keutamaan agama di atas politik, tapi ada kelonggaran untuk melakukan kerja sama dengan kelompok sekuler. Sementara kelompok akomodasionis menilai kerangka persatuan disediakan oleh Islam, karena menyusun kepentingan social dan ekonomi harus menjadi prioritas dari organisasi Islam. Untuk bacaan lebih lanjut, lihat Allan A. Syamson, *Conceptions od Politics, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian Islam*, dalam Karl D. Jackson, *Power and Communication in Indonesia*, London, University of California Press, 1978.

| | | |
|----------|-------------|-----------|
| Ortodoks | Ortodoks | |
| Modern | Tradisional | Sinkretis |
| Santri | | Abangan |

Sumber: Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan, Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.

Gambar 7. Varian Keagamaan di Kalangan Orang Jawa

Hal mendasar yang membedakan antara kelompok Liberal Modernis Muslim dan Konservatif Modernis Muslim adalah cara memahami dan menginterpretasikan ajaran Islam tersebut. R. William Liddle dan Saeful Mujani, memberikan penjelasan yang terkait dengan Islam Modernis adalah sebagai berikut:

Modernists, inspired at the end of the nineteenth century by Mohammad Abduh and other Middle Eastern reformers, abjure all of the classical schools in favor of direct interpretation of the Qur'an and other religious texts by believers. They have less respect for the ulama, often viewed as out of touch with modern life and its particular challenges. Sociologically, Modernists have tended to be more urban and Western-educated than traditionalists, although this distinction has been breaking down in the last half century with the spread of Western education and modern life styles more generally. The largest Modernist organization, which claims more than 20 million members, is Muhammadiyah.

Some Modernists have become Liberal, reading the Qur'an in an open, metaphoric, or presentist way to allow incorporation of borrowed practices and institutions such as banks and parliaments. Liberals tend to accept Christians and other non-Muslims as equal members of Indonesian society. Other Modernists have become conservatives, even Fundamentalists. Conservatives read the Qur'an and other texts literally and are highly suspicious of the intentions of non-Muslims. Conservatives urge the formation of Islamic Banks, the wearing by women of the jilbab or Islamic headscarf, the separation of the sexes in state schools, and in broad terms the implementation of Islamic law.

Berbagai kategori umat Islam yang dikemukakan oleh para ahli mulai dari Clifford Geertz dengan Santri, Abangan, dan Priyayi; Foreman dengan kyai, awam, dan elit birokrat; Saifuddin Anshari dengan Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler. Berbagai kategori tersebut tidak dikenal dalam budaya Islam, yang dikenal dalam Islam dalam

mengkategorikan masyarakat didasarkan pada tingkat pemahamannya mengenai Islam serta tingkat ketaatannya dalam menjalankan ajaran Islam (Mul Khan, 1988). Namun dalam diskursus akademik, justru hasil rujukan para ahli itulah yang paling banyak dipakai sebagai rujukan atau patokan dalam menganalisis masyarakat Islam di Indonesia, terutama tipologi Abangan, Santri dan Priyayi yang dikemukakan Geertz.

Patut dicatat bahwa konsep aliran yang dikemukakan Geertz ini, kalau dilihat dari perilaku keberagamaan, menunjukkan adanya ketidakkonsisten dalam membangun generalisasi yang menghasil tiga varian itu. Di satu sisi Geertz mendasarkan analisisnya pada perilaku keberagamaan untuk melahirkan konsep Santri Abangan, namun di sisi lain Priyayi yang merupakan satu kesatuan dalam trikotomi mendasarkan analisisnya pada fenomena berbeda yaitu suatu kompleks keagamaan yang menekankan pada pentingnya hakikat alus sebagai lawan kasar (kasar dianggap sebagai ciri-ciri utama Abangan) yang perwujudannya tampak dalam berbagai simbol yang berkaitan dengan etiket, tari-tarian dan berbagai bentuk kesenian, bahasa, dan pakaian. Begitupun Geertz menyebutkan bahwa perilaku keberagamaan dari Priyayi lebih dekat dengan Abangan.

Konsep Priyayi dalam dimensi sosial mungkin masih bisa dilihat dalam artian pola perilaku ketika berkomunikasi (Jawa: *unggah ungguh*). Namun dalam dimensi politik, varian Abangan ini tidak bisa memberikan dampak secara langsung, khususnya terkait dengan persoalan ideologi politik. Apalagi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik pasca penelitian Geertz telah mengalami perubahan dan perkembangan yang menurut hemat penulis sangat berbeda. Apa yang dilihat oleh Geertz terkait fenomena Priyayi, pada saat ini sudah tidak sama dengan yang dulu.⁴ Oleh karena alasan tersebut, penulis tidak akan banyak mempergunakan konsep Priyayi dalam membahas persoalan yang ada kaitannya dengan persoalan hubungan partai dan pemilih.

⁴ Priyayi sebenarnya merupakan varian dari abangan, namun karena punya karakter berbeda dengan adanya "etiket" Priyayi seolah menjadi varian sendiri dalam aliran politik. Padahal Geertz, melakukan dasar analisisnya pada pola perilaku keberagaman bukan pada hubungan sosial, dengan demikian kalau Geertz menjadikan Priyayi sebagai varian tersendiri di luar Abangan dan Santri itu tidak tepat. Pengukuhan kelompok Priyayi dalam konstelasi politik kepartaian muncul ketika rezim Orde baru. Masuknya pemilih Pegawai Negeri sebagai pendukung utama Golkar diasumsikan sebagai bagian dari konsekuensi dari afiliasi politik Priyayi. Orde Baru seolah menjadi legitimasi bagi kelompok Priyayi ini, dimana Golkar jadikan sebagai penghubung bagi kelompok Priyayi untuk menjustifikasi mereka yang mengatakan bahwa aliran ini tercermin dalam kehidupan sosial maupun politik. Padahal ketika Geertz

Selanjutnya, varian Santri yang terbagi kedalam Santri Modernis dan Santri tradisonal (Jakcson, 1978) juga mengalami perkembangan. Kalau Allan A. Samson membagi masing-masing kelompok berdasarkan sikapnya pada pemerintah ke dalam tiga belahan. Dimana kelompok Modernis terbelah oleh perbedaan strategi dalam bersikap terhadap penguasa, yaitu sebagai Fundamentalis, reformis, dan akomodasionis, dan di sisi lain kelompok Tradisional terbelah oleh perbedaan kepentingan individual yaitu kyai, politisi, dan birokrat. Harap kita pahami, Jackson melakukan penelitian pada saat Orde Baru berkuasa, dan dalam kondisi politik yang sentralistik. Sekarang ini, situasi sangat berbeda, dimana masyarakat sudah diberikan kebebasan sebagai konsekuensi reformasi yang mendorong demokratisasi.

Berdasarkan pada realitas tersebut di atas, pembilahan sosial-religi (*social cleavages*) yang dikemukakan Geertz maupun Alan A. Syamson sudah kehilangan pijakan realitas objektifnya. Untuk itu perlu ada modifikasi teoretis yang telah dikemukakan oleh kedua ahli tersebut agar dapat menemukan kembali realitas objektifnya. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak relevan lagi ketika kita membicarakan Priyayi dalam terminologi sosial keagamaan seperti yang dikemukakan Geertz. Dengan demikian yang ada hanyalah Santri dan Abangan. Di sisi lain varian Santri Modernis dan Tradisional dikembangkan Alan A Syamson, dimana Santri Modernis yang didasarkan pada sikapnya terhadap penguasa terbagi ke dalam Fundamentalis--Reformis--Akomodasionis, sementara Santri Tradisional berdasar pada kepentingan individualnya terbagi ke dalam Kyai—Awam—Birokrat.

Perkembangan struktur sosial masyarakat sejak dilakukannya penelitian oleh para ahli tersebut telah mempengaruhi tingkat keakurasiannya dalam menjawab fenomena-fenomena yang berkembang saat ini. Realitas objektif pada saat Geertz, Allan A. Syamson, Jakcson sekarang ini telah menjadi realitas historis. Ideologi Komunis pada saat Geertz melakukan penelitian, saat ini sudah hilang dari peredaran sejarah, begitu pun rejim otoritarian Orde Baru yang menjadi bingkai penelitian Syamson juga sudah berganti dengan suasana kehidupan politik yang

melakukan penelitiannya di Mojokuto, pare, Kota Kediri, pada saat itu yang dimaksud dengan Priyayi adalah mereka yang punya trah kerajaan (bangsawan) dan bekerja untuk pemerintah Belanda. Jelasnya mereka bukan birokrat atau pegawai negeri seperti sekarang yang diangkat dan dipilih berdasarkan rekrutmen profesional untuk kepentingan menjalankan birokrasi pemerintahan. Di samping itu konstelasi politik pada saat itu jauh berbeda dengan sekarang.

demokratis. Oleh karena itu ketika ada fenomena pergeseran pilihan politik, merebaknya non-partisipan konsep-konsep yang dikembangkan oleh para ahli terdahulu kurang bisa memberikan daya penjas yang akurat. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa berbagai teori tersebut, sekarang ini, sedang dalam proses anomali (Thomas Khun, 1970).⁵

Menyikapi problem keilmuan yang terjadi, dengan tetap bersumber pada kategorisasi Geertz, Jackson, terkait dengan Santri Modernis dan tradisional, pengembangan konseptualisasi dilakukan berdasarkan dari sisi pemahaman dan pengetahuan keagamaan. Berdasarkan perspektif ini, Santri Modernis dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok: Fundamental-Liberal-Moderat. Sementara Santri Tradisional berdasarkan pengetahuan agamanya terbagi ke dalam dua kelompok yaitu Awam dan Alim. Di sisi lain, Abangan dilihat dari sikap dan perilaku sosialnya terbagi ke dalam dua kelompok: Abangan Elitis--Abangan Populis.

Kelompok Santri yang Modernis Fundamentalis adalah kelompok yang pemahaman keagamaannya sangat konservatif sehingga cenderung kolot dan reaksioner yang selalu merasa perlu untuk kembali ke ajaran agama yang asli seperti yang ada dalam Al-Qur'an. Kelompok Santri Modernis Fundamentalis dianggap sebagai antitesis dan seringkali berada pada posisi kontradiktif dengan ajaran Islam adat. Hal ini dianggap karena Islam adat terlalu mengedepankan aspek lokalisme budaya yang cenderung ber-sinkretis dengan ajaran Islam murni. Sementara kelompok Santri Modernis Liberal adalah mereka yang menekankan pada ajaran Islam yang progressif dan Liberalisasi pemahaman terhadap Islam agar sesuai dengan konsteks ruang dan waktu. Pada saat ini, kelompok Santri Modern telah mengalami perkembangan, terutama mereka-mereka yang sudah mendapatkan pendidikan dari Barat. Mereka yang sudah belajar dari Barat biasanya mereka mendapatkan metode baru dalam

⁵ Khun melihat bahwa ilmu pengetahuan pada waktu tertentu didominasi oleh satu paradigma tertentu. Yakni suatu pandangan yang mendasari tentang pada yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) dari satu cabang ilmu. *Normal science* adalah suatu periode akumulasi ilmu pengetahuan, di mana para ilmuwan bekerja dan mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh. Namun para ilmuwan tidak dapat mengelak pertentangan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (*anomalies*) karena tidak mampunya paradigma I memberikan penjelasan terhadap persoalan yang timbul secara memadai. Selama penyimpangan memuncak, suatu krisis akan timbul dan paradigma itu sendiri mulai disangsikan validitasnya. Bila krisis sudah sedemikian seriusnya maka suatu revolusi akan terjadi dan paradigma baru akan muncul sebagai pengganti paradigma lama yang akan menjelaskan persoalan yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya lihat Thomas Khun, *The stucture of Scientific Revolution*, Chicago, University of Chicago Press, 1976.

rangka memahami Al-Quran yang berbeda dengan sebelumnya, seperti metode hermenetika. Dan di sisi lain, ada kelompok Santri Modernis yang tergolong Moderat. Kelompok ini cenderung berada di antara kelompok Fundamental dan Liberal.

Dalam kelompok Santri Tradisional, yang dinamakan Santri Tradisional Awam adalah kelompok Santri Tradisional yang dalam pengetahuan keislamannya dangkal. Kelompok ini cenderung hanya mengikuti apa yang diajarkan dan diperintahkan para kyai atau ulama. Sementara kelompok Santri Tradisional yang Alim adalah kelompok yang dalam pengetahuan keislamannya tinggi. Orang yang mempunyai pengetahuan keislaman biasanya disebut Ustadz, ulama, kyai, Gus. Mereka umumnya adalah lulusan satu atau beberapa pesantren (Bruinessen, 1994), dan sebagian lagi ada yang lulusan sekolah formal baik dari dalam maupun luar negeri.

Di sisi lain, pembagian kelompok Abangan ke dalam Abangan Elitis dan Abangan Populis didasarkan pada bagaimana mereka menjalankan kehidupan sosialnya. Abangan Elitis, dari sisi sosial merupakan kelompok yang tergolong maju dan berpendidikan. Dalam kelompok ini termasuk juga adalah kelompok atau golongan Piyayi yang dikategorikan Geertz. Karakter kelompok Abangan Elitis ini sangat individual, dan kebanyakan mereka tinggal di perkotaan. Pola hubungan sosial mereka didasarkan pada hubungan yang terbangun akibat profesi yang ditekuni. Umumnya kelompok Abangan Elitis ini bekerja di sektor pemerintahan.

Sementara yang dinamakan kelompok Abangan Populis adalah mereka yang umumnya tinggal di pedesaan, dan secara sosial tergolong ekonomi kelas bawah. Kehidupannya sangat diwarnai oleh karakter masyarakat pedesaan yang "paguyuban", dengan nuansa kehidupan yang penuh dengan upacara. Namun demikian, Abangan populis ini, juga ada di perkotaan yang merupakan golongan pekerja kasar dari mulai buruh pabrik, pedangan kaki lima, sopir dan lain-lain. Hal yang paling menonjol dari kalangan Abangan Populis ini adalah sikap dan perilaku sosial yang penuh solidaritas di antara mereka.

B. Varian Keagamaan Pemilih dan Afiliasi Politik

Geertz (1960) menggambarkan aliran sebagai "Alat pelembagaan bagi integrasi cara baru. Selanjutnya Ia mengemukakan bahwa aliran secara harfiah berarti aliran sungai atau arus, namun dalam Indonesia

masa Republik konsep ini sudah diperluas hingga memberi makna yang biasa disebut gerakan sosial (dalam bahasa Inggris) atau kelompok/fraksi politik yang ditentukan secara ideologis dan yang terdorong cita-cita moral yang agak jauh jangkauannya. Secara khusus, aliran terdiri dari suatu partai politik yang dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa sodalities—yaitu organisasi sukarela—yang terkait pada partai secara resmi atau tidak resmi.

Dalam Mojokuto setelah perang, keempat partai yang ada adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Masyumi (Partai Islam Pembaharu/Reformis) dan Nahdhatul Ulama (NU) yakni partai Islam konservatif. Bila salah satu partai menjadi inti, maka satu aliran berarti suatu perangkat organisasi Nasionalis—perkumpulan wanita, kelompok pemuda, pandu, yayasan, koperasi, perkumpulan peminjaman, sekolah swasta, perkumpulan atletik, organisasi agama, serikat buruh tani, kelompok seni, dan organisasi dagang—semuanya mengikuti arah perangkat ideologis yang serupa serta kesetiaan pada pimpinan yang sama bagi seluruh Indonesia. Ada organisasi petani PNI, organisasi petani PKI, organisasi petani Masyumi, dan NU dan seterusnya, taman kanak-kanak pun mengikuti pembagian ini.

Mempertegas pada apa yang dikemukakan Geertz mengenai aliran ini, Liddle dan Mujani (2004), menyampaikan bahwa dalam hal orientasi politik, kelompok Tradisionalis umumnya berafiliasi dengan organisasi keagamaan Nahdhatul Ulama (NU), sebagaimana sebagaimana yang mereka kemukakan, ... *“Particularly those affiliated with the Java-centered NU, explain this difference alternatively in term of Javanese culture and the pluralism of Islamic legalism. Javanese culture, they say, both in its animist and Hindunized versions, predisposes one to accept the idea that there are many truths or many paths to reaching truth. Because Tradisionalists—especially the older generation—are more parochial, rural and less Western-educated than Modernists, they are also more influenced by old Javanese values.”*

Begitu juga Karl D. Jackson (1978) yang menempatkan varian Santri ke dalam dikotomi Modernis dan Tradisionalis ortodok, dan varian lainnya ditempatkan sebagai sinkretis. Dengan mendasarkan analisisnya pada hasil pemilu 1955, Jackson menunjukkan bahwa kelompok Modernis direpresentasikan oleh Masyumi, PMI (Partai

Muslimin Indonesia), dan Muhammadiyah, sementara Tradisionalis ortodok direpresentasikan oleh Nahdhatul Ulama (Jackson dan Lucian W. Pye, 1978). Guna mempertegas hasil temuannya, ia menggambarkan aliran ini dalam bentuk hubungan antara varian keagamaan dan afiliasi politik pemilih.

| Muhammadiyah | | | | |
|--------------|-------------|----|----------------|-----|
| Masyumi | PSII | NU | PNI | PKI |
| Ortodoks | Ortodoks | | | |
| Modern | Tradisional | | Kaum Sinkretis | |
| Santri | | | Abangan | |

Sumber: Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, Dan Pemberontakan, Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.

Gambar 8. Afiliasi Partai Politik Pemilih dan Varian Keagamaan dalam Pemilu 1955

Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa komitmen pemilih abangan dalam memilih partai Nasionalis dan pemilih Santri dalam memilih partai Islam masih konsisten. Hal ini juga didukung oleh hasil survey ⁶ yang dilakukan penulis terhadap 241 (dua ratus empat puluh satu) orang pemilih, dengan 112 orang pemilih Santri dan dan 129 orang pemilih abangan menunjukkan bahwa hampir semua pemilih abangan memilih partai Nasionalis. Sementara pemilih Santri sebagian besar saja memilih partai Islam.

⁶ Dalam menentukan responden, untuk menentukan bahwa mereka adalah betul-betul pemilih Santri maupun pemilih Abangan, dilakukan dengan cara menentukan karakteristik Santri dan Abangan dan dilakukan secara acak. Pemilih Santri merupakan kelompok Islam yang taat sehingga responden yang dipilih adalah mereka yang baru keluar dari Mesjid setelah menjalankan Shalat. Sementara bagi responden Abangan yang merupakan pemeluk Islam nominal, dipilih dari mereka yang tengah bekerja pada saat di survey atau mereka yang ada di pinggir jalan yang menunjukkan ciri-ciri kelompok Abangan. Para supir, tukang becak, atau pun orang-orang yang bertato menjadi target dalam survey yang dilakukan terhadap kelompok Abangan. Dengan pertanyaan, pada pemilu 2004 Bapak/Ibu/ Saudara memilih partai Islam atau Partai Nasionalis?

Tabel 21. Pilihan Partai Politik Pemilih Didasarkan pada Pembilahan Sosial Santri dan Abangan

| Nomor | Pemilih Santri | | | | Pemilih Abangan | | | |
|-------|----------------|----|-------------------|----|-----------------|----|-------------------|----|
| | Partai Islam | | Partai Nasionalis | | Partai Islam | | Partai Nasionalis | |
| | Angka | % | Angka | % | Angka | % | Angka | % |
| 01. | 62 | 55 | 50 | 45 | 27 | 21 | 102 | 79 |
| Total | N=112 | | | | N=129 | | | |

Sumber: Hasil Survey Sampel yang dilakukan pada bulan Desember 2008 di Malang Raya.

Karakteristik responden dianggap homogen, dengan dengan estimasi sampling error 5,25 % pada tingkat kepercayaan 99%

Keterangan: Para pemilih mengkategorisasikan PKB dan PAN ke dalam Partai Islam.

Walaupun ada kecenderungan politik aliran masih berjalan dimana pemilih Santri akan memilih Partai Islam dan pemilih Abangan akan memilih partai Nasionalis, namun tampak kecenderungan ini semakin memudar. Pemilih Santri cenderung sudah sangat cair dalam pilihan politiknya, terutama di kalangan Santri Modernis. Santri Modernis pilihan politik antara partai Islam dan Nasionalis, perbandingannya adalah 56:44, sementara Santri Tradisionalis pilihan politik antara Partai Islam dan Nasionalis 58:42. Di sisi lain pemilih Abangan, cenderung lebih konsisten pilihan politiknya terhadap partai Nasionalis, dengan perbandingan 79:21. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa di Malang Raya, kekuatan partai politik Nasionalis, khususnya PDIP paling besar dibanding dengan partai-partai lainnya.

Tabel 22. Pilihan Politik Santri Modernis Vs Tradisional

| Nomor | Santri Modernis | | | | Santri Tradisional | | | |
|-------|-----------------|----|-------------------|----|--------------------|----|-------------------|----|
| | Partai Islam | | Partai Nasionalis | | Partai Islam | | Partai Nasionalis | |
| | Angka | % | Angka | % | Angka | % | Angka | % |
| 01. | 15 | 56 | 13 | 44 | 49 | 58 | 35 | 42 |
| Total | N=28 | | | | N=84 | | | |

Sumber: Hasil survey sampel pada bulan Desember 2008.

Dalam pemilu 1999, sebagai justifikasi pada politik aliran, bisa dikemukakan bahwa organisasi massa solidaritas yang dikemukakan Geertz menunjukkan afiliasinya pada partai politik tertentu. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang modernis walaupun secara formal tidak menjadi bagian pendukung partai (PAN), namun kelahiran PAN mau tidak mau akan selalu dikaitkan dengan Muhammadiyah dikarenakan Amin Rais sebagai pendiri PAN merupakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Apalagi di tingkat kepengurusan baik Wilayah maupun Daerah, sebagian besar mereka adalah orang-orang yang merupakan aktivis Muhammadiyah. Artinya ada benang merah yang menghubungkan antara Muhammadiyah sebagai organisasi massa keagamaan yang Modernis dengan PAN sebagai partai politik.

Di sisi lain, Nahdlotul Ulama (NU) yang menjadi representasi dari organisasi massa keagamaan Tradisional, harus merelakan diri apabila diklaim sebagai ormas pendorong lahirnya partai politik, dalam hal ini PKB. Kelahiran PKB sebagai partai politik tidak lepas dari karyanya Gus Dur atau Abdurahman Wahid sebagai cucu pendiri NU yang sekaligus mantan Ketua Umum PB NU, dan juga sebagai mantan Presiden. Dengan adanya Gus Dur, PKB sepertinya dianggap sah mempergunakan basis pemilih NU yang cukup besar khususnya di Jawa Timur. Oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, baik PAN atau pun PKB, walaupun tidak secara formal mencantumkan Islam sebagai asas partai, keduanya baik secara sosiologis maupun historis merupakan partai Islam. Alasan sosiologis yang sangat jelas tergambar dari para elit partai maupun konstituennya, serta historis dari kelahiran partai-partai itu.

Lebih jauh, bagi kelompok yang disebut dengan abangan, walaupun dalam hal organisasi tidak bisa dilihat secara jelas sebagaimana pada kelompok Santri baik yang Tradisional maupun Modern, namun kelompok masyarakat yang dibedakan dari perilaku keberagamaannya yang minimalis (Islam Nominal) mempunyai hubungan yang kuat dengan partai Nasionalis. Pada pemilu 1999 dan 2004 pemilih abangan ini sebagian besar afiliasi politiknya pada PDIP yang merupakan partai politik yang berhaluan Nasionalis. Dengan demikian, sesuai dengan kerja dari politik aliran bahwa kelompok santri yang taat beragama akan membentuk partai politik yang sama yaitu Islam, sementara abangan akan membentuk partai yang bukan agama yaitu Nasionalis.

Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa dalam pemilu 2004 para pemilih Santri juga tidak bisa dipisahkan dari partai-partai Islam atau yang secara sosiologis dan historis dengan Islam seperti PKB, PPP, PAN, PKS dan PBB, walaupun ada sebagian yang memilih partai Partai Nasionalis Religius, seperti Golkar dan Demokrat. Secara khusus PKB, PPP, PPNU merupakan partai politik yang menjadi afiliasi bagi kalangan Santri Tradisional, dan PAN, PKS dan PBB merupakan partai politik yang menjadi afiliasi bagi kalangan Santri Modernis. Sementara Partai Golkar dan Partai Demokrat merupakan partai tempat penyaluran aspirasi dari sebagian kalangan Muslim baik yang Tradisional maupun Modernis.

Tabel 23. Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu 1999 dan 2004 di Malang Raya

| No | Nama Partai | Kabupaten Malang | | Kota Malang | | Kota Batu | |
|-----|-------------|------------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | 1999 | 2004 | 1999 | 2004 | 1999 | 2004 |
| 01. | PDI-P | 39,66% | 19,88% | 41,22% | 25,84% | 38,47% | 18,97% |
| 02. | P. Golkar | 23,98% | 20,62% | 16,04% | 12,35% | 18,32% | 19,67% |
| 03. | PKB | 20,36% | 13,19% | 19,60% | 17,36% | 29,57% | 12,59% |
| 04. | PPP | 2,84% | 2,51% | 2,80% | 2,36% | 3,46% | 4,51% |
| 05. | PAN | 5,82% | 5,91% | 10,53% | 6,77% | 2,93% | 5,64% |
| 06. | PBB | 1,31% | 1,12% | 2,41% | 1,28% | 0,74% | 1,03% |

Sumber: Data Hasil Pemilihan Umum 1999 dan 2004 KPU D Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, yang telah diolah penulis.

Sebagai mana telah dikemukakan, afiliasi politik pemilih Abangan punya kecenderungan besar tertuju pada PDIP, di samping Partai Nasionalis yang lain seperti Golkar, Demokrat, dan lain-lain. Dalam kelompok pemilih Abangan PDIP merupakan pilihan politik yang mayoritas, sehingga di Malang Raya pada pemilu 1999 dan 2004 PDIP menjadi partai politik yang mempunyai suara signifikan. Bahkan dalam pemilu 1999, PDIP di Malang Raya melebihi perolehan PDIP secara nasional. Secara nasional PDIP mendapat 37,78%, sementara di Malang Raya berdasar wilayah berturut-turut mendapat 39,66% di Kabupaten Malang, dan 41,22% di Kota Malang. Secara nasional PDIP, pada pemilu 1999 memperoleh suara sebesar 33,76%.

Konfigurasi politik di Malang Raya menunjukkan bahwa politik aliran yang dikemukakan Clifford Geertz (1960) tetap eksis, sekalipun dengan

pelbagai variasinya dan perkembangan yang baru. Kenyataan ini bisa dilihat dari besarnya dukungan masyarakat pada partai-partai berlabel keagamaan Islam dan partai-partai berlabel Nasionalis khususnya dalam Pemilu 1999 dan 2004, termasuk menjelang Pemilu 2009. Walaupun pada pemilu 1999, tidak semua partai-partai berlabel Islam tidak mendapat banyak suara, kecuali empat partai saja, yakni PBB, PAN yang mewakili pilihan Santri Modernis dan PKB PPP, yang mewakili pilihan Santri Tradisional. Dan di sisi lain partai politik berhaluan Nasionalis yang diwakili PDIP menjadi pilihan politik bagi kalangan Abangan.

Kekuatan partai yang lahir di era Orde Baru, yaitu partai Golkar telah sedikit menembus batas politik aliran sehingga aliran ini menjadi tidak jelas. Hal ini dikarenakan Partai Golkar sebagai partai Nasionalis yang berwajah *catchall party*, sehingga sedikit banyak menanggalkan ideologinya, sehingga banyak konstituennya datang dari kalangan Santri dan Abangan. Dengan demikian ada spektrum afiliasi politik yang bergeser keluar baik dari kelompok Santri maupun Abangan (*outlayer*). Dari hasil obeservasi di lapangan menunjukkan bahwa kelompok Santri Modernis yang moderat, cenderung berafiliasi dengan Partai Golkar, begitupun sebagian kelompok Santri Tradisional yang awam. Sementara, dari kelompok abangan yang cenderung bergeser adalah mereka yang termasuk varian abangan elitis. Kenyataan ini tidak lepas dari pengaruh kebijakan rezim Orde Baru yang melakukan berbagai rekayasa untuk menghancurkan pengaruh politik aliran dalam kepartaian.⁷

| PKS, PBB | | | |
|----------|-------------|---------|----------------|
| PAN | PPP | PKB | PDIP |
| Ortodoks | Ortodoks | | |
| Modern | Tradisional | | Kaum Sinkretis |
| Santri | | Abangan | |

Gambar 9. Kecenderungan Afiliasi Partai Politik Pemilih dan Varian Keagamaan dalam Pemilu 2004 di Malang Raya

⁷ Pada jaman Orde Baru, kedua kutub (Santri dan Abangan) digiring baik secara halus maupun kekerasan oleh kekuatan Orde Baru untuk memilih Golkar sebagai pilihan politik mereka. Baik pemilih Abangan maupun pemilih Santri, sebagian besar tidak punya pilihan lain kecuali mencoblos Golkar untuk mencari aman baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan berjalannya waktu, pilihan politik terhadap Golkar ini menjadi hal biasa baik dikalangan Santri maupun Abangan, dan tidak heran apabila setelah berakhirnya kekuasaan Soeharto, banyak pemilih Santri maupun Abangan yang tidak merubah pilihan politiknya.

Kecenderungan afiliasi politik pemilih tersebut, didukung oleh hasil survey yang dilakukan penulis. Tidak ada satu pun partai politik yang memperoleh suara signifikan pada pemilu 2004, baik itu Partai Nasionalis maupun Islam yang mendapatkan dukungan murni pemilih tradisionalnya. Hampir semua partai mendapatkan dukungan baik dari pemilih Santri maupun pemilih Abangan, walaupun dukungan politik Pemilih Santri dan Pemilih Abangan terhadap masing-masing partai politik berbeda-beda.

Data menunjukkan bahwa komposisi pemilih Abangan dan Santri yang hampir seimbang adalah Golkar dengan perbandingan Santri 44% dan Abangan 56%. Hal ini menunjukkan bahwa Golkar merupakan pemilih yang paling heterogen dalam artian basis pemilihnya. Walaupun Golkar termasuk kedalam partai Nasionalis dengan asas Pancasila, akan tetapi konstituennya banyak juga dari kalangan Santri. Pemilih Santri Golkar lebih banyak datang dari kalangan Santri yang termasuk kategori Modernis, khususnya yang moderat. Sementara pemilih Abangan berasal dari kelompok Abangan Elitis.

Di sisi lain, pemilih PDIP banyak datang dari kalangan pemilih Abangan yaitu sebesar 72%, yang menurut Afan Gaffar merupakan Abangan populis yang tingkat keabangannya kuat (*strong Abangan*). Hal ini tidaklah mengherankan karena PDIP sangat kental dengan aroma Nasionalis-nya. Dukungan dari kalangan Santri terhadap PDIP sebesar 28%, yang umumnya berasal dari kalangan pemilih Tradisional yang awam dan tergolong Santri Lemah (*week Santri*). Kondisi PDIP ini hampir mirip dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat mendapat suara paling banyak dari kalangan pemilih Abangan yaitu sekitar 68%, sementara pemilih Santri 32%. Sementara PKB, keadaannya terbalik kalau dibandingkan dengan PDIP. PKB lebih banyak pemilihnya datang dari kalangan Santri yang terkategorikan Santri Tradisional yaitu 61%, sementara pemilih dari kelompok Abangan sebesar 39%, khususnya kelompok Abangan Populis.

Bagi pemilih PAN dan PKS, walaupun sama-sama mayoritas pemilihnya datang dari kalangan Santri, namun PKS mendapatkan pemilih Santri yang paling besar. PKS mendapat 87% pemilih dari kalangan Santri dan 13% datang dari pemilih Abangan, sementara PAN hanya mendapat 65% dari kalangan pemilih Santri dan 35% datang dari kalangan pemilih Abangan. Pemilih Santri PAN banyak datang dari

kelompok Santri Modernis yang tergolong Liberal, sementara PKS banyak datang dari kelompok Santri Modernis yang tergolong Fundamental. Dengan demikian bisa dikatakan, bahwa pemilih masih terikat dengan “pakem” aliran dalam menentukan pilihan politiknya walaupun dengan tingkat identifikasi dirinya yang sudah semakin melemah.

Tabel 24. Komposisi Pilihan Partai Politik Kelompok Santri dan Abangan di Malang Raya

| No | Partai Politik | Perbandingan Jumlah Pemilih (%) | |
|----|----------------|---------------------------------|---------|
| | | Santri | Abangan |
| 1 | P. Golkar | 44 % | 56 % |
| 2 | PDI-P | 28 % | 72 % |
| 3 | PKB | 61 % | 39 % |
| 4 | P. Demokrat | 32 % | 68 % |
| 5 | PKS | 87 % | 13 % |
| 6 | PAN | 65 % | 35 % |

Sumber Hasil Survey Di Malang Raya, Desember 2008.

Jumlah Sampel 241 responden, dilakukan dengan *clustered random sampling*.

Dengan demikian, walaupun telah mengalami sedikit perubahan, namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa aliran politik masih tetap eksis dalam pemilu era multipartai ini. Pemilih Santri masih berkecenderungan memilih partai politik yang Islam, sementara pemilih Abangan masih punya kecenderungan memilih partai yang Nasionalis. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemilu 1999 dan 2004 di Malang Raya keyakinan sosio-religi yang bersumber aliran seperti yang dikemukakan Geertz, masih menjadi bagian yang mewarnai kehidupan politik masyarakat. Hal ini, mungkin akan terus berlangsung dalam beberapa pemilu ke depan, dengan derajat yang semakin lama akan semakin berkurang.

C. Pemilih Santri dan Abangan

Sudah kita pahami bahwa yang disebut dengan santri adalah kelompok masyarakat dengan perilaku keberagamaan baik atau penganut ajaran Islam yang taat. Mereka menjalan Shalat, Puasa di bulan Ramadhan, dan bagi mereka yang mampu juga membayar zakat dan menunaikan ibadah haji. Dalam kehidupan politik, mereka sering

berusaha memperjuangkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Sementara mereka yang Abangan adalah kelompok masyarakat dengan tingkat keberagamaan yang minimal, atau sering disebut sebagai Islam KTP. Bagi mereka yang Abangan, jarang bahkan tidak pernah menjalankan rukun Islam, apalagi ada keinginan untuk menegakkan syariat Islam.

Secara umum, kelompok masyarakat Santri mempunyai corak dan kehidupan sosial yang berbeda dibanding dengan mereka yang Abangan. Walaupun demikian, pada saat-saat tertentu kedua kelompok ini saling bertemu, terutama dalam kegiatan-kegiatan seperti pembangunan lingkungan, peringatan hari besar Nasional maupun untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik, termasuk ketika acara perkawinan dan kematian.

Gaya bahasa kelompok Abangan cenderung kasar dalam ukuran berbahasa Jawa, tanpa tatakrama, namun mereka mempunyai solidaritas kelompok yang tinggi dalam *peer group*-nya. Sebaliknya yang Santri, tampak lebih santun dalam bertata krama. Lebih jauh, dilihat dari sisi penampilan, kelompok Abangan ini sangat kontras dengan Santri. Kalau kelompok Santri, dalam berpakaian menonjolkan pakaian koko dengan peci di atas kepala, sementara kelompok Abangan lebih berpenampilan seperti gaya barat dan kadang pakai anting maupun kalung dengan tato di tubuhnya. Kalau kelompok Santri sering berada di lingkungan Masjid atau Langgar, sementara kelompok Abangan lebih banyak berada di pinggir-pinggir jalan atau di pos-pos yang ada di kampung. Dalam aktivitas kesehariannya, kelompok Santri banyak menghabiskan waktunya untuk mengaji, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan keagamaan, sementara kelompok Abangan menghabiskan waktu senggangnya dengan main kartu, atau cangkrukan (ngumpul bareng sambil ngobrol-ngobrol).

1. Santri

Menurut hasil pengamatan Geertz (1960), perbedaan yang mencolok antara Abangan dan Santri adalah jika Abangan tidak acuh terhadap doktrin dan terpesona kepada upacara, sementara Santri lebih memiliki perhatian kepada doktrin dan mengalahkan aspek ritual Islam yang menipis. Di samping itu, Santri juga lebih peduli kepada pengorganisasian sosial umat di sekeliling mereka, dengan empat lembaga sosial utama

yaitu; parpol Islam, sistem sekolah agama, jamaah masjid/langgar, dan birokrasi pemerintah/Depag. Menurut Geertz, keempat struktur kelembagaan itu terjalin satu sama lain, bersangkutan paut dengan pola ideologis modern dan kolot yang menyediakan suatu kerangka yang kompleks bagi hampir semua perilaku keagamaan umat Islam yang berlaku.

Perbedaan sosial telah menyebabkan timbulnya konflik-konflik di antara Santri Tradisional dan Modern, akan tetapi konflik-konflik itu dapat terpecahkan oleh kesamaan keagamaan. Gambaran perbedaan pola ideologis modern dan kolot dalam partai politik, Geertz menjelaskan fenomena tahun 1953-1954 sebagai akhir dari konfliknya konflik telah melahirkan PSII sebagai partai kecil serta NU dan Masyumi sebagai partai besar. PSII sebagai partai kecil, sebagian anggotanya merupakan pejuang SI dan keturunannya, partai NU sebagai Orsos dan Parpol yang digabungkan dalam satu kesatuan organisasi yang agak lemah, sedangkan Masyumi sedikit lebih baik dalam organisasi yang dipimpin orang Muhammadiyah, dan Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi sosial.

Pembagian Santri modern dan Konservatif oleh Geertz didasarkan pada lima perbedaan tafsir keduanya yaitu: (1) kehidupan yang ditakdirkan lawan kehidupan yang ditentukan sendiri; (2) pandangan yang totalistik lawan terbatas; (3) Islam sinkretik lawan Islam murni; (4) perhatian kepada pengalaman religius lawan penekanan aspek instrumental agama; (5) pembenaran atas tradisi dan madzhab lawan pembenaran purifikasi secara umum dan pragmatis. Dalam hal penyikapan terhadap Abangan, antara Santri Modernis dan Konservatif mempunyai perbedaan, dimana Modernis menekankan disosiasi dan purifikasi, sementara kaum Konservatif mencoba mengambil jalan tengah yang selaras dengan tradisi yang berlaku. Oleh karena itu, Geertz menyebutkan bahwa pandangan dunia Santri kolot sebenarnya lebih dekat kepada Abangan.

Pandangan keagamaan Santri Modernis *vis a vis* Konservatif mempolakan pengorganisasian politik yang sama. Ada Masyumi-Muhammadiyah dan PSII sebagai progresif-Modernis dan NU yang Konservatif. Untuk mempertahankan doktrin, Santri yang Modernis maupun Konservatif sama-sama mengembangkan pola pendidikan yang khusus dan terus menerus. Kaum Konservatif menjadikan pondok (pola

Santri Tradisional), langgar dan masjid (komunitas Santri lokal), kelompok tarekat (mistik Islam tradisional) sebagai sarana mempertahankan doktrinnya. Di sisi lain Santri Modernis menggunakan model sekolah untuk media sosialisasi dan doktrinisasi. Persoalan yang sama dalam internal kaum Modernis dan Konservatif adalah adanya konflik. Konflik dalam NU terjadi antara generasi muda yang terpelajar dan terpengaruh kota dengan kyai-kyai pedesaan yang lebih tua, sementara konflik dalam Masyumi-Muhammadiyah antara yang saleh dan sekuler atau mengatur agar Islam Modernis tidak menjadi sekuler.

Terkait ide negara Islam, Santri Konservatif memahaminya sebagai teokrasi di mana para kyai lah yang berkuasa. Sementara Modernis berpandangan ada jaminan non Muslim tidak menjadi kepala negara dan konstitusi yang mencantumkan hukum harus sesuai dengan jiwa al-Quran dan Hadist dan menyerahkan pelaksanaannya pada pembuat Undang-undang. Geertz memandang Depag merupakan kompromi kedua Santri terhadap keberadaan negara nasional. Pada akhirnya terjadi rivalitas kedua Santri dalam menguasai birokrasi di Depag. Sementara pola ibadah Santri yang meliputi sembahyang, shalat Jumat dan puasa dalam beberapa masalah masih terpengaruh oleh perbedaan Santri Modernis dan Konservatif. Di antaranya persoalan khutbah, teraweh, tadarus dan akhir liburan puasa. Terkait shalat itulah yang secara tegas membedakan antara Santri dengan Abangan.

Dengan demikian dapat dikatakan, seorang Santri setidaknya memegang rukun Islam (membaca dua kalimat syahadat, menjalankan shalat lima waktu, membayar zakat bagi yang telah memenuhi syarat, menjalankan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu). Di antara lima rukun Islam ini, yang paling umum berlaku bagi umat Islam, relatif lepas dari status sosial dan ekonomi, adalah syahadat, shalat lima waktu, dan puasa pada bulan Ramadhan. Seorang Santri adalah Muslim yang biasa atau setidaknya tidak jarang menjalankan ketiganya. Sementara Abangan tidak atau jarang menjalankannya, dan digantikan dengan kepercayaan dan ritual Abangan sendiri. Karena itu, frekuensi atau intensitas menjalankan shalat lima waktu dan puasa pada bulan Ramadhan merupakan ukuran minimal untuk membedakan seorang Santri dan non-Santri.

Berdasarkan hasil di lapangan penulis menemukan bahwa di Malang Raya, pola perilaku keberagamaan masyarakat Santri hampir sama seperti

yang dikemukakan Geertz, baik di Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun Kota Batu. Kelompok Santri, dicirikan dengan kehidupan yang agamis dengan menjalankan rukun Islam yang berjumlah lima tuntutan, yaitu Sahadat, Shalat lima waktu, Zakat, Puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan Ibadah Haji bagi yang sudah mampu. Mereka biasanya rutin ke Masjid untuk menjalankan Shalat lima waktu, berpuasa sebulan penuh di Bulan Ramadhan dimana setiap malamnya menjalankan Shalat Tarawih, dan mereka merasa tidak lengkap kalau belum menjalankan rukun Islam ke lima yaitu pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Secara konseptual, Santri dibagi ke dalam dua kelompok yaitu Santri Tradisional dan Santri Modern (Jackson, 1978), kedua kelompok Santri ini dalam hal menjalankan Rukun Islam hampir sama. Di samping itu mereka yang Santri mempunyai ciri, simbol serta atributnya untuk menunjukkan kesantrian mereka.

Walaupun demikian, pola sosio-religi sebagaimana yang dikemukakan Geertz (1960) mengalami perkembangan dalam variannya karena berjalannya waktu dan berkembangnya dinamika kemasyarakatan. Santri Modernis menunjukkan adanya fenomena yang baru, dimana dalam komunitas Santri Modernis terbagi ke dalam kelompok berdasarkan pandangan dan pemahamannya mengenai ajaran. Ada tiga kelompok Santri Modernis yang bisa dikategorisasikan yaitu Santri Modernis Fundamental, Liberal dan Moderat. Sementara Santri Tradisional dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok Awam, Alim.

a. Santri Modernis

Di antara kelompok Santri Modernis terkait apakah liberal maupun konservatif, Mujani dan Liddle (2004) menyebutkan bahwa hal ini tidak ada korelasinya dengan tingkat pendidikan. Karena menurutnya, gejala liberalisme maupun konservatisme, keduanya berkembang di perguruan-perguruan tinggi pemerintah seperti Universitas Indonesia Jakarta, dan Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Terkait dengan Islam Modernis, Mujani dan Liddle mengemukakan sebagai berikut:

Some Modernists have become liberals, reading the Qur'an in a more open, metaphoric, or presentist way to allow incorporation of borrowed practices and institutions such as banks and parliaments. Liberal tend to accept Christians and other non-Muslims as equal members of Indonesian society. Other modernists have become conservatifs, even fundamentalists. Conservatatives read the Qur'an and other texts literally and are highly

suspicious of the intentions of non-Muslim. Conservatives urge the formation of Islamic banks, the wearing by women of the jilbab or Islamic headscarf, the separation of the sexes in state schools, and in broad terms the implementation of Islamic law.

Salah satu ciri dari Santri Modernis adalah aktivitas kegiatan lebih banyak dilakukan oleh organisasi. Aktivitas Santri Modernis dalam hal keagamaan lebih terorganisir, khususnya di Muhammadiyah. Dalam artian pengajian atau kegiatan lainnya lebih banyak dilaksanakan oleh organisasi yang memang sudah mempunyai struktur dari mulai pusat sampai ke ranting di kampung-kampung. Urusan pengajian biasanya diorganisir oleh Majelis yang dinamakan Majelis Tabligh, sementara untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan ada bidang sendiri yang dinamakan Majelis Pengembangan Kesejahteraan Ummat.

Dalam kepatuhan kepada tokoh, dalam kalangan santri Modernis yang terkenal rasional dan independen sangat rendah. Hal yang mungkin terjadi adalah kepatuhan pada keputusan organisasi. Oleh karena itu, dalam memobilisasi Santri Modernis untuk urusan politik sangatlah sulit. Banyak dari pemilih pada pemilu 2004 yang tidak memilih Amin Rais sebagai calon presiden, padahal Amin Rais adalah tokoh yang paling dikenal dalam Muhammadiyah. Begitupun berbagai himbauan ataupun perintah yang sifatnya tidak merupakan hasil keputusan organisasi, banyak dari kalangan santri Modernis tidak patuh, apalagi urusan politik.

b. Santri Tradisional

Bagi kaum Santri Tradisionalis dalam menjalankan kehidupan cenderung tenang, kalau tidak dikatakan statis. Aktivitas kesehariannya tidak lepas dari ke Langgar atau Masjid, pengajian, tahlilan, yasinan dan lain-lain, Di samping menjalankan aktivitasnya sebagai petani. Pemikiran mereka dibatasi oleh keyakinan akan adanya takdir yang sudah menjadi ketentuan mengenai nasib mereka. Bagi mereka yang bermatapencarian sebagai petani, buruh, pedagang ataupun yang lainnya tampak stagnan tidak ada upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara, kalangan Santri Modernis lebih fleksibel dalam berusaha, dalam artian tidak monoton. Umumnya Santri Modernis bermatapencarian sebagai guru sekolah, pedadang, atau bahkan ada yang melakukan pekerjaan keduanya. Pola hidup yang dinamis, dalam kehidupan Santri Modernis kelihatan menonjol sehingga

tampak lebih menonjol aktivitasnya jika dibanding dengan masyarakat lain di lingkungannya.

Pola peribadatan yang berkembang di lingkungan Santri Tradisionalis banyak menonjolkan aspek ritual, seperti khajatan, tahlilan, yasinan, diba'an, di samping peribadatan wajib. Oleh karena itu tampak kehidupan keberagamaan di lingkungan Santri Tradisionalis sangat padat, sehingga waktu mereka cenderung lebih banyak diisi oleh aktivitas keagamaan yang bersifat ritual itu. Di samping itu, bagi Santri Tradisionalis, upacara kematian menjadi hal yang paling mendapat perhatian. Apabila ada satu orang yang meninggal dalam satu kampung, maka baik Santri Tradisionalis laki-laki maupun perempuan hampir semuanya dalam kampung itu mendatangi keluarga yang meninggal. Sebelum yang meninggal itu dikuburkan, tidak ada orang yang berani melakukan pekerjaan. Bahkan, bagi mereka yang bekerja di perusahaan, kalau tetangganya ada yang meninggal, maka mereka meminta ijin untuk tidak masuk kerja. Oleh karena itu, dalam hal tertentu Santri Tradisionalis, seperti yang dikemukakan Geertz, cenderung lebih dekat dengan Abangan. Sementara di lingkungan Santri Modernis, tidak ada upacara kematian yang menonjol, hanya sebatas mereka memandikan, menyolatkan, dan menguburkan. Akan tetapi tidak menjadi kewajiban sosial untuk mendatangi orang meninggal dengan harus meninggalkan kewajiban sebagai pekerja di perusahaan. Mereka menganggapnya sebagai kewajiban kolektif (*fardzu kipayah*).

Kepatuhan Santri tradisional tertuju pada personal kyai atau figur-figur yang dianggap representasi dari kaum Nahdilyin bukan pada pengurus organisasinya. Namun yang paling penting dalam kepatuhan ini adalah aktivitas yang mengiringi masyarakat keseharian dan kebutuhan upacara seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dalam hal ini ulama atau kyai lokal menjadi lebih efektif dalam membangun kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, kunci utama dari afiliasi politik yang ada pada kelompok Santri Tradisional adalah kyai. Sementara pengingkaran mereka terhadap kyai dalam urusan politik bukan disebabkan karena tidak menjadikan kyai sebagai figur atau tokoh, melainkan ada kepentingan lain khususnya kepentingan ekonomi. Banyak dari masyarakat yang tergolong Santri Tradisional tidak patuh secara politik ke kyai karena partai lain lebih menjanjikan secara ekonomi dibanding dengan partai yang didukung oleh kyai.

2. Abangan

Perilaku keberagamaan Abangan, menurut Geertz (1960), lebih banyak menonjol adalah *slametan* yang merupakan pusat tradisi yang menjadi perlambang kesatuan mistis dan sosial di mana mereka berkumpul dalam satu meja menghadirkan semua yang hadir dan ruh yang gaib untuk memenuhi setiap hajat orang atas suatu kejadian yang ingin diperingati, ditebus, atau dikuduskan. Slametan dilakukan dalam berbagai peristiwa yang menurut orang Jawa terjadi dan mempengaruhi keluarga sebagai sistem utamanya, misalnya kelahiran, kematian, pindah rumah, mimpi buruk, ganti nama, sakit, dan lain lain. Upacara slametan dilakukan dengan cara menyediakan hidangan khas, dupa, pembacaan do'a Islam, dan pidato tuan rumah yang disampaikan dalam bahasa Jawa tinggi yang resmi. Bagi kalangan Abangan yang terdiri dari petani dan orang-orang kecil, slametan adalah bagian dari kehidupannya.

Dalam tradisi *slametan* dikenal adanya siklus slametan: (1) yang berkisar krisis kehidupan (2) yang berhubungan dengan pola hari besar Islam namun mengikuti penanggalan Jawa (3) yang terkait dengan integrasi desa, bersih desa (4) slametan sela untuk kejadian luar biasa yang ingin dislameti. Semuanya menunjukkan betapa slametan menempati setiap proses kehidupan dunia Abangan. Slametan berimplikasi pada tingkah laku sosial dan memunculkan keseimbangan emosional individu karena telah di-slamet-i (hal. 17). Bagi masyarakat Abangan, kepercayaan kepada roh dan makhluk halus menempati kepercayaan yang mendasari misalnya perlunya mereka melakukan slametan. Mereka percaya adanya memedi, lelembut, tuyul, demit, danyang, dan bangsa alus lainnya. Hal yang berpengaruh atas kondisi psikologis, harapan, dan kesialan yang tak masuk akal. Semuanya melukiskan kemenangan kebudayaan atas alam, dan keunggulan manusia atas bukan manusia (hal. 36). Gambarnya adalah kebudayaan orang Jawa berkembang dan hutan tropis yang lebat berubah menjadi persawahan dan rumah, makhluk halus mundur ke sisa belantara, puncak gunung berapi, dan Lautan Hindia.

Kalau kepercayaan mengenai roh dan berbagai slametan merupakan dua sub katagori daripada agama Abangan, maka yang ketiga adalah kompleks pengobatan, sihir dan magis yang berpusat pada peranan seorang dukun (hal.116). Ada beberapa macam dukun: dukun bayi, dukun pijet, dukun prewangan, dukun calak, dukun wiwit, dukun temanten, dukun petungan, dukun sihir, dukun susuk, dukun japa,

dukun jampi, dukun siwer, dukun tiban. Masyarakat Jawa secara umum mengakui adanya dukun, namun apakah mereka percaya kepada kemampuan dukun merupakan masalah lain, karena *mandi* dan tidaknya seorang dukun juga terkait dengan masalah kecocokan (cocog).

Dilihat dari kehidupan sosial dan kemasyarakatan, Abangan ini ada variannya yaitu Elitis dan Populis. Abangan elitis punya kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan supranatural dari benda-benda, tempat-tempat, atau peristiwa-peristiwa tertentu di satu pihak, dan di pihak lain shalat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan tidak menjadi bagian dari ritual mereka. Sementara itu varian populis punya tingkat soliditas yang tinggi dalam memperjuangkan nasib mereka, dan di pihak lain tidak menjalankan ritual Islam seperti shalat lima waktu ataupun puasa di bulan Ramadhan.

Abangan Populis, afiliasi politiknya sangat fanatik pada partai politik Nasionalis, yang dalam pemilu 1999 dan 2004 di wakili oleh PDIP, sementara Abangan yang elitis tidak menunjukkan fanatisme yang kuat dan cenderung memilih partai berkuasa. Namun demikian, kelompok Abangan Populis ini kadang pragmatis dan cenderung mengikuti irama atau apa yang umum dalam masyarakat. Sebagian lagi Abangan populis ini cenderung untuk berafiliasi secara politik kepada partai-partai selain PDIP, seperti Partai Golkar atau pun partai Nasionalis lain seperti Partai Demokrat. Dan di sisi lain, ada sebagian kelompok yang menunjukkan karakteristik Santri, akan tetapi secara politik mereka lebih suka berafiliasi ke partai Nasionalis. Bahkan secara umum, walaupun di Malang Raya ini mayoritas beragama Islam, namun secara politik lebih kental dengan aroma partai Nasionalisnya.

a. Abangan Elitis

Dengan berjalannya waktu, sejak Geertz melakukan penelitian di Mojokuto, wilayah Jawa mengalami perkembangan pesat. Desa, pasar, dan birokrasi yang menjadi dasar kelembagaan yang diketengahkan Geertz tidak lagi punya karakteristik seperti dulu, karena sudah mengalami evolusi walaupun aspek sosio-religi yang dikemukakan Geertz masih nyata karena itu adalah gejala laten. Dengan demikian, beberapa persoalan hasil penelitian mengenai agama Jawa perlu ada penyesuaian dengan perkembangan sekarang. Birokrasi yang dulunya sebagai alat kepanjangan tangan dari pemerintahan kolonial, dan para

bangsawan yang punya trah kerajaan menjadi bagian dari birokrasi kolonial, sekarang ini sudah berbeda. Birokrasi sekarang tidak diisi oleh orang-orang yang menjadi kepanjangan tangan dan sistem perekrutannya pun sudah dilakukan dengan pola-pola yang merit sistem sebagaimana dikemukakan Weber.

Merujuk pada kenyataan tersebut, Priyayi yang dikategorikan oleh Geertz, saat ini tidak lagi menjadi sebuah realitas objektif. Yang ada hanyalah sebuah realitas historis yang pernah ada pada masa itu. Di sisi lain, kalau kita kembali kepada dasar kategorisasi Geertz yang berbasis pengalaman keberagaman masyarakat, maka konsep Priyayi pun menjadi tidak masuk, karena pengelompokan Priyayi hanya didasarkan pada perbedaan dalam pola perilaku yang membedakan dengan Abangan yang kasar, dimana Priyayi halus dengan label “etiket”.

Oleh karena itu, Priyayi, kalau dilihat dari aspek keberagaman lebih merupakan varian dari Abangan, bukan bagian tersendiri. Dalam realitas politik, Priyayi ini sulit dikategorisasikan untuk menjadi kelompok politik sendiri. Berdasarkan kenyataan tersebut, Priyayi itu sebenarnya adalah Abangan dengan varian Abangan Elitis. Hal ini apabila dilihat dari keberadaan mereka yang umumnya di perkotaan, dan dari segi pendidikan mereka lebih maju.

b. Abangan Populis

Abangan Populis merupakan bagian terbesar dari kelompok Abangan. Karakter umum kalangan Abangan tidak begitu memperhatikan doktrin Islam, dan mereka sangat mengutamakan dan memperhatikan detail keupacaraan, sementara di kalangan Santri perhatian terhadap doktrin hampir seluruhnya mengalahkan ritual Islam yang telah menipis. Seorang Abangan populis tahu kapan harus menyelenggarakan slametan dan apa yang harus jadi hidangan pokoknya – bubur untuk kelahiran, apem untuk kematian. Walaupun mereka tidak memahami makna itu semua, namun secara umum mereka tahu alakadarnya tentang apa yang dilambangkan oleh berbagai unsur dalam hidangan itu.

Salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh kelompok abangan populis, dalam hal keupacaraan yang sifatnya massal adalah bersih Desa. Dalam hal bersih desa, sebagaimana peneliti amati, hampir setiap rumah membuat “ancak”, sebuah hidangan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk alakadarnya diwadahi dalam sebuah wadah yang alasnya

terbuat dari anyaman bambu dan pinggirnya dari kulit pohon pisang. Umumnya acara bersih desa dilakukan pada sore hari atau abis shalat Isya, yang selanjutnya diisi dengan acara kesenian seperti jaranan, dan yang terpenting adalah wayangan. Acara inti dipimpin oleh tokoh agama, dengan sambutan sepatah dua patah kata, tokoh agama itu memberikan penjelasan mengenai apa arti dan fungsi bersih desa itu. Setelah itu dilanjutkan dengan do'a bersama. Bersih desa ini, tidak hanya diikuti oleh kalangan Abangan, tapi juga oleh kalangan Santri Tradisional.

Acara slametan dilakukan oleh masing-masing rumah tangga, dimana para kepala rumah tangga jugalah yang datang untuk mengikuti slametan itu, untuk kemudian membawa pulang sebagian makanan bagi anggota keluarganya yang lain. Bahkan upacara bersih desa, yang paling dekat kepada upacara publik atau upacara supra rumah tangga yang dapat ditemukan orang dalam sistem Abangan. Bersih desa tak lain adalah penggabungan sumbangan dari berbagai slametan terpisah yang dilakukan oleh rumah tangga-rumah tangga desa itu dari pada suatu upacara untuk desa itu secara keseluruhan: hidangannya merupakan penganan dari berbagai dapur yang lantas dibagi-bagi. Kenapa slametan ini dilakukan oleh rumah tangga, karena dalam kalangan Abangan unit sosial yang paling dasar tempat hampir semua upacara berlangsung adalah rumah tangga – seorang pria, istrinya dan anak-anaknya.

Dalam solidaritas kelompok atau pertemanan, dari kelompok Abangan ini cukup tinggi. Ketika salah seorang dari mereka terlibat pertengkaran, maka bisa dipastikan bahwa pertengkaran itu akan menjadi pertengkaran kelompok. Oleh karena itulah, menurut salah satu informan, sebelum adanya perkumpulan Arema di Malang Raya, sering terjadi perkelahian massal yang melibatkan dua kelompok berbeda dan dari wilayah yang berbeda. Umumnya kelompok Abangan suka bentrok dan berkelahi ini berasal dari kalangan menengah ke bawah, atau abangan populis.

Sebagaimana dikemukakan Geertz, bahwa Abangan adalah kelompok Muslim yang tidak taat menjalankan kewajiban agama Islam, apalagi memperjuangkan agar negara berasaskan Islam. Bagi kelompok Abangan, Islam tidak penting dalam kehidupan sosial-politik. Tidak heran apabila ketika Orde Lama, kelompok Abangan ini tergoda untuk mendukung partai politik yang berhaluan kiri seperti Partai Komunis Indonesia. Pada saat Orde Baru, Abangan yang berada

di Malang raya mewujudkan nilai-nilai politiknya pada partai PDI dan sebagian lagi pada Golkar sebagai upaya mencari aman dari represi rezim penguasa.⁸

D. Proses Sosialisasi dan Identifikasi Pemilih

Pendekatan psikologis menggunakan dan mengembangkan konsep dari psikologi, terutama konsep sikap dan sosialisasi, untuk menjelaskan perilaku pemilih. Menurut pendekatan ini para pemilih di Amerika menentukan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya (Hyman, H., 1969).

Sikap menjadi variabel sentral dalam menjelaskan perilaku politik disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri. Menurut Greenstein (1969) fungsi sikap ada tiga, yaitu:

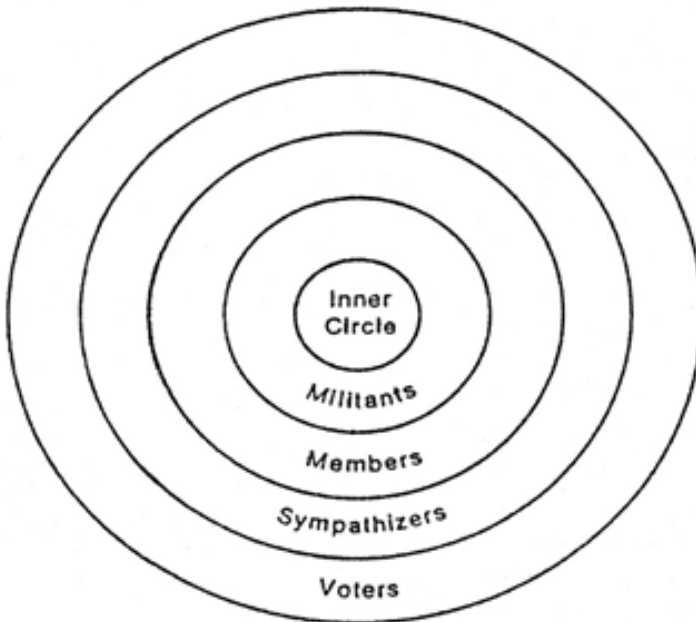
"Pertama, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya, penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. Kedua, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Artinya, seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. Ketiga, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berujud mekanisme pertahanan (defence mechanism) dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi."

Walaupun demikian, sikap bukanlah sesuatu yang bersifat begitu saja jadi, tetapi terbentuk melalui proses yang panjang, dari mulai lahir sampai dewasa. Pada tahap *pertama*, informasi pembentukan sikap berkembang pada masa anak-anak yang sudah mulai mempersonifikasikan politik. Fase ini merupakan proses belajar keluarga, dimana anak-anak belajar dari orang tua tentang bagaimana perasaan orang tua mereka terhadap pemimpin-pemimpin politik; bagaimana orang tua mereka menganggap isu-isu politik, dan sebagainya. Tahap *kedua*, adalah bagaimana sikap politik dibentuk pada saat dewasa ketika menghadapi situasi di luar

⁸ Perbedaan antara Abangan yang ada di Golkar dan di PDI secara kultural terletak pada sopistikasi kepercayaan mereka dan pada perbedaan kelas.

keluarga, seperti di sekolah, antara kelompok-kelompok sebaya, dan sebagainya. Tahap *ketiga*, bagaimana sikap politik dibentuk oleh kelompok-kelompok acuan seperti pekerjaan, gereja, partai politik, dan asosiasi-asosiasi lain.

Melalui proses sosialisasi ini kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik, yang berupa simpati terhadap partai politik. Ikatan psikologis ini yang kemudian dikenal sebagai identifikasi partai. Konsep identifikasi partai dijadikan variabel sentral dalam menjelaskan perilaku memilih oleh penganut pendekatan psikologis. "Sebagaimana diakui oleh Czudnowski (1976), ...'party identification' has been found to be the single most important variable determining voting preferences".



Gambar 10. Tingkat Afiliasi Kepada Partai Politik

Mark N. Hagovian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978

Walaupun demikian, patut dipahami bahwa identifikasi partai di sini berbeda dengan *voting*. Sebab identifikasi partai lebih menunjuk pengertian psikologis, yang ada dalam konstruksi pikiran manusia dan tidak dapat diobservasi secara langsung, sementara *voting* merupakan

tindakan yang jelas dan dapat diobservasi secara langsung. Identifikasi kepartaian ini pada akhirnya bermuara pada afiliasi politik. Semakin dalam seseorang terlibat dalam politik, maka semakin tinggi tingkat afiliasi politik seseorang.

1. Proses Sosialisasi

a. Sosialisasi dalam Kelompok Santri

Perbedaan yang cukup menonjol antara kelompok Santri Modern dan Santri tradisional adalah tradisi dalam melakukan sosialisasi dan tranfer keilmuan. Di kalangan Santri Modern, sosialisasi dan transfer keilmuan lebih banyak dilakukan lewat buku-buku teks, sehingga dikenal dengan budaya baca. Bagi kelompok Santri Tradisional, transfer keilmuan lebih banyak dilakukan lewat kyai, sehingga lebih dikenal dengan budaya lisan. Perbedaan dalam proses sosialisasi dan transfer keilmuan di antara kedua kelompok ini telah berpengaruh pada kultur serta perilaku keberagamaan masing-masing. Transfer keilmuan lewat buku dalam kelompok Santri Modernis telah melahirkan sikap dan perilaku independen yang tidak taklid pada seseorang. Di sisi lain, budaya lisan yang telah dikembangkan dalam tradisi pesantren, telah membangun hubungan kuat antara kyai dan santri termasuk masyarakat yang memposisikan kyai sebagai patron. Dengan demikian posisi kyai menjadi dominan dan sentral dalam kehidupan kelompok Santri Tradisional, sebaliknya santri dan masyarakat berada pada posisi dependen.

Lebih jauh, perbedaan antara kelompok Santri Modernis dan Tradisional juga pada agen sosialisasi. Keluarga, sekolah formal, organisasi menjadi agen yang paling menonjol dalam proses sosialisasi nilai-nilai dan doktrin di kalangan kelompok Modernis. Bagi kelompok Tradisional, pesantren, Langgar atau Mesjid, acara pengajian, Yasinan, Tahlilan lebih berperan dalam proses sosialisasi berbagai doktrin serta adat dan kebiasaan yang melingkupi kehidupan kelompok masyarakat Islam Tradisional.

b. Sosialisasi dalam Kelompok Abangan

Sementara sosialisasi di lingkungan kelompok Abangan sedikit berbeda dengan kelompok Santri. Proses sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat Abangan dimulai dari keluarga, kelompok permainan, dan lingkungan masyarakat. Keluarga Abangan, dengan berbagai upacara

yang dilakukan, perilaku kehidupan anggota keluarga terutama ayah, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses asimilasi perilaku anak dalam keluarga tersebut. Aktivitas kesenian yang digemari oleh kaum Abangan, jaranan, dan sejak dini sudah disosialisasikan kepada anak-anak mereka. Berbagai alat peraga yang sering dimainkan dalam kesenian jaranan juga menjadi alat permainan anak-anak Abangan sejak kecil, seperti kuda-kudaan, cambuk, bahkan perilaku kalap yang sering dipertontonkan dalam pertunjukan jaranan. Begitu juga dengan apa yang disebut bantengan, kesenian ini selalu dipertontonkan dalam masyarakat Abangan terutama menjelang peringatan hari besar Nasional. Hal ini secara sadar atau tidak, masyarakat Abangan telah mempunyai gambaran sendiri tentang kehidupan sosial maupun kehidupan politik dengan simbol-simbol dalam setiap aktivitas yang dilakukan dalam masyarakatnya.

Simbol perjuangan mereka dalam melawan penguasa yang sering menindas kaum golongan kecil (*wong cilik*) mereka ilustasikan dalam sebuah aktivitas kesenian yang disebut bantengan. Dalam kesenian itu *wong cilik* disimbolkan dengan kerbau/banteng, sementara penguasa disimbolkan dengan harimau. Kesenian ini menjadi tontonan yang menarik dari kalangan Abangan karena dirasakan mewakili kesadaran dan kenyataan kolektif mereka akibat tekanan dan himpitan ekonomi yang mereka alami setiap hari. Acara kesenian bantengan ini digelar selalu bertepatan dengan acara tujuh belasan, sebagai bagian dari peringatan kemenangan masyarakat melawan penjajah. Dan mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai *wong cilik*, merasakan bahwa bagi mereka kenyataan nasib yang selalu tidak berubah, salah satunya diakibatkan oleh adanya regulasi dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada mereka. Maka dari itulah, makna PDI perjuangan yang mengusung simbol kepala banteng, dengan embel-embel perjuangan memberikan napas baru yang menyalurkan energi bagi kelompok Abangan untuk membangun solidaritas kelompok seperjuangan dengan sama-sama mendukung partai pimpinan Megawati.

2. Identifikasi Diri

Sebagaimana telah dikemukakan, identifikasi kepartaian seseorang merupakan hasil proses sosialisasi yang turun temurun dari satu generasi ke generasi. Berkenaan dengan identifikasi partai, Harrop (1987) mengemukakan sebagai berikut: "*The concept of party identification denotes the long-term feelings of attachment which many electors develop to a*

particular political party". Dan secara umum, Angus Campbell dkk. (1960) mendefinisikan identifikasi partai sebagai "*sense of individual attachment to a party,*" and "*this tie is a psychological identification which can persist without a consistent record of party support*". Identifikasi kepartaian diyakini awalnya diperoleh dari orang tua, dalam banyak kasus, hal ini diyakini menjadi tetap berlangsung sepanjang hidup, walaupun suatu waktu mengalami peningkatan maupun penurunan selama periode dewasa (Philip E. Converse, 1972). Oleh karena itu tidaklah salah kalau Harrop (1987) menyatakan:

"Thus identification with a party forms part of the citizen's self-image, initially inherited through the family but then strengthening with its duration, as adult voters rely more and more on their partisanship to help them make sense of continuing barrage of political information which assails them.

Identifikasi kepartaian akan mempengaruhi pilihan partai politik orang-orang menurut Campbell dan teman-temannya, "*the strength and direction of party identification are in fact of central importance in accounting for attitude and behavior*". Dalam beberapa kasus dimana berbagai isu dan kandidat tidak begitu menonjol, peran identifikasi kepartaian mungkin menurun atau menjadi kurang signifikan dalam menjelaskan perilaku *voting*. Namun sebaliknya, dalam situasi dimana individu tidak punya pemahaman terhadap berbagai isu, catatan partai politik, atau kandidat, peran dari identifikasi kepartaian akan menjadi sangat kuat. Dalam kasus ini Campbell dkk. (dalam Harrop, 1987), pengarang dari *the American Voter* berpendapat bahwa:

"If someone has little perception of the candidates, of the record the parties, of public issues or questions of interests, his attitudes toward these things may play less important intervening role of relatively impoverished attitude who yet have a sense of partisan loyalty, party identification has a more direct influence on behavior than it has among people with a well-elaborated view of what their choice concerns".

a. Identifikasi Politik Kelompok Santri

Sementara yang berkaitan dengan pola afiliasi dari kelompok Santri, kelompok Konservatif umumnya berafiliasi dengan partai-partai yang punya ikatan historis dengan NU, dan kelompok Modernis umumnya memilih partai politik Islam yang punya ikatan historis dengan ormas Modernis, seperti Muhammadiyah. Namun demikian, dari hasil pengamatan di lapangan, kategori partai Islam bagi pemilih tidak hanya

berdasar pada platform partai. Para pemilih mengkategorikan apakah itu partai Islam atau bukan juga ditentukan oleh tokoh yang ada di dalam partai tersebut.

Dalam kasus kemenangan relatif PAN pada pemilu 1999, terhadap partai-partai Muslim Modernis lain seperti PBB, PK, Partai Masyumi, sebagian besar dapat dijelaskan dengan kehadiran Amien Rais sebagai tokoh nasional di pucuk kepemimpinan partai tersebut yang merupakan tokoh Islam Modernis. Begitupun keunggulan pengumpulan suara oleh PKB dibanding partai-partai NU yang lain seperti PNU, dan Partai Suni, dan bahkan PPP sendiri, merupakan hasil dari ketokohan Gus Dur di partai tersebut. Walaupun PAN dan PKB keduanya tidak mencantumkan Islam sebagai asas tetap menjadi partai pilihan kaum Modernis dan Tradisional. Oleh karena itu tidaklah heran apabila PKB yang dianggap sebagai partainya NU banyak mendapat dukungan di wilayah Malang Raya, begitu juga dengan PAN dianggap sebagai partainya warga Muhammadiyah.

Hasil temuan di lapangan juga menunjukkan kuatnya konflik berdasarkan politik aliran antara Santri Modernis dan Tradisional salah satunya ditunjukkan oleh adanya anggapan di kalangan warga Nahdliyin bahwa PAN ini adalah partainya Muhammadiyah. Keadaan ini mencerminkan adanya resistensi dari kalangan Santri Tradisional terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang punya kaitan dengan Muhammadiyah. *Image* Muhammadiyah di kalangan warga Nahdliyin yang tinggal di pedesaan tidak baik, karena mereka menganggap Muhammadiyah sebagai agama baru. Oleh karena itu, jangankan masuk menjadi anggota PAN yang dianggap sebagai partai Muhammadiyah, ada orang ataupun warga yang dianggap simpatisan Muhammadiyah saja mereka sangat antipati sehingga tidak jarang simpatisan Muhammadiyah yang diisolir dalam kehidupan sosial di lingkungannya. Bahkan sering terjadi benturan di tingkat *grassroot* antara warga Muhammadiyah dan warga NU. Perbedaan atau *khilafiah* sering menjadi penyulut ketegangan antara NU dan Muhammadiyah, seperti khunut dalam shalat, tahlilan bagi yang meninggal, ataupun ritual lain telah menjadi barometer dari perbedaan warga Muhammadiyah dengan NU di tingkat *grassroot*. Di sisi lain bagi partai politik yang dilahirkan oleh NU, berbagai ritual keagamaan yang dilakukan oleh warga dijadikan sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi dan sekaligus justifikasi bahwa partai politiknya merupakan bagian integral dari NU.

Hasil proses sosialisasi yang dilakukan baik oleh tokoh struktural maupun kultural NU telah melahirkan sikap antipati terhadap Muhammadiyah dan sekaligus kepada PAN yang dianggap partainya Muhammadiyah dari warga Nahdilyin. Bagi Warga Nahdilyin, dari pada harus memilih PAN mereka lebih baik memilih PDIP ataupun Golkar. Mereka menganggap dengan memilih Golkar maupun PDIP tidak mempunyai konsekuensi sosial dalam masyarakat ketimbang harus memilih PAN.

Sementara di sisi lain, PAN yang diharapkan mendapat dukungan dari warga Muhammadiyah tidaklah gampang. Banyak warga Muhammadiyah yang garis keras tidak menyukai PAN karena dianggap tidak jelas ideologinya. PAN yang berasas Pancasila tidak melabelkan partai Islami yang menjadi idaman sebagian warga Muhammadiyah yang fundamentalis. Oleh karena itu banyak dari warga Muhammadiyah yang memilih partai yang secara jelas berasaskan Islam seperti PKS, PBB, Partai Masyumi. Di samping itu animo yang berkembang di kalangan warga Muhammadiyah sendiri, bahwa warga Muhammadiyah yang terlibat di PAN itu lebih banyak mewakili perorangan. Mereka yang duduk di legislatif yang diharapkan mampu membawa aspirasi Muhammadiyah ternyata tidak begitu memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan Muhammadiyah.

Kemudian warga Muhammadiyah, khususnya perorangan yang ada di legislatif dalam perjalanannya mereka menjadi wakil rakyat terkesan tidak pernah turun ke bawah (dalam arti kepada warga Muhammadiyah). Hal ini berbeda dengan warga Muhammadiyah yang menjadi wakil dari PKS, lebih banyak memperhatikan Muhammadiyah seperti memberikan beberapa masukan kepada warga Muhammadiyah lainnya dan lebih sering bertemu. Salah seorang warga Muhammadiyah yang aktif dalam kepemudaan menuturkan,

Secara organisasi waktu itu secara tertulis pimpinan PKS yang berasal dari Muhammadiyah membuat surat pernyataan pengunduran diri dari organisasi kepengurusan kepemudaan Muhammadiyah tetapi dalam beberapa item kepemudaan Muhammadiyah lebih banyak terikat dibandingkan dengan pimpinan pemuda yang sekarang menjabat tapi aktif di PAN yang tidak mau menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tetapi tidak aktif. Sehingga terkesan komando sampai akhir periode tidak ada kegiatan kemudian beberapa kali diminta untuk mengadakan kegiatan juga jarang muncul itulah salah satu ceritanya.

Sebenarnya kemunculan Partai Keadilan pada pemilu 1999 tidak menjadi ancaman dari partai-partai lain termasuk Partai Amanat Nasional (PAN). Oleh karena itu keikutsertaan sebagian warga Muhammadiyah kepada Partai Keadilan (PK) tidak berdampak besar pada hubungan antar sesama anggota Muhammadiyah. Akan tetapi, setelah pemilu 2004, dengan berkembangnya massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dilihat dari perolehan suara yang mencapai 7,2 % membuat hubungan dengan anggota Muhammadiyah, khususnya yang menjadi aktivis PAN menjadi kurang mesra. Dan dalam prakteknya PKS tidak hanya bergerak dalam bidang politik ansih, namun juga bergerak dalam bidang da'wah yang wilayahnya bergesekan dengan aktivitas da'wah Muhammadiyah. Apalagi ada beberapa kasus perebutan amal usaha yang awalnya dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah, namun karena pengurusnya merangkap menjadi anggota PKS dan lebih inten dengan PKS, maka kepemilikannya dialihkan kepada PKS.⁹ Akhirnya Muhammadiyah secara organisatoris merasa terancam dengan aktivitas PKS, terjadi beberapa gesekan akibat banyak dari warga Muhammadiyah masuk menjadi anggota PKS yang *nota bene* dalam setiap kegiatan yang dilakukan termasuk da'wah.

Dengan munculnya konflik antara Muhammadiyah dengan PKS, maka banyak Pimpinan Wilayah maupun Daerah menerapkan kebijakan untuk melarang anggotanya yang terlibat dalam PKS menjadi pengurus Muhammadiyah. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan PAN, karena dalam pemilu 2004 banyak dari warga Muhammadiyah yang mencoblos PKS. Ada beberapa alasan kenapa warga Muhammadiyah lebih tertarik ke PKS, *pertama* secara ideologi warga Muhammadiyah merasa lebih pas dengan PKS. PKS yang menyatakan diri sebagai partai yang berasas Islam dianggap lebih jelas dalam perjuangan ideologinya. Dibandingkan dengan PAN yang berasaskan Pancasila, bagi warga Muhammadiyah yang dianggap "fundamentalis", PKS lebih bisa diterima. *Kedua*, dilihat dari ajaran yang dikembangkan dalam da'wahnya PKS lewat gerakan Tarbiyah-nya senapas dengan ajaran yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Dengan demikian, kalau diibaratkan rumah, warga Muhammadiyah merasa nyaman tinggal di rumah PKS karena merasa tidak asing.

⁹ Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Di samping sebagai partai politik, juga bergerak dalam bidang sosial dengan dibentuknya Yayasan yang bisa memiliki sekolah, rumah sakit, maupun tempat ibadah.

Sementara hubungan Muhammadiyah dengan PBB tidak banyak persoalan, karena memang PBB Di samping perolehan suaranya baik dalam pemilu 1999 maupun 2004 kecil, juga tidak ada aktivitas yang bersinggungan dengan aktivitas yang dilakukan Muhammadiyah. Dengan demikian, PBB bagi Muhammadiyah maupun PAN sama-sama tidak menganggap PBB menjadi ancaman. Dalam aktivitas keseharian, khususnya untuk kegiatan keagamaan, warga Muhammadiyah yang merupakan aktivis atau pendukung PBB tidak banyak persoalan dengan warga Muhammadiyah lainnya. Lain lagi dengan warga Muhammadiyah yang menjadi aktivis PKS, sedikit banyak terjadi pergesekan dengan warga Muhammadiyah lainnya akibat aktivitas keagamaan mereka lebih inten dengan aktivitas keagamaan yang dijalankan oleh PKS sendiri.

Umumnya mereka yang menjadi pendukung dan simpatisan PBB adalah mereka yang mempunyai historis atau garis keturunan orang tua yang pernah menjadi pendukung dari Masyumi. Maka tidaklah heran kalau PBB ini menganggap dirinya sebagai manifestasi dari Masyumi pada massa Orde Lama.

Dengan menggunakan pola Santri-Abangan, kita dapat melihat kehadiran partai-partai Islam yang ada pada Pemilu 1999 dan 2004. Pada Pemilu 1999, di Malang Raya jelas sekali partai-partai Islam masih mendapatkan simpati dari pemilih. Hal ini mengindikasikan bahwa umat Islam ternyata masih memilih partai politik berdasar corak ideologis. Walaupun demikian, ada fenomena pemilih Santri untuk memilih partai politik yang secara formal tidak mencantumkan asas Islam, yaitu adanya suara yang cukup signifikan dari PAN khususnya di Kota Malang dan PKB.

b. Identifikasi Politik Kelompok Abangan

Pembelahan sosial yang dikemukakan oleh Geertz yaitu Santri, Abangan menjadi dasar masyarakat dalam mengidentifikasi dirinya dengan partai politik tertentu. Kelompok Abangan mengidentifikasi dirinya dengan partai-partai yang berhaluan Nasionalis, sementara kelompok Santri mengidentifikasi dirinya dengan partai-partai yang berhaluan Islam.

Kalangan Abangan yang kurang memperhatikan doktrin Agama Islam mengidentifikasi dirinya dengan partai yang bukan Islam. Di Malang Raya sebagaimana penulis temukan, kelompok Abangan ini mengidentifikasi dirinya dengan partai politik Nasionalis. Pola

Identifikasi politik kelompok Abangan yang tergolong elitis umumnya kepada Partai Golkar, dan sebagian lagi kepada Partai Demokrat. Sebagai sebuah kebenaran historis apabila Abangan Elitis ini sering suka dengan kekuasaan, dimana konsep dasarnya adalah priyayi, maka ketika Orde Baru. Namun ketika Golkar pasca Orde Baru tidak lagi banyak menentukan pemerintahan, maka Abangan Elitis ini identifikasi politiknya sedikit bergeser ke Partai Demokrat sebagai partai pengusung Presiden.

Di sisi lain kelompok Abangan Populis pola pengidentifikasian dirinya mengarah pada PDIP, terutama dalam pemilu 1999 dan 2004. Walau demikian ada sebagian dari mereka yang dalam perilakunya menunjukkan ciri dari Abangan namun dalam afiliasi politiknya tidak ke PDIP, namun dia lebih memilih partai Nasionalis lainnya seperti Golkar.

E. Pola Patronasi

Karl D. Jackson (1980) melakukan analisis mengenai keterlibatan orang desa di masyarakat Sunda Jawa Barat dalam pemberontakan Darul Islam tahun 1948-1962. Analisisnya didasarkan pada konsep kekuasaan Tradisional yang ada di Indonesia. Sejumlah sarjana lain, seperti Selosumarjan (1963), dan Sartono Kartodirjo (1984) juga mencoba memakai konsep ini dalam menganalisis struktur kekuasaan di Indonesia. Apa yang mereka temukan adalah bahwa pola paternalisme merupakan fenomena umum dalam masyarakat Jawa.¹⁰

Melalui analisisnya, Jackson (1978) mempergunakan konsep kekuasaan Tradisional, yang dia definisikan sebagai *“the exercise of personalistic power accumulated through the past and the present role of the influences as provider, protector, educator, source of values, and status superior of those who have established a dependency relationship with him”*. Tipe kekuasaan ini menurut dia dinamakan Tradisional karena pola kekuasaan ini sudah dipraktekan sejak lama dan sudah menyatu dari generasi ke generasi. Jackson lantas menjelaskan bahwa kekuasaan Tradisional merupakan bagian dari model hubungan *patron-client* dalam masyarakat yang vertikal, statis, dan asimetris.

¹⁰ Masalah kekuasaan Tradisional Jawa secara teoretik dibahas oleh Benedict R. O’G. Anderson, *The Idea of Power in Javanese Power*, dalam Benedict R. O’G. Anderson *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990). Lihat juga Benedict R. O’G. Anderson, *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990)

Seorang analis politik Indonesia, Harry Tjan Silalahi (1977), memberikan gambaran yang kongkrit ketika dia mendiskusikan hasil dari pemilu 1977. Dia berpendapat bahwa faktor utama yang memberikan penjelasan kepada sikap pemilih di Indonesia utamanya dari peran kekuasaan Tradisional yang ditunjukkan dalam bentuk paternalism "bapakism". Seperti halnya Jackson, Silalahi juga menganggap bahwa pola hubungan antara pemimpin dan pengikut menempatkannya dalam kontek hubungan *patron-client*.¹¹

Masyarakat Jawa umumnya memahami masyarakat dalam dua pembilahan, yaitu *wong gedhe* orang berpengaruh dan *wong cilik* orang pada umumnya. *Wong gedhe* umumnya dipahami sebagai pemimpin yang punya sudut pandang yang sama sebagaimana orientasi masyarakat kota, "orang pintar", "pengambil keputusan yang epektif" dan "mempunyai kewenangan dalam kehidupan lokal." Sementara *wong cilik* di sisi lain merupakan pengikut yang hanya dipahami sebagai orang pasif dan masa bodoh, dan "orang yang tidak mengerti".

Stratifikasi dalam masyarakat desa Jawa mungkin juga dapat dipahami dalam dua bagian pembilahan seperti di atas, yaitu pemimpin dan pengikut atau rakyat. Banyak para sarjana mencoba menggambarkan hubungan antara pemimpin dan rakyat sebagai pola komunikasi dimana pemimpin merupakan figur dominan ketika berhadapan dengan rakyat. Tipe hubungan ini dinamakan sebagai pola hubungan *patron-cilent* atau bapak-anak buah.

Dalam masyarakat Desa Jawa, tipe kepemimpinan ini juga dimiliki baik oleh pemimpin yang mempunyai posisi dalam birokrasi formal sebagai kepala desa, dan pemipimpin di luar birokrasi, khususnya pemimpin spritual. Dalam kasus ini, Sartono Kartodidjo berpendapat bahwa, "di luar pejabat pemerintahan terdapat juga pemimpin alami yang

¹¹ Hubungan sosial "bapakisme" lebih halus (*sophisticated*) dari pada hubungan *patron-client* yang banyak terdapat di beberapa Negara Asia lainnya dan Amerika Latin yang sangat menitik beratkan aspek material. Sebab dalam system bapakisme ini pada prinsipnya "bapak" atau "patron" menanggung pemenuhan kebutuhan social, material, spiritual, dan pelepasan pemenuhan kebutuhan emosional untuk para "anak buah" atau client. Faktor utama yang menentukan dalam "pakisme" aalah hutang budi yang menimbulkan sikap hormat yang begitu tinggi dari "anak buah" kepada "bapak". Dalam hubungan seperti ini maka "anak buah" tidak akan pernah mau menentang "bapak" sekalipun jelas diketahui bahwa "bapak" tidak benar.

berkuasa seperti kyai¹² lokal, haji, guru, dukun. Para pemimpin tersebut mempunyai atribut tertentu seperti jimat yang memberikan perlindungan dari bahaya, mempunyai ilmu kedigjayaan, ilmu pengetahuan, ilmu keselamatan, yang memberi kekuasaan sebagai manusia lebih. Tipe kepemimpinan ini dapat membentuk perilaku politik dalam negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam masyarakat Jawa, kultur patrimonial dengan pola *patron-client*-nya sangat menonjol. Beberapa pemimpin yang sering menjadi panutan masyarakat antara lain, kyai, tokoh agama, guru, kepala desa, tokoh politik. Bagi kelompok Santri kepatuhan pada kyai sangat mewarnai dalam kehidupan kesehariannya. Dalam setiap kesempatan, baik acara keluarga, ataupun bersifat publik, awal pembukaan selalu menyelipkan kata-kata “para kyai yang kami panuti”. Hal ini bisa dipahami karena seluruh aktivitas keseharian kalangan Santri selalu melibatkan kyai; shalat lima waktu yang menjadi imam shalat adalah kyai, dalam acara tahlilan yang memimpin kyai, dalam acara khajatan yang memberikan do’a kyai. Sementara kelompok Abangan secara langsung tidak punya keterikatan dengan kyai, karena Abangan tidak pernah melakukan aktivitas seperti yang dilakukan Santri. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan kelompok Abangan pada kyai rendah, dan bahkan untuk kalangan Abangan yang kuat ada kecenderungan mereka tidak suka karena perilaku keseharian mereka sering dianggap tidak baik yang kadang dilontarkan dalam acara-acara pengajian.

1. Pola Patronase di Kalangan Santri

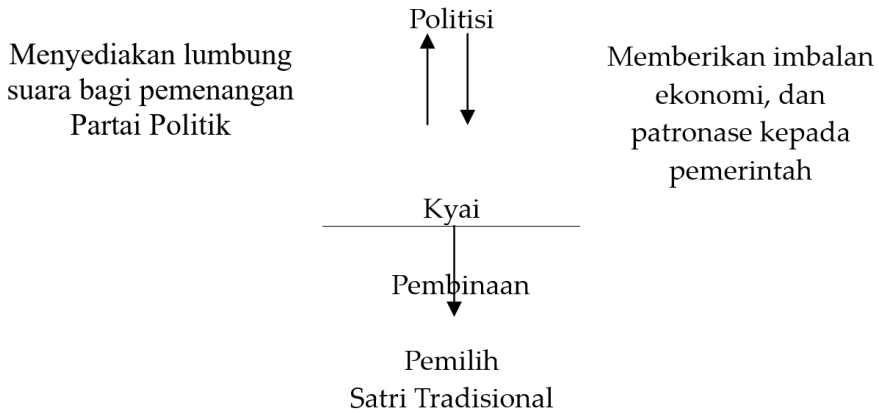
Masyarakat Malang Raya dikenal dengan masyarakat yang berbasis NU, namun hal itu lebih merupakan corak dari kehidupan masyarakat yang Islami, seperti menjadikan kyai atau ulama-ulama sebagai Patron yang dihormati sekaligus menjadi panutan dalam kehidupan spiritualnya. Kondisi ini secara tidak langsung diwariskan turun temurun, dari generasi ke generasi mengikuti kebiasaan menjadikan kyai ataupun ulama-ulama tertentu sebagai panutan. Berbagai acara yang punya keterkaitan dengan kehidupan beragama Santri Tradisionalis, seperti

¹² Anderson menyebutkan bahwa dalam komunitas Islam, orang yang mempunyai status tertinggi adalah mereka yang berpengetahuan tinggi mengenai hukum agama dan mereka yang mengajarkan ajaran Islam. Lihat Benedict R. O’G. Anderson *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990) terutama Hlm. 61.

ziarah ke makam para wali, istighosa, ataupun kunjungan tetap tiap bulannya kepada kyai-nya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan Santri Tradisionalis. Pada saat pemilu, seorang kyai menjadi figur sentral dalam menentukan arah kemana masyarakat akan memilih partai politik. Namun pada umumnya, hasil pengamatan di Malang Raya, para kyai tidak ada yang mengarahkan untuk memilih partai yang bukan berhaluan Islam. Kecenderungan umum pemilu 2004, para kyai di Malang Raya mengidentifikasi dirinya dengan partai Islam, khususnya PKB, walaupun ada sebagian kecil yang menyeberang ke PPP, PPNU atau ke partai Islam lainnya.

Karena pilihan politik kaum Santri Tradisionalis itu tidak independen (kebergantungan pada kyai), maka ada kecenderungan pilihan politiknya tidak sepenuhnya seragam. Hal ini sangat bergantung pada kyai lokal yang menjadi panutan dimana mereka tinggal. Menurut pengamatan penulis, para kyai lokal, atas dorongan kepentingannya baik itu pembangunan, maupun eksistensi diri, maka ada yang melakukan pengalihan politik dari alur kebanyakan. Di Malang Raya umumnya, para kyai lokal menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB yang kepemimpinannya ada Gus Dur. Namun ada sebagian ulama atau kyai yang tidak mendukung PKB, tetapi mendukung partai Islam lain seperti PPP, PPNU atas dasar kepentingan dan kedekatan pribadi dengan pimpinan partai tersebut. Bahkan ada sebagian dari kyai yang memberi dukungan pada Golkar, baik secara langsung ataupun sembunyi-sembunyi, karena kedekatan mereka ketika Orde Baru.

Oleh karena itu, penyebaran pilihan politik Santri di Malang Raya, cukup tersebar walaupun tidak merata. Sebagian besar memilih PKB dan sebagian lagi memilih partai Islam lain dan partai Nasionalis seperti Golkar. Di sisi lain, para pemilih Islam Modernis menjatuhkan pilihan politiknya sebagian besar kepada PAN, khususnya di wilayah perkotaan. Hal ini bisa dilihat dari perolehan suaran PAN pada pemilu 1999 dan 2004 yaitu masing 10,53 % dan 6,77 %. Namun demikian, ada juga yang memberikan suaranya kepada PKS, dan PPP. Bahkan bagi warga Muhammadiyah yang Konservatif, ada kecenderungan mereka memilih PKS karena secara ideologis mereka merasa pas dengan apa yang diperjuangkan oleh PKS. Sebagai partai da'wah, dengan ajaran Salafi-nya secara garis besar tidak ada perbedaan dengan ajaran yang dianut oleh Muhammadiyah. Dengan demikian, banyak aktivis PKS yang berasal dari Muhammadiyah.



Gambar 11. Model Pola Hubungan Politisi, Kyai, dan Santri

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa dukungan pemilih Islam Tradisional terhadap PKB di Jawa Timur, khususnya di Malang Raya sangat besar. Dukungan besar dari warga Nahdilyin di Malang Raya ini tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan lewat jalur NU kultural yang ada di berbagai pelosok. Lewat kyai lokal, PKB mengadakan sosialisasi informasi, isu dan gagasan politik melalui berbagai aktivitas keagamaan dari mulai pengajian, tahlilan, istighosah dan lain sebagainya. Kegiatan ini menjadi salah satu hal yang penting dalam mendulang suara, karena pesan yang tersirat adalah “apabila mengaku warga nahdilyin, maka PKB harus menjadi pilihan politiknya”. Dengan demikian, banyak dari warga Nahdilyin yang sangat panatik dengan pilihan politiknya. Mereka tidak merasa nyaman dan aman secara sosial apabila memilih partai politik selain partai yang dilahirkan oleh NU ini. Di samping itu juga, PKB memperkokoh diri sebagai bagian dari partai NU dengan menggandeng PMII untuk kemahasiswaannya, Fatayat untuk para pemudinya, dan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama), termasuk juga Ansor dan Banser. Hasil perolehan suara PKB di Malang Raya pada Pemilu 1999 dan 2004 bisa dilihat dalam tabel 25.

Tabel 25. Perolehan Suara PKB Pada Pemilu 1999 dan 2004 di Malang Raya

| Nama Wilayah | Perolehan Suara | | Prosentase | |
|------------------|-----------------|---------|------------|--------|
| | 1999 | 2004 | 1999 | 2004 |
| Kabupaten Malang | 392.472 | 316.665 | 29,57% | 25,72% |
| Kota Batu | 19.756 | 14.148 | 20,36% | 13,19% |
| Kota Malang | 77.429 | 68.321 | 19,60% | 17,36% |

Sumber: KPU Kabupaten dan Kota Malang, Kota Batu yang telah diolah penulis.

Keterangan: Pada pemilu 1999, status Kota Batu masih Kota Administratif di bawah Pemerintahan Kabupaten Malang.

Keberpihakan massa Santri dan Tradisional kedalam partai Islam yang mempunyai tokoh dari masing-masing kelompok, bisa dijelaskan dalam perspektif budaya masyarakat Jawa. Budaya *patron-client* yang berkembang tidak bisa begitu saja lepas dari pijakan masyarakat untuk menentukan pilihan politik, dimana tokoh-tokoh itu merupakan simbolisasi dari ideologi yang mereka perjuangkan. Di PKB, Gus Dur yang nota bene sebagai cucu dari pendiri NU, K.H. Hasyim Asyari, selalu mendapat dukungan dari warga Nadhliyin karena budaya NU yang paternalistis yang patuh pada guru, kyai atau menghormati keluarga dari gurunya.

Para kyai yang mempunyai tradisi menghormati dan mematuhi pada guru menjadi benang merah yang menjembatani kepentingan politik PKB dengan warga Nahdilyin. Para kyai di Malang Raya yang menjadi panutan dalam masyarakat, sebagian besar menjadi bagian dari pendukung PKB, walaupun demikian ada sebagian lagi yang mendukung PPP, PPNU. Para kyai dan pemimpin pondok yang keluar dari jalur politik PKB umumnya mereka yang dulu menjadi aktivis PPP atau mereka yang berseberangan dengan Gus Dur seperti Ketua PBNU, K.H. Hasyim Mujadi.

Lebih jauh, walaupun masyarakat Malang Raya secara kultural berbeda dengan kultur masyarakat Jawa Timur pada umumnya, khususnya wilayah kultur padalungan, namun pola budaya paternalis yang memberikan stratifikasi tertinggi pada kyai berkembang. Kondisi sosial demikian berimplikasi pada pola hubungan sosial dan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Kyai menjadi sosok panutan

dan tauladan dalam setiap gerak dan langkahnya. Oleh karena itu apa yang menjadi ucapan dan tindakan kyai menjadi contoh dan pegangan masyarakat, tidak hanya dalam urusan sosial, namun juga masuk ke dalam ranah politik. Fenomena kepatuhan kepada kyai bukan hanya fenomena lokal, akan tetapi boleh dikatakan pola umum yang terjadi di masyarakat Jawa, dan Indonesia pada umumnya. Sebagai contoh hasil penelitiannya Karl D. Jackson di Jawa Barat mengenai kewibawaan Tradisional.

Hasil temuan di lapangan, di lingkungan yang kental dengan suasana keagamaan Santri, khususnya Santri Tradisionalis, peran ulama atau kyai sangat menonjol. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam masyarakat Santri, berbagai ritual yang mereka lakukan selalu berhubungan dengan peran ulama atau kyai baik itu ritual kematian maupun ritual kelahiran, perkawinan. Bahkan, hampir setiap saat seorang ulama itu, dari mulai pagi sampai malam, selalu terlibat dengan kehidupan masyarakat dari mulai menjadi imam shalat, guru ngaji, pemberi ceramah, khotbah jum'at, pemimpin do'a, pemimpin tahlil dan lain-lain. Dengan demikian posisi ulama atau kyai di masyarakat Santri sangat sentral. Peran sentral kyai di dalam masyarakat telah membuat kyai menjadi orang yang ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari secara sosial, namun juga secara politik.

Dalam kaitannya dengan peran ulama,¹³ Komarudin Hidayat dan M. Yudhie Haryono (2004), membagi para ulama ke dalam tiga kelompok besar, yaitu netral, partisan dan mengambil peran utama. Ulama netral adalah ulama yang paling tidak ter-*cover* oleh media, tapi masih dimungkinkan kehadirannya di tengah umat, sebaliknya ulama yang tidak netral terbagi ke dalam dua bagian, ulama yang menjadi tim sukses dan ulama pembuat fatwa. Sedangkan ulama yang mengambil peran utama menurut Komarudin Hidayat banyak ter-*cover* oleh media.

¹³ Secara umum, ulama atau intelektual Muslim terbagi ke dalam dua kelompok: pertama ulama atau intelektual Liberal yang melahirkan Islam Liberal (Binder, 1988; Kurzman, 1998); kedua, ulama atau intelektual Islamis yang melahirkan Islamisme (Roy, 1993; Ruedy, 1994; Guazonne, 1995; Kramer, 1997; Monshipouri, 1997). Menurut Mujani, intelektual pandangan politik liberal dalam masyarakat Muslim kontemporer dapat ditelusuri paling tidak sampai ke Muhammad 'Abduh dari Mesir, seorang pemikir Muslim terkemuka yang memberikan sumbangan berharga bagi pembaharuan Islam atau Modernisme. Diilhami oleh pemikiran social Barat dan aliran kalam rasional, Mu'tazilah,, 'Abduh berpendapat bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya penalaran ('aql). Sementara para intelektual Islamis menyatakan bahwa dalam Islam, agama dan Negara, atau agama dan politik, tidak dapat dipisahkan. Slengkapnya lihat Saeful Mujani, Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru, PT.Gramedia Utama, Jakarta, 2007.

Sikap aktif ulama dalam kehidupan politik, setelah tumbangnya rezim Orde Baru sangat mendukung, karena terjadi perubahan substansial dengan rezim era reformasi.

Tabel 26. Perbedaan Kondisi Politik: Rezim Orba Vs Rezim Orde Reformasi

| No | Indikator | Orde Baru | Orde Reformasi |
|-----|--------------------|--|---|
| 01. | Aktor politik | Aparatus negara, milisi. ABRI, Famili, koneksi ideologis dan biologis. | Ulama, guru, profesi lain menjadi sumber baru dalam masyarakat. |
| 02. | Modal politik | Perkawanan, Senjata, KKN, Kekerasan, Kejahatan, Ancaman, dll. | Massa (umat/santri), fatwa, do'a akbar, restu, istighosah kubro, salat masal. |
| 03. | Sikap politik | Tunggal, diminatif, murah, partisan, pesanan, pura-pura. | Beragam, bersaing, mahal, netral, pesanan, nurani. |
| 04. | Target politik | Tentram, stabil, aman, tunggal, seragam. | Dinamis, terkenal, partisipatif, tanggung jawab. |
| 05. | Pesan politik | Seragam, tunggal, eufimisme, memusuhi rakyat. | Beragam, multiarah, plural, terang, vulgar, anti-KKN. |
| 06. | Komunikasi politik | Dominatif dengan aktor negara, pejabat pemerintah, ABRI, dan preman. | Menyebarkan ke seluruh elemen masyarakat, LSM, Kampus, Pesantren, dll. |
| 07. | Alat kontrol | Kontrol tunggal seluruh media dari Departemen. | Umat, Partai, UU, dan lembaga-lembaga rakyat. |

Sumber: Komarudin Hidayat dan Yudhie Latif, *Manuver Politik Ulama*, Yogyakarta, Jalasutra.

2. Pola Patronase di Kalangan Abangan

Kelompok Abangan banyak membina hubungan dengan elit-partai politik yang berasal dari Partai Nasionalis. Bahkan dalam kehidupan sosialnya, para kader politik di tingkat lokal mempunyai peran besar dalam membangun solidaritas kelompok Abangan ini. Kader politik di tingkat lokal ini menjadi media penyalur aspirasi dari masyarakat Abangan kepada para tokoh politik yang lebih tinggi. Dilihat dari aspek demografi, kelompok Abangan ini di Malang Raya banyak mendiami wilayah-wilayah pinggiran atau sebuah perkampungan kota yang padat. Kalau di pedesaan umumnya mereka bermatapencaharian sebagai petani

atau buruh tani, buruh bangunan atau kerjaan yang sifatnya insidental. Sementara mereka yang ada di perkotaan bekerja sebagai tukang parkir, tukang becak, pedagang kaki lima atau pekerjaan lain yang menunjukkan bahwa mereka adalah kalangan *wong cilik*.

Dengan melihat karakter Abangan, walaupun pola patrimonial ini merupakan gejala umum dalam masyarakat Jawa, namun tokoh panutan antara Santri dan Abangan ini berbeda. Kelompok Abangan, mereka yang menjadi panutan biasanya di samping tokoh politik lokal, juga aparat desa baik dari mulai Kepala Desa, Kepala Dusun, RW, RT. Dari pengamatan, banyak dari aparat desa, ketika pemilihan dilakukan sering mempergunakan pendekatan yang dilakukan oleh kelompok Abangan. Dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar mereka yang menjadi RT atau RW umumnya mereka yang berlatar belakang Abangan, sementara yang Santri cenderung lebih banyak mengurus kegiatan dan aktivitas di Langgar atau Mesjid.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Bab V

PARTAI DAN SISTEM KEPARTAIAN

Dalam bab V penulis akan membahas mengenai partai dan sistem kepartaian yang berkembang di Indonesia, khususnya pasca reformasi. Tujuan dikemukakan pembahasan ini adalah memberi gambaran tentang kondisi ideologi partai politik yang berkembang di era multipartai. Hal ini penting dikemukakan untuk bisa memberi penjelasan dan pemahaman atas situasi dan kondisi kepartaian yang terjadi saat ini. Kita ketahui bahwa partai politik yang ada sekarang ini tidak lagi bisa dijadikan tumpuan harapan dari masyarakat akibat kinerja partai yang jelek. Berhubungan dengan tujuan tersebut, pembahasan ini diawali dengan sistem kepartaian Indonesia, dilanjutkan dengan partai sektarian. Untuk melengkapi kedua sub pembahasan tersebut, penulis memasukkan pembahasan mengenai peta ideologis partai politik serta kecenderungan partai politik pasca reformasi.

Berkenaan dengan realitas kepartaian Indonesia di era multipartai, baik dari sisi tipologi maupun sistem kepartaian, maka dapat kita kategorikan sebagai berikut: dilihat dari sistem kepartaian, partai politik Indonesia baik pada pemilu 1999 maupun 2004 dengan jumlah partai politik lebih dari enam, maka sistem kepartaiannya tergolong sistem multipartai ekstrim; secara tipologis, partai-partai yang berkembang baik pemilu 1999 maupun 2004 kalau dilihat dari sisi sumber dukungannya, maka umumnya partai didukung oleh pemilih dengan basis ideologi, dimana agama, khususnya Islam, menjadi menjadi basis material dalam pembentukan partai. Oleh karena itu, partai-partai di era multipartai dapat dikatakan tergolong ke dalam tipe atau jenis partai sektarian.

A. Sistem Kepartaian Era Multipartai

Dominasi Orde Baru yang otoriter terhenti ketika Presiden Soeharto melepaskan jabatannya dan menyerahkannya kepada Habibie pada tahun 1998. Mulai saat itu gairah politik muncul kembali yang ditandai dengan berdirinya beragam partai politik. Kemunculan partai politik pada era

reformasi, tampak seperti melanjutkan sejarah kejayaan partai politik masa Orde Lama seperti yang tercermin dalam pemilu 1955. Partai yang berbasiskan Islam, Nasionalis, kecuali komunis mewarnai perpolitikan Indonesia di era reformasi. Pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Partai-partai politik berasas Islam yang muncul pada era reformasi dan ikut pemilu, sebagai berikut: pemilu 1999 berjumlah 14 partai politik, yaitu PPP, PBB, PK, PUI, PSII, PSII 1905, PNU, PKU, Partai Politik Islam Masyumi, Partai Masyumi Baru, KAMI, PP, dan yang secara sosiologis masuk ke dalam partai Islam adalah PAN dan PKB. Sementara partai Islam pada pemilu 2004 terdiri dari Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bintang Reformasi, PAN dan PKB.¹

Dari sekian partai Islam, partai yang paling militan adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK)² dengan perolehan suara masing-masing 1,94% (mendapatkan 13 kursi) dan 1,36% (mendapatkan 7 kursi). PBB menjadi harapan baru bagi kembalinya kejayaan Masyumi pada pemilu 1955. Pemimpin senior PBB merupakan aktivis Masyumi. Organisasi dan ideologi yang dibangun oleh PBB didasarkan pada organisasi DDII³ (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), yang bermarkas di gedung Masyumi pada masa lalu di Jakarta Pusat. Pada pemilu 2004,

¹ Dalam pemilu 1999 dan 2004 semua partai Islam bertarung memperebutkan massa Islam konvensional, yakni massa Muslim berafiliasi NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Al-Irsyad dan seterusnya yang kesemuanya tidak mengalami perubahan ideologi, yakni tetap masa Islam Tradisionalis dan Modernis. Kalau kita sederhanakan, afiliasi tradisional adalah NU, dan afiliasi Modernis adalah Muhammadiyah, SI, dan Persis. Sementara Al-Irsyad adalah massa Muslim yang merasa keturunan Habib, tetapi tampaknya di Malang Raya massa ini lebih dekat dengan Muhammadiyah.

Baik dalam tubuh Islam Tradisionalis ataupun Modernis terjadi pertarungan keras di antara partai Islam itu sendiri. Dalam tubuh Islam Tradisionalis ada PKB PKU, PNU, dan Partai SUNI dan juga termasuk PPP yang sebagian petinggi partainya juga berasal dari NU. Sementara pada pemilu 2004, pertarungan terjadi antara PPP, PBR, PPNU dan PKB sendiri. Hal ini tampaknya tidak kondusif bagi berkembangnya partai politik Islam. Salah satu dampak yang bisa dirasakan adalah tidak adanya konsistensi dalam electoral dalam setiap pemilu yang dilaksanakan. Dari pemilu 1999 ke 2004 perolehan suara partai politik Islam mengalami perubahan.

² Partai Keadilan merupakan partai baru, dipimpin oleh para akademisi dan dosen berbagai universitas, umumnya dari universitas negeri, dan didukung oleh banyak Santri Modernis yang mempunyai pendidikan tinggi. Hal ini merupakan bagian dari produk pengembangan pendidikan pada masa Orde Baru, dan kesempatan yang diberikan pada generasi muda Muslim untuk sekolah ke luar negeri. Oleh karena itu tidaklah heran apabila PKS mendapatkan dukungan dari kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Dengan media pengajian, Tarbiyah, para mahasiswa Di samping mengembangkahkan misi da'wah, juga sebagai alat konsolidasi dan sosialisasi partai.

³ DDII merupakan lembaga dakwah yang paling dekat dengan Masyumi, didirikan oleh Mohammad Natsir dan kawan-kawannya. Natsir, salah seorang dari sedikit pemimpin Indonesia

suara PBB meningkat dari 1,94% menjadi 2,56%. Bahkan yang lebih spektakuler adalah peningkatan suara PK yang sebelumnya hasil pemilu 1999 tidak lulus *Electoral Threshold* 3% dan harus berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada pemilu 2004 mendapatkan 7% suara secara nasional.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam pemilu 1999 sudah mencatumkan asas partainya adalah Islam. Partai ini merupakan kelanjutan dari partai era Orde Baru yang merupakan hasil fusi dari partai-partai Islam. Pada saat menjelang didirikannya Partai Amanat Nasional (PAN), sebagian elit PPP ini berupaya membujuk Amien Rais untuk tidak mendirikan partai, mereka khawatir kalau PAN didirikan, maka suara partai Islam akan terpecah.⁴ Pada pemilu 1999 PPP mendapat 10,72%, namun dalam pemilu 2004 perolehan suara PPP mengalami penurunan menjadi 8,32%.

Sementara partai lain yang mempunyai hubungan dengan Islam, akan tetapi tidak memakai asas Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilu 1999 masing-masing memperoleh suara 12,62% dan 7,12%. PAN didirikan oleh Amien Rais yang sebelumnya merupakan Ketua PP Muhammadiyah, sehingga dalam perjalanannya partai ini selalu dikaitkan dengan Muhammadiyah, walaupun secara organisatoris tidak ada hubungannya. Sedangkan PKB, sejak semula memang dinyatakan sebagai partainya Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurahman Wahid (Gus Dur). Memang tidak berlebihan kalau PKB dinyatakan sebagai partainya NU, karena Gus Dur sebagai pimpinan (Ketua Dewan Syuro) merupakan tokoh sentral di NU.

PDI-P yang merupakan representasi dari partai Abangan dalam pemilu 1999 mendapatkan suara sangat tinggi dibandingkan dengan partai-partai lain dengan perolehan suara sebesar 33,76%. Kemenangan

yang punya reputasi internasional, pada waktu itu adalah seorang wakil ketua dari Liga Dunia Islam (Rabithah al-'Alam Al-Islami) yang disponsori Arab Saudi dan DDII sering kali dituduh sebagai Wahabi karena hubungan baiknya dengan Arab Saudi. DII ini mewakili Islam yang bercorak puritan, walaupun lebih dekat pada ikhwanul Muslimin Mesir. Lihat, Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pecarian Wacana Baru, Yogyakarta, PT LKIS, 1994.

⁴ Menurut hemat penulis, keinginan sebagian elit untuk menjadikan Amin Rais sebagai pimpinan puncak PPP tidak tercapai karena ada penolakan dari internal elit partai. Hal ini terkait dengan pembagian jatah yang harus duduk dalam kepengurusan partai berlambang ka'bah ini.

partai ini dianggap sebagai kemenangan *wong cilik* yang selama Orde Baru mendapat tekanan, dan Megawati yang merupakan putri dari seorang tokoh Proklamator menjadi simbol dari perjuangan *wong cilik*. Akan tetapi, kemenangan PDI-P dalam pemilu 1999 tidak bertahan, rakyat mulai meragukan komitmen Megawati sebagai pembela *wong cilik* ketika menjabat sebagai Presiden. Pada Pemilu 2004, PDI-P mengalami penurunan suara yang sangat signifikan karena hanya memperoleh suara 19,58% di bawah Golkar.

Sementara Golkar yang merupakan partai pendukung rezim Orde Baru, walaupun terjadi hujatan akibat sepak terjangnya pada masa itu, namun pada pemilu 1999 tetap mendapatkan suara cukup signifikan yaitu 22,46%. Bahkan pada pemilu 2004, Golkar menjadi partai tertinggi dalam perolehan suara mengalahkan PDI-P yang pada pemilu 1999 memperoleh suara jauh melampaui partai-partai lain termasuk Golkar. Sebagai perbandingan pada pemilu 2004 Golkar mendapatkan 21,7% dan PDI-P mendapatkan suara 19,98%.

Pemilu 2004 Golkar keluar sebagai pemenang dengan mengantungi perolehan 24.461.104 suara atau 21,62% total suara pemilih. Hasil ini membuat Golkar menguasai 23,27% suara di parlemen. PDI Perjuangan memperoleh 18,31% dengan menguasai 19,82% suara parlemen, PPP memperoleh suara 8,16% dengan menguasai 10,55% suara parlemen, Partai Demokrat memperoleh suara 7,46% dengan menguasai 10% kursi parlemen, PAN memperoleh suara 6,41% dengan menguasai 9,64% suara parlemen, PKB memperoleh suara 10,61% dengan menguasai 52% suara parlemen, PKS (nama baru Partai Keadilan) memperoleh suara 7,20% dengan menguasai 8,18% suara parlemen, PBR memperoleh suara 2,60% dengan menguasai 2,55% suara parlemen.

Dalam pemilu 2004 Golkar mengalami kenaikan dari pemilu 1999, sebaliknya PDI Perjuangan mengalami penurunan, begitu juga PKB mengalami penurunan perolehan suara, tetapi mengalami kenaikan jumlah kursi di parlemen. Di sisi lain, walaupun PPP mengalami penurunan perolehan suara, namun jumlah perolehan kursinya tetap sama dengan hasil pemilu 1999.

Hal yang paling mengejutkan, PD (Partai Demokrat) yang pada pemilu 2004 baru mengikuti pemilu, langsung memperoleh 7,5% suara dengan total penguasaan kursi parlemen 56. Partai ini besar lebih banyak dikarenakan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu

pun PKS (dulu PK), yang pada pemilu 1999 tidak memenuhi *threshold* 3%), mengalami kenaikan cukup signifikan dari 1,4% di pemilu 1999 menjadi 7,3% di pemilu 2004. Hal yang menarik dari PAN, walaupun mengalami penurunan jumlah suara, dari 7,1% di pemilu 1999 menjadi 6,4% di pemilu 2004, akan tetapi kursi parlemen mereka bertambah dari 34 di pemilu sebelumnya menjadi 53 di pemilu 2004. Yang bernasib tidak baik justru PBB, meski mengalami kenaikan jumlah suara dari 1,9% menjadi 2,6%, tetapi peroleh kursi mereka turun dari 13 menjadi 11.

Pola sistem kepartaian yang berlaku masih menyerupai Pluralisme Terpolarisasi (ekstrim) baik pemilu 1999 maupun 2004. Partai-partai relatif besar seperti Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PPP, dan PAN masih menguasai kursi yang cukup besar di parlemen. Tidak ada partai yang mampu menjadi mayoritas secara mudah. Mereka harus saling berkoalisi. Partai yang menjadi partner pertama didasarkan kedekatan garis ideologis, baru kemudian faktor-faktor pragmatis seperti kemenangan suara untuk kebijakan tertentu dan lain sebagainya.

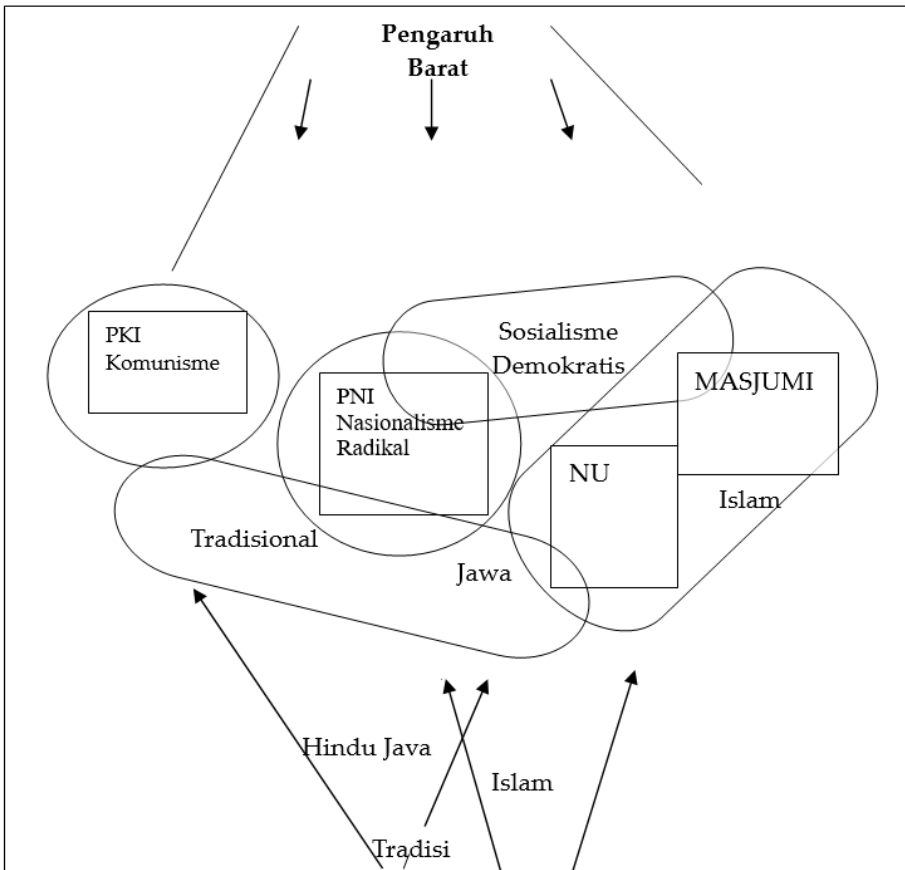
B. Peta Ideologi Partai Politik Indonesia

Dalam pemetaan Ideologi politik di Indonesia kita bisa menelusurinya dengan memahami berbagai pemikiran yang telah dikemukakan oleh para tokoh politik maupun akademisi pada era tahun 1950-an. Dari kalangan politisi, Soekarno (1964) memetakan ideologi partai politik ke dalam Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom), dimana kelompok Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama oleh Masyumi dan NU sedangkan Komunis direpresentasi oleh PKI. Dari kalangan akademisi, Feith dan Castles (1970) menyodorkan pembagian yang lebih kompleks untuk Sungai Budaya tahun 1950-an, yaitu, Nasionalisme radikal (PNI), Tradisionalisme Jawa (PNI-PKI-NU), Islam (NU, Masyumi), sosialisme demokratis (PNI-Masyumi) dan komunisme (PKI). Mencoba mengikuti Feith dan Castles, Dhakidae (1999) membagi masyarakat ke dalam empat kelompok, yaitu, kelompok Nasionalis (PDI-P), Pembangunan (Golkar), Agama (PBB) dan Sosialisme (PRD). Sedangkan Suryadinata (2002) mengkristalkan kembali pemikiran dan aliran politik yang ada ke dalam dua kategori besar, yaitu, Pancasila dan Islam Politik (*Political Islam*).

Formulasi Feith (1970) yang mengungkap lima kutub aliran. Yaitu, Islam, Nasionalisme radikal, sosialisme, komunisme, dan Tradisionalisme Jawa. Tumbuhnya kelima aliran itu dipengaruhi oleh dua sumber utama, yakni: khasanah Barat (modern) dan domestik (Hindu-Buddha dan Islam). Dari situlah mengejawantah heterogenitas partai. Feith melihat kelima aliran itu saling terkait (*cross-cutting*). Nasionalisme radikal dengan representasi PNI terkait dengan NU; Islam dengan representasi Masyumi bersama NU; Tradisionalisme Jawa dengan representasi Partindo terkait PNI dan NU; sedangkan sosialisme demokrat dengan representasi PSI terkait Masyumi dan PNI. Kecuali aliran komunisme yang diwakili PKI yang menjadi kutub terpisah sendiri. Pola penggolongan Feith tersebut tampaknya mendobrak kesemerawutan pandangan ideologi yang kaku.⁵

Gambaran ini mengingatkan pemikiran aliran yang justru jauh lebih dahulu dikemukakan Soekarno sekitar tahun 1920-an, yang melihat kemungkinan pertemuan dan perpaduan antara berbagai kutub politik ideologis. Pemikiran Soekarno mengemukakan tiga aliran politik besar yang menurutnya berjasa mengantar Indonesia ke gerbang kemerdekaan, yaitu: Islam, Nasionalisme, dan Marxisme. Ketika Soekarno menerapkan kekuasaan demokrasi terpimpin, ketiga aliran itu dikemasnya menjadi doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).

⁵ Feith membagi tipologi parpol di Indonesia atas dasar ideologi politik. Paling kiri dianut Partai Komunis Indonesia), agak ke tengah (komunis Nasionalis) Partai Murba, ke kanan (sosial demokrat) Partai Sosialis Indonesia (PSI), di tengah ada Nasionalisme kerakyatan Partai Nasional Indonesia (PNI), agak ke kanan ada partai-partai Islam modern (Masyumi dan Persis), Tradisional (NU), dan yang bertipe solidarity maker bercampur traders (PSII). Ada juga partai-partai Nasionalis kecil, seperti PIR (Partai Persatuan Indonesia Raya), Parindra (Partai Indonesia Raya), PNI-Merdeka, SKI (Sarekat Kerakyatan Indonesia), Partai Buruh dan lainnya. Dua partai beraliran Kristen, Parkindo dan Partai Katholik, tidak dikategorikan partai agama, karena Kristianitas dan Nasionalisme berbaur hanya untuk menunjukkan eksistensi kaum minoritas.



Sumber: Feith, H. 1970 "Introduction". In Feith and Castle, Lance ed. Indonesian Political Thinking, 1945–1965. Ithaca : Cornell University Press

Gambar 12. Peta Ideologis versi Herbert Feith

Dalam realitasnya, kehadiran partai-partai politik di negeri kita baik pada pemilu 1999 maupun 2004 selalu mencerminkan kedua aliran tersebut yaitu Partai Nasionalis dan Partai Agama, dalam hal ini Islam. Karena itu lalu ada penyebutan “partai sekuler” untuk yang berada di kubu Nasionalis, dan “partai Islam” untuk yang berada di kubu religius.

1. Ideologi Partai Politik Pasca Reformasi

Dari 48 partai politik pada pemilu 1999 tercatat ada 10 partai politik yang secara formal berasaskan Islam. Sementara yang lainnya berasaskan Pancasila dan dua partai yang berasaskan gabungan antara

Pancasila dan Islam. Kategorisasi ideologis yang didasarkan pada asas partai yang secara formal tercantum dalam AD/ART tidak akan mampu mendalami secara substantif dari partai politik yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa walaupun ada partai yang secara formal mencantumkan asas selain Islam, namun dalam praktiknya basis massa mereka adalah Islam. Di sisi lain, figur-figur elit partai dilihat dari latar belakang keagamaannya termasuk tokoh-tokoh yang tidak diragukan lagi keberpihakannya terhadap Islam. Sebagai contoh PAN yang didirikan oleh Amin Rais yang punya latar belakang sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Begitu juga dengan PKB, ada Gus Dur yang merupakan tokoh Islam mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nahdlotul Ulama. Begitupun ada beberapa partai yang dibangun, walaupun tidak mengatasnamakan partai Islam, tapi konstituen yang dibidiknya adalah konstituen Islam.

Tabel 27. Nama Partai Politik dan Azas Partai

| No | Nama Partai | Azas Partai | | |
|----|--|-------------|-------|-----------------------------|
| 1 | Partai Indonesia Baru (PIB) | Pancasila | | |
| 2 | Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA) | Pancasila | | |
| 3 | PNI Supeni | Pancasila | | |
| 4 | Partai Aliansi Demokrasi Indonesia (PADI) | Pancasila | | |
| 5 | Partai Kebangkitan Muslimin Indonesia (KAMI) | | Islam | |
| 6 | Partai Umat Islam (PUI) | | Islam | |
| 7 | Partai Kebangkitan Umat (PKU) | | | Pancasila dan Akidah Islam |
| 8 | Partai .MASYUMI BARU | | Islam | |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** | | Islam | |
| 10 | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | | Islam | |
| 11 | PDI PERJUANGAN ** | Pancasila | | |
| 12 | Partai Abul Yatama (PAY) | Pancasila | | |
| 13 | Partai Kebangkitan Merdeka (PKM) | Pancasila | | |
| 14 | Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) | Pancasila | | |
| 15 | Partai Amanat Nasional (PAN)** | Pancasila | | |
| 16 | Partai Rakyat Demokratik (PRD) | | | Sosial Demokrasi Kerakyatan |
| 17 | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII 1905) | | Islam | |
| 18 | Partai Katolik Demokrat (PKD) | Pancasila | | |

| | | | | |
|----|--|-----------|-------|----------------------------|
| 19 | Partai Pilihan Rakyat (PILAR) | Pancasila | | |
| 20 | Partai Rakyat Indonesia (PARI) | Pancasila | | |
| 21 | Partai Partai Politik Islam Indonesia MASYUMI | | Islam | |
| 22 | Partai Bulan Bintang (PBB)** | | Islam | |
| 23 | Partai Solidaritas Pekerja (PSP) | Pancasila | | |
| 24 | Partai Keadilan (PK) | | Islam | |
| 25 | Partai Nahdatul Umat (PNU) | | | Pancasila dan Akidah Islam |
| 26 | PNI PRON MARHAENIS | Pancasila | | |
| 27 | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | Pancasila | | |
| 28 | Partai REPUBLIK | Pancasila | | |
| 29 | Partai Islam Demokrat (PID) | Pancasila | | |
| 30 | PNI MASSA MARHAEN | Pancasila | | |
| 31 | Partai Musyawarah Rakyat Indonesia (PMURBA) | Pancasila | | |
| 32 | Partai Demokrasi Indonesia (PDI) | Pancasila | | |
| 33 | Partai GOLKAR** | Pancasila | | |
| 34 | Partai Persatuan (PP) | | Islam | |
| 35 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** | Pancasila | | |
| 36 | Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) | | | Demokrasi Religius |
| 37 | Partai Buruh Nasional (PBN) | Pancasila | | |
| 38 | Partai MKGR | Pancasila | | |
| 39 | Partai Daulat Rakyat (PDR) | Pancasila | | |
| 40 | Partai CINTA DAMAI | Pancasila | | |
| 41 | Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) | Pancasila | | |
| 42 | Partai Solidaritas Sekerja Seluruh Indonesia (SPSI) | Pancasila | | |
| 43 | Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI) | Pancasila | | |
| 44 | Partai Bhineka Tunggal Ika (PBI) | Pancasila | | |
| 45 | Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) | Pancasila | | |
| 46 | Partai Nasional Demokrat (PND) | Pancasila | | |
| 47 | Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI) | Pancasila | | |
| 48 | Partai Pekerja Indonesia (PPI) | Pancasila | | |

Sumber : Jawa Pos, Selasa 25 September 2007

Di sisi lain, Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono (2004) mencatat pembilahan ideologi partai politik kedalam enam kelompok, yaitu Islam Tradisionalis, Islam Modern, Nasionalis, Sosial Demokrat, Marhaenisme, dan Kristen. Apa yang dikemukakan oleh Hidayat dan Haryono merupakan gambaran ideologi partai politik sebagaimana yang dipaparkan dalam visi, misi, serta *flatform* partai politik. Walaupun demikian apa yang dikemukakan dalam *flatform* partai tidak selamanya merupakan cerminan dan ideologi partai politik. Banyak partai politik yang tidak selaras antara asas partai dengan realitas pemilih dan *flatform* serta program-program partai. Lebih jauh, tingkah laku elit politik, kadang tidak mencerminkan ideologi dari partai yang diusungnya.

Tabel 28. Peta Ideologi 24 Partai Peserta Pemilu 2004 Versi Komarudin Hidayat dan Yudhie Haryono

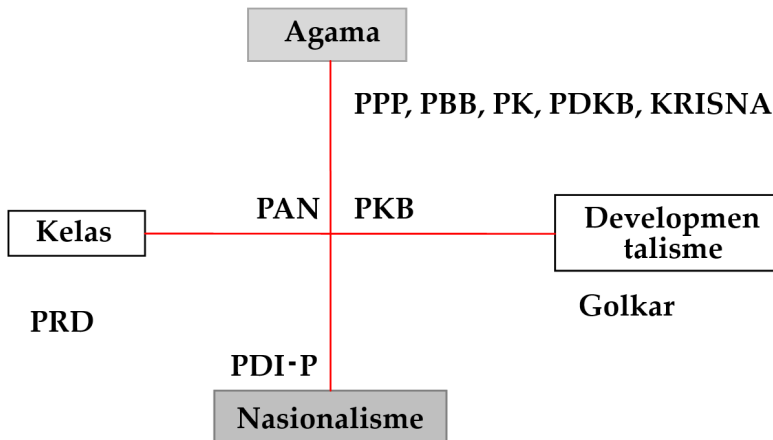
| No | Ideologi | Partai Politik |
|-----|---------------------|---|
| 01. | Islam Tradisionalis | Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa. |
| 02. | Islam Modern | Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang. |
| 03. | Nasionalis | Partai Golkar, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Patriot Pancasila, Partai Demokrat, Partai Persatuan Daerah, Partai Merdeka. |
| 04. | Sosial Demokrat | Partai Indonesia Baru, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. |
| 05. | Marhaenisme | PDI-P, PNBK, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme. |
| 06. | Kristen | Partai Damai Sejahtera. |

Sumber: Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono, *Manuper Politik Ulama, Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.

Sementara Riswanda Imawan (2004), dengan menggunakan model versi Daniel Dhakidae, menggambarkan tipologi partai politik pada pemilu 1999. Tipologi yang dikemukakan Riswanda memberikan

gambaran yang lebih utuh karena dia tidak hanya menampilkan wajah ideologi partai yang berdasar Sektarian yaitu Agama, namun juga ditampilkan sisi lain berupa developmentalisme yang menjadi bagian dari ideologi kapitalis yang punya pesan mengedepankan pembangunan ekonomi.

Menurut Riswanda, partai sektarian yang cenderung ke arah developmenalis adalah PPP, PKB, PBB, PDKB, PK, dan Partai Krisna. Sementara partai Nasionalis yang cenderung ke arah developmenalis adalah partai Golkar. Partai Sektarian yang cenderung ke arah kelas adalah PAN, dan Partai Nasionalis yang cenderung ke arah kelas adalah PDIP dan PRD.



Sumber: Riswanda Imawan 2004

Gambar 13. Tipologi Parpol dalam Pemilu 1999 Versi Daniel Dhakidae

Sementara penulis mengkategorisasikan partai berdasarkan basis ideologinya sebagai berikut: Islam, Nasionalis Sekuler, Nasionalis Religius, dan Kristen. Basis massa partai berhaluan Islam berasal dari pemilih Santri baik modernis maupun tradisional, basis massa partai berhaluan Nasionalis berasal dari pemilih Abangan, basis massa pemilu partai berhaluan Nasionalis Religius berasal dari pemilih santri, Abangan, kristiani dan lain-lain, sementara partai yang berhaluan Kristen berasal dari pemilih Kristen.

Pemilu Tahun 2004 yang diikuti oleh 24 partai, berdasarkan orientasi politik dan ideologi, partai politik yang dapat dikategorikan

sebagai partai Islam yaitu Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan,⁶ Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera,⁷ Partai Bulan Bintang, Partai Sarikat Indonesia. Bagi pemilih Santri sangat tidak mungkin untuk memilih Partai yang berhaluan Nasionalis Sekuler. Hal ini didasarkan pada bedanya orientasi politik mereka, dan dalam kehidupan keseharian baik pemilih Abangan maupun Santri yang walupun ada pertautan secara kultural, khususnya dalam ritual, namun masing-masing sudah punya identifikasi politiknya.

Partai Nasionalis Sekuler yaitu, PDI-P, PNBK, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme. Basis pemilih Partai Nasionalis yang abangan sangat jelas dapat dibedakan dengan pemilih Santri. Walaupun PDIP berusaha untuk menggaet pemilih Santri dengan memunculkan wadah bagi berkumpulnya pemilih Islam seperti Jamah Muslimin (Jamus) dan sekarang Baitul Muslimin (Bamus), namun upaya ini tidak banyak mendapatkan hasil karena para pemilih santri punya hambatan psikologis untuk memilih PDIP yang *nota bene* banyak dihuni oleh kelompok Abangan.

⁶ Keputusan PPP untuk kembali kepada Islam sebagai asas partai pada tahun 1998 lalu, merupakan titik balik bagi partai ini dalam mengapresiasi diri sebagai partai politik Islam. Langkah ini diambil setelah sepuluh tahun lebih rezim Orde Baru melucuti atribut ke Islamannya melalui penerapan asas tunggal Pancasila kepada seluruh partai politik. Kembalinya PPP ke khittah 1973 menandai tekad partai berlambang Ka'bah ini melepaskan diri dari dilema idiologi. Menghadapi pemilihan umum 2004 lalu PPP akan tetap mengedepankan prinsip istiqomah dalam melakukan tugasnya sebagai partai politik.

⁷ Partai Keadilan Sejahtera yang singkat PK Sejahtera merupakan partai berasakan Islam yang pendirinya terkait dengan pertumbuhan aktifitas dakwah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. partai dengan lambing dua bulan sabit ini juga merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang didirikan pada 20 Juli 1998. Awal tahun delapan puluhan gerakan-gerakan Keislaman yang mengambil masjid-masjid sebagai basis operasional dan strukturnya, terutama masjid kampus, mulai bersemi. Gerakan dakwah ini merebak dari tahun ke tahun mewarnai suasana Keislaman di kampus-kampus dan masyarakat umum. Bahkan, menjaral pula kekalangan pelajar dan mahasiswa di luar negeri, baik eropa, Amerika maupun Timur Tengah. Gejolaknya muncul dalam bentuk pemikiran Keislaman dalam berbagai bidang dan juga praktik pengalaman sehari-hari. Persaudaraan (ukhuah) yang dibangun di antara mereka menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-tengah masyarakat yang cenderung semakin individualistik. Gerakan dakwah ini semakin membesar dan mengental, dan jaringan mereka pun semakin luas. Mereka juga berupaya membangun ruh ke-Islaman melalui media tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi dan juga pendidikan, meskipun saat itu berada dalam bayang-bayang kekuasaan Orde Baru yang demikian ketat mengawasi aktivitas keagamaan. lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 dirasakan membuka iklim kebebasan yang semakin luas. Musyawarah kemudian dilakukan oleh para aktivitas dakwah Islam, yang melahirkan kesimpulan perlunya iklim yang berkembang untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya peralihan cita-cita mereka, yaitu apa yang mereka maksudkan sebagai upaya mewujudkan bangsa negara Indonesiayang diridlohi oleh Allah Swt. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang. Maka mereka pun sepakat untuk membentuk sebuah partai politik.

Partai Nasionalis Religius yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar,⁸ Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Patriot Pancasila, Partai Demokrat, Partai Persatuan Daerah, Partai Merdeka. Partai Indonesia Baru, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. Bagi partai yang berhaluan Nasionalis Religius, segmen pemilihnya datang dari berbagai elemen. Baik kalangan Santri, Abangan, maupun kelompok beragama lain dapat masuk menjadi bagian dari pemilih Partai Nasionalis Religius. Khususnya Partai Golkar yang dalam pemilu 2004 menjadi pemenang, basis dukungan pemilihnya banyak yang datang dari kalangan Santri maupun Abangan.

Partai Kristen yaitu Partai Damai Sejahtera. Basis dukungan partai Kristen sangat eksklusif, yaitu hanya pemilih yang berlatar keagamaan Kristen. Dapat dipastikan bahwa mereka yang Islam tidak akan memilih partai yang memang berasal dari kalangan Kristiani. Bahkan mereka yang abangan pun, kalau harus memilih sangat sukar bagi mereka untuk menjadi bagian dari pendukung partai berhaluan Kristen, karena walaupun mereka abangan tapi mereka masih menyebut dirinya sebagai orang Islam. Oleh karena itu maka, Kristen menjadi bagian ideologi tersendiri dari pentas politik kepartaian di Indonesia. Sementara agama-agama lain, tidak membangun identitas politik sendiri karena secara kuantitas pemeluk tidaklah signifikan. Banyak pemilih dari pemeluk agama selain Islam dan Kristen menjadi pendukung partai yang bersifat Nasionalis Religius. Keberadaan pemilih selain Islam dan Kristen sangat sulit dideteksi kemana pilihan politiknya berlabuh, akan tetapi yang jelas mereka sangat sulit untuk memilih partai Islam atau pun partai

Atas dasar beberapa hal yang melatar belakangi sejarah berdirinya Partai Keadilan, maka dipandang wajar jika para fungsionaris partai ini adalah mereka yang tergolong muda dan kalangan intelektual kampus. Partai Keadilan secara resmi didirikan pada tanggal 20 Juli 1998. Islam menjadi asas dari partai baru ini. Tercatat lebih dari 50 pendiri partai ini, diantaranya adalah Hidayat Nur Wahid, Lutfi Hasan Ishaq, Salim Segaf Aljufri, Nur Mahmudi Ismail yang kemudian menjadi menjadi Presiden Partai Keadilan, sedangkan Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di Masjid AL-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dengan dihadiri sekitar 50.000 massa.

⁸ Partai Golkar merupakan kelanjutan dari Golkar yang pada era Orde Baru selalu mendominasi kursi legeslatif. Setelah rezim Orde Baru tumbang, berbagai tekanan dari berbagai kelompok masyarakat yang anti Orde Baru terus menimpa Golkar, dari aksi demonstrasi sampai gugatana di pengadilan. Akan tetapi partai ini ternyata mampu meraih suara 22,44 persen atau menduduki urutan kedua. Bahkan, di provinsi-provinsi di luar Jawa, partai ini mampu meraih suara terbanyak.

Kristen seperti PDS. Berdasar kenyataan tersebut, penulis berupaya untuk mengelompokkan ideologi partai politik, khususnya partai politik peserta pemilu 2004, ke dalam empat kategori, yaitu partai yang berideologi Islam, partai yang berideologi Nasionalis Sekuler, partai yang berideologi Nasionalis Religius, serta partai yang berideologi Kristen.

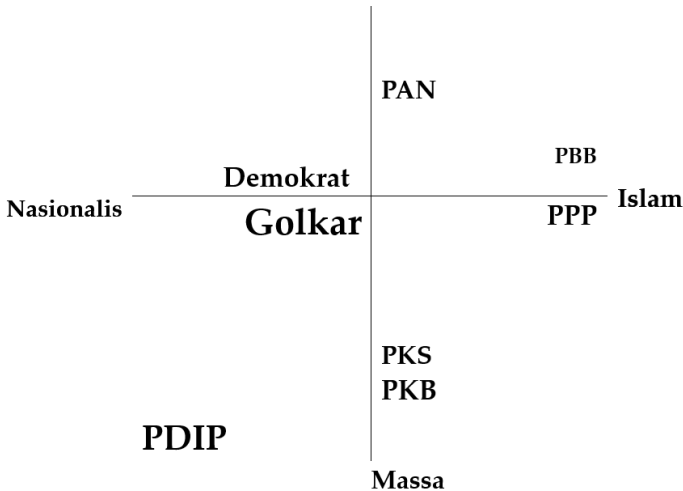
Kalau kita kaji lebih jauh dengan menggunakan pendekatan proses pembentukan partai, akan kita temukan bahwa partai politik terbagi ke dalam dua kutub yaitu partai elit dan partai massa (Riswanda, 2004). Partai Elit atau *caucus party* adalah partai yang dibentuk oleh elit. Sejarahnya diawali dengan partai yang dibentuk para bangsawan (elit) yang beroperasi secara *top-down* dengan fungsi utamanya memobilisasi massa bagi legitimasi kekuasaan. Sementara partai massa (*mass party*), merupakan partai bentukan masyarakat. Partai Massa beroperasi secara *botton-up* dengan fungsi utamanya adalah menyalurkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat ke dalam sistem politik.

Tabel 29. Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2004

| No | Ideologi | Partai Politik |
|-----|---------------------|--|
| 01. | Islam | Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang. |
| 02. | Nasionalis Religius | Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Sarikat Indonesia, Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Patriot Pancasila, Partai Demokrat, Partai Persatuan Daerah, Partai Merdeka, Partai Indonesia Baru, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. |
| 03. | Nasionalis Sekuler | PDI-P, PNBK, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Sosial Demokrat. |
| 04. | Kristen | Partai Damai Sejahtera |

Keterangan: Bagi pemilih Islam, 90 % yang mencoblos PKB menganggap partai ini adalah Partai Islam, sebaliknya 70 % yang mencoblos PAN menganggap Partai ini adalah Partai Nasionalis. Kedua partai ini, kalau dilihat secara historis dan sosiologis, maka menurut hemat penulis dapat dikategorikan sebagai partai Islam.

Dalam pemilu 2004, kalau kita analisis, partai elit umumnya melakukan kampanye berdasarkan pada program yang akan mereka perjuangkan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mampu membangun partai secara instan dari basis massa yang jelas dan dengan orientasi ideologi yang jelas dan kuat.⁹ Oleh karena itu mereka harus membuat satu isu maupun program yang akan diperjuangkan sebagai alat mobilisasi massa. Sementara, partai massa bergerak dari basis massa yang jelas dan mempunyai jumlah pendukung relatif besar dengan ideologi yang jelas dan kuat. Partai ini hanya berusaha untuk memperjuangkan aspirasi dari konstituennya, yang menjadi penopang utama dari partai tersebut. Kalau pengelompokan partai ini (partai elit dan partai massa), dianalisis berdasarkan pada tipologi ideologi Islam dan Nasionalis, maka hasil komposisi partai politik bisa dilihat dalam gambar15.



Sumber: Hasil Analisis Penulis

Gambar 14. Tipologi Partai Partai pemilu 2004

Satu hal yang patut dipahami, karakteristik keberagaman di Malang Raya, khususnya bagi kelompok Santri Tradisional, ada pertautan yang khas dengan kelompok abangan. Banyak dari kelompok Abangan lemah, juga mengikuti aktivitas keagamaan atau ritual keagamaan yang

⁹ Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan *client* (anak buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini. Biasanya, elit yang duduk di kepemimpinan partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpandang. Partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik, yang biasanya terbentuk di dalam parlemen

dijalankan Santri Tradisional. Oleh karena itu, ada kecenderungan pilihan politik dari kelompok Santri yang lemah memilih Partai Nasionalis, sebaliknya bagi Kelompok Abangan yang lemah memilih partai Islam. Di Malang Raya, yang menjadi simbol pemilih abangan adalah PDIP, sementara yang menjadi simbol pemilih Santri Tradisional adalah PKB, simbol untuk pemilih Santri Modernis adalah PAN, PKS, PBB.

Tabel 30. Pilihan Santri dan Abangan terhadap Partai Politik pada Pemilu 2004

| No | Partai Politik | Jumlah Pemilih | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|-----|---------|-----|
| | | Santri | | Abangan | |
| | | Angka | % | Angka | % |
| 1 | PNI Marhaenisme | - | - | 2 | 100 |
| 2 | PBSD | - | - | - | - |
| 3 | PBB* | 1 | 100 | - | - |
| 4 | Partai Merdeka | - | - | 1 | 100 |
| 5 | PPP* | 6 | 65 | 3 | 35 |
| 6 | PPDK | - | - | - | - |
| 7 | PPIB* | 1 | 100 | - | - |
| 8 | PNBK | - | - | 1 | 100 |
| 9 | Partai Demokrat | 13 | 32 | 28 | 68 |
| 10 | PKDPI | - | - | - | - |
| 11 | PPDI | - | - | - | - |
| 12 | PPNU* | 1 | 100 | - | - |
| 13 | PAN* | 11 | 65 | 5 | 35 |
| 14 | PKPB | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 15 | PKB* | 28 | 61 | 17 | 39 |
| 16 | PKS* | 21 | 87 | 3 | 13 |
| 17 | PBR* | 1 | 100 | - | - |
| 18 | PDI-P | 17 | 28 | 48 | 72 |
| 19 | PDS | - | - | 2 | 100 |
| 20 | GOLKAR | 12 | 44 | 15 | 56 |
| 21 | P. Patriot Pancasila | - | - | 1 | 100 |
| 22 | PSI* | - | - | - | - |
| 23 | PPD | - | - | 1 | 100 |
| 24 | Partai Pelopor | - | - | 1 | 100 |
| Total Jumlah Pemilih | | 112 | 46 | 129 | 54 |

Sumber: Hasil survey yang dilakukan pada bulan Desember 2008 di Malang Raya.

Keterangan: Karakteristik responden dianggap homogen, dengan dengan estimasi sampling error 5,25 % pada tingkat kepercayaan 99%.

Pengelompokan tersebut di atas, kalaulah aliran itu masih disepakati sebagai dasar dalam pembilahan politik, juga diperkuat dengan hasil survey yang menunjukkan posisi ideologis dari partai politik. Besar dan kecilnya dukungan pemilih dari kelompok pemilih Islam atau Abangan dapat menjadi indikasi dari ideologis partai tersebut. Hasil survey terhadap 112 (Seratus Dua Belas) pemilih Santri dan 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) pemilih Abangan, yang dilakukan di Malang Raya dengan *Clustered Random Sampling*.

C. Partai Sektarian

Angus Campbell (1976) menunjukkan adanya korelasi antara variabel agama dalam pemungutan suara di samping variabel ras, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Pada pemilu 1999 dan 2004, di Malang Raya walaupun secara tidak langsung menjadikan ormas Islam sebagai partai politik, namun pada praktiknya agama dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi massa. Ada alasan yang kuat kenapa banyak partai politik menggunakan organisasi massa atau agama sebagai dasar atau basis dalam partai politik. Salah satu alasannya adalah tidak berkembangnya basis sosial secara material, seperti yang diperlihatkan oleh lemahnya pengelompokan profesi yang akan memobilisasi massa untuk mendukung partai politik. Di Indonesia, khususnya di Malang Raya, justru alat mobilisasi massa yang paling efektif adalah agama.

Terseretnya agama dalam politik bukanlah hal yang aneh, karena secara riil pemeluk agama, khususnya pemeluk Islam, di daerah ini merupakan pemeluk agama yang umumnya terkategori Tradisional dengan tingkat kepanatikan terhadap agama yang tinggi. Dari segi kuantitas, sebagai contoh, jumlah pemeluk agama Islam di Malang Raya merupakan mayoritas, dibanding dengan agama lain seperti Kristen kira-kira hanya 5%, Katolik sekitar 4% dan Hindu dan Budha merupakan minoritas ketiga dan keempat. Lebih dari itu terlibatnya agama dalam kehidupan politik disebabkan oleh belum terbentuknya basis material dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi massa. Walaupun demikian, dalam Islam (pemeluk agama Islam) di Malang Raya tidaklah homogen karena ada varian-varian yang bisa dilihat

dari karakteristik penganutnya. Salah satu pencetus dari varian Islam itu adalah Geertz, yang mengemukakan bahwa pemeluk agama Islam terkategoriisasikan ke dalam tiga, yaitu Santri, priyayi dan Abangan.¹⁰

Memahami tingginya korelasi agama dan partai politik, Komaruddin Hidayat dan M. Yudhi Haryono (2004), menyebutkan bahwa fenomena partai dan politik agama bisa dijelaskan dengan tiga cara:

Pertama, agama adalah politik, atau lebih tepatnya produk politik. Berbagai fakta sejarah menunjukkan bahwa kelahiran agama (terutama agama Ibrahimian) adalah kritik perlawanan, pemberontakan, dan pembebasan dari hegemoni dan sistem politik rezim penguasa. Agama menjadi kumpulan daya kohesif yang mengikat umat untuk melakukan perlawanan.....

Kedua, agama adalah stuktur penyelamat yang menghasilkan agen penyelamatan. Agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dan keselamatan sendiri, keluarga dan keselamatan alam semesta. Karenanya agama juga telah menimbulkan khayalan yang paling luas dan digunakan untuk membenarkan kekejaman pada orang lain, membangkitkan kebahagiaan, dan menjalari rasa takut yang luar biasa, sehingga gagasan penyelamatan demikian sentral dalam setiap agama.....

Ketiga, agama adalah alat analisis sekaligus jawaban persoalan dunia. Ia adalah sumber pembaharu-pembaharu yang kreatif. Karena paradigma inilah, kita bisa melihat jejak rekam para nabi yang ditempatkan sebagai tempat bertanya sekaligus tempat menjelaskan problem umat.

¹⁰ Setidaknya ada dua karya terpenting sering jadi rujukan jika membicarakan masyarakat Islam dalam konteks Indonesia. *Pertama, The Religion of Java* karya Clifford Geertz yang didasarkan studi di Mojokuto, sebuah desa kecil di Jawa Tengah. *Kedua, Indonesia Political Thinking* karya Herbert Feith dan Lance Castles yang mengacu pada koleksi tulisan sejumlah tokoh Indonesia. Kedua karya tersebut ditulis sekitar tahun 1950-1960-an. Hasil studi Geertz intinya mengungkapkan temuan trikotomi politik aliran. yaitu: Abangan, Santri, dan priyayi. Abangan adalah ciri kelompok masyarakat yang berbasis pertanian (pedalaman) dengan orientasi keagamaan tidak ketat. Santri adalah berbasis pada perdagangan (perkotaan) dengan orientasi keagamaan yang kuat. Sedang priyayi yang berbasis birokrasi berorientasi lebih kental pada warisan tradisi aristokrat atau pamong. Berbeda dengan teori Gertz, formulasi Feith mengungkap lima kutub aliran. Yaitu, Islam, Nasionalisme radikal, sosialisme, komunisme, dan Tradisionalisme Jawa. Tumbuhnya kelima aliran itu dipengaruhi oleh dua sumber utama, yakni: khasanah Barat (modern) dan domestik (Hindu-Buddha dan Islam). Dari situlah mengejawantah heterogenitas partai.

Feith melihat kelima aliran itu saling terkait (*cross-cutting*). Nasionalisme radikal dengan representasi PNI terkait dengan NU; Islam dengan representasi Masyumi bersama NU; Tradisionalisme Jawa dengan representasi Partindo terkait PNI dan NU; sedangkan sosialisme demokrat dengan representasi PSI terkait Masyumi dan PNI. Kecuali aliran komunisme yang diwakili PKI yang menjadi kutub terpisah sendiri. Pola penggolongan Feith tersebut tampaknya mendobrak kesemrawutan pandangan ideologi yang kaku.

Walaupun demikian, dalam kalangan Islam sendiri tidak homogen. Banyak aliran pemikiran yang berkembang, dan pada akhirnya menjadi *mainstream* baru dalam mazhab pemikiran Islam. Perbedaan pemikiran ini tidak hanya dalam hal kehidupan sosial, namun juga dilatar belakangi persoalan politik. Berkembangnya perbedaan pandangan politik di dalam Islam bersumber pada perbedaan pemikiran tentang relasi Islam dan Negara. Dalam khazanah pemikiran umat Islam, diskursus tentang Islam dan Negara memang bukan barang baru. Diskursus ini telah berlangsung sangat lama, namun sampai sekarang belum juga berakhir. Ini menandakan bahwa masalah Islam dan negara merupakan masalah laten yang akan terus mewarnai diskursus politik nasional.¹¹

Menurut Charles Kurzman (1998), sesungguhnya di seluruh dunia Muslim termasuk di Indonesia, secara umum sejak masa dua abad yang lalu telah mengalami perdebatan yang cukup pelik di antara tiga tradisi besar sosial-religius. *Tradisi pertama* adalah Islam adat, yang merupakan kombinasi dari kebiasaan lokal yang hidup di suatu daerah tempat menyebarnya Islam. Secara sama juga dikemukakan oleh Geertz (1969) yang memberi label pada orang Islam Jawa yang menerapkan ajaran Islam

Gambaran ini mengingatkan pemikiran aliran yang justru jauh lebih dahulu dikemukakan Soekarno sekitar tahun 1920-an, yang melihat kemungkinan pertemuan dan perpaduan antara berbagai kutub politik ideologis. Pemikiran Soekarno mengemukakan tiga aliran politik besar yang menurutnya berjasa mengantar Indonesia ke gerbang kemerdekaan, yaitu: Islam, Nasionalisme, dan Marxisme. Ketika Soekarno menerapkan kekuasaan demokrasi terpimpin, ketiga aliran itu dikemasnya menjadi doktrin nasakom (Nasionalisme, agama, dan komunisme). Sebenarnya pendekatan aliran seperti model Geertz, Feith, dan Soekarno itu sudah banyak mendapatkan kritik karena dianggap hanya mewakili potret masyarakat Jawa.

¹¹ Sekurang-kurangnya, ada tiga pandangan dalam diskursus Islam dan negara. *Pertama*, mereka yang berpandangan bahwa Islam merupakan bagian tak terpisahkan dengan negara. Islam sebagai *din*, tidak bisa dipisahkan dengan *ad-daulah*. *Din wa daulah* adalah sesuatu yang menyatu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Paham ini yang kemudian dinisbatkan pada kelompok formalis, karena menghendaki Islam sebagai bentuk negara, yakni negara Islam. Dalam kacamata pengamat asing, paham ini biasanya disebut sebagai kelompok Fundamentalis, sekalipun sebenarnya tidak cocok, mungkin lebih cocok disebut sebagai kelompok Islamisme; yakni kelompok yang ingin menumbuhkan kembali Islam dalam level negara. Islam adalah *integrated* dengan negara, karena itu mendirikan sebuah partai Islam adalah kewajiban umat Islam.

Paham kedua adalah yang berpandangan bahwa Islam tidak ada aturan atau perintah secara formal dari kitab suci al-Qur'an maupun Hadits untuk mendirikan sebuah negara Islam. Yang ada hanyalah isyarat-isyarat yang mengarah pada perlunya sebuah nilai-nilai agama (Keislaman) mewarnai penyelenggaraan negara. Islam tidak perlu diwujudkan dalam bentuk formal sebuah negara, yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam menjadi bagian dari proses bernegara sehingga dalam berpolitik seseorang atau komunitas tidak meninggalkan kaidah-kaidah etik yang terdapat dalam agama Islam. Nilai-nilai Islam menjadi pijakan dalam bernegara, atau dengan istilah lain bisa disebut sebagai Islamisasi masyarakat, bukan Islamisasi negara, sebab dengan melakukan Islamisasi masyarakat sejatinya telah terjadi Islamisasi negara secara tidak langsung.

dengan budaya lokal sekaligus (sinkretisme). Tradisi kedua adalah tradisi revivalis Islam, yang dianggap sebagai antitesis dan seringkali berada pada posisi kontradiksi dengan ajaran Islam adat. Hal ini dianggap karena Islam adat terlalu mengedepankan aspek lokalisme budaya yang cenderung ber-sinkretis dengan ajaran Islam murni. Ketiga adalah tradisi Islam Liberal, yang menekankan pada ajaran Islam yang progressif dan Liberalisasi pemahaman terhadap Islam agar sesuai dengan konsteks ruang dan waktu.

Sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa yang termasuk partai sektarian adalah partai yang sumber dukungannya didasarkan pada kelas, daerah, atau ideologi. Dan yang bisa dikategorikan sebagai partai sektarian ini adalah partai sosialis dan partai agama. Melihat kenyataan yang ada, partai-partai yang berkembang di negara kita tidak lepas dari unsur ideologi. Hasil penelitian Geertz (1960), membuktikan bahwa pembilahan sosial yang berbasis agama juga tertransformasi ke dalam pembilahan politik. Secara garis besar Geertz

Paham ini biasanya dinisbatkan dengan mazhab substansialis Islam, sebagai semacam perimbangan atas mazhab formalis. Munculnya mazhab ini tampaknya lebih realistis dan ditengarai oleh adanya kekuatan-kekuatan yang nyata-nyata memang tidak menyukai Islam atau Islamophobia, yang melihat Islam sebagai sebuah kekuatan tiranik yang menindas, sehingga akan memunculkan tirani mayoritas atas minoritas. Mazhab substansialis sebetulnya telah berkembang sejak terjadi perdebatan pada saat perumusan UUD 1945 tentang tujuh kata dalam preambule; "dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Walaupun kemudian berkembang pesat pada tahun 1970-an, pada saat Cak Nur mengusung tema "Islam Yes; partai Islam No", yang kemudian ditafsirkan sebagai bentuk sekularisasi Islam.

Paham ketiga, paham yang secara tegas menolak adanya formalisasi ataupun bentuk-bentuk pembawaan agama dalam hal-hal kenegaraan atau publik. Dalam pandangan paham ketiga yang berkembang adalah adanya keinginan untuk memisahkan wilayah keagamaan Islam dengan wilayah-wilayah publik. Negara tidak perlu mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Tugas negara adalah mengurus masalah publik, seperti membuat peraturan tentang perpajakan, hubungan luar negeri dan keamanan. Sementara agama difokuskan untuk mengurus masalah-masalah seperti bagaimana seseorang menjadi saleh dalam beragama.

Dalam pandangan ini, antara agama dan negara harus benar-benar dipisahkan secara tegas. Agama bisa dibidang hanya mengurus masalah-masalah pribadi yang bersifat ubudiyah atau peribadatan diri sendiri dengan Tuhan, sementara negara harus mengurus masalah-masalah yang tidak diurus agama. Pemisahan yang tegas antara urusan agama dan negara ini kemudian dinisbatkan dengan mazhab sekularisasi, yakni pemisahan antara masalah agama sebagai masalah sacred dengan masalah negara yang bersifat profane. Mazhab ini agaknya mendapatkan respon kurang positif dari mazhab formalis Islam dan politik, sehingga acapkali menuduh kelompok sekularis sebagai kelompok penghancur Islam dari dalam Islam itu sendiri. Sekalipun dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, bukan agama sebagai dasarnya adalah sebuah pilihan atas sekularisme, jika kita tidak ingin menjadi bangsa munafik. Pilihannya adalah tegas, sebagai negara agama atau negara sekular. Dalam paham mazhab ini, antara agama

membuat dikotomisasi partai kepada basis pemilih Santri yang identik dengan pemilih partai Islam, di sisi lain ada basis pemilih Abangan yang identik dengan partai pemilih Nasionalis. Akan tetapi perjalanan sejarah perkembangan partai-partai politik dan pengalaman pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Tanah Air, realitas ekspresi penyaluran aspirasi politik umat Islam tidak terkonsentrasi ke dalam satu wadah tunggal partai Islam atau partai berbasis Islam, akan tetapi menyebar secara bervariasi ke berbagai saluran partai politik yang ada di panggung arena politik nasional.

Ada hal yang patut dicermati, akibat *attachment* yang bersifat primordial lebih dominan, maka partai-partai politik di Indonesia tidak berkembang menjadi partai yang programatik. Mengentalnya *attachmen* agama dalam pentas politik nasional, salah satu alasannya karena hilangnya elemen “kiri”. Dulu elemen “kiri” ini sempat ada, namun sekarang hilang akibat konflik politik pada tahun 1965 yang berkhir dengan dijadikannya PKI sebagai partai terlarang.¹² Karena hilangnya PKI ini, semua partai berhaluan “kiri” (sosialis) ikut menghilang, padahal tidak semua yang berhaluan sosialis itu selalu berkonotasi komunis. Akibatnya, partai politik dan pemilih tidak memiliki preferensi kebijakan yang konsisten, dalam artian pilihan kebijakan yang ditawarkan partai politik itu pro rakyat atau pro pasar.

dan negara tidak ada hubungan simbiotik atau integreted, bahkan terkesan atau dikesankan disintegreted.

Bertolak dari cara pandang seperti itu, maka dalam hal diskursus antara Islam dan Negara menempatkan Islam berada di luar sistem kekuasaan negara. Islam tidak boleh turut terlibat dalam urusan negara, hal yang sama juga negara tidak boleh dan tidak perlu turut campur dalam urusan-urusan keagamaan yang sifatnya memang pribadi. Pandangan ini oleh sebagian umat Islam dinyatakan sebagai paham yang mengadopsi kerangka yang dipakai dalam tradisi kenegaraan di Barat dan Eropa, yang secara tegas memisahkan antara gereja dan negara. Gereja berada dalam genggaman para pastur/pendeta, sementara negara berada dalam genggaman para politisi dan negarawan.

¹² Literatur mengenai sistem politik yang mapan, terutama di Eropa, selalu menampilkan spektrum ideologis partai-partai politik yang konsisten: kiri-tengah-kanan. ‘Kiri’ berarti mendukung peran negara yang dominan dalam ekonomi dan kesejahteraan (bersifat sosialistik, belum tentu sinonim dengan komunis), ‘tengah’ adalah Moderat, dan ‘kanan’ adalah kelompok Liberal yang berusaha mengeliminir peran negara (singkatnya tidak setuju subsidi dan pajak yang tinggi misalnya) dan berusaha mengembalikan kapital lewat aktifitas masyarakat (pasar). Adanya spektrum ideologi yang signifikan itu membuat sistem politik di Eropa menjadi mapan karena partai politik terdorong untuk mengkedepankan kebijakan berbasis orientasi ideologis yang jelas. Dengan demikian pemilih juga menjadi rasional, para pemilih memilih partai yang sejalan ideologi nya, terutama dalam masalah substansial seperti peran negara dalam ekonomi dan politik. Pemilih menjadi rasional dalam arti pemilih bisa dipilah preferensinya.

Penjelasan lain kenapa aliran kiri di negara kita tidak ada, menurut Afan Gaffar (1992) dalam masyarakat desa Jawa, seperti halnya negara dunia ketiga yang secara ekonomi terbelakang, stratifikasi kelas berdasarkan pada pada status sosial ekonomi tidak begitu menonjol, dan persepsi kelas secara subjektif tidak dikenal dalam masyarakat desa, khususnya dalam istilah Marxis. Jika dipahami, konteks kelas dalam masyarakat Jawa, mungkin dapat dijelaskan dalam kerangka birokrasi, bukan dalam kontek Marxis.¹³ Dia mencontohkan bahwa di Jawa, orang-orang hanya mengenal dua pembeda mengenai individu dalam masyarakat yaitu *wong cilik* (orang kecil) dan *wong gedhe* (orang besar), yaitu orang-orang yang berkerja di birokrasi atau Priyayi. Oleh karena itu, istilah seperti “kiri”, “Liberal”, tidak dipahami dalam istilah tata bahasa di Indonesia.

Di sisi lain, hasil studi Bartolini menunjukkan bahwa ketika sebuah *cleavage* (kelas, agama, atau etnik misalnya) menjadi terorganisasi, maka *cleavage* ini akan menjelma menjadi kekuatan politik yang otonom dan berpengaruh. Studi klasik Sartori (1968) juga menunjukkan bahwa partai politik (kiri) bukanlah ‘akibat’ dari eksistensi kelas ekonomi. Sebaliknya, partai politik lah yang mengeraskan perbedaan kelas, melalui proses sosialisasi politik yang membentuk kesadaran kelas. Karena itu, kelihatannya menarik untuk mencari hubungan antara *political cleavages* dan partai politik di Indonesia. Juga bila hubungan itu sudah teridentifikasi, amat menarik untuk menemukan mekanisme kausalistiknya untuk memahami perilaku pemilih Indonesia (Gaffar, 1992).

1. Realitas Politik Partai Berbasis Agama

Kebangkitan parpol-parpol agama di era multipartay sering disebut kalangan pengamat tertentu sebagai bangkitnya “politik aliran”, yang tentunya terkait dengan tipologi Santri, Abangan, priyayi dalam masyarakat Jawa sebagai mana dirumuskan Clifford Geertz pada tahun 1950-an. Meningkatnya ketegangan antara parpol-parpol Islam ditambah lagi dengan seruan MUI dan ormas-ormas Islam untuk tidak memilih parpol lain (PDI-P) yang banyak menampilkan caleg non-Muslim seakan-

¹³ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam Afan Gaffar, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under s Hegemonic Party System*, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1992) Hlm. 9.

akan memperkuat asumsi tentang kembalinya politik aliran ke kancah politik Nasional (Azymardi Azra, 2002).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKNU, Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah beberapa contoh partai yang sangat berkaitan erat dengan Agama. PKB, PAN, PPP dan partai partai lain yang setipe, mereka nyata - nyata memporklamirkan bahwa mereka adalah partai agama. Dengan tujuan meyedot massa dari golongan yang fanatik agama. Atau dengan kata lain orang yang lebih sreg atau cocok dengan segala sesuatu yang berbau agama, maka orang tersebut tentu akan memelilih partai yang ada embel-embelnya agama.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa Aliran masih merupakan sebuah konsep yang mewarnai pentas politik di Indonesia.¹⁴ Hal ini menurut Fachry Ali (1996) dikarenakan budaya dan sistem politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan bersifat tipikal di mana kekayaan dan kontrol atas sumber-sumber material—yang pada waktu itu hampir sepenuhnya dikuasai oleh pihak asing—tidak terlalu besar pengaruhnya dalam dunia dan dinamika politik Indonesia. Dengan demikian, maka tidak salah kalau J.A.C. Mackie (1990) mengatakan bahwa konsep aliran yang merupakan jalan keluar bagi kebuntuan analisis kelas di Indonesia.

Belum tumbuhnya kesadaran politik yang bersifat *material-based* menjadikan konsep aliran punya peranan penting dalam dalam memahami dan menganalisis kecenderungan dan dinamika politik Indonesia. Dunia politik modern bagi masyarakat Indonesia, walaupun

¹⁴ Setelah Pemilu presiden 2004 berlangsung, analisis politik banyak bermunculan di media massa, termasuk pengujian ulang "politik aliran" yang pernah berkembang tahun 1950-an. Berbagai analisis itu menarik karena akan memeriksa apakah sepanjang 40 tahun terjadi kontinuitas atau diskontinuitas geneologi sejarah budaya-politik kita. Kuntowijoyo (Kompas, 7/7/ 2004) menyatakan politik Indonesia bergerak menuju apa yang ia sebut "pragmatisme-religius", kian kaburnya identitas religius-sekuler. Dijelaskannya, pragmatisme religius merupakan antropo-teosentrisme. Kuntowijoyo mencatat yang tersisa dari dikotomi itu apa yang oleh Max Weber disebut ketegangan kreatif antara *zweckrational* dan *wertrational*, pemikiran yang murni rasional menjadi satu dengan pemikiran berdasar nilai. Sehingga yang ada hanya pertentangan "aktualitas", bukan "ideologis". Senada dengan Kuntowijoyo, Lance Castles (Kompas, 9/7/20 04) menulis pola aliran sudah berakhir. Keraguan muncul dari Muhammad Ali (Kompas, 15/7/ 2004) yang merespons dengan pertanyaan apakah benar yang terjadi lenyapnya dikotomi sekuler-religius? Ali merekomendasikan pencarian jalan tengah yang "seharusnya" bagi politik kita ke depan.

merdeka sudah cukup lama, masih belum bisa berjalan dengan baik akibat belum terbangunnya struktur sosial yang didasarkan pada *material-based* tersebut.¹⁵ Oleh karena itulah, untuk memasuki kancah dunia politik, masyarakat masih memerlukan simbol-simbol yang dikenalnya sebagai perantara yang menstrukturkan sistem tindakan dan cara mereka menginterpretasikan realitas politik tersebut. Dalam konteks inilah aliran memberikan solusi bagi ketiadaan sistem nilai baru itu. Dengan demikian dinamika dan bangunan afiliasi politik lebih ditentukan oleh adanya persamaan atau perbedaan budaya didalam kelompok-kelompok masyarakat Indonesia.

Penggunaan konsep aliran dalam menganalisis politik Indonesia bukannya tanpa kelemahan,¹⁶ apalagi Indonesia sudah hampir setengah abad lebih merdeka, dimungkinkan struktur sosial yang terbangun pada masa itu telah mengalami perubahan. Namun demikian, konsep ini masih dipakai akibat sulitnya menemukan konsep baru yang dapat menjelaskan perilaku politik di Indonesia sekarang ini. Berdasar pada kenyataan di atas, untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang pemilih di Indonesia perlu kiranya membuat gambaran mengenai budaya politik masyarakat. Untuk kepentingan ini, konsep aliran menjadi sangat relevan.

Berkenaan dengan konsep aliran, Clifford Geertz memperkenalkannya dalam beberapa buku (sebagai contoh 1959; 1960), dan pengaruhnya terhadap analisis politik Indonesia sangat besar. Hal ini bisa terlihat dalam karya-karya ahli Indonesia seperti karyanya Robert Tay (1963:1969),

¹⁵ Fachri Ali mengatakan bahwa pengaruh aliran dalam politik Indonesia adalah suatu produk sejarah sosial-politik dan ekonomi yang khas. Bahwa kendatipun masyarakat Indonesia telah mengalami proses kapitalisasi sejak abad ke-19, namun sumber-sumber material belum tertransformasikan menjadi alat politik dan daya pendorong bagi terciptanya afiliasi politik yang efektif bagi masyarakat Indonesia. Ini terjadi karena proses kapitalisasi modern itu berada dalam di dalam kontrol tangan-tangan asing. Dalam arti kata lain, absennya kontrol kaum pribumi terhadap sumber-sumber material berbanding lurus dengan absennya kesadaran politik yang bersifat material-based di kalangan masyarakat Indonesia. Dia mencontohkan, gagalnya anggota Sarekat Islam untuk berkembang menjadi kelas ekonomi yang sadar—walau pada mulanya lahir dengan kesadaran itu—antara lain, menunjukkan kecenderungan kegagasaln diatas. Di samping itu kegagalan PKI mengembangkan politik kelas yang cenderung membuat kompromi-kompromi ideologis dalam realitas dan politik Indonesia. Lihat Fachri Ali, Pengaruh Aliran Dalam Politik Indonesia, *unpublished paper*, 1996.

¹⁶ Salah satu kelemahan muncul dari penjelasan konsep aliran itu sendiri, dimana Geertz tidak konsisten memberikan definisi pada konsep yang ditemukannya itu. Dalam kontek

Liddle (1970;1972), Young Mung Cheong (1973), dan Emmerson (1976). Walaupun menurut Afan Gaffar karya terakhirnya Liddle (1977) mempertanyakan mengenai peran pentingnya konsep aliran, juga mencatat bahwa “aliran merupakan kekuatan laten yang mungkin muncul ke depan dengan kekuatan baru”.

Pada pemilu 1999 dan 2004 di Malang Raya, hampir menyedot semua entitas masyarakat untuk terlibat semuanya dalam pemilu. Semua komponen masyarakat, tidak terkecuali ulama maupun rohaniawan terlibat langsung dalam urusan ini. Apabila hal ini terus berlanjut, menurut Komaruddin (2004), ada dua dampak yang tidak bisa dielakkan, yaitu: *pertama* jagad keulamaan bangsa ini akan mengalami defisit deposito moral. Kasarnya menurut Komaruddin, Indonesia akan kehabisan manusia independen yang mendudukan dirinya di posisi tengah-tengah antara rakyat dan pemerintah. *Kedua*, Profesi politis ternyata jauh lebih menggiurkan bagi para ulama. Banyak para ulama merasa dengan berpolitik mereka akan ikut secara mudah memperjuangkan idealitas dan moralitas.

Walau pada pemilu 1999 dan 2004, partai-partai Islam berupaya keras berjualan dengan berbagai iklan yang menjanjikan seperti Syariat Islam, namun fakta hasil pemilu menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak lagi begitu terpengaruh dengan ide Syariat Islam. Hal ini dibuktikan dari hasil perolehan suara dalam pemilu untuk partai-partai Islam yang getol meng-isu-kan Syariat Islam, seperti PPP, yang tidak mendapat suara besar. PKB yang *nota bene* sebagai partai yang berasas Nasionalis (Pancasila) dan tidak menggunakan isu Syariat Islam justru banyak didukung oleh pemilih Islam, khususnya Santri Tradisionalis yang cenderung umumnya sering terpengaruh oleh isu Syariat Islam.

ini Geertz di satu pihak melihat aliran sebagai sesuatu yang abstrak dengan apan yang disebut “cultural paradigm” yaitu sebuah struktur simbol yang merupakan sitem gagasan dan tingkah laku public. Namun pada saat lainnya, aliran disebutnya sebagai suatu yang bersifat riil. Lihat Joes S. Khan, *Ideologi and Social Structure in Indoneisa*”, dalam Ben Anderson and Aundrey Kahin, *interpreting Indonesian politics: Thirteen Contributions to Debates*, (Ithaca, Newyork: Cornell Modern Indonesia Project, South Asia Program, Cornell University, 1982), hlm. 96.

Tabel 31. Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu 2004 di Malang Raya

| No | Nama Partai | Kota Malang | | Kabupaten Malang | | Kota Batu | |
|----|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Perolehan Suara | Persentase Partai | Perolehan Suara | Persentase Partai | Perolehan Suara | Persentase Partai |
| 1 | PNI Marhaenisme | 1.289 | 0,33% | 9.215 | 0,75% | 1.690 | 5% |
| 2 | PBSD | 1.506 | 0,38% | 5.078 | 0,41% | 315 | 0,9% |
| 3 | PBB* | 5.050 | 1,28% | 11.482 | 0,93% | 319 | 0,9% |
| 4 | Partai Merdeka | 1.485 | 0,38% | 6.119 | 0,50% | 277 | 0,8% |
| 5 | PPP* | 9.271 | 2,36% | 55.597 | 4,51% | 551 | 1,6% |
| 6 | PPDK | 1.112 | 0,28% | 5.700 | 0,46% | 237 | 0,7% |
| 7 | PPIB* | 987 | 0,25% | 1.598 | 0,13% | 22 | 0,07% |
| 8 | PNBK | 1.580 | 0,40% | 9.959 | 0,81% | 2.398 | 6,9% |
| 9 | Partai Demokrat | 57.278 | 14,55% | 95.670 | 7,76% | 4.517 | 13,8% |
| 10 | PKDPI | 1.853 | 0,47% | 3.90 | 0,32% | 81 | 0,03% |
| 11 | PPDI | 2.527 | 0,64% | 9.563 | 0,78% | 113 | 0,3% |
| 12 | PPNU* | 1.772 | 0,45% | 4.458 | 0,36% | 325 | 0,7% |
| 13 | PAN* | 26.663 | 6,77% | 32.099 | 2,61% | 1.638 | 5% |
| 14 | PKPB | 3.731 | 0,95% | 24.142 | 1,96% | 1.349 | 4% |
| 15 | PKB* | 68.321 | 17,36% | 316.665 | 25,72% | 4.209 | 12,6% |
| 16 | PKS* | 28.182 | 7,16% | 37.534 | 3,05% | 669 | 2% |
| 17 | PBR* | 2.296 | 0,58% | 9.730 | 0,97% | 331 | 1% |
| 18 | PDI-P | 101.732 | 25,84% | 357.008 | 28,97% | 3.299 | 16% |
| 19 | PDS | 16.517 | 4,20% | 13.261 | 1,08% | 368 | 1,1% |
| 20 | GOLKAR | 48.612 | 12,35% | 205.505 | 16,68% | 7.740 | 23,4% |
| 21 | P. Patriot Pancasila | 3.965 | 1,01% | 9.195 | 0,75% | 201 | 0,6% |
| 22 | PSI* | 1.235 | 0,31% | 2.868 | 0,23% | 345 | 1% |
| 23 | PPD | 1.271 | 0,32% | 2.324 | 0,19% | 130 | 0,3% |
| 24 | Partai Pelopor | 5.423 | 1,38% | 3.487 | 0,28% | 117 | 0,4% |

Sumber: KPUD Kota, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Tanda *: Menunjukkan Partai Islam atau partai yang berbasis massa Islam

Data Lapangan menunjukkan bahwa perolehan hasil suara pemilu 2004, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati posisi teratas perolehan suara di Malang Raya dengan perincian sebagai berikut: Kota Malang 101.732, Kabupaten Malang 357.008, dan Kota Batu 3.299. Pada posisi kedua ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perincian Kota Malang 68.321, Kabupaten Malang 316.665, dan Kota Batu 4.209.

Dari sembilan partai Islam¹⁷ yang berlaga pada pemilu 2004, tiga partai mengalami penurunan dukungan suara (PPP, PKB dan PAN) dan dari tiga partai politik lainnya meningkat, yakni PKS, PBB, dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI). Satu partai lagi adalah pendatang baru, yaitu Partai Bintang Reformasi (PBR). Dengan demikian, pada pemilu 2004 ada kecenderungan dari pemilih Santri sudah mulai melirik partai yang benar-benar berasaskan Islam seperti PKS. Setelah kekalahan pada pemilu 1999, PKS yang awalnya bernama Partai Keadilan, melakukan konsolidasi sehingga pada pemilu 2004 menjadi partai papan tengah dengan perolehan suara 6,44 % secara nasional.

Dari fakta yang ada, kalau pada masa Orde Baru, kekuatan riil dari kelompok masyarakat Abangan tidak menampakkan diri. Akan tetapi, ketika Orde Baru tumbang, dan partai politik diberi kebebasan, maka kekuatan riil kelompok Abangan menunjukkan kekuatan yang sangat signifikan dilihat dari jumlah hasil suara yang diperoleh dari partai politik PDI-P sebagai representasi dari kaum Abangan ini.

¹⁷ Hingga saat ini, apa yang dimaksud dengan partai Islam masih ditemukan pemahaman yang beragam. Hal ini sejalan dengan pandangan yang berkembang di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia tentang hubungan antara Islam dan negara yang juga mendapat tanggapan yang beragam. Bagi kalangan akademisi, keragaman pandangan ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi, bagi kalangan awam keragaman ini masih relatif sulit dipahami dan tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan yang berpotensi memicu konflik. Untuk itulah, dalam kajian ini penting dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam dan yang terkait dengan hal ini berikut argumentasi-argumentasi yang melandasinya, agar keragaman pandangan tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam mendapat apresiasi yang proporsional. Pembahasan ini menjadi terasa penting bila dikaitkan dengan posisi umat Islam Indonesia yang menempati jumlah terbanyak di dunia, sekaligus yang memiliki jumlah partai Islam terbanyak pula.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai-partai yang menggunakan nama atau simbol simbol Keislaman. Sebagian yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang menjadikan Islam sebagai azasnya. Sebagian kalangan lagi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang bertujuan memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat Islam, meskipun tidak menggunakan simbol atau atribut Islam, dan masih banyak lagi pendapat tentang hal ini. Dari berbagai pendapat yang berkembang tentang apa yang dimaksud dengan partai Islam tersebut, paling tidak dapat ditemukan suatu rumusan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Pertama, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang menggunakan nama, azas, tanda gambar, yang terkait dengan Islam. Kedua, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang konstituen utamanya adalah umat Islam. Ketiga, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang program dan tujuannya memperjuangkan kepentingan-kepentingan semua warga negara, tetapi konstituennya adalah umat Islam. Jadi, yang dimaksud dengan partai Islam adalah partai yang di dalamnya mengandung ketiga unsur di atas. Lebih jelas mengenai karakteristik partai, khususnya partai politik peserta pemilu 199, lihat Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program, 2004-2009, PT. Kompas Media Nusantara, 2004.

Di Malang Raya PDI-P pada pemilu 1999 memperoleh suara hampir 40 % dengan perincian: 41,22% di Kota Malang, 38,47% di Kabupaten Malang.¹⁸ Oleh karena itu tidak salah apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa Islamnya masyarakat ternyata tidak berhubungan lurus dengan kemenangan Islam sebagai gerakan politik (Islam Politik). Sejauh ini tampaknya rakyat lebih merasa tenteram dipayungi oleh gerakan politik Nasionalis daripada Islam.

Oleh karena itu, menurut wakil ketua PPP, Chozin (Jawa Pos, 2007), "Partai-partai Islam saat ini dituntut untuk lebih nyata berbuat dengan program pemerdayaan masyarakat, dengan hanya mengedepankan ayat-ayat Alqur'an dan simbolisasi Islam tidak memadai lagi dikedepankan parpol-parpol berbasis Islam." lebih lanjut ia mengatakan bahwa Otoritas negara tidak bisa dihadapkan dengan keyakinan masyarakat. Sebab, relasi agama dan negara telah selesai dengan menempatkan NIKRI sebagai kesepakatan nasional, bukan negara agama. NKRI juga bukan negara sekuler, tapi negara yang berketuhanan yang Maha Esa.

Kekalahan kelompok Santri dari kelompok Abangan seperti yang terlihat dari hasil pemilu, tidak lepas dari adanya intervensi pemerintah yang berkuasa baik pada masa rezim Orde Lama maupun rezim orde Baru. Akibat menolak ideologi Nasakom, maka Masyumi sebagai representasi partai politik Santri harus tenggelam karena dibubarkan oleh Soekarno. Sementara pada Masa Orde Baru, Soeharto melakukan pengkaburan dengan cara mengelompokkan pada partai-partai Islam dan sekaligus melakukan rekayasa politik agar politik aliran menjadi kabur dan tidak lagi menjadi dasar dalam pengelompokan politik dalam masyarakat seperti yang terlihat dalam pemilu pertama tahun 1971.¹⁹

¹⁸ Dengan realitas seperti itu, tampaknya sulit bagi partai Islam untuk mendapatkan popular support. Jika mereka memasang isu-isu umum, maka kekuatan politik Nasionalis akan menggilasnya. Tetapi jika mereka menggemakan isu-isu parokial seperti penerapan Syari'at Islam, dukungan politiknya menjadi sempit. Pendeknya, perjalanan partai-partai Islam akan selalu berada pada situasi dilematis tersebut.

¹⁹ Selain hal tersebut di atas, sesuatu yang tidak kalah berpengaruh. *Pertama*, menciptakan lembaga politik yang amat canggih, Golkar, yang menjadikan kian samarnya solidaritas ideologis. Memang dua partai lain masih dibangun atas dasar sentimen ideologis, partai-partai Islam ke PPP dan partai Abangan dan non-Islam ke PDI. Golkar menjadi ruang baru yang ingin selalu keluar dari dikotomi ideologis, meski pergeseran dari yang semula abang-branang ke ijo royo-royo di akhir kekuasaannya amat jelas tergambar. Karena itu, partai ini, kini memiliki "kekenyalan" strategis dan setidaknya memiliki beban ideologis secara historis. *Kedua*, masyarakat Islam terbesar, nahdliyin, memiliki modal kultural, seperti tahlilan yang amat mempengaruhi pengkaburan ketegangan antara kaum Santri dan Abangan. Institusi ini

Hal ini sejalan dengan hasil kajian Aswab Mahasin (1993) bahwa dalam masyarakat telah terjadi pergeseran kearah "Santrinisasi Abangan" dan "Santrinisasi priyayi". Menurut dia, mobilitas Santrinisasi ke dalam politik kekuasaan menunjukkan telah terjadi "priyayinisasi Santri". Di samping itu, Kuntowijoyo juga menyebutkan bahwa peran lembaga pendidikan agama yang diselenggarakan negara memiliki andil besar dalam mengkaburkannya. Menurut R. William Liddle bahwa kelompok skripturalisme (kelompok Islam formalistic) tidak akan berkembang, hal ini karena ada tiga hambatan yang akan dihadapi, yaitu : (1) komunitas Abangan, yang meski semakin sedikit namun masih tetap; (2) Santri Tradisionalis yang tetap akomadisionis, dan (3) kalangan Modernis sendiri.

Hasil proses pengkaburan (*blurring*) itu dalam politik lokal kontemporer tidak bisa digeneralisir. Di Malang Raya proses pengkaburan politik aliran mungkin berhasil, mereka yang Abangan dan Santri dalam politik tidak terjadi konfrontasi secara tajam dalam politik, ada kebebasan dalam memilih. Apakah mereka mau memilih partai politik barhaluan Islam atau Nasionalis tidak jadi persoalan. Yang menjadi masalah apabila mereka tidak ikut dalam kegiatan ritual keagamaan, terutama dalam persoalan ritual kematian. Bahkan pada pemilu 1999 dan 2004, walaupun Daerah Malang Raya terkenal daerah hijau, ternyata PDI-P merupakan partai yang paling tinggi mendapatkan suara di Malang Raya. Pada pemilu 1999, PDI-P mendapatkan suara sebesar 41,22% di Kota Malang, 38,47% di Kabupaten Malang.

Dengan berakhirnya dominasi Golkar, elit-elit Islam berupaya melahirkan kembali partai-partai baru yang berorientasi agama pada pemilu 1999 dan 2004. Partai-partai yang berorientasi agama seperti PKB, PAN, PBB, PPP, PKS cukup mendapat respon dari pemilih di Malang Raya. Kondisi ini tidak lepas dari karakteristik masyarakat Malang Raya yang beragam karena banyaknya pendatang dari kawasan timur Jawa seperti Jember, Madura, serta kawasan timur Indonesia. Para pendatang dari kawasan tersebut secara sosial sangat

mampu menjadi jembatan antara mereka yang "taat beragama" dan yang "tidak taat" dalam pergaulan sosial sehari-hari. Dalam forum kultural itu kaum Abangan secara tiba-tiba merasa dirinya di dalam (inside) komunitas Santri, tanpa harus kehilangan identitasnya awal sebagai Abangan.

mematuhi perkataan dan perilaku pemimpin dalam hal ini pemimpin agama (kyai).

Kekalahan partai politik berbasis Islam, juga dianalisis oleh Abdul Munir Mulkan (1988). Menurut Mulkan, perdebatan mengenai hubungan Islam dan politik, khususnya keterlibatan gerakan Islam dan kaum Santri dalam dunia politik tak pernah selesai dan terus mewarnai setiap fase perkembangan politik nasional. Mulkan melihat perdebatan ini bersumber pada dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan yang melihat dunia politik sebagai wilayah profan yang terbuka bagi partisipasi publik tanpa memandang kualitas keberagamaan atau ke-Santri-an di satu sisi; dan pandangan yang melihat dunia politik sebagai realisasi kebenaran ajaran agama (Islam) yang absolut dan hanya dikuasai sekelompok elite keagamaan dengan beragam sebutan seperti ulama, *wilayatul faqih* atau *ahlul halli wal aqdi* di sisi lain.

Selanjutnya menurut Mulkan, pandangan kedua berimplikasi pada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik yang hanya melalui wasilah elite keagamaan yang di negeri ini dikenal sebagai kelas kyai dan ulama atau pemimpin gerakan Islam. Hal ini menyebabkan sulitnya partai Santri berkomunikasi terbuka dan dialogis dengan konstituen rakyat pemilih, sehingga berdampak pada sulitnya aktivis politik Santri untuk mengakomodasi kepentingan publik rakyat yang tergolong Abangan atau priyayi. Akibatnya, partainya kaum Santri sulit memperoleh dukungan mayoritas pemilih yang mayoritas memeluk Islam.

Pandangan Mulkan ini dalam satu sisi mungkin benar, namun dalam realitas politik di lapangan keengganan kaum Abangan untuk mendukung partai Islam bukan disebabkan oleh persoalan penguasaan kebenaran oleh sekelompok elit agama, namun lebih dari itu, kaum Santri maupun kaum Abangan sudah terlebih dahulu melakukan identifikasi diri dengan partai-partai yang menurut mereka sesuai dengan kultur mereka yang sudah disosialisasikan secara turun temurun. Oleh karena itu, bagaimanapun aktivis politik Santri melakukan upaya untuk meraih dukungan dari kelompok Abangan, maka hasilnya akan sangat sulit. Salah satu hal yang mungkin dilakukan adalah, dengan cara merubah perilaku keagamaan kaum Abangan terlebih dahulu, setelah itu baru bisa. Namun yang menjadi persoalan, merubah perilaku keberagamaan bukanlah hal yang mudah.

Tabel 32. Perolehan Suara Partai-Partai Berbasis Agama pada Pemilu 2004 di Malang Raya

| No | Nama Partai | Kota Malang | | Kabupaten Malang | | Kota Batu | | Malang Raya |
|----|-------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Perolehan Suara | Persentase Partai | Perolehan Suara | Persentase Partai | Perolehan Suara | Persentase Partai | Perolehan Suara |
| 1 | PBB** | 5.050 | 1,28% | 11.482 | 0,93% | 319 | 0,9% | 16.851 |
| 2 | PPP** | 9.271 | 2,36% | 55.597 | 4,51% | 551 | 1,6% | 65.419 |
| 3 | PAN** | 26.663 | 6,77% | 32.099 | 2,61% | 1.638 | 5% | 60.400 |
| 4 | PKB** | 68.321 | 17,36% | 316.665 | 25,72% | 14.209 | 12,6% | 390.195 |
| 5 | PKS | 28.182 | 7,16% | 37.534 | 3,05% | 669 | 2% | 66.385 |
| 6 | PPNU | 1.772 | 0,45% | 4.458 | 0,36% | 325 | 0,7% | 6.555 |
| 7 | PSI | 1.235 | 0,31% | 2.868 | 0,23% | 345 | 1% | 4.448 |
| 8 | PDS | 16.517 | 4,20% | 13.261 | 1,08% | 368 | 1,1% | 30.146 |

Sumber: KPUD Kabupaten, Kota Malang, dan Kota Batu yang telah diolah penulis.

Kelompok Islam Tradisionalis di Malang Raya, telah melakukan sohpistikasi dalam pendekatan dengan kelompok Abangan, akan tetapi dalam kenyataannya, hasil pemilu legislatif justru yang muncul jadi pemenang baik itu pemilu 1999 maupun 2004 adalah partai yang berbasis kaum Abangan.

2. Partai Politik Islam

Dengan adanya kelonggaran asas pada organisasi politik, memang seakan-akan ada euphoria politik di kalangan umat Islam, yang telah kurang lebih 32 tahun merasa ditekan oleh sebuah rezim otoriter di bawah Orde Baru dengan Soeharto sebagai penguasanya. Dari 14 partai Islam peserta Pemilu 1999, ada empat partai Islam yang dapat memenuhi batas minimal perolehan suara (*electoral threshold*) sehingga dapat mendudukkan wakilnya di DPR Pusat yaitu PPP, PBB, PAN, dan PKB. Sementara partai-partai Islam lainnya tidak bisa memenuhi batas minimal perolehan suara.

Memasuki Pemilu 2004, ada 8 partai Islam atau Partai Islam yang akan turut bertanding dengan partai-partai non-Islam, baik secara asas maupun secara konstituen. Partai Islam mengalami penurunan yang drastis, sehingga tidak sebanyak Pemilu 1999, yang terdiri dari 14 partai Islam turut bertanding. Menurut hemat penulis menurunnya jumlah

partai Islam karena ketidakmampuan partai tersebut untuk meraih simpati massa, khususnya massa Islam yang mengambang akibat ulah Orde baru. Sebagian pemilih Islam sudah tidak lagi otomatis aspek ideologis (politik aliran) menjadi penentu afiliasi politik mereka tanpa adanya kinerja kongkrit dari partai. Dan di sisi lain bisa jadi pemilih tidak lagi melihat partai Islam pada asas partai politik, atau dalam kelompok-kelompok massa yang menggunakan simbol-simbol keagamaan, termasuk Keislaman.

Kalau kita menengok ke belakang, sejarah berdirinya partai politik Islam diinspirasi oleh adanya keinginan untuk membentuk wadah politik tunggal untuk perjuangan ummat Islam pasca kemerdekaan 1945. Sesuai dengan manifestasi politik pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta bulan November 1945 semua golongan ummat Islam sepakat untuk membentuk suatu wadah politik tunggal yang bernama MASYUMI (Moh. Sjafaat Mintaredja, 1971).

Partai Politik Masyumi ini didukung oleh organisasi-organisasi Islam besar seperti NU, Muhammadiyah, dan PSII. Akan tetapi kebersamaan ketiga ormas Islam ini mengalami perpecahan dalam mendukung Masyumi pada tahun 1948 dengan dibentuknya kembali Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) di bawah pimpinan Arudji Kartawinata, Abikoesno Tjokrosoejoso dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1953 disusul dengan keluarnya Nahdlatul Ulama (NU) dan menjadi partai politik sendiri. Dan akhirnya, sebagai benteng terakhir, Muhammadiyah menyatakan diri untuk tidak lagi menjadi anggota istimewa dari Masyumi sebelum partai ini dibubarkan pada tahun 1960.²⁰

Pada masa Orde Baru partai Islam mengalami kehancuran akibat adanya fusi partai politik yang hanya membolehkan dua partai yaitu partai berhaluan agama yang diwakili PPP dan partai yang berhaluan Nasionalis yang diwakili PDI (Mohta Mas' oed, 1994). Pada masa ini partai Islam banyak ditinggalkan konstituennya akibat adanya tekanan dan politik adopsi dari penguasa sehingga pemilih Islam banyak yang lari ke Golkar sebagai partai pemerintah.

²⁰ Untuk lebih jelasnya bias dilihat, Moh. Sjafaat Mintaredja, Masyarakat Islam dan Politik di Indonesia, Jakarta, Permata Jakarta, 1971.

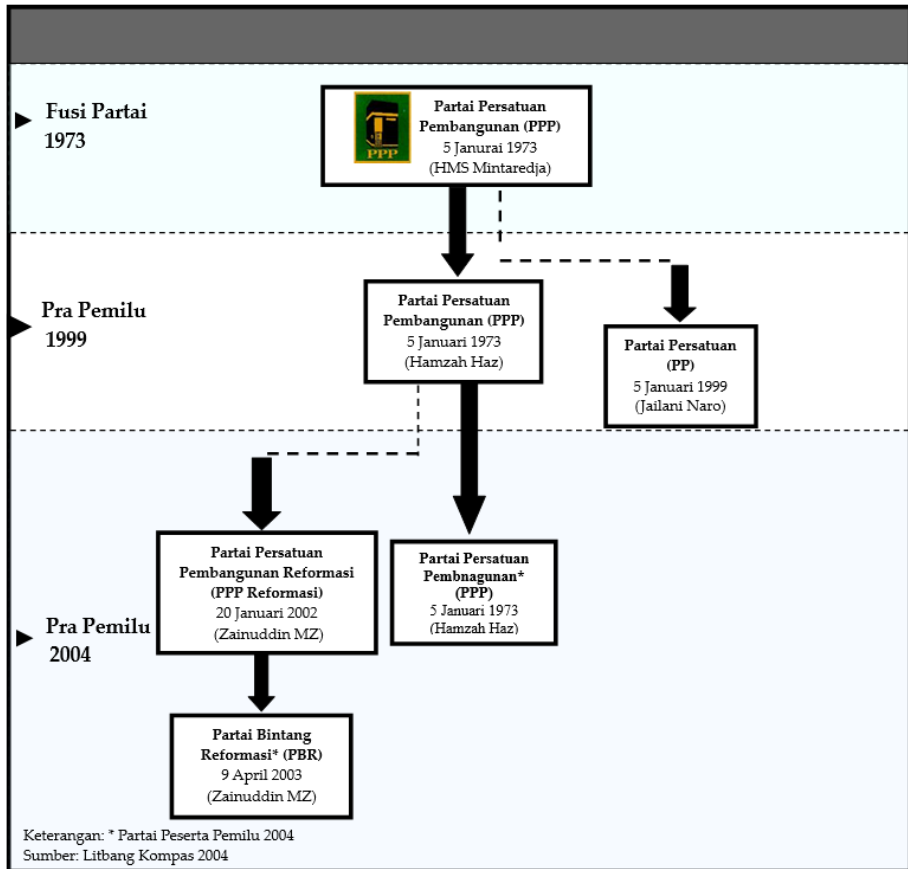
Ketika rezim Orde Baru berakhir, Partai Islam kembali berkembang, walaupun tidak sebaik dan se militan partai Islam pada masa Orde Lama. Pada pemilu 1999 tercatat ada sekitar 114 partai yang secara tegas mencantumkan Islam sebagai asas maupun yang secara sosiologis termasuk partai Islam yaitu PAN dan PKB yang berasan Pancasila. Sementara pada pemilu 2004, Partai Islam menyusut menjadi 7. Dari ketujuh partai Islam ini tidak ada satu pun partai yang mendapatkan suara lebih dari 10%.

a. Menurunnya Kekuatan Politik Islam

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pasca Orde Baru, akibat gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa, telah terjadi ledakan partisipasi politik masyarakat dari kalangan Islam. Ledakan partisipasi politik itu bukan hanya menimpa kalangan masa akar rumput tetapi juga menghinggapi kalangan elit politik. Sebagai perwujudan dari ledakan partisipasi politik itu, para elite politik berlomba-lomba mendirikan atau menghidupkan kembali partai politik Islam. PPP yang merupakan fusi partai Islam di masa Orde Baru mengalami fragmentasi. Ada Partai Persatuan yang dipimpin Zaelani Naro, ada juga Partai Bintang Reformasi yang didirikan Zaenuddin MZ.

Dalam pemilu 1999 maupun 2004 beberapa partai politik membidik pemilih yang berbasis Islam, secara langsung maupun tidak langsung mempergunakan atribut Islam dalam desain partai, pola kampanye, pola rekrutmen, maupun dalam melakukan transaksi politik pada pemilihnya.²¹ Namun hasil yang diperoleh partai-partai Islam jauh dari harapan, karena ternyata tidak ada satu pun Partai Islam yang mendapatkan suara signifikan seperti Masyumi dan NU pada pemilu 1955. Bahkan pada pemilu 2004 partai-partai Islam mengalami penurunan suara.

²¹ Fenomena terseretnya gerbong agama dalam politik adalah fenomena Islam secara umum. Dengan doktrin agama dan negara, gagasan Islam politik mendapatkan legitimasi teologis dan historis.



Gambar 15. Genealogi Partai Persatuan Pembangunan

Akibat dari banyaknya partai politik yang mengatasnamakan Islam, atau pun partai politik yang berebut massa Islam. Pada akhirnya partai politik Islam tidak ada satu pun yang mempunyai suara signifikan pada pemilu 1999, termasuk PAN dan PKB. Bahkan pada pemilu 2004 kedua partai politik ini mengalami kemunduran dalam hal jumlah suara. Hal yang menarik dalam pemilu 2004 ini adalah munculnya Partai Keadilan Sejahtera yang pada pemilu 1999 bernama Partai Keadilan. PKS mengalami peningkatan suara yang signifikan. PKS, berbeda dengan PAN dan PKB yang menyatakan dirinya sebagai partai terbuka, dengan tidak menjadikan Islam sebagai dasar ideologi partai, PKS secara formal jelas mencantumkan Islam sebagai dasar ideologi partai.

Tabel 33. Perolehan Suara dan Kursi DPR RI Partai Politik Peserta Pemilu 2004

| No | Partai Politik | Jumlah Pemilih | % dari total Suara Sah | Jumlah Kursi DPR | % dari total Kursi DPR |
|-------|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 1 | P. Golkar | 24.480.757 | 2158 | 128 | 23.27 |
| 2 | PDI-P | 21.026.269 | 18.53 | 109 | 19.81 |
| 3 | PKB* | 11.989.564 | 10.57 | 52 | 9.45 |
| 4 | PPP* | 9.248.764 | 8.15 | 58 | 10.55 |
| 5 | P. Demokrat | 8.455.225 | 7.45 | 57 | 10.36 |
| 6 | PKS* | 8.325.020 | 7.35 | 45 | 8.18 |
| 7 | PAN* | 7.303.324 | 6.44 | 52 | 9.45 |
| 8 | PBB* | 2.970.487 | 2.62 | 11 | 2.00 |
| 9 | PBR* | 2.764.998 | 2.44 | 13 | 2.36 |
| 10 | PDS | 2.414.254 | 2.13 | 12 | 2.18 |
| 11 | PKAPB | 2.399.290 | 2.11 | 2 | 2.36 |
| 12 | PKPI | 1.424.240 | 1.26 | 1 | 2.18 |
| 13 | PDK | 1.313.654 | 1.16 | 5 | 0.36 |
| 14 | PNBK | 1.230.450 | 1.08 | 1 | 0.18 |
| 15 | P. Patriot Pancasila | 1.073.139 | 0.95 | 0 | 0.91 |
| 16 | PNI Marhaenisme | 923.159 | 0.81 | 1 | 0.18 |
| 17 | PPNUI* | 895.610 | 0.79 | 0 | - |
| 18 | P. Pelopor | 878.932 | 0.77 | 2 | 0.18 |
| 19 | P. Penegak Demokrasi Indonesia | 855.811 | 0.75 | 1 | - |
| 20 | P. Merdeka | 842.541 | 0.74 | 0 | 0.36 |
| 21 | PSI | 679.296 | 0.60 | 0 | 0.18 |
| 22 | PIB | 672.957 | 0.59 | 0 | - |
| 23 | PPD | 657.916 | 0.58 | 0 | - |
| 24 | PBSD | 636.397 | 0.65 | 0 | - |
| Total | | 113.462.414 | 100 | | 100 |

Sumber : Hasil Perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat 2004. Yang dibubuhi tanda * adalah Partai Islam yang mengikuti pemilu 2004.

Hasil Pemilu Legislatif 2004, dari 24 partai yang ikut menjadi kontestan pemilu, sebanyak 17 partai politik mendapat kursi di DPR RI. Partai Islam atau pun yang pemilihnya sebagian besar Islam Santri, tiga partai mengalami penurunan dukungan suara (PPP, PKB dan PAN) dan dari tiga partai politik lainnya meningkat, yakni PKS, PBB, dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI). Satu partai lagi adalah pendatang baru, yaitu Partai Bintang Reformasi (PBR). Namun semua Partai Islam itu merupakan partai kecil, kecuali PKS.

Dengan melihat kenyataan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kekuatan politik Islam telah mengalami penurunan jika dibanding dengan kekuatan Islam pada masa Orde lama. Hal ini menjadi petunjuk bahwa apa yang dilakukan oleh Orde Baru, dengan berbagai regulasinya, telah berdampak pada keberadaan politik Islam sekarang ini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan R. William Liddle yang menyatakan bahwa dengan berkembangnya gerakan Islam kultural pada masa Orde Baru, kekuatan Islam politik tidak akan muncul lagi. Selanjutnya ia menyatakan bahwa kelompok skripturalisme (kelompok Islam formalistic) tidak akan berkembang, hal ini karena ada tiga hambatan yang akan dihadapi, yaitu: (1) komunitas Abangan, yang meski semakin sedikit namun masih tetap; (2) Santri Tradisionalis yang tetap akomadisionis, dan (3) kalangan Modernis sendiri.

3. Partai Nasionalis

Partai Nasionalis di era multipartai baik 1999 maupun 2004, terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu partai Nasionalis Sekuler dan Partai Nasionalis Religius. Pada pemilu 2004 yang termasuk Partai Nasionalis Sekuler yaitu, PDI-P, PNBK, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat. Sementara yang termasuk Partai Nasionalis Religius yaitu Partai Golkar, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Patriot Pancasila, Partai Demokrat, Partai Persatuan Daerah, Partai Merdeka, Partai Indonesia Baru, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan.

Pada pemilu 1999, didasarkan pada basis pemilih Clifford Geertz membaginya sebagai berikut: Kaum Santri diwakili oleh Masyumi dan Partai Syarikat Islam yang Modernis dan NU yang tradisionalis, kaum

priyayi diwakili oleh Partai Nasionalis Indonesia²², sementara kaum Abangan diwakili oleh Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan PKI. Namun dengan berjalannya waktu dan terjadinya dinamika politik di negara kita, telah merubah konstelasi politik kepartaian yang telah ada sebelumnya. Kaum Abangan yang sejatinya menjadi pendukung dari PKI, namun karena karena sejarah menghendaki PKI bubar, maka kaum abangan mengalihkan pilihan politiknya.

Kalau dikatakan bahwa pemilih Santri akan cenderung memilih partai Islam, dan pemilih Abangan akan cenderung memilih Partai Nasionalis, maka pada pemilu Orba kaum Abangan ini kalau tidak memilih PDI akan memilih Golkar. Sementara pemilih Priyayi yang pada pemilu 1955 menjadi pendukung PNI, maka pada pemilu Orba menjadi pemilih Golkar. Dengan demikian kalau dilihat dari massa pemilihnya, baik PDI maupun Golkar sebenarnya punya basis yang sama dengan dengan PDI yaitu Abangan.

Perkembangan Partai berhaluan Nasionalis selanjutnya, yaitu pada era reformasi, Golkar berkembang menjadi Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai MKGR. Sementara PDI berkembang menjadi PDI, PDIP, PNBK, PITA, PDPR. Perbedaan partai ini ternyata membuat pengkotakan dalam pemilih, sehingga menjadi terbentuk dua kelompok Nasionalis yaitu Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Religius. Hal ini sejalan dengan temuan Sartori (1968) juga menunjukkan bahwa partai politik (kiri) bukanlah 'akibat' dari eksistensi kelas ekonomi. Sebaliknya, partai politik lah yang

²² PNI didirikan di Bandung Tahun 1927 oleh para tokoh nasional seperti Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr Sunaryo. Selain itu para pelajar yang tergabung dalam Algemeene Studie Club yang diketuai oleh Ir. Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini. 1928 - Berganti nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. 1929 - PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja. 1930 - Pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara Sukamiskin, Bandung. Dalam masa pengadilan ini Ir. Soekarno menulis pidato "Indonesia Menggugat" dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya. 1931 - Pimpinan PNI, Ir. Soekarno diganti oleh Mr. Sartono. Mr. Sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931. Moh. Hatta yang tidak setuju pembentukan Partindo akhirnya membentuk PNI Baru. Ir. Soekarno bergabung dengan Partindo. 1933 - Ir. Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores sampai dengan 1942. 1934 - Moh. Hatta dan Syahrir dibuang ke Bandaneira sampai dengan 1942. 1955 - PNI memenangkan Pemilihan Umum 1955.

mengeraskan perbedaan kelas, melalui proses sosialisasi politik yang membentuk kesadaran kelas. Umumnya Partai Nasionalis Religius merupakan partai yang awalnya berinduk dengan Golkar, sementara Partai Nasionalis Sekuler umumnya merupakan partai yang awalnya berinduk dengan PDI.

Kalau kita runut ke belakang, partai yang pada pemilu 1955 mempergunakan kata Nasionalis dalam partai adalah PNI. Partai ini didirikan pada 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia dengan ketuanya pada saat itu adalah Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr Sunaryo. Dan Bung Karno merupakan simbol dari partai Nasionalis ini.

Pada pemilu 1955 Partai Nasionalis Indonesia (PNI) cukup mendapat sambutan, hal ini dibuktikan dengan hasil pemilu yang meraih suara signifikan dibanding dengan partai-partai lainnya. Dari empat besar perolehan suara pada pemilu 1955 PNI mendapatkan 22,3% suara, Masyumi 20,9% suara, NU 18,4% suara, dan PKI mendapat 16,4% suara. Dengan melihat kekuatan empat besar partai pemenang pemilu menunjukkan adanya kekuatan yang seimbang antara partai Islam berbanding dengan partai Nasionalis plus Komunis, dengan rasio 39,3% berbanding 38,7%, dengan selisih hanya 0,6%. Sementara peroleh kursi di Parlemen, PNI mendapat 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, dan PKI mendapat 39 kursi.

Dari komposisi politik di Parlemen yang sangat seimbang berakibat pada pola kerja Parlemen yang tidak sehat akibat tidak adanya mayoritas untuk menentukan dan menggolkan satu keputusan. Hal yang paling menonjol adalah perdebatan dan perselisihan yang menjurus pada dua blok yang sama-sama kuat yaitu blok Nasionalis plus Komunis dengan blok Islam. Sumber utama perdebatan dan perselisihan di antara kedua blok itu berkaitan dengan penentuan dasar negara. Kubu Islam menghendaki agar Islam menjadi dasar negara, sementara kubu Nasionalis tidak menghendakinya. Kenyataan ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959²³, untuk kembali ke UUD'45 dan membubarkan Parlemen dan Konstituante.

²³ Dekrit Presiden dikeluarkan atas dukungan TNI yang tidak senang dengan keadaan di Parlemen yang terlalu banyak perselisihan dan pertentangan Ideolgi. Hal-hal yang terkait dengan persoalan peran TNI pada masa kemerdekaan, bisa dilihat dalam bukunya Harold Crouch, *Army and Politic in Indonesia*.

Tabel 34. Perolehan Suara Empat Besar Pemilu 1955

| NO | Nama Parta Politik | Prosentase Suara | Jumlah Kursi |
|----|--------------------|------------------|--------------|
| 1. | PNI | 22,3% | 57 |
| 2. | Masyumi | 20,9% | 57 |
| 3. | NU | 18,4% | 45 |
| 4. | PKI | 16,4% | 39 |

Sumber: Herbert Feith (1970), yang telah diolah Penulis.

Komunis yang semula menjadi partner strategis dari pemerintah, dalam perjalannya, terus melakukan manuver politik untuk menyeimbangkan kekuatan dan pengaruhnya dengan TNI. Dengan demikian, PKI dan TNI seperti berlomba untuk saling mendapatkan tempat di hati Soekarno yang memang menjadi sentral kekuasaan pada saat itu. Soekarno membutuhkan TNI untuk menjaga dan menstabilkan politik dari rongrongan separatisme. Di sisi lain Soekarno membutuhkan PKI sebagai basis legitimasi dalam pemerintahan. Persaingan antara PKI dan TNI berlanjut, dari mulai pemberontakan Madiun yang didalangi PKI sampai pada akhirnya terjadi peristiwa Gestapu yang menghantarkan kehancuran Partai Komunis di Indonesia, dan juga jatuhnya kekuasaan Soekarno yang dianggap melindungi PKI. Maka muncullah Orde Baru di bawah komando Soeharto yang membawa era kemunduran partai politik dan demokrasi.

Memasuki periode Orde Baru, pemerintah berusaha menyederhanakan Partai Politik. Seperti pemerintahan sebelumnya, banyaknya Partai Politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), GOLKAR dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dalam pengelompokan ini ada partai yang merasa tidak pas masuk ke dalam kelompok spiritual yaitu Partai katolik dan Parkindo, akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Nasionalis.²⁴

²⁴ Situasi pada saat itu tidak memberikan pilihan lain bagi parpol kecuali mempusikan diri. Kelompok Nasionalis yang disebut kelompok Demokrasi Pembangunan menjadi Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Sedangkan kelompok persatuan menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Sejak saat itu Indonesia mempunyai sistem tiga partai, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan partai Golongan Karya. Walaupun dalam komunikasi politiknya Golkar tidak mau menyebutkan dirinya sebagai partai politik, dalam setiap pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde baru selalu mencantumkan dirinya hanya Golkar tanpa di embel-embeli dengan partai.

Akhirnya pada tanggal 4 Maret 1970 terbentuk kelompok Nasionalis yang merupakan gabungan dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai katolik. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret Tahun 1970 terbentuk kelompok spiritual yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Penyederhanaan (baca: penciptaan) baru tuntas pada tahun 1972. Partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, Perti, dan PSII dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Partai Katolik, Parkindo, IPKI, PNI, dan Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan demikian, organisasi politik yang mengikuti pemilu tahun 1977 tinggal tiga. Bersamaan dengan itu, akar partai di tingkat Desa dan Kecamatan diputus, dan hanya diizinkan sampai daerah tingkat Kota atau Kabupaten (*floating mass*).

Memasuki Era Reformasi, kemunculan partai-partai politik tidak lepas dari partai induknya ketika jaman Orde Baru. Oleh karena itu partai-partai Nasionalis yang tumbuh dan berkembang di era multipartai sekarang ini, kebanyakan merupakan turunan dari partai-partai sebelumnya (era Orde Baru). Baik partai Golkar, maupun PDI yang pada masa Orde Baru merupakan fusi dari beberapa partai politik, pada akhirnya harus terjadi pembelahan sel politik dan berkembang menjadi partai baru. Adapun Golkar walaupun bukan merupakan gabungan dari beberapa partai, namun karena berdiri atas dukungan banyak ormas kekarya,an, maka tidak bisa dihindari terjadinya disintegrasi politik dalam partai.

D. Kecenderungan Ideologis Partai Politik di Era Multipartai

1. Menuju Partai Catchall

Dengan banyak partai politik yang bersaing, baik dalam pemilu 1999 (48 papol) maupun 2004 (24 parpol), partai politik kesulitan untuk mendapatkan suara yang hanya mengandalkan segmen massa politik yang terbatas. Banyak partai politik pada pemilu 1999 harus gulung tikar akibat kurangnya dukungan untuk memenuhi *electoral threshold*. Begitupun nasib partai politik yang lulus *electoral threshold*, dengan segmen pemilih yang sempit, mengalami penurunan jumlah dukungan pemilih akibat ketidakmampuannya dalam meraih dan mempertahankan simpati pemilih. Kondisi ini telah mendorong partai-partai untuk memperluas segmen massa pemilihnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Demi memperoleh suara yang lebih besar dalam pemilu, ada kecenderungan partai-partai melakukan pencairan basis ideologi mereka, dengan cara merubah sifat organisasi yang eksklusif menjadi inklusif.

Perubahan ini menurut Riswanda Imawan (2004), membuka kemungkinan bagi partai untuk melakukan reposisi dan redefinisi fungsi mereka yang semakin jelas dan efektif dalam dinamika politik. Partai tidak sekedar berfungsi sebagai pencari legitimasi (perspektif partai elit) atau menyalurkan aspirasi massa (perspektif partai massa). Perubahan ini terjadi karena masuknya perspektif perilaku rasional ke dalam wacana perdebatan ilmiah mengenai peran dan fungsi partai politik.

Murni Ideologi:
Berbagai Isme—
Komunisme,
Lebiralisme,
Sosialisme

Murni Kepentingan:
Kekuasaan, Keamanan,
Pendapatan,
Kehormatan, dll.

| | | | | |
|----------|-------|----------|-------|-------|
| Diktator | Massa | Catchall | Kader | Proto |
|----------|-------|----------|-------|-------|

Gambar 16: Rangkaian Kesatuan Motivasi Partai Politik

Sumber: Mark N. Hagovian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978.

Kenyataan tersebut di atas dipengaruhi oleh adanya perkembangan aspirasi politik masyarakat yang membangun kesadaran dari para pelaku politik untuk berpikir bagaimana bisa merangkul berbagai kepentingan yang ada. Apalagi hal ini didukung oleh kenyataan bahwa kegagalan partai politik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berkembang merupakan penyebab utama matinya sebuah partai politik. Dengan demikian banyak partai yang aktif dalam menjaring aspirasi yang berkembang, dan hal ini telah melahirkan format baru dalam partai politik yang dikenal dengan *catch-all party*.²⁵ Posisinya

²⁵ Dasar pertimbangan utama kenapa partai politik tergoda untuk membangun catchall party adalah keinginan untuk memenangkan pemilu. Baik catchall party yang berbasis partai massa maupun partai kader sama-sama punya pandangan bahwa untuk memenangkan pemilu harus menangkap semua atau berbagai kelompok kepentingan. Hal ini dilakukan dengan cara memperlunak ideologi mereka agar dapat masuk ke dalam berbagai kelompok. Semua catchall party menjanjikan kondisi yang lebih baik bagi pengusaha, upah dan jaminan social yang lebih baik bagi pekerja, harga terjangkau dan dukungan pada petani, jaminan hari tua, bantuan terhadap pengusaha kecil, pendidikan dan lapangan kerja yang lebih baik bagi pemuda, dan sebagainya. Lebih jelasnya, lihat Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction to Political Science*, New York and London, Logman Inc., 1978.

berada di antara kutub dikotomi partai elit dan partai massa. Menurut Riswanda, format ini mengagungkan pragmatisme dan rasionalitas sebagai pilar penyangga sistem politik yang demokratis. Dengan prinsip pragmatisme dan rasionalitas ini dimungkinkan bagi masyarakat untuk berpikir tentang “politik tanpa alur” (*politics without cliches*), tidak menjadi tawanan ideologi, sehingga masyarakat mampu menyikapi berbagai masalah tanpa prakonsepsi, tanpa distorsi idologis, dan tanpa kekakuan bersikap partisan.

Pengelolaan Partai

Dari peta basis massa, partai berbasis Nasionalis akan bertarung di antara sesamanya, juga yang berbasis Islam Tradisionalis/Modern. Untuk merambah massa berideologi berbeda, beberapa partai Islam dan Nasionalis mencoba mengubah citra diri. PDI-P membentuk Baitul Muslimin untuk merebut simpati generasi muda Islam. PAN kian bergeser ke arah Nasionalis. PBR mengawinkan Islam dan sosialisme. Hanya PBB yang secara konsisten mengampanyekan Syariat Islam. Semua pergeseran itu akan membawa konsekuensi politik para pendukung Tradisionalnya.

Memasuki pemilu 2004, di mana partai-partai yang semula dikenal “hijau” mulai mencoba untuk menampilkan wajah Nasionalis dengan mereduksi isu-isu penegakan Syariat Islam dan Negara Islam dalam kampanyenya, sebagaimana dilakukan oleh PPP dan PKS. Ketika masih bernama Partai Keadilan (PK), dengan mengusung isu Islam partai ini tidak mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilu 1999. Di Parlemen hanya memperoleh 7 kursi. Namun setelah melakukan pembenahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di mana isu yang diluncurkan lebih riil dan menjadi dambaan masyarakat, seperti penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi dengan semboyan “bersih dan peduli”, PKS yang pada pemilu 1999 hanya mendapat 7 kursi, pada pemilu 2004 menjadi 45 kursi.

PPP meskipun sudah menarik isu syariat Islam dan Negara Islam dan menggantinya dengan “mendukung” Pancasila, tetap saja stagnan dengan 58 kursi. PBB yang tetap ngotot dengan Syariat Islam juga melorot, dari 13 kursi dalam pemilu 1999 menjadi 11 kursi dalam pemilu 2004. PDI-P yang unggul dengan 153 kursi dalam pemilu 1999, juga melorot hanya memperoleh 109 kursi di pemilu 2004.

Dalam pandangan Riswanda, terbentuknya *catchall party* di era multipartay, merupakan kelanjutan politik era Orde Baru yang menolak ideologi kiri-kanan, sehingga kedua spektrum ideologi harus hilang. Hilangnya ideologi ini menurutnya justru akan menghancurkan negara seperti yang terjadi di negara-negara sosialis. Untuk melukiskan kondisi tersebut, Riswanda mengutip pernyataan Bell, 'bahwa bangkrutnya negara-negara sosialis adalah akibat kosongnya makna dikotomi "kiri-kanan" dalam perspektif ideologi politik. Ia berpendapat bahwa bila kubu tengah terbentuk karena penolakan terhadap kubu "kiri atau kanan", maka format *catch-all party* itu sendiri merupakan refleksi dari kehadiran satu ideologi baru.

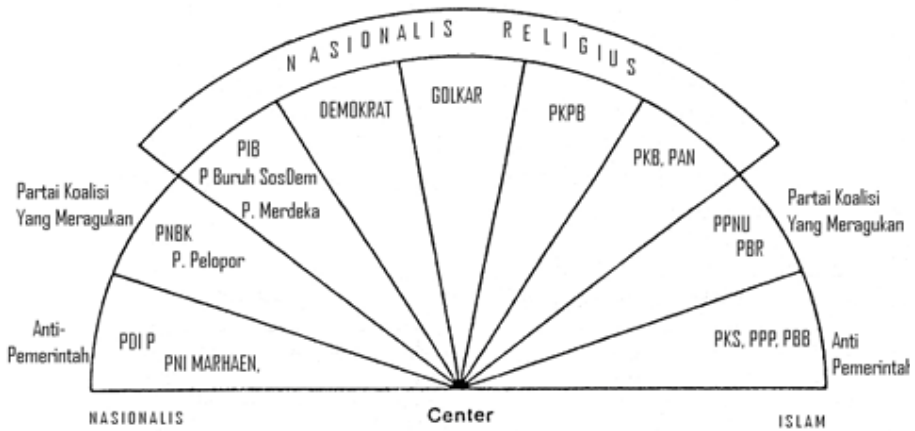
Tanpa ideologi terbuka kemungkinan politik mengarah kepada pragmatisme dan oportunistik yang sangat akut. Logika produsen-konsumen yang merupakan pondasi pasar ekonomi menjadi dasar dalam kebijakan partai, yang menurut Riswanda logika ini mengandaikan bahwa segala pergulatan politik bergantung pada kreatifitas elit dalam mengiring massa politik untuk larut ke dalam jualan politik yang ditawarkan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa bila kalkulasi elitis ini terjadi dalam sistem politik di mana personifikasi institusi masih berlaku, maka format *catch-all party* berpotensi melahirkan oligarki dalam tubuh partai itu sendiri. Dan ini bertentangan dengan jati diri dari partai politik sebagai pilar demokrasi.²⁶

2. Koalisi Pragmatis

Ciri utama dari sistem kepartaian yang terpolarisasi ekstrim adalah susahnya untuk terjadi koalisi di antara partai politik (*marginal turnover*) dalam membangun pemerintahan, khususnya dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, kepala pemerintahan atau presiden, tidak ditentukan lewat koalisi langsung oleh anggota parlemen terpilih dimana pemegang suara mayoritas umumnya berhak untuk mendapat jatah perdana menteri. Kepala negara atau presiden, dalam sistem presidensial, harus melewati pemilihan langsung. Oleh karena itu, koalisi yang dibuat, sebangun dengan sistem parlementer namun dengan hasil akhir ada di tangan pemilih (rakyat).

²⁶ Untuk lebih jelasnya lihat, Riswanda Imawan, Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4 September 2004.

Pada awal koalisi (untuk mengusung calon Presiden maupun Kepala Daerah), walaupun dasar pertimbangan awal adalah kedekatan ideologi, namun dasar utama lebih banyak pada sisi pragmatis. Adakalanya partai yang sangat berseberangan secara ideologis, karena kepentingan untuk mengusung calon (kasus pilkada), bisa berkoalisi dan bekerja sama dalam mengusung calon kepala Daerah.²⁷ Sebenarnya model koalisi yang akan terbangun apabila sisi pragmatisme tidak menonjol, maka konfigurasinya akan berada pada *mainstream* seperti di bawah.



Sumber: Mark N. Hagopian yang dimodifikasi penulis.

Gambar 17. Koalisi Partai Politik Berdasar Spektrum Ideologi di Era Reformasi

Dampak koalisi yang dibangun atas dasar pragmatisme, pemerintahan yang terbangun menjadi tidak jelas dalam arah kebijakannya. Bahkan kesulitan yang sering terjadi, seperti dalam pemerintahan Susilo Bambang Yhudoyono adalah sulitnya mencapai kata mufakat dalam satu masalah, sehingga bisa disebut koalisi yang tidak simetris. Artinya, koalisi yang dibangun hanya dalam konteks berbagi kekuasaan, namun tidak linier dengan dukungan partai dalam persoalan arah kebijakan politik pemerintah yang akan di jalankan. Lebih lanjut, dampak dari

²⁷ Kasus dalam pilkada Jatim, dalam mengusung calon gubernur pasangan calon Khipipah-Mujiono, untuk memenuhi syarat minimal pencalonan harus menyatukan koalisi yang secara ideologis berseberangan yaitu PPP dan PDS. Dimana PPP secara ideologis menyatakan diri sebagai partai Islam seperti yang dicantumkan dalam asas partai, sementara PDS merupakan partai yang lahir dari kalangan Nasrani walaupun secara asas menggunakan Pancasila.

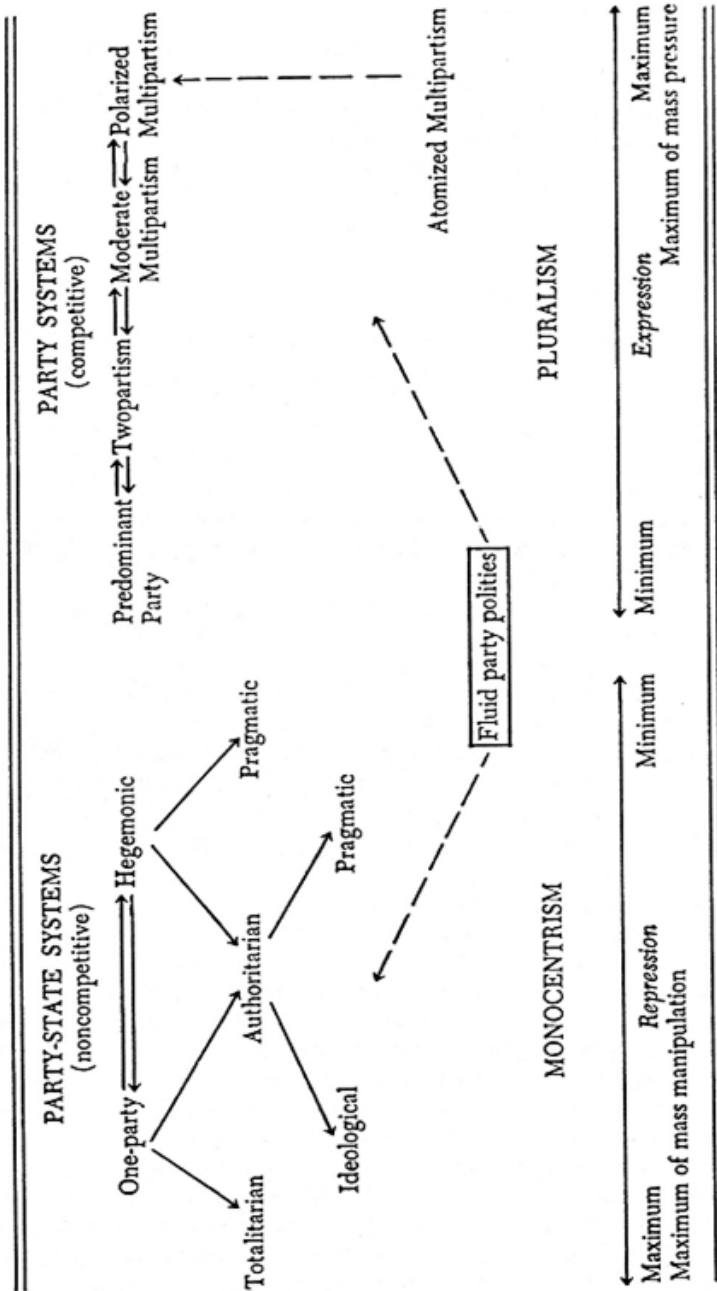
koalisi pragmatis ini, di tingkat parlemen banyak melahirkan lobi dan transaksi yang cenderung bersifat material dalam menggolkan satu kebijakan. Hal ini telah mendorong lahirnya genetika parlemen lama yang penuh dengan perilaku korup. Walaupun demikian, akibat sistem pemerintahan Presidensial yang tidak punya ruang untuk melakukan mosi tidak percaya pada pemerintah, maka posisi pemerintah, seberapa parah pun hancurnya bangunan koalisi tidak punya dampak serius pada posisinya sebagai Presiden.

Dilihat dari spektrum ideologis yang ada pada era multipartai sekarang ini, maka partai-partai yang punya potensi tinggi untuk membangun koalisi adalah partai politik yang berideologi nasionalis religius. Sebagai catatan, pembuktian apakah partai ini nasionalis sekuler atau nasionalis religius, kalau dilihat dari platform partai sangat sulit. Namun partai nasionalis religius bisa dilihat dari komposisi dukungan atau basis pemilih yang dibidiknya dan tentu dengan sosiologis dan historis dari partai tersebut. Melihat dari konfigurasi ideologis yang ada, maka partai yang termasuk berideologi nasionalis religius dengan dukungan pemilih yang cukup signifikan adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, dan termasuk juga PAN dan PKB yang punya kedekatan secara historis dan sosiologis dengan Islam. Sementara dua kutub yang ekstrim, yang secara ideologis tidak mungkin dipertemukan, walaupun secara pragmatis bisa ketemu, adalah PDIP dengan ideologi Nasionalisnya pada satu kutub, PKS, PPP, dan PBB yang berideologi Islam pada kutub lainnya.

Di sisi lain, dampak dari sistem multipartai yang terpolarisasi ekstrim adalah tipe pemerintahan yang banyak mendapat gangguan dan rongrongan berupa tekanan kepada pemerintah yang berkuasa. Masing-masing ideologi yang terwakili dalam partai politik, di tingkat *grassroot*, akan menjadi persoalan tersendiri apabila kebijakan yang dikeluarkan tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan ideologi yang ada.

Oleh karena itu, pemerintahan yang dibangun dalam kerangka sistem multi partai dengan terpolarisasi ekstrim, akan sangat banyak sekali tuntutan baik yang dilakukan secara konvensional (lewat parlemen) maupun yang *unconventional* (lewat jalanan). Kondisi seperti ini, mau tidak mau, suka atau tidak akan berdampak pada terganggunya efektifitas pemerintahan, akibat banyaknya gangguan dari kelompok-kelompok yang menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Secara

skematis kecenderungan-kecenderungan dari partai pemerintah ini dikembangkan oleh Sartori sebagaimana dalam gambar.



Gambar 19. Tipologi Partai Yang Memerintah
 Sumber: Giovanni Sartori, Party and Party Systems, A Framework for analysis, New York: Cambridge University Press, 1959

Bab VI

MAKNA PARTAI BAGI PEMILIH

Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa makna subyektif dari pemilih mengenai partai politik. Banyak hal yang bisa ditangkap dari hasil penelitian yang penulis lakukan menyangkut pemaknaan pemilih pada partai politik, namun paling tidak ada beberapa fenomena yang ada dapat diambil sebagai benang merah terkait dengan pemaknaan partai ini. Beberapa fenomena yang muncul di lapangan, penulis mengelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu makna ideologis, makna sosial, dan makna ekonomi. Varian makna ideologi yang ada dalam masyarakat pemilih terbagi ke dalam empat hal pemaknaan partai, yaitu alat Perjuangan Islam, Pengejawantahan Keislaman, Pembelaan *Wong cilik*, dan Perlawanan Pada Ideologi Penguasa. Makna sosial terdiri dari Solidaritas Sosial, Kepatuhan kepada Pemimpin, dan Budaya. Sementara varian makna ekonomi terdiri dari Pemberian Uang Tunai, Bantuan Pembangunan, Panggung Hiburan Rakyat.

A. Makna Partai: Sebuah Gambaran Umum

Reformasi¹ memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk berekspresi secara bebas tanpa ada tekanan dan ketakutan. Momentum ini dipergunakan oleh para elit untuk membangun partai politik sebagai sarana untuk merebut tiket dalam kekuasaan seperti menjamurnya partai-partai baru dengan beragam jenis dan corak kepartaian. Mereka menawarkan berbagai macam produk politik sesuai dengan segmen pemilih yang mereka bidik dengan tidak lupa memberikan janji-janji politik agar apa yang mereka tawarkan mendapat simpati dari masyarakat.

¹ Kajian mengenai reformasi dibahas secara komprehensif dalam kumpulan tulisan, "Economic Reform and Democracy", yang diedit oleh Larry Diamond dan Marc F. Plattner, London: The Johns Hopkins University Press and the National Endowment for Democracy All right reserved, 1995.

Kemunculan beragam partai baru pada pemilu 1999 dan 2004 umumnya diinspirasi oleh sistem kepartaian yang ada dan berkembang pada era demokrasi parlementer Orde Lama yang sangat kental dengan nuansa ideologis tanpa hirau dengan dinamika politik era Orde baru yang menutup rapat kemunculannya sistem kepartaian yang beraroma sektarian. Pada pemilu 1999, secara faktual menunjukkan adanya kecenderungan dari masyarakat untuk memilih partai politik sejalan dengan aliran ideologis sebagaimana dibuktikan dengan keberhasilan dari partai berhaluan Nasionalis dan Islam meraih suara signifikan. Namun di sisi lain, ada sekelompok masyarakat yang tidak memaknai reformasi sebagai sebuah kebebasan politik. Mereka justru memaknai reformasi sebagai era kesulitan sandang, pangan, dan papan sebagaimana plesetan yang berkembang seperti reformasi diplesetkan menjadi "repot nasi", demokrasi menjadi "demo-crazy". Kemenangan partai Golkar (partai yang lahir di era Orde Baru) sebagai peringkat pertama dalam pemilu 2004 menjadi bukti bahwa sebagian masyarakat lebih memilih sejahtera dalam bidang ekonomi daripada kebebasan politik. Masyarakat menilai jaman Orde Baru lebih enak ketimbang sekarang yang mereka rasakan, sehingga muncul harapan dalam masyarakat untuk kembali ke "jaman normal" (jaman ketika Orde Baru Berkuasa).

Kenyataan politik yang terjadi pasca pemilu 1999, para elit politik yang berhasil duduk dalam kekuasaan lupa diri karena mabuk kekuasaan, oleh karenanya menjadi lupa dengan nasib rakyat yang harus mereka perjuangkan. Korupsi, Kolusi, dan nepotisme yang menjadi isu politik untuk menggulingkan rezim Orde Baru justru semakin merajalela di era reformasi sehingga menambah besarnya antipati masyarakat pada partai politik. Oleh karena itu tidak heran kalau PDIP yang pada pemilu 1999 memperoleh suara tertinggi dengan total suara hampir 33,76 % pada pemilu 2004 turun drastis menjadi 19,58 % sementara partai Golkar tidak mengalami penurunan tajam yaitu hanya sekitar 2 % sehingga pada pemilu 2004 yaitu dari 22,47 % menjadi 21,7 %, dan menempatkan partai ini sebagai pemenang pemilu. Antipati masyarakat pada perilaku politik elit partai yang korup telah berimbas pada menurunnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu 2004 yang ditunjukkan dengan tingginya angka "golput". Situasi politik ini bagi sebagian partai politik menjadi kerugian karena

hilangnya jumlah kursi kekuasaan yang telah mereka dapatkan, namun bagi sebagian kecil partai politik justru mendapatkan berkah dari keputusan dan kejengkelan masyarakat pada perilaku elit partai politik ini.

Dengan mengusung jargon “bersih dan peduli”, Partai Keadilan Sejahtera berhasil menarik simpati massa pada pemilu 2004 sehingga mengalami peningkatan jumlah suara signifikan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada pemilu 1999. Di sisi lain, hilangnya harapan masyarakat dimanfaatkan dengan baik oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang *notabene* sebagai pensiunan Jenderal masa Orde Baru dengan membidani lahirnya satu partai yaitu Partai Demokrat. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh masyarakat dianggap sebagai orang yang mampu mengembalikan situasi sulit yang sedang dirasakan, oleh karena itu pada pemilu 2004 Partai Demokrat dengan mengejutkan memperoleh suara 7,46 %, dan kemenangan ini menghantarkan SBY untuk merebut kursi Presiden pada pilpres 2004.

Dari kondisi tersebut di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pilihan partai politik masyarakat tidak hanya mengandung makna ideologis dalam arti pilihan sejalan dengan aliran politik, namun ada makna lain seperti kesejahteraan ekonomi dan keamanan. Selain makna tersebut, ada makna lain yang muncul sebagai manifestasi dari kultur masyarakat desa yaitu kultur paguyuban yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, partai politik yang menjadi pilihan dalam satu komunitas sosial di satu kampung atau desa akan menjadi pilihan individu anggota kelompok sosial tersebut sebagai wujud dari solidaritas kelompok.

Dengan melihat kenyataan tersebut di atas, fenomena yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya bisa didekati dengan hanya melalui pendekatan ideologi, namun juga perlu didekati dengan pendekatan lain seperti budaya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Bourdieu (1984) yang mengkritik pendekatan Weber yang cenderung mengutamakan pendekatan Ideologi dan kelas ekonomi dalam memahami masyarakat. Bourdieu mengatakan bahwa “*society cannot be analyzed simply in terms of economic classes and ideologies.*” Di samping itu Bourdieu menggunakan konsep *field* yaitu sebuah arena sosial dimana masyarakat berusaha dan berjuang dalam mendapatkan sumberdaya yang diinginkan.

B. Makna Ideologis

Dikotomi aliran politik yang dikemukakan Geertz (1960) yaitu Santri dan Abangan, dalam kehidupan politik aliran ini ditranslasikan menjadi ideologi partai berhaluan Islam dan Nasionalis. Karakteristik Santri yang dikonsepsikan Geertz sebagai kelompok masyarakat yang taat dalam menjalankan ajaran Islam terbagi ke dalam dua varian yaitu kelompok Santri Modernis dan kelompok Santri Tradisional. Kedua varian Santri ini, terutama Santri yang mempunyai identifikasi kesiantrian yang kuat (Afan Gaffar, 1992), pilihan politik terhadap partai sangat kental dengan nuansa ideologis. Walaupun demikian, karena ada perbedaan pemahaman serta kultur keagamaan dari kedua varian Santri ini telah melahirkan perilaku politik yang berbeda walaupun dasarnya sama yaitu ideologi Islam.

Begitu pun mereka yang Abangan, dasar pertimbangan ideologis dalam memilih partai politik cukup kental. Pemilih Abangan umumnya memilih partai yang berhaluan Nasionalis, yang juga sering dikonsepsikan sebagai partai sekuler. Pertimbangan pemilih Abangan dalam menentukan pilihan politik sering mengabaikan peran dari partai sebagai agregator kepentingan. Hal ini telah berdampak pada kinerja partai yang abai terhadap platform partai yang harus membangun partai yang bersifat programatik. Para pemilih lebih banyak dipengaruhi oleh identifikasi diri sebagai kelompok Abangan yang langsung mentransformasikan dirinya kedalam pilihan politik tertentu. Dengan demikian pandangan politik, khususnya ideologi politik partai, bagi kalangan Abangan masih kabur atau kurang kongkrit. Bagi pemilih Abangan, yang dinamakan dengan partai Nasionalis, secara ideologis dipersepsikan sebagai pembela "wong cilik". Pemahaman ini sebenarnya tersirat sebuah keinginan dari masyarakat di tingkat *grassroot* agar partai politik memperjuangkan agenda politik membela masyarakat dengan berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.

Dalam menterjemahkan apa yang menjadi keinginan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab dari partai politik. Komitmen ideologis partai harus tersurat dalam platform partai dan sekaligus menjadi agenda politik partai untuk diperjuangkan. Hal ini sejalan dengan konsep Ideologi politik yang merupakan himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ketertiban (*order*) masyarakat tertentu termasuk menawarkan bagaimana mengatur

kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anthony Downs (1957), *Political ideology is a believe sistem that explains and justifies a preferred political order for society, either existing or proposed, and offer a strategy (processes, institutional arrangements, programs) for its attainment. It is a "verbal image of the good society and the chief means of constructing such society."*

Menurut Amstutz (1982), paling tidak ideologi mempunyai tiga dimensi:

Pertama, *an ideologi provides a philosophical perspective about the world. As a world of view, an ideologi provides justification for the values, preferences, and actions of people and a method of criticizing those ideals and events that are not in accord with the world view.*

Kedua, *an ideologi provides values and goals about the future of a political community, i.e., it informs people about what ought to be. Although ideologies differ as to the specificity with they describe the ultimate purposes and goals of society, all provide some vision of what the good life entails.*

Ketiga, *ideologies give some guidance about ways to realize desired goals and objective.all ideologies implicitly include values and norms for realizing ideals of an ideologi.*

Dari kedua pandangan tersebut di atas dapat ditarik satu benang merah bahwa ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, sekaligus menawarkan ketertiban dalam masyarakat tersebut. Hal itu semua dikarenakan ideologi menyediakan pandangan filosofis, nilai dan tujuan masyarakat, dan arahan guna merealisasikan tujuan dan cita-cita masyarakat tersebut.

Dari hasil temuan di lapangan, para pemilih walaupun secara umum dapat disimpulkan bahwa pemahaman partai politik terkandung makna ideologis namun konseptualisasi terhadap ideologi politik itu sendiri punya banyak varian. Varian pemaknaan ini berjalan secara linier dengan latar belakang aliran mereka, apakah mereka seorang Santri, atau Abangan. Bagi pemilih Santri, khususnya Santri Modernis, pemaknaan ideologi terhadap partai politik dipahami sebagai alat perjuangan Islam. Sementara bagi Santri Tradisional, pemaknaan ideologis partai politik dipahami sebagai pengejawantahan dari Keislaman mereka. Bertolak belakang dengan mereka yang Santri, pemilih Abangan memandang partai politik harus memperjuangkan nasib orang kecil (*wong cilik*). Di sisi

lain, akibat tekanan dari pemerintah Orde Baru yang banyak menekankan stabilitas politik demi pembangunan ekonomi, mereka yang menamakan *wong cilik* merasa telah dipinggirkan dan dimarginalkan. Oleh karena itu, partai politik bagi mereka juga dimaknai sebagai alat perlawanan terhadap penguasa, karena mereka tidak berani untuk melakukan protes langsung dengan melakukan demonstrasi, maka cara yang paling memungkinkan bagi mereka yaitu dengan cara memilih partai yang dianggap berseberangan dengan partai pemerintah.

1. Alat Perjuangan Islam

Di kalangan Santri Modernis berkembang pemahaman akan pentingnya partai. Partai politik diperlukan sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan, dengan alasan bahwa agama dalam perkembangannya tidak lepas dari pengaruh orang-orang berkuasa. Di sisi lain mereka berpandangan bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki atau didukung oleh penguasa, perkembangan agama akan mengalami kemajuan karena kekuasaan ikut membentengi dan menyokong perkembangan agama. Anggapan tersebut tidak lepas dari pengaruh perkembangan Islam pada jaman Nabi Muhammad, dimana pada jaman Rasulullah dan para sahabat, perkembangan Islam tidak lepas dari pengaruh kekuasaan. Islam dan kekuasaan sejalan dan seiring dalam sejarah perkembangan Islam, bahkan naik turunnya perkembangannya Islam pun tidak lepas dari akibat perebutan pengaruh dan kekuasaan di kalangan intern umat Islam sendiri, dan hal ini mendorong terjadinya polarisasi dalam Islam seperti adanya Suni dan Syiah.

Menurut beberapa aktivis Muhammadiyah Kabupaten Malang, pengaruh kekuasaan dalam perkembangan agama tidak hanya dalam Islam, akan tetapi terjadi juga di kalangan pemeluk Kristen. Pada saat kekaisaran Romawi Kristen yang mengembangkan ajaran Trinitas bisa berkembang pesat karena didukung oleh penguasa Romawi pada saat itu. Sedangkan konsep kristen yang mengembangkan ajaran ketuhanan yang bersifat tunggal tidak bisa berkembang karena mendapat hambatan dari penguasa.

Adanya partai politik yang berbasis Islam di Indonesia bagi kalangan Santri Modernis sangat dibutuhkan dalam rangka membentengi Islam dari pengaruh serta serangan yang akan menghancurkan Islam dari luar (non Islam). Mereka meyakini dengan adanya partai politik Islam, maka

Islam akan punya kekuatan karena didukung oleh mereka yang duduk di pemerintahan. Oleh karena itu, menurut pandangan pemilih Islam, partai harus mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan Islam di negeri ini. Agar dapat memperjuangkan Islam, maka orang-orang yang duduk di Dewan yang merupakan wakil dari partai Islam harus memahami dan menghayati nilai-nilai Keislaman yang dituangkan dalam perilaku kesehariannya.

Karena punya padangan positif mengenai keberadaan partai Islam, dan merasa perlu adanya partai Islam, umumnya pemilih dari kalangan Santri Modernis ini sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik. Minimal mereka akan mendatangi bilik suara untuk memberikan suaranya kepada partai yang menurut mereka bisa memperjuangkan Islam. Oleh karena sikap aktifnya dalam politik, pemilih kalangan Santri Modernis ini sangat kritis terhadap partai maupun wakil rakyat yang duduk di Dewan apabila tidak sejalan dengan apa yang menjadi pandangannya. Apabila ada partai Islam yang dalam perjalanannya tidak bisa diharapkan dalam memperjuangkan Islam, umumnya pemilih Santri Modernis yang Fundamentalis ini mengalihkan suaranya ke partai lain yang lebih getol memperjuangkan Islam. Dalam kasus yang terjadi di Malang Raya, banyak pemilih Santri Modernis mengalihkan pilihan politiknya dari PAN ke PKS karena PKS lebih bisa diharapkan dalam memperjuangkan Islam ketimbang PAN. Dan dalam hal ini PKS yang menyebutkan dirinya sebagai partai da'wah mencantumkan Islam sebagai dasar partai. Hal ini berbeda dengan PAN yang tidak mencantumkan Islam sebagai dasar partai, yaitu Pancasila.

PKS sebagai partai Islam dan mencatumkan Islam secara formal dalam AD/ART-nya bisa dipahami karena PKS lahir dari kelompok massa keagamaan yang bergerak dalam bidang da'wah yang dikenal dengan "Tarbiyah". Di sisi lain PAN yang dimotori Amin Rais, berdiri atas keinginan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang hancur akibat krisis ekonomi dan membangun sistem politik yang telah rusak oleh penguasa Orde Baru. Oleh karena itu, PAN dan Amin Rais dalam setiap kampanye selalu membawa isu reformasi. Dengan latar belakang tersebut, PAN dianggap kurang pas apabila hanya membidik segmen pemilih Islam saja, karena PAN ingin berkiprah untuk kepentingan bangsa, maka PAN harus menjadi partai plural yang mampu menjembatani semua kepentingan masyarakat.

Hal yang menarik dari pandangan kelompok Santri Modernis adalah sikapnya terhadap negara Islam. Bagi mereka, apa yang diperjuangkan partai Islam tidak selalu harus mengusung isu negara Islam, namun yang lebih penting adalah bagaimana syariat Islam bisa berkembang dan dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Muhammadiyah yang merupakan representasi dari kelompok Islam Modernis tidak mendukung untuk mencantumkan Piagam Jakarta dalam Pancasila. Salah satu alasan kenapa tidak harus secara formal mencantumkan syariat Islam dalam Dasar Negara, penulis kutip dari hasil wawancara dengan salah satu mantan Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten Malang sebagai berikut:

“... Islam harus dipatuhi dan diakui oleh seluruh warga negara yang tidak hanya Islam. Karena pada jaman Rasulullah, mereka yang beragama non Islam, seperti Yahudi juga apabila melanggar hukum seperti mencuri, maka mereka diperlakukan dan dihukum berdasarkan Islam. Kalau Piagam Jakarta dicantumkan dalam Pancasila, dimana syariat Islam hanya diperuntukkan bagi orang-orang Islam di khawatirkan akan merugikan perjuangan dakwah Islam sendiri. Sebagai contoh, apabila ada orang Islam yang mencuri, karena tahu kalau mencuri itu hukumannya dalam Islam itu dipotong tangan, maka mereka akan mengaku bukan Islam agar hukumannya tidak potong tangan.”

Oleh karena itu menurut kalangan Santri Modernis, kalau partai yang berbasis Islam ingin maju dan mendapat perhatian serta dukungan dari kalangan umat Islam, maka partai Islam harus sungguh-sungguh memperjuangkan Islam. Menurut mereka partai-partai Islam yang ada sekarang tidak sungguh-sungguh memperjuangkan Islam karena hanya melulu mengejar kekuasaan. Hal ini dilihat dari kinerja partai yang mengatas namakan partai Islam yang cenderung hanya sebagai merek dagang atau label saja. Kenyataannya memang pada saat ini partai Islam hanya namanya saja, karena tidak ada yang bisa membedakan secara kongkrit dimata masyarakat. Partai Islam dan non Islam hampir sama saja, dalam keadaan tertentu partai sekuler lebih banyak perhatian pada masyarakat Islam, sementara di sisi lain partai yang mengatasnamakan Islam tidak atau jarang memperjuangkan kepentingan orang-orang Islam.

Bahkan gagasan dari PDIP yang *notabene* sebagai partainya orang Abangan ketika menggagas dibentuknya Baitul Muslimin sebagian kalangan kelompok pemilih Santri Modernis yang Liberal cukup

apresiatif. Dengan pertimbangan bahwa partai hanya sebagai alat perjuangan Islam, maka dengan didirikannya baitul Muslimin ini sebagian kelompok Santri Modernis menyambutnya dengan turut terlibat dalam kepengurusan. Walaupun demikian, dikarenakan baitul Muslimin ini lahir di rumah kelompok Abangan, ada sebagian dari Santri Modernis, terutama yang Fundamentalis bersikap skeptis dan bahkan menjadi perdebatan di kalangan Santri Modernis. Sehingga dalam kalangan Santri Modernis terbentuk dua kutub antara mereka yang cenderung mendukung dan mereka yang tidak mendukung, termasuk ada juga yang Moderat. Sebagai contoh, Santri Modernis yang ada di Lowokwaru dengan Kedungkandang, kalau Lowokwaru bisa lebih menerima baitul Muslimin, yang juga rasional dalam rangka menjalankan dakwah. Di sisi lain Kedungkandang yang cenderung melakukan pendekatan emosional tidak bisa menerimanya, sehingga dua tempat itu komunitas punya karakteristik Santri Modernis berbeda.

Perbedaan pandangan terhadap baitul Muslimin ini didasari perbedaan latar belakang status sosial dan ekonomi Santri tersebut. Santri yang ada di daerah Lowokwaru itu adalah birokrat, akademisi yang hidupnya sudah tertata dengan baik. Kehidupan mereka selama satu bulan sudah tertata dengan baik. Di samping itu kalau dilihat dari segi pendidikan, Santri di wilayah ini mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Sementara Kedungkandang mereka umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang karena mereka tinggal dekat pasar, kehidupan mereka cukup dinamis dengan mobilitas cukup tinggi terkait dengan aktivitas di bidang perdagangan, namun untuk urusan agama mereka cenderung lebih fanatik.

2. Pengejawantahan Keislaman

Kehidupan kalangan Santri Tradisional di Malang Raya sangat disiplin menjalankan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan ritual keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut melekat dengan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan yang berimpitan dengan nilai budaya lokal, khususnya budaya Jawa. Bagi Santri Tradisional, apa yang mereka lakukan disadarinya sebagai bagian dari implementasi keberagaman mereka termasuk dalam berpolitik atau memilih partai. Mereka lebih paham sesuatu yang tersurat dari pada yang tersirat, lebih senang dengan hal yang kongkrit/permukaan daripada substansi. Dengan demikian bagi kalangan Santri Tradisionalis, lambang, simbol menjadi hal

yang sangat penting dalam kehidupan Santri Tradisional. Seorang Santri Tradisional akan sangat mudah dibedakan dengan mereka yang bukan Santri. Cara berpakaian Santri Tradisional sangat khas. Sarung, baju koko, peci, atau sebagai pakai sorban menjadi ciri khas dari Santri Tradisional. Namun hal yang paling umum, mereka yang tergolong Santri Tradisional, adalah pemakaian sarung dalam kehidupan keseharian mereka.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa orang memilih PPP masa Orba karena merupakan partai Islam dan ada gambar ka'bah yang menjadi simbolnya. Oleh karena itu banyak pemilih Tradisional memilih PPP walaupun banyak tekanan dari aparat maupun pemerintah. Banyak dari masyarakat yang rela dan setia untuk mendukung PPP karena mereka menganggap dengan memilih PPP berarti sudah bisa menjalankan dan membela Islam. Apalagi dalam gambar PPP ada ka'bah nya yang merupakan simbolisasi dari Islam. Melihat kenyataan ini pemerintah merasa perlu untuk melakukan rekayasa, sehingga pemerintah meminta diganti, dan berhasil karena PPP bisa diacak-acak.²

Pada pemilu 1999 dan 2004, walaupun PPP masih ada, namun para pemilih di Malang Raya yang berbasis Islam Tradisional mengalihkan pilihan politiknya ke PKB. Alasan yang muncul kenapa mereka tidak memilih PPP dikarenakan pimpinan PKB merupakan tokoh dan sekaligus pimpinan teras NU yang mempunyai garis keturunan langsung dari K.H. Hasyim Ashari yaitu Abdurahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Padahal PKB yang dideklarasikan oleh Gus Dur ini bukan merupakan partai Islam, karena dalam AD ART nya tidak mencantumkan Islam sebagai asas tapi Pancasila. Namun bagi pemilih Santri Tradisional itu tidak penting, karena yang mereka lihat bukan substansi dari partai itu melainkan siapa yang duduk dalam kepengurusan partai itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di kalangan pemilih Santri Tradisional,

² Ketika jaman Orde Baru banyak pemilih Santri Tradisional memilih PPP dengan alasan bahwa partai ini merupakan satu-satunya partai Islam. Apalagi ketika PPP di pimpin oleh Idham Cholid yang nota bene sebagai pemimpin ormas Islam Tradisional Nahdlatul Ulama (NU). Banyak para kader NU yang berjuang habis-habisan untuk mengkampanyekan dan memenangkan PPP dalam setiap pemilu yang dilaksanakan. Dorongan kuat dari pemilih Tradisional untuk membela PPP didasarkan pada keyakinan bahwa membela PPP sama dengan membela Islam, karena PPP merupakan partai Islam yang disimbolisasikan dari pemimpin teras partai yang merupakan tokoh-tokoh Islam khususnya NU. Dalam memperjuangkan PPP mereka tanpa pamrih, setiap kegiatan yang mereka lakukan untuk mengkampanyekan PPP tanpa bantuan apapun mereka jalan, bahkan untuk kegiatan ini dia dan teman-temannya rela urunan sendiri, bahkan mereka berani mati untuk membela PPP.

tolak ukur untuk menentukan pilihan politik partai tidak pada *flatform* partai melainkan pada siapa tokoh yang duduk di partai itu. Hal ini merupakan bagian dari tradisi di kalangan NU yang menjadikan pemimpin agama (dalam hal ini ulama/kyai) sebagai panutan, tidak hanya untuk urusan keagamaan dan kehidupan sosial, namun juga untuk urusan politik ulama menjadi referensi dalam menentukan pilihan politik mereka.

Hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah seorang Santri Tradisional, Muslimin seorang partisan PKB dan aktivis NU, menuturkan sebagai berikut:

"Saya dulu ketika jaman pak Harto milih PPP, saya sering ikut kampanye. Jaman dulu sekitar tahun 1977 PPP dan Golkar kan rame, saya waktu itu berani berjuang untuk PPP, istilahnya berani mati lah. Setelah selesai jaman Pak Harto, muncul PKB, saya sekarang milih PKB. Walaupun di PKB tidak pernah ada bantuan apapun, untuk kepentingan PKB kami sama teman-teman rela mengeluarkan biaya sendiri. Ketika kampanye PKB, saya datan secara sukarela tanpa dibayar atau uang bensin sekalipun.

Saya kan NU, keluarga saya juga sama. Jadi untuk warga NU, kalau untuk membela agama walaupun nyawa sekalipun akan dikorbankan. Oleh karena itu karena PKB itu didirikan oleh NU, maka saya rela berkonban untuk PKB. Di PKB kan pimpinannya orang NU, seperti Gusdur. Jadi kami sabagai orang NU harus mendukung PKB, karena orang NU itu kan harus patuh sama pimpinan. Jadi tidak ada masalah walaupun harus berkorban untuk PKB, karena PKB adalah NU dan NU adalah PKB.

Kampanye PKB biasanya dilakukan dengan cara pengajian, kami datang sama teman-teman bukan untuk melihat kampanye tapi ikut pengajian itu. Pokoknya kalau orang NU itu kalau untuk kepentingan agama tidak perhitungan. Ya...tadi... matipun rela, sehingga kalau ada yang berani menjelek-jelekkkan agama...pasti semua akan membela."

Dari apa yang dikemukakan di atas terlihat jelas bahwa tingkat fanatisme mereka pada partai sangat tinggi. Karena dalam pandangan mereka memilih partai adalah juga pengejawantahan Keislaman, maka hal ini berpengaruh pada kondisi psikologis mereka yang tidak bisa menerima partai lain dengan tingkat kecurigaan yang tinggi pada pemilih lain. Kondisi ini menyimpan potensi konflik yang tinggi dengan pemilih lain ketika terjadi benturan antara sesama masyarakat yang berbeda, terutama ketika saat kampanye terbuka. Bahkan banyak dari pemilih Tradisional menganggap bahwa mereka yang tidak memilih partai sama

dengan mereka tidak baik Keislamannya sehingga cenderung di jauhi oleh kelompoknya.

Di sisi lain, banyak pemilih Santri Tradisional enggan meninggalkan partai pilihannya karena alasan merasa tidak tenang. Mereka merasa apabila tidak memilih partai yang sesuai dengan kelompoknya, Keislaman dia menjadi berkurang. Oleh karena itu mereka akan sangat bangga apabila memiliki kaos yang berlambang partai, khususnya partai PKB yang logonya mirip dengan logo Nahdatul Ulama dengan bintang sembilannya. Implikasi dari kebanggaan akan Keislaman mereka yang di translasikan dalam kepartaian, para pemilih dan pendukung PKB di Malang Raya sebagai mana penulis teliti, ada sikap-sikap heroik yang muncul dari para pendukung PKB. Bahkan anggapan mereka membela PKB disamakan dengan membela agama. Dengan demikian mereka akan rela datang ke tempat-tempat kampanye yang diadakan PKB sejauh apapun dan dengan biaya sendiri.

3. Pembela Wong Cilik

Banyak pemilih Abangan yang memandang PDIP sebagai partainya pembela *wong cilik*. Simbol yang mereka lihat adalah Megawati sebagai pimpinan partai. Kenapa megawati yang dijadikan simbol, menurut salah seorang pemilih simpatisan PDIP, alasannya karena “megawati sudah lama terjun di politik dan sudah lama berjuang untuk PDI.” Sebagian pemilih menyatakan bahwa megawati menjadi figur di PDIP sekarang sangat dipengaruhi oleh kharisma Bung Karno, Megawati yang merupakan putri Bung Karno dianggap mewarisi ajaran dari ayahnya. Ajaran Bung Karno, mengenai Marhaenisme, merupakan cita-cita politik yang harus diperjuangkan. Sementara marhaenisme sendiri merupakan simbol politik yang merujuk pada sebuah masyarakat kelas bawah atau apa yang disebut dengan “wong cilik”. Oleh karena itu Bung Karno dengan partainya yaitu PNI pada masa itu dianggap sebagai partainya *wong cilik*. Pada saat Orde Baru, PDI, walaupun tidak selamanya Megawati jadi pimpinan di partai namun keluarga Soekarno tetap dipakai sebagai *vote getter* karena pimpinan teras PDI pada saat itu menyadari betul bahwa ruh partai ini adalah keluarga Soekarno.

Aguk, salah satu simpatisan PDIP menyampaikan kepada penulis terkait dengan pilihan masyarakat terhadap partai berlambang kepala banteng sebagai berikut: “Para pemilih yang mencoblos PDI-P lebih banyak

dipengaruhi oleh figur Pak Karno, sedangkan Megawati sendiri tidak tidak begitu dijadikan figur, dia diterima karena sudah berjuang cukup lama. Oleh karena itu ketika Megawati menjadi presiden dianggap tidak menjalankan komitmennya untuk memperbaiki *wong cilik*, maka pada saat pemilu presiden banyak dari pemilih PDIP tidak mencoblos Megawati.“

Sementara banteng yang menjadi gambar dalam partai PDIP, bagi kalangan pemilih Abangan dianggap sebagai simbol perjuangan dari kalangan orang kecil. Oleh karena itu, simbol banteng ini tidak hanya dijadikan simbol partai tetapi juga dipakai dalam setiap kegiatan yang pada intinya menunjukkan identitas kelompok marginal. Dalam bidang kesenian yang berasal dari kalangan bangan, salah satu acara yang sering ditampilkan dalam setiap acara tujuhbelas agustus adalah bantengan.³ Karena para pemilih Abangan memaknai partai sebagai pembela *wong cilik*, maka partai yang menjadi representasi dari mereka apabila mendapat perlakuan tidak adil dari penguasa akan segera mendapat reaksi dengan membangun ikatan solidaritas yang lebih kuat untuk mendukung partainya. Hal ini terbukti dengan menang mutlaknya PDIP pada pemilu 1999, karena pada saat Orde Baru megawati yang menjadi pemimpin partai di “*kuyo-kuyo*” oleh pemerintah.

Lebih lanjut, karena partai dimaknai sebagai pembelaan kelompok kelas yang dimarginalkan, hal ini berujung pada tingkat fanatisme yang sangat besar dari para simpatisan partai, khususnya PDIP. Mereka merasa bahwa membela partai sama dengan membela nasibnya dan membela kelompoknya yang sama-sama *wong cilik*. Citra PDIP sebagai partainya orang kecil, dan orang kecil itu selalu identik dengan petani, buruh kasar, pedagang kaki lima yang umumnya hanya mengandalkan tenaga, maka dalam setiap kampanye yang melibatkan massa, sebagian masyarakat merasa takut. Perilaku massa PDIP apabila berkampanye, khususnya ketika ada konvoi, dari mereka menunjukkan adanya ekspresi yang tidak terkendali. Seolah-olah mereka ingin melampiaskan segala tekanan yang mereka rasakan akibat berbagai persoalan hidup.

³ Dari hasil pengamatan penulis ketika menyaksikan acara tujuh belasan, tradisi kesenian bantengan ini menjadi suguhan utama dari kalangan masyarakat Abangan yang umumnya kelompok marginal. Dalam iring-iringan karnaval, barisan terdepan diisi oleh orang-orang yang membawa prototipe kerbau yang terdiri dari kepala kerbau yang terbuat dari kerdus dengan kain hitam di bagian badannya dan di belakangnya ada semacam ekor. Setelah itu di belakang orang-orang yang berpakaian dan berdandan layaknya petani, buruh, atau apapun yang menurut mereka merepresentasikan kaum marginal.

Berkenaan dengan latar belakang psikologis pemilih Abangan yang umumnya kelompok marginal, ekspresi kekecewaan maupun ekspresi dukungan selalu diwujudkan dalam bentuk dan tindakan cenderung destruktif dan anarkis, jauh dari sikap dan tindakan santun dan bersahabat. Pembakaran kaos dan atribut partai, perusakan gedung dan simbol partai, ataupun bentuk dukungan cap jempol darah merupakan bagian dari ekspresi umum yang dipertontonkan oleh kalangan Abangan. Oleh karena itu bagi mereka, visi-misi serta *platform* partai sama sekali tidak hirau, kalau tidak dikatakan tidak paham. Bagi mereka tindakan rill yang bersifat praktis-pragmatis lebih bisa diterima. Orasi pimpinan partai yang berkualitas tidak mereka butuhkan, yang mereka butuhkan pidato bersemangat yang penuh propaganda, dan tidak kalah pentingnya adalah hiburan rakyat seperti dangdutan lebih mereka senangi.

Hasil temuan di lapangan, yang menarik adalah proses identifikasi diri mereka sebagai *wong cilik* tidak hanya dalam kontek pekerjaan atau pun keadaan sosial ekonomi, namun juga dari tingkat keberagamaan mereka. Bagi kelompok Abangan yang dinamakan *wong cilik* di samping bekerja sebagai buruh kasar atau secara ekonomi tergolong bawah, namun yang paling penting perilaku kesehariannya yang cenderung menjauh dari Langgar atau Masjid, dan tidak taat dalam menjalankan syariat Islam. Walaupun mereka sama-sama secara ekonomi termasuk miskin, namun apabila taat beragama tidak mereka masukkan dalam kelompok Abangan. Pada umumnya mereka yang masuk dalam kelompok Abangan ini adalah *wong cilik* yang berprofesi sebagai buruh, baik itu buruh pabrik, buruh bangunan, buruh tani yang relatif tidak mempunyai waktu cukup untuk menjalankan shalat dan karena pekerjaannya yang berat mereka tidak bisa berpuasa. Ketakberdayaan dalam menjalankan keagamaan inilah yang sebenarnya memicu tumbuhnya perilaku keberagamaan yang minimal dari kelompok Abangan. Perilaku keberagamaan minimal yang awalnya disebabkan karena ketakberdayaan, berubah menjadi kebiasaan dan pada akhirnya menjadi budaya dan identitas atau karakter dari kelompok masyarakat tersebut.

Sementara di sisi lain ada sebagian *wong cilik*, seperti buruh tani atau petani atau pedagang kecil mengidentikkan diri sebagai *wong cilik* tidak dalam konotasi kelompok Abangan. Mereka lebih cenderung masuk dalam kelompok Santri, karena perilaku keberagamaan yang lebih baik. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa keberadaan *wong cilik*

ini terbagi ke dalam dua kelompok yaitu ada *wong cilik* Abangan dan ada *wong cilik* Santri.

4. Perlawanan pada Ideologi Penguasa

Ideologi marhaenis merupakan varian dari ideologi sosialis, termasuk juga marxisme. Kalau dalam pandangan Marx, dalam buku yang terkenal "*das kapital*", melukiskan perjuangan kaum buruh dalam melawan kaum kapitalis yang menguasai alat-alat produksi. Dengan demikian sumber konflik utama dalam pandangan Marx ini bersumber pada penguasaan alat produksi, oleh karena itu Marx mengajukan proposisi bahwa untuk mengakhiri ketertindasan kaum buruh oleh kaum kapitalis caranya dengan melakukan perebutan alat produksi yang dikuasai kaum kapital. Salah satu cara yang Marx anjurkan untuk mengakhiri ketertindasan ini dengan jalan revolusi. Karena banyaknya kegagalan dalam praktiknya di lapangan, pengikut Marx, banyak yang merevisi pemikiran Marx ini (neo-Marxis), dengan menyebutkan bahwa kekuasaan itupun sama halnya dengan alat produksi harus diperjuangkan. Salah satu bentuk dari pemikiran neo-Marxis ini adalah perjuangan merebut kekuasaan secara konstitusional. Kelompok ini dalam khasanah politik dikenal dengan kelompok sosial demokrat, yang memperjuangkan dan pembelaan kepada kaum buruh melalui jalur yang sah dengan cara pembentukan sebuah partai politik. Maka kemudian tumbuhkan konsep baru dalam teori politik yang dikenal dengan "sosialis kiri", dan "sosialis kanan".

Di negara kita pandangan sosialis kiri ini sempat berkembang, khususnya pada jaman Soekarno, yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena jiwa revolusionismenya dalam kader-kader komunis ini, maka tidak jarang melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya memprovokasi massa untuk berlaku destruktif. Pada akhirnya, akibat peristiwa G.30.S, PKI dibubarkan. Oleh karena itu, sekarang ini paham-paham yang terkait ideologi sosialis kiri ini jarang ditemukan, akibat pembumihangusan oleh rezim Soeharto. Setelah lengser Soeharto, ideologi kiri ini tidak juga muncul, yang ada dan berkembang hanyalah ideologi sosialis kanan, seperti yang diusung oleh partai PDIP pimpinan Megawati.

Karena ruh yang terbangun dalam kelompok sosialis ini adalah pembebasan dan perlawanan pada penindasan, maka ciri khas dari partai-partai yang dibangun atas pondasi ideologis sosialis ini cenderung punya

semangat atau spirit kepartaian yang tinggi dari para kader-kadernya. Sebagaimana halnya yang terjadi di negara kita, PDIP yang merupakan partai sosialis dengan ideologi “marhaenisme”-nya para kader dan pengikutnya sangat militan dengan spirit kepartaian yang tinggi. Bagi pemilih dan simpatisan PDIP, partai ini merupakan simbol perjuangan dan perlawanan mereka pada kemapanan yang telah menempatkan mereka pada posisi marginal. Oleh karena itu, banyak kaum buruh memilih PDIP karena merasa ada justifikasi sebagai kelompok marginal untuk melawan pengusaha atau pemerintah, khususnya perjuangan mereka dalam mendapatkan upah buruh yang layak.

Karena PDIP menjadi simbol perlawanan *wong cilik* pada penguasa, maka ketika pada saat Orde Baru banyak buruh, petani, maupun pedagang kaki lima yang menjadi korban dari penertiban aparat keamanan. Di sisi lain PDI pada saat itu, ketika dipimpin oleh Megawati, selalu mendapat tekanan dari penguasa. Bahkan sempat menjadi drama politik ketika Soeryadi mengambil alih kepemimpinan dan terjadi dualisme kepemimpinan. Peristiwa pengambilalihan kantor PDI secara paksa ini terkenal dengan peristiwa “kudatuli” (Kudeta Satu Juli). Setelah lepas cengkraman rezim Orde Baru, banyak dari pemilih yang merasa nasibnya sama, serta merta mendukung PDIP sebagai simbol kemenangan dalam perjuangan melawan penguasa Orde Baru, dan akhirnya mengantarkan PDIP sebagai pemenang pemilu 1999 dengan kemenangan mutlak.

Bagi sebagian kalangan pemilih PDIP, menganggap bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak membuat kebijakan yang merugikan mereka. Kasus di Kota Malang, dukungan kelompok Abangan pada Peni Soeparto yang menjabat sebagai Wali Kota Malang sangat besar. Hal ini terbukti ketika Peni maju lagi sebagai calon dalam pilkada di Kota Malang pada bulan Juni 2008, dimana Peni memenangkan pilkada dengan perolehan suara mutlak yaitu sekitar 40%. Dilihat dari karakteristik pribadi Peni memang menurut beberapa sumber sangat dekat dengan kelompok Abangan, terutama pemudanya.

Dari hasil wawancara dengan simpatisan PDIP, khususnya terkait dengan pelayanan pemerintah yang diberikan, mereka menunjukkan sikap yang apati dan cenderung menunjukkan sikap sinis pada pemerintah. Satu hal yang bisa ditangkap dari apa yang dikemukakan oleh para simpatisan PDIP ini adalah kesusahan yang mereka rasakan sekarang ini akibat ulah pemerintah. Ukuran bagi mereka, adalah harga

kebutuhan pokok yang langsung mereka bisa rasakan. Yang mereka persalahkan tidak hanya pemerintah, namun juga pada anggota dewan yang mereka anggap tidak peduli. Dengan demikian, persoalan mereka mendukung partai bukan karena mereka akan mendorong seseorang untuk duduk di dewan, tapi lebih karena dukungan mereka kepada partai sebagai simbol persatuan di antara mereka dalam memperjuangkan nasib.

Oleh karena itu, umumnya para simpatisan PDIP jarang yang kenal dengan anggota dewannya, yang mereka tahu adalah partai dan pengurus partai, sehingga mereka sering berhubungan dengan pengurus partai yang biasanya sebagai pimpinan Ranting, atau pimpinan Cabang partai. Adapun mereka yang datang mau minta dukungan, secara pribadi untuk menjadi anggota dewan, mereka sangat transaksional. Bagi mereka mendukung orang, berarti orang itu akan dinaikkan derajatnya. Oleh karena itu, karena akan menaikkan derajatnya, orang itu harus membayar atau memberi konpensasi kepada yang mendukungnya. Sikap ini tidak hanya ditunjukkan pada partai di luar PDIP, tapi juga kepada semua calon yang dari partai manapun yang minta dukungan, termasuk dari PDIP.

C. Makna Sosial Kemasyarakatan

Dalam kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan, secara sosiologis berbeda dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat desa lebih cenderung bersifat komunal dan agak statis, sementara masyarakat kota lebih menonjol sifat individualnya, namun kehidupannya cukup dinamis.

Dalam masyarakat yang statik, dimana teknik produksi dan ekonominya belum begitu berkembang dan ekspansif ada kecenderungan anggota-anggota masyarakat kelas atasnya untuk mempertahankan posisi menguntungkan. Dan apa yang mereka peroleh dipertahankan sampai anak cucu mereka. Kondisi ini berakibat pada penonjolan perbedaan-perbedaan dari kelas satu dengan kelas lainnya dan digunakannya ikatan kerabat untuk mendapatkan legitimasi calon yang akan menempati posisi atas dalam masyarakat baik itu dalam ekonomi, sosial, maupun politik. Di dalam kelompok kerabat biasanya ada diferensiasi sosial yang besar berdasarkan kelamin dan umur, dimana orang-orang yang agak tua memegang peranan yang penting. Dengan demikian calon-calon yang akan menempati kedudukan dalam masyarakat dipilih berdasarkan kriteria yang sifatnya partikularistik, tidak berdasarkan penilaian yang universal.

Di Malang Raya organisasi keagamaan menduduki tempat yang penting, dengan susunan atau strata sosial yang sangat hirarkik. Dan elit Elit keagamaan umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan elit politik. Yang menjadi dasar kekuasaan dari organisasi keagamaan adalah nilai agama, dan menjadi faktor pemersatu dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang menempatkan agama dalam posisi tertinggi, moral memegang peranan penting, dan agama menjadi bagian yang pokok. Dalam seluruh kepercayaan dan praktek keagamaan dapat dilihat dari perbedaan antara tradisi besar dan tradisi kecil. Dan yang mengatur serta menjabarkan tradisi besar adalah mereka yang ada di kota, hal ini merupakan bagian dari peneguhan akan kekuasaan elit kota terhadap massa yang ada di desa.

Pandangan dan perintah-perintah agama sangat mempengaruhi tingkah laku masyarakat Malang Raya. Tidak ada aspek kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh oleh pandangan agama ini. Upacara-upacara keagamaan, yang mengikutsertakan sebagian besar masyarakat, sekaligus mekanisme yang menunjang integrasi masyarakat yang terkotak-kotak. Praktek religio-magik yang berkembang, oleh masyarakat dianggap mempunyai kekuatan untuk memberi perlindungan, memulihkan keadaan atau untuk meramal. Di samping itu, masyarakat merasa sangat bergantung pada lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, masyarakat Malang Raya dalam segala hal tidak terlepas dari kehidupan sosial ini, termasuk dalam urusan politik. Mereka menganggap, segala sesuatu sudah ada bagiannya. Mereka yang berperan dalam urusan politik adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, dan biasanya tinggal di perkotaan, sementara mereka hanya tinggal tunggu perintah ataupun himbauan dari tokoh yang merupakan kepanjangan tangan dari elit perkotaan.

1. Solidaritas Sosial

Kehidupan sosial di Malang Raya, unsur kekerabatan masih cukup menonjol. Sikap guyub dan rukun cukup kental mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat. Perilaku kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan, jarang ditandai dengan adanya kejutan-kejutan. Pola kehidupan mereka sepertinya sudah teratur dengan konsep sosial yang mereka pahami dan tetap dipertahankan dari generasi ke generasi. Ketika ada kajatan besar baik itu yang berkaitan upacara keagamaan maupun upacara nasional, mereka bersatu padu satu sama lain dengan

pembagian peran yang permanen. Hal yang paling menonjol dari semua yang dilakukan oleh masyarakat adalah kesadaran akan kebersamaan yang dilandasi oleh stratifikasi sosial yang sudah terlembagakan.

Dalam kegiatan lima tahunan (Pemilu), yang oleh masyarakat sering dinamakan sebagai kajatan besar nasional, nampak jelas masing-masing bagian dari masyarakat berperan aktif sesuai dengan porsi masing-masing. Sebelum pemilu dilaksanakan, biasanya masyarakat sudah punya patokan dalam menentukan pilihan partai politik yang akan mereka pilih. Kekeluargaan, pertemanan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan biasanya menjadi penentu pilihan partai politik yang mereka pilih. Sehingga ada kecenderungan bahwa pilihan masyarakat pada partai politik dalam setiap pemilu seperti perilaku “ikut-ikutan” dengan pilihan sodara, teman atau lingkungan masyarakat lain karena takut dianggap bukan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Salah seorang warga di Kota Batu, Muslim (30), menyampaikan pada penulis bahwa dalam pemilu 1999 dan 2004 masyarakat tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi wakil-wakil mereka yang akan duduk di DPR. Mereka memilih partai Islam tidak lebih karena takut tidak disebut seorang Muslim atau takut dikucilkan oleh kelompoknya. Dengan demikian, pilihan partai politik Islam tidak menjamin mereka sadar bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari pemahaman keberagaman mereka.

Pemilih yang pada pemilu baik 1999 maupun 2004 mencoblos partai Islam cenderung ikutikutan saja, takut mereka tidak disebut Islam atau dikucilkan oleh kelompok. Para pemilih tidak bisa membedakan mana wakil-wakil yang duduk di DPR itu yang merupakan wakil Partai Islam atau bukan, karena mereka sama sama suka korupsi. Padahal dalam ajaran Islam sangat memperhatikan sikap dan perilaku amanah, tidak boleh berbuat merugikan orang lain.

Faktor keluarga dalam pilihan partai juga sangat kental. Sebagai mana penuturan salah seorang warga yang menjadi pemilih PDIP pada pemilu 2004, - Saya memilih PDI-P karena di sini umumnya PDI-P, “saudara saya Sony sebagai kader PDI yang mengkoordinir agar mencoblos PDI. Kalau ada acara kampanye orang-orang yang akan ikut diberi uang transport dan mereka yang punya sepeda motor dikasih uang bensin.”

Begitupun juga kasus pemilih Partai Golkar. Mereka yang memilih Golkar disebabkan pengaruh keluarga, walaupun sekarang mereka sudah tidak menjadi pegawai negeri sipil, namun banyak keluarga yang sudah tersosialisasi cukup lama dengan Golkar pada akhirnya semua keturunannya banyak yang memilih Golkar dalam pemilu. Kita ketahui bahwa pada jaman Orde Baru mereka yang punya jabatan di pemerintahan secara inplisit diwajibkan untuk memenangkan Golkar, bahkan banyak tekanan-tekanan dari aparat kepada masyarakat pada saat itu untuk mencoblos Golkar. Di samping itu ABRI di desa dengan memelalui babinsa, juga melakukan tekanan tekanan sehingga babinsa menjadi alat *pressure* pada masyarakat.

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa sebagian masyarakat sangat concern akan pentingnya kebersamaan dalam lingkungan mereka. Mereka sadar bahwa kebersamaan merupakan bagian dari pengamanan sosial bagi mereka, ketakberdayaan secara individu dalam melangsungkan kehidupan mereka telah menjadi bagian yang diyakini dalam alam bawah sadar mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung akan mengikuti pola umum dalam masyarakat karena mereka sangat bergantung dengan masyarakat yang lain. Dengan demikian, banyak dari anggota masyarakat berupaya mendapatkan peran dilingkungannya dalam membina dan membangun lingkungannya. Biasanya mereka yang punya peran menonjol dalam masyarakat, secara langsung maupun tidak masyarakat akan patuh pada mereka yang telah punya andil dalam membangun lingkungannya.

Dalam hal aktivitas dalam bidang lingkungan dan kemasyarakatan, baik kelompok Santri maupun Abangan tidak terpisahkan. Bahkan dalam hal ritual keagamaan yang sering dilakukan oleh kelompok Santri Tradisional, sebagian Abangan juga ikut serta. Perbedaan antara Abangan dan Santri dalam kehidupan masyarakat hanya akan dapat dilihat dalam kaitannya dengan urusan pelaksanaan rukum Islam, terutama puasa di bulan Ramadhan dan Shalat lima waktu. Kelompok Abangan jarang atau tidak pernah menjalankan Shalat lima waktu, dan tidak berpuasa ketika bulan Ramadhan tiba. Sementara kelompok Santri sangat khusus dalam menjalankan Shalat maupun puasa di bulan Ramadhan.

Berkaitan dengan aktivitas kemasyarakatan, banyak dari tokoh masyarakat yang sudah dikenal menjadi kepanjangan tangan dari elit politik dari partai tertentu, walaupun mereka secara pribadi jarang

yang aktif dalam partai. Hal yang penting adalah manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dari apa yang mereka lakukan sebagai bagian dari pengabdian mereka kepada masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, setiap warga yang menjadi aktivis atau pun kepanjangan dari partai politik tertentu, tidak lebih peran mereka hanya mencari sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat. Tidak jarang mereka yang punya hubungan dengan partai tertentu menjadi media bagi partai untuk membagikan kaos, uang bensin pada saat kampanye, ataupun yang berkaitan dengan bantuan bagi pembangunan lingkungan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebersamaan, tidak mau berbeda dengan yang lain, merupakan jaminan sosial bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, partai politik yang ingin mendapatkan simpati dari masyarakat, mau tidak mau, harus melakukan interaksi langsung kedalam masyarakat. Sugiono, seorang warga menyatakan, "pentingnya tokoh partai politik untuk turun dalam kegiatan kemasyarakatan kalau ingin terpilih, di daerah sini ada calon dari Golkar tapi tidak dipilih karena jarang ikut dalam kegiatan masyarakat." Secara sama juga dikemukakan oleh Wahid,

"Yang penting bagi partai adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung, bisa dengan kunjungan, ikut kegiatan warga atau sekedar membantu pada yang dibutuhkan oleh warga kampung. Kegiatan itu lebih efektif dibanding dengan kampanye yang dilakukan di lapangan dengan berbagai janji-janji atau pun membacakan visi misi. Bagi warga visi misi tidak dibutuhkan, karena warga membutuhkan yang kongkrit-kongkrit aja. Kalau pengurus parpol sudah turun kemasyarakat tidak perlu berkampanye."

2. Kepatuhan pada Pemimpin

Masyarakat Jawa umumnya memahami masyarakat dalam dua pembilahan, yaitu *wong gedhe* orang berpengaruh dan *wong cilik* orang pada umumnya. *Wong gedhe* umumnya dipahami sebagai pemimpin yang punya sudut pandang yang sama sebagaimana orientasi masyarakat kota, "orang pintar", "pengambil keputusan yang efektif" dan "mempunyai kewenangan dalam kehidupan lokal." Sementara *wong cilik* di sisi lain merupakan pengikut yang hanya dipahami sebagai orang pasif dan masa bodoh, dan "orang yang tidak mengerti" seperti yang Clifford Geertz gambarkan.

Stratifikasi dalam masyarakat desa Jawa mungkin juga dapat dipahami dalam dua bagian pembilahan seperti di atas, yaitu pemimpin

dan pengikut atau rakyat. Banyak para sarjana mencoba menggambarkan hubungan antara pemimpin dan rakyat sebagai pola komunikasi dimana pemimpin merupakan figur dominan ketika berhadapan dengan rakyat. Tipe hubungan dinamakan sebagai pola hubungan *patro-cilent* atau bapak-anak buah. (Karl Jackson, 1980)

Berbicara mengenai pemimpin di Jawa selalu tidak terpisahkan dari konsep karisma. Dimana pemimpin dan karisme menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat karena kepatuhan yang tinggi kepada pemimpinnya. Karisma adalah kemampuan seorang pemimpin dalam ilmu gaib atau hal-hal bersifat keramat untuk memperbesar pengaruh sehingga keabsahannya sebagai pemimpin diakui dan didukung. Konsep *kesakten* adalah konsep inti dalam ideologi atau paham Jawa Tradisional tentang kekuasaan. (Hajriyanto Y. Thohari, 2002)

Sementara ciri-ciri kepemimpinan Karismatis Ann Ruth Willner (1984) mengemukakan sebagai berikut. *Pertama*, adanya keyakinan bahwa sang pemimpin memiliki kualitas istimewa yang *superhuman*; *kedua*, para pengikutnya kehilangan kritisme terhadap pemimpinnya, bahkan cenderung memperlakukan pendapat atau sikap pemimpinnya sebagai sesuatu kebenaran; *ketiga*, para pengikut memberikan loyalitas mutlak kepada para pemimpinnya; dan *keempat*, massa pengikut senantiasa memperlihatkan komitmennya yang emosional dan personal terhadap pemimpinnya. Namun menurut Hajriyanto Tohari (2002), karena kepercayaan kepada karismatis seorang pemimpin selalu bersifat lokal dan terbatas, dan tidak pernah nasional, apalagi universal, yakni karisma di tempat, daerah, atau golongan tertentu saja, serta tidak bagi komunitas atau tidak pada entitas politik lainnya, maka kepemimpinan karismatis cenderung menciptakan primordialitas dan komunalitas.

Dalam masyarakat Desa Jawa, tipe kepemimpinan ini juga dimiliki baik oleh pemimpin yang mempunyai posisi dalam birokrasi formal sebagai kepala desa, dan pemimpin diluar birokrasi, khususnya pemimpin spritual. Dalam kasus ini, Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa, "di luar pejabat pemerintahan terdapat juga pemimpin alami yang berkuasa seperti kyai⁴ lokal, haji, guru, dukun (Sartono Kartodirdjo 1972).

⁴ Anderson menyebutkan bahwa dalam komunitas Islam, orang yang mempunyai status tertinggi adalah mereka yang berpengetahuan tinggi mengenai hukum agama dan mereka yang mengajarkan ajaran Islama. Lihat Benedict R. O'G. Anderson Culture and Politics in Indonesia (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990) terutama Hlm. 61.

Para pemimpin tersebut mempunyai atribut tertentu seperti jimat yang memberikan perlindungan dari bahaya, mempunyai ilmu kedigjayaan, ilmu pengetahuan, ilmu keselamatan, yang memberi kekuasaan sebagai manusia lebih. Tipe kepemimpinan ini dapat membentuk perilaku politik dalam negara berkembang seperti Indonesia.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, petunjuk yang datang dari tokoh atau kyai punya pengaruh kuat untuk mengiring masyarakat memilih partai tertentu. Kenyataan ini disadari betul oleh banyak tokoh politik. Oleh karena itu ketika menjelang pemilu banyak tokoh Parpol melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren untuk mendapatkan dukungan dari kyai. Namun menurut salah seorang warga, kedatangan para tokoh politik ke pesantren-pesantren itu tidak akan efektif kalau dilakukan hanya pas menjelang pemilu. Begitu juga dengan nada yang sama, rohim mengatakan, "memberi dana tapi hanya ketika pemilu, partai seharusnya melakukan silaturahmi ke-kyai harus continue tidak sebatas pada pemilu. Kalau ini dilakukan hanya untuk menguntungkan partai itu dalam masa mendatang."

Dalam satu kesempatan penulis mencoba ikut salah satu tokoh politik pergi ke pesantren untuk menemui sang kyai yang ada di Kota Batu. Kebetulan pada saat itu ada acara pengajian yang dihadiri oleh banyak jamaah. Dari hasil pantauan penulis, jumlah jamaah yang datang ada ratusan orang. Setelah sekian lama, acara pengajian itu selesai dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Giliran pulang, kyai itu menunggu di pintu keluar, dan para jamaah itu pamitan pada kyai satu persatu sambil menciumi tangan sang kyai bolak balik. Dari fenomena itu, penulis bisa menyimpulkan bahwa para jamaah tersebut mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi pada kyai itu. Dari hasil pemilu 2004, menunjukkan bahwa daerah itu sangat fanatik dengan partai Islam khususnya PKB.

3. Budaya

Kepercayaan dalam konsep sosiologi dimasukkan ke dalam kebudayaan. Hal ini didasarkan pada asal mula kata kebudayaan yang dalam bahasa Sanskerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata "*buddhi*" yang berarti akal atau budi. Dalam bahasa Inggris budaya ini sama dengan *culture* yang diambil dari bahasa latin yang disebut "*colore*", diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengelola dan

merubah alam. Soerjono Soekanto (1982), mengutip pendapatnya seorang antropologi E.B. Tylor, mendefinisikan kebudayaan sebagai “kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.” Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup kesemua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Sementara Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1964), mendefinisikan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (*material culture*) yang diperlukan manusia. Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan dalam arti luas. Di dalamnya termasuk agama, ideologi, kebatinan, kesenian dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi dari jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat.

Kebudayaan dimiliki oleh setiap masyarakat, perbedaannya hanya terletak pada kesempurnaan dari kebudayaan itu sendiri di dalam memenuhi segala keperluan masyarakatnya. Kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi tinggi biasanya dinamakan “peradaban “ (*civilization*). Dalam sebuah masyarakat yang besar seperti Indonesia, kebudayaan ini mempunyai corak dan ragamnya sendiri dalam beberapa bidang tertentu karena perbedaan daerah, suku bangsa, agama, latar belakang pendidikan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan dalam bagian kebudayaan ini, dinamakan kebudayaan khusus (*sub-culture*).

Lebih jauh, kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana harus bertindak dan berlaku di dalam pergaulan hidup. Norma-norma, atau kaidah-kaidah pada hakikatnya merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana manusia harus bertindak. Kaidah-kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat, lazimnya dinamakan adat atau adat istiadat (*custom*). Adat istiadat itu berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Adat istiadat mempunyai akibat hukum, bernama hukum adat, sehingga apabila ada anggota masyarakat yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Oleh karena itu, cara-cara bertindak atau berkelakuan dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut.

Ada dua hal yang perlu diketahui, *pertama* adalah berkaitan dengan pola perilaku, dan *kedua* adalah kebiasaan. Pola-pola perilaku adalah cara bertindak yang dilakukan bersama-sama oleh semua anggota suatu masyarakat yang mempunyai norma-norma dan kebudayaan yang sama pula. Sementara kebiasaan merupakan cara bertindak seseorang anggota masyarakat yang kemudian diakui dan mungkin diikuti oleh orang-orang lain. Pola-pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan dan dilaksanakan pada khususnya apabila seseorang berhubungan dengan orang-orang lain, yang dinamakan *social organization*. Kebiasaan tidak perlu dilakukan oleh seseorang di dalam hubungannya dengan orang lain.

Berkaitan dengan pilihan politik seseorang dalam masyarakat, tampaknya pilihan politik itu dalam Masyarakat Malang Raya sudah menjadi bagian dari perilaku masyarakat. Artinya, partai politik tertentu akan dipilih secara bersama-sama oleh semua anggota masyarakat yang mempunyai norma dan kebudayaan yang sama. Oleh karena itu dalam Kalangan Santri Tradisional, yang mempunyai tradisi keagamaan sendiri, setiap anggotanya akan memilih partai yang sama.

Anggota masyarakat yang suka tahlilan, yasinan dan kegiatan keagamaan lain banyak yang memilih PKB. Akan tetapi kalau PDI-P dan Golkar berupaya untuk meraih simpati dengan cara memberi bantuan sumbangan bisa saja mereka memilih Golkar atau PDI, kecuali PAN para pemilih PKB agak sulit karena PAN oleh masyarakat yang umumnya Nahdilyin menganggap PAN identik dengan Muhammadiyah yang mempunyai tradisi atau norma-norma yang berbeda.

Norma-norma yang berkembang dalam satu kelompok masyarakat, juga difungsikan sebagai filter terhadap norma-norma lain yang dianggap berbeda atau bertentangan. Dalam hal ini kelompok Nahdilyin yang mempunyai norma-norma berbeda akan menolak pengaruh yang datang dari kelompok masyarakat Muhammadiyah. Makanya tidaklah mengherankan apabila warga Nahdilyin di tingkat *grassroot* menganggap Muhammadiyah sebagai agama baru, atau Islam murni yang secara praktik keagamaan banyak yang tidak bisa diterima oleh warga NU di tingkat *grassroot*. Warga NU sering melakukan tahlilan, kajatan dan berbagai ritual lain yang umumnya melibatkan tokoh agama lokal yaitu Kyai. Sementara orang Muhammadiyah tidak mengenal tahlilan, Yasinan, dan berbagai kajatan lainnya, padahal dalam konteks masyarakat NU kegiatan-kegiatan itu tidak melulu urusan keagamaan tetapi juga sudah

menjadi bagian dari kehidupan sosial, dimana kyai sebagai pemimpinnya. Dan umumnya para kyai yang menjadi tokoh agama di tingkat *grassroot* adalah mereka yang mempunyai kedekatan dengan tokoh-tokoh PKB atau sekaligus mereka juga menjadi pengurus PKB.

Salah seorang warga yang penulis wawancarai menuturkan bahwa PAN sulit untuk mendapat simpati dari anggota masyarakat. Hal ini dikarenakan PAN dianggap sebagai partainya Muhammadiyah yang tidak ada tahlilan seperti di NU. Kalau partai lain menurutnya masih bisa seperti PDI atau Golkar, karena menurut mereka orang PDI dan orang Golkar masih suka ikut kegiatan sosial keagamaan.

D. Makna Ekonomi

Belum berjalannya pendidikan politik yang benar dan efektif yang dilakukan oleh partai saat ini berimplikasi pada rendahnya pemahaman masyarakat akan peran dan fungsi partai politik. Hal yang mereka pahami dari partai politik hanya sebatas kegiatan pemilu dan kampanye yang oleh mereka dianggap sebagai momen mendapatkan hiburan atau sekedar pelepas dari keterkungkungan masalah sosial dan ekonomi yang mereka rasakan.

Ketika menjelang pemilu, partai politik gencar melakukan pendekatan pada masyarakat untuk mensosialisasikan dan mengingatkan mereka agar memilih partai yang masing-masing. Berbagai cara yang mereka lakukan, seperti pembagian kaos, mengajak untuk ikut kampanye dengan memberikan uang bensin, mengadakan hiburan massal, termasuk berjanji atau membantu langsung pembangunan lingkungan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya sarana dan prasarana sosial seperti tempat ibadah, saluran air, gorong-gorong, jalan dan lain-lain.

Dalam konteks ini masyarakat dibuat objek oleh partai politik, dengan keyakinan bahwa sebagian besar masyarakat mempunyai pengetahuan relatif rendah, ketakberdayaan secara sosial dan ekonomi menjadi celah masuk bagi partai politik untuk mendulang suara. Partai politik dengan cerdas memasuki ruang-ruang kosong rasionalitas pemilih dari sisi sosial dan ekonomi agar sejalan dengan warna partai politik yang mereka usung. Fenomena ini kadang dinilai menjauhkan masyarakat dari pemikiran rasional yang bertanggung jawab. Hal ini partai tidak bisa secara penuh, karena kompetisi dalam merebutkan suara di antara mereka sangat ketat, sehingga berbagai cara dilakukan oleh partai politik

walaupun harus membodohi masyarakat. Dengan demikian menjadi gayung bersambut, antara kepentingan partai untuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilu dan kondisi keterbatasan secara sosial dan ekonomi masyarakat yang ada.

Pendekatan Pilihan Rasional melihat adanya analogi analogi antara pasar (ekonomi) dengan perilaku pemilih (politik). Apabila secara ekonomi anggota masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dengan perilaku politik pun anggota masyarakat akan dapat bertindak secara rasional pula, yakni memberikan suara ke partai yang dianggap mendatangkan keuntungan atau kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian atau kemudharatan yang sedikit mungkin. Secara demikian, perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa alternatif yang paling menguntungkan (*maximum gained*) atau yang mendatangkan kerugian yang sedikit, tetapi juga dalam arti memilih alternatif yang menimbulkan risiko yang paling kecil (*least risk*), yang penting mendahulukan selamat. Dengan begitu, diasumsikan bahwa para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan maupun calon (kandidat) yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap kandidat ini bisa didasarkan pada jabatan, informasi, pribadi yang populer karena prestasi masing-masing di bidang seni, olah raga, film, organisasi, politik dan semacamnya.

Him Melweit dkk., menyebutnya sebagai "*Consumer Model*" of *Party Choice*" yaitu bahwa perilaku pemilih merupakan pengambilan keputusan yang bersifat instant, bergantung pada situasi politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan-keputusan lain. Ia mencatat bahwa "*Some Express hope that the voters, loosened from traditional partisan attachment, will be able to exercise more rational choice base on a thoughtful consideration of the issues.*"⁵

Dalam model ini pemilih diasumsikan sebagai suatu yang aktif dari pada pasif, responsif dari pada bergantung. Sebagai suatu yang berlawanan dengan model rasional lain, dan perhatian utama dari consumer model ini diletakan pada preferensi kebijakan pemilih. Para pemilih mencari partai yang dapat memberikan sumbangan terbaik

⁵ Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker, op.cit., hlm.202.

pada preferensi mereka, sebagaimana layaknya konsumen yang akan mencari produk terbaik untuk kebutuhannya. Di samping itu juga masyarakat akan memberikan penilaian pada kemampuan partai untuk mengimplementasikan proposal mereka sebelum mereka memutuskan untuk memilih, sebagaimana halnya konsumen mempertimbangkan kelayakan produk sebelum dijual. Dengan demikian, sebagaimana layaknya konsumen, mereka dapat mengembangkan *brand loyalties*. Dalam model yang dikembangkan Himmelwit ini, pilihan yang lalu hanya punya andil sedikit dalam pilihan terbaru. Akan tetapi masyarakat memperlakukan pemilu sebagaimana layaknya pasar, mereka berhati-hati dengan ide-ide segar dari partai baru sebagaimana halnya terhadap partai lama yang menjadi pilihannya.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada pemilih sudah tidak condong kesalah satu partai manapun, yang penting adalah mana partai yang bisa menguntungkan. Partai apapun yang masuk akan diterima, asalkan bisa memberi kontribusi pada lingkungan dan masyarakat di sini. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang responden yang sempat penulis wawancarai menyampaikan bahwa mereka akan mencoblos partai apapun asalkan ada konpensasinya.

Masyarakat sudah punya anggapan bahwa setelah pemilu dilakukan tidak akan ada perubahan apapun pada mereka. Kami memilih hanya untuk kepentingan mereka yang mencalonkan, kalau memilih berarti akan menaikkan derajatnya orang sehingga orang itu perlu memperhatikan. Oleh karena itu biasanya kami minta imbalan kepada mereka yang mencalonkan kalau mereka mau mendapat dukungan dari warga. Warga disini sempat mendapat bantuan untuk perbaikan lingkungan berupa gorong-gorong untuk saluran air, itu kami dapat dari PDI P karena di sini banyak kader PDI yang bisa mengkomunikasikan dengan para pengurus partai.

1. Pemberian Uang Tunai

Salah satu simpatisan PDIP, Sony, menyampaikan pada menulis bahwa umumnya mereka yang sudah didukung untuk menjadi anggota dewan, mereka lupa janji-janjinya sebelum jadi. Oleh karena itu menurut dia, sekarang masyarakat sudah pintar, mereka tidak akan memilih kalau tidak ada uangnya. Lanjutnya, hal yang penting bahwa pembagian itu harus *roto*, tidak boleh ada yang tidak kebagian.

"Coba aja mas, saya ini dari dulu ya gini-gini aja. Ada pemilu ataupun tidak ada pemilu nasib saya tetap tidak berubah. Kalau gitu...ya...mendingan apa yang bisa didapatkan sekarang, kedepan kan kita tidak tahu...paling... mereka yang kita dukung lupa."

Di sisi lain, sebagian pemilih yang kelihatan Santri dan pendukung dari partai-partai Islam, menyampaikan kepada penulis "bahwa partai itu identik dengan figur seseorang. Partai itu baik apabila sering memberi bantuan." Pandangan ini sejalan dengan apa yang sering disosialisasikan dalam setiap pengajian ataupun khotbah jum'at di lingkungan komunitas Islam Tradisional bahwa seorang Muslim harus sering bersodakoh. Dalam Islam juga diajarkan bahwa kita sebagai pemeluk Islam harus memperhatikan masyarakat miskin. Karena setelah menjalankan ibadah, sholat mendoakan fakir miskin ajaran Islam itu sangat berpihak pada masyarakat bawah seperti kelompok *duafa*, *mustadafin*. Karena seringnya disosialisasikan kepada masyarakat, nilai-nilai ini juga menjadi bagian dari barometer masyarakat untuk menilai baik buruknya seorang calon atau partai politik.

Karena pandangan mereka yang sudah jelek pada partai politik, sebagian pemilih cenderung menjadi apatis dan sinis pada partai. Sikap sinis dan apatis ini, secara tidak sadar telah menumbuhkan perilaku parktis-pragmatis, karena banyaknya calon dan partai yang meminta jasa dukungan pada pemilih. Sebagaimana diungkapkan salah seorang warga kepada penulis, berikut:

"Saya tidak peduli dengan partai, karena partai sendiri tidak akan memperhatikan saya. Partai hanya akan mencari suara saja agar calon yang berasal dari partai tersebut bisa jadi. Oleh karena itu saya tidak mau milih kalau tidak ada imbalannya. Umumnya setelah pemilu, mereka yang terpilih lupa dengan warga yang memilihnya, makanya sebelumnya kita harus mendapat manfaat dulu. Soal nanti lain lagi. Pokoknya untung dulu.. Pokok..e.. ono duwite..milih..."

Kenyataannya, justru banyak wakil-wakil dari partai Islam yang melakukan korupsi, memperkaya diri sendiri dan melupakan masyarakat yang memilihnya. Dengan demikian walaupun *money politic* kenyataannya berkembang dalam masyarakat, dimana pemberian itu tidak hanya uang tetapi sembako, biaya sekolah. Akan tetapi sekarang ini terjadi perubahan, walaupun diberi uang belum tentu memilih calon atau partai yang memberi uang.

Masyarakat miskin memang tidak menganggap politik uang sebagai hal buruk. Mereka memang menantikan jatah uang itu, bahkan ada yang tidak mau memilih kalau tidak mendapatkan uang. Memang demokrasinya menjadi demokrasi warung, ada yang membayar, maka akan diberi suara. Sebagian elite juga menganggap pemberian uang dalam politik juga sebagai hal yang biasa, bahkan seperti keharusan yang wajar dilakukan. Memang ini bertentangan dengan ide demokrasi di Barat. (Jawa Pos, 2008)

2. Bantuan Pembangunan

Dalam rangka membina dan menjaga konstituennya agar tidak lari ke partai lain, para kader partai selalu berusaha melakukan pendekatan-pendekatan yang *continue* dengan konstituen mereka. Termasuk memberikan sumbangan untuk kepentingan warga dan lingkungan dimana basis partai itu berada. Oleh karena itu banyak partai yang berusaha membantu kebutuhan warga, baik bantuan untuk pembangunan maupun untuk kegiatan. Setiap bantuan ke warga selalu diberikan lewat kader yang sudah punya hubungan dengan anggota dewan dari partai tersebut.

Walaupun demikian, menurut hasil temuan lapangan, tidak semua partai yang suka memberikan bantuan kepada warga maupun bantuan untuk lingkungan. Seperti warga yang memilih PKB ataupun PPP umumnya mereka tidak banyak perhatian dari partainya. Sebagai contoh kasus, daerah Caru, Pendem, Kota Batu, menurut informasi yang penulis dapatkan dari masyarakat, warga di sekitar itu umumnya pendukung kuat PKB. Ketika penulis tanyakan apa ada perhatian dari partai untuk kepentingan lingkungan atau pembangunan lain, umumnya mereka menjawab tidak ada. Lantas saya tanyakan bagaimana untuk kepentingan pembangunan pesantren, atau Mesjid? Mereka hanya menjawab, kurang paham, tapi mereka menyatakan sering melihat banyak mobil yang mengunjungi ke pondok. Kenyataan tersebut juga terjadi di tempat lain, tepatnya di Daerah Lowokwaru, Kota Malang, ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang kebetulan menjadi Ketua RT di sana, Supriyanto, menyampaikan bahwa yang getol memberi bantuan untuk kepentingan lingkungan di sini ada PDIP, Golkar, Partai Demokrat, sementara PKB maupun PPP jarang sekali.

Jarang sekali menerima bantuan dari para wakil mereka yang duduk di dewan tidak seperti warga lain yang memilih partai PDI-P, Golkar, PAN, Demokrat maupun partai lain. Umumnya partai dari PKB-PPP lebih memperhatikan tokoh agamanya dari pada warganya. Bantuan yang diberikan biasanya hanya diperuntukan untuk kepentingan pembangunan pesantren, sekolah, Mesjid, maupun organisasi yang sifatnya mendukung bagi pengembangan keagamaan. Bantuan yang diberikan Golkar, PDI-P, Demokrat, maupun PAN umumnya langsung bisa dirasakan oleh warga. Sebagai contoh perwakilan PAN dari dapil disini H. Fujiyanto melakukan bantuan berupa Votisasi (tempat sampah) kesemua warga yang ada di pinggir jalan.

Selain memberi bantuan langsung bagi kepentingan warga, banyak para wakil di wilayah Lowokwaru ini memperjuangkan kepentingan warganya dengan cara menyalurkannya lewat APBD. Bahkan sepertinya para anggota Dewan bersaing agar mereka mendapatkan tempat di hati masyarakat dengan cara memperjuangkan berbagai program pembangunan yang ada di masyarakat agar bisa mendapat simpati dari warga yang diperjuangkan.

Kenyataan tersebut di atas, secara tidak sadar merubah pandangan subyektif dari warga terhadap partai. Partai yang sering memberi bantuan dianggap partai yang baik, sementara partai yang jarang memeberi bantuan dianggap partai yang jelek. Partai selalu dimaknai dengan sumber bantuan untuk pembangunan, dan hal ini sangat terasa dalam kehidupan politik sekarang, khususnya yang terjadi di akar rumput. Menurut, warga yang sempat penulis wawancarai, agar para pemilih tetap memilih partai tersebut, maka partai dan pemilih itu harus ada ikatan bathin. Ikatan batin itu diwujudkan dalam bentuk bantuan kongkrit kepada masyarakat seperti pembangunan Mushola, gorong-gorong, saluran air agar masyarakat tahu dan ingat bahwa partai ini telah menyumbang ini dan itu pada lingkungan.

3. Pangung Hiburan Rakyat

Bagi kelompok Abangan, yang umumnya berasal dari kalangan masyarakat kecil (*wong cilik*), kegiatan hiburan rakyat menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Bahkan hampir di setiap tempat di Malang Raya, pada saat menjelang pemilu, berdasar hasil pengamatan penulis sering diadakan hiburan rakyat. Panggung hiburan rakyat yang diadakan, selalu dijubeli oleh pengunjung baik itu laki maupun perempuan,

namun umumnya kalangan kaum muda. Panggung hiburan itu bukan hanya untuk refreasing atau melepas kejenuhan bekerja, namun bagi muda-mudi sering dijadikan ajang untuk mencari dan mendapatkan pasangan.

Memahami kondisi dari konstituennya yang haus akan hiburan, maka PDIP sebagai partai yang banyak pendukung dan simpatisannya di Malang Raya, acara hiburan rakyat sepertinya menjadi program pokok dalam setiap kampanye yang harus dilaksanakan oleh PDIP. Menurut penuturan salah seorang warga yang sempat penulis wawancarai, mengungkapkan, “..di sini hampir satu kelurahan banyak yang mencoblos PDI-P karena partai ini royal dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan mereka yang mencoblos PDI-P umumnya berasal dari kalangan *wong cilik*. Setiap ada kegiatan di sini PDI-P, terutama yang terkait dengan hiburan warga, selalu berusaha dilakukan dengan meriah untuk menyenangkan warga.”

Dalam mendapatkan simpati dari warganya, PDI-P cenderung melakukan kegiatan hiburan yang sifatnya hura-hura seperti mengadakan kegiatan dangdutan. Tujuan utamanya untuk menyenangkan warga yang umumnya berasal dari kelompok *marginal*. Maka tidaklah heran apabila pada saat acara-acara rakyat tersebut banyak penonton yang "tidak sadar", karena memang sudah jadi kebiasaan khususnya bagi komunitas pendukung PDI-P. Bahkan hasil penuturan salah seorang warga menyebutkan bahwa “untuk menyenangkan pendukungnya, di belakang panggung itu sudah disediakan jamuan. Kalau bapak tidak percaya... nanti kalau ada kegiatan dangdutan akan saya undang biar tahu sendiri..”

Ketika saya mau membandingkannya dengan partai politik lain, saya tanya kepada salah warga, bagaimana dengan kegiatan hiburan yang dilakukan partai lain, seperti PKB, maupun PPP? Pada umumnya mereka menyatakan bahwa PKB jarang mengadakan panggung hiburan rakyat, yang sering ada adalah pengajian yang mendatangkan tokoh atau penceramah dari luar daerah yang sudah terkenal. Namun ada, satu dua orang warga yang menyampaikan bahwa PKB juga pernah mengadakan acara dangdutan, khususnya pada ada kampanye terbuka. Mereka menyebutkan bahwa dia juga pernah datang ke acara kampanye itu dengan menyewa mobil, namun kedatangan saya ke sana bukan untuk melihat dangdutan namun untuk mendengarkan ceramah, karena di sana hanya ada dangdutan, kami beserta rombongan pulang lagi. Lantas saya tanyakan apa dapat

bantuan dana untuk bensin, mereka menyampaikan bahwa untuk datang ke acara kampanye PKB tidak ada dana dari partai, kami semua biayai sendiri. Lantas dia menyebutkan dengan nada rendah, "yang saya tahu Golkar dan PDI sangat loyal dengan kegiatan dan dana, beda dengan PKB dimana kalau ada kegiatan kampanye jarang ada bantuan dana, ini juga atas himbauan kyai sehingga kami mau pergi secara sukarela mengikuti kampanye walau pake dana sendiri."

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Bab VII

PARTAI DAN PEMILIH DI ERA PEMILU MULTI PARTAI

Setelah pada bab VI membahas mengenai makna partai bagi pemilih, dalam bab VII ini penulis akan menguraikan bagaimana hubungan partai dan pemilih di tengah pemaknaan partai politik yang ada. Sub pokok bahasan pertama terkait dengan kinerja partai politik khususnya yang terkait dengan peran dan fungsi yang dijalankan. Apakah peran dan fungsi yang dijalankan oleh partai sesuai dengan harapan masyarakat? Selanjutnya, pokok bahasan kedua, dibahas mengenai strategi dari partai politik dalam meraih simpati massa, apakah strategi yang dilakukan sejalan dengan pemaknaan partai oleh pemilih. Pada akhirnya, sub pokok bahasan ketiga, dibahas mengenai dampak dari kinerja partai politik serta strategi partai terhadap perilaku voting.

A. Kinerja Partai Politik

Bekerjanya partai politik dalam sistem politik Indonesia tampaknya belum banyak beranjak dari fungsi praktis jangka pendek sebagai alat meraih kekuasaan. Kondisi ini sebagaimana dikemukakan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung terhadap Partai Golkar era kepemimpinan Jusuf Kalla pada saat Ujian Terbuka Program Doktor UGM, awal September 2007. Menurut Akbar Tandjung, "terpilihnya Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai ketua umum pada tahun 2004 menunjukkan, Partai Golkar masih dipenuhi orang yang sangat berorientasi pada kekuasaan". Fenomena yang dikemukakan Akbar Tandjung bisa mewakili watak parpol Indonesia secara umum.

Lebih jauh, partai menjadi alat negosiasi dengan penguasa untuk mencapai kompensasi politik ketimbang benar-benar memperjuangkan aspirasi konstituen. Sementara di sisi lain, fungsi mendasar sebuah parpol, sebagai sarana artikulasi, agregasi, lebih-lebih sarana pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat sepertinya kian jauh dari harapan. Ketidakmampuan parpol dalam mengorganisasikan diri, meredam konflik internal, dan menumbuhkan militansi positif, pada saat yang sama

agaknya telah menumpulkan kemampuan mereka dalam menerjemahkan kehendak politik publik dan memberi pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Wadah organisasi yang demokratis, sehat, dan bersih belum banyak tercermin pada partai politik yang mapan maupun beberapa partai yang baru. Ketidakmampuan menyerap aspirasi publik itu rupanya terus berlanjut saat parpol menjalankan fungsi agregasi politik mereka sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif.

Sejumlah penilaian buruk yang datang dari masyarakat masih ditambah dengan konflik internal, perekrutan keanggotaan dan kaderisasi yang tidak lancar serta kebergantungan pada sosok elit partai. Dari hasil temuan di lapangan, sejumlah partai pada pemilu 2004 tidak lepas penilaian negatif masyarakat. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera, yang dikenal dengan slogan “jujur dan peduli” pun, juga dinilai ada sisi negatif dari masyarakat. Sebagaimana pula penilaian kepada PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PAN, PPP, dan partai lainnya, masyarakat menilai parpol saat ini kian menurun komitmennya pada masyarakat.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kinerja partai politik, penulis akan mengutarakan sedikit mengenai definisi serta peran dan fungsi dari partai politik. Hal ini perlu dikemukakan karena kinerja partai politik secara sederhana dapat dilihat dari bagaimana partai itu menjalankan peran dan fungsinya. Memahami peran dan fungsi partai adalah untuk memberikan landasan dalam melakukan *critical analysis* pada kinerja partai politik yang selama ini berjalan.

Secara konseptual partai politik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan setiap jaman, sehingga tidak ada definisi tunggal yang bisa diterima secara universal di seluruh dunia tentang konsep partai politik. Menurut Austin Ranney (1963), walaupun tidak ada satu batasan konseptual tentang partai politik dalam setiap definisi, tetapi secara umum dapat dipahami melalui karakteristik-karakteristik Fundamental. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh organisasi bernama partai politik, antara lain:

1. Berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang beridentitas.
2. Terdiri dari beberapa orang yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama.
3. Masyarakat mengakui legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka.

4. Beberapa tujuannya di antaranya, mengembangkan aktivitas-aktivitas partai, bekerja melalui mekanisme "pemerintahan yang mencerminkan pilihan rakyat". Aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik.

Kelima kriteria Fundamental partai politik dari Ranney, bukanlah satu-satunya indikator untuk menilai apakah suatu organisasi dapat dikatakan sebagai partai politik. Namun secara sederhana partai politik dari kriteria tersebut bisa didefinisikan bahwa yang dinamakan partai politik adalah "kelompok warga negara yang terorganisir atau tergabung dalam satu organisasi yang memiliki identitas ideologi tertentu, yang dalam setiap aktivitasnya selalu berusaha untuk memperoleh jabatan publik." Atau dapat pula didefinisikan sebagai "sekumpulan orang yang secara terorganisir membentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah untuk menjalankan program-programnya." Sementara dalam pasal 1 UU no. 31/2002 tentang Partai Politik mendefinisikan partai politik sebagai: "Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum".

Lebih jauh, parpol mempunyai asas, tujuan, ideologi dan misi tertentu yang di terjemahkan kedalam program-programnya, parpol juga mempunyai pengurus dan massa. Berbagai asas, tujuan, dan ideologi yang diusung partai merupakan cermin dari basis massa yang menjadi dasar pembentuk partai. Basis pembentuk partai politik bisa berupa kelompok sosial (buruh, agama, dsb.), ideologi (Nasionalisme, Sosialisme dsb.), kelas sosial (pengusaha dsb.), sentimen primordial (kelompok etnis, dsb.)¹ Oleh karena itu partai tidak dapat lepas dari latar sosial, budaya masyarakat di tempat dimana parpol itu di lahirkan termasuk di Indonesia, khususnya di Malang Raya.

Sementara fungsi-fungsi yang menentukan identitas dan kredibilitas partai politik adalah peran partai politik dalam satu sistem politik, serta fungsi-fungsi yang dijalankannya. Fungsi partai politik berkenaan dengan apa yang dilakukan partai politik, dan dampaknya terhadap sistem politik. Setiap aktifitas partai politik, terutama partai mayoritas

¹ Menurut Riswanda Imawan, kenyataan tidak ada partai yang hanya memiliki satu basis, sebab pada dasarnya partai adalah "*Coalitions of people with different objektivis in mind*".

akan memiliki dampak terhadap struktur dan fungsi pemerintahan serta proses politik didalamnya. Dan pada akhirnya mempunyai dampak pada perkembangan dan kesejahteraan raykat.

Dalam pandangan Michael G. Roskin setidaknya secara umum partai politik menjalankan beberapa fungsi:

1. Sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah yang berfungsi sebagai alat dalam hubungan rakyat dan pemerintah yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan (aspirasi).
2. Agregasi kepentingan adalah suatu aktivitas yang di dalamnya tuntutan-tuntutan individu dan kelompok dikombinasikan menjadi proposal (usulan) kebijakan publik yang signifikan.
3. Integrasi ke dalam sistem politik fungsi ini dijalankan oleh partai politik, dengan jalan mengintegrasikan atau memasukkan elemen-elemen masyarakat dengan berbagai identitas sosial ke dalam sistem politik.
4. Sosialisasi politik yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.
5. Mobilisasi pemilih, fungsi ini berkenaan dengan aktifitas partai politik dalam pemilu dan fungsi mobilisasi bukan berarti negatif atau memilih dengan paksa, tapi dalam konteks praktik kampanye untuk kandidat-kandidat partai politik.
6. Mengorganisasikan pemerintah suatu fungsi yang berusaha agar tugas-tugas pemerintah dan kekuasaan, digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita partai politik.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa definisi partai politik itu tidak seragam, begitupun definisi partai politik yang ada di Indonesia. Dalam Undang-undang partai politik, yaitu UU No 2 Tahun 1999 (Undang-undang yang lahir setelah reformasi 1998), definisi partai politik pada Bab I pasal 1 adalah: Setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Sementara dalam UU No. 2 Tahun 2008 mendefinisikan partai politik adalah “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan

dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Dan dalam UU No. 2 Tahun 1999, Bab IV, pasal 7 dikatakan bahwa fungsi partai politik,

1. Melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Menyerap, meyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/perwakilan;
3. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

1. Pendidikan Politik

Salah satu peran dari partai politik yang banyak dilupakan adalah pendidikan politik. Kebanyakan partai-partai yang ada lebih menekankan pada solidaritas serta konsistensi dari pemilih terhadap partai mereka masing-masing, tanpa menyentuh sisi pencerahan bagi konstituen. Hal ini sebagai wujud dari upaya partai politik dalam mengamankan basis konstituennya agar tidak lari ke partai lain. Ketakutan dari partai politik untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat disebabkan oleh karena partai yang dibangun adalah partai yang tumbuh dalam pondasi sektarian. Partai politik di negara kita cenderung memupuk dan memperkuat identitas konstituen mereka masing-masing baik mereka yang berhaluan Nasionalis maupun Islam.

Partai yang dibangun dalam pondasi sektarian sangat sulit melakukan komunikasi politik pada konstituennya dengan bersandar pada *flatfom* partai yang lebih rasional dan kongkrit sebagai wujud dari tanggung jawab partai terhadap masyarakat. Komunikasi yang dibangun oleh partai politik, dari hasil temuan di lapangan menunjukkan sebagai berikut: *Pertama*, para tokoh partai politik yang bernaung dalam partai berhaluan Nasionalis jarang berkomunikasi langsung dengan konstituennya dalam bahasa verbal. Mereka lebih banyak menyatu dan melebur dengan konstituennya sambil mendukung pola perilaku dan budaya yang merupakan ciri khas dari kelompok Abangan yang selalu identik dengan pesta rakyat. Pesta rakyat ini biasanya diisi dengan berbagai kegiatan

dan atraksi yang merupakan ciri khas kelompok Nasionalis (Abangan) yang umumnya berasal dari kalangan masyarakat kecil (*wong cilik*). Kedua, bagi partai Islam atau partai yang punya kedekatan dengan pemilih Islam, logika dan bahasa agama lebih banyak ditonjolkan oleh partai politik. Begitu pun media yang dipergunakan tidak jarang menggunakan simbol-simbol agama seperti Mesjid, Langgar maupun kegiatan ritual keagamaan dari mulai tahlilan, pengajian, maupun khajatan dan lain-lain. Komunikasi yang dibangun pun hanya komunikasi satu arah, karena tujuan komunikasi yang mereka lakukan bukan untuk pendidikan politik tapi untuk memperjelas identitas politik serta memperkokoh kekuasaan elit politik yang umumnya merangkap sebagai tokoh agama.

Partai Politik yang seharusnya melakukan apa yang idealnya dikerjakan sebuah partai yang sehat, yaitu pendidikan politik bagi para kadernya untuk menyiapkan dan mencetak calon pemimpin partai serta bermanfaat bagi masyarakat. Apabila hal ini terus terjadi, politisi yang dihasilkan parpol adalah mereka yang tidak memberikan empati kepada masyarakat. Sebenarnya keberhasilan partai politik terletak pada konsistensi dan komitmen Parpol terhadap mekanisme pendidikan politik. Melalui pendidikan politik yang sehat diharapkan terbentuk loyalitas serta militansi kader calon figur pemimpin eksekutif, legislatif dan diimbangi oleh loyalitas kepada visi, misi dan program partai sesuai dengan aturan dan mekanisme yang demokratis. Parpol harus sesuai mekanisme kaderisasi internal partai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat.

Salah satu wujud dari pendidikan politik adalah memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk mau berkiperah dalam politik. Menurut Ganjar (2008), terdapat perintah UU terhadap Parpol agar melakukan pendidikan politik melalui penyerapan mediasi dan perjuangan aspirasi. Sementara, untuk pendidikan politik saat ini tingginya tuntutan perempuan terhadap peningkatan partisipasi perempuan sebesar 30 persen pada tingkat parlemen. Walaupun masih ada resistensi partai karena tidak cukup mudah melakukan rekrutmen kader perempuan.

Sukar dinafikan rendahnya kesadaran partai politik melakukan pendidikan politik ini telah mempengaruhi kualitas demokrasi yang dihasilkan. Banyaknya konflik dalam Pilkada bahkan disertai dengan tindakan anarkisme adalah bukti masih rendahnya pendidikan politik

masyarakat kita. Bahkan rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat ini sengaja dibiarkan, agar elite partai mudah memobilisasi dukungan untuk kepentingannya.

2. Agregasi Kepentingan

Selama ini agregasi politik banyak diwakili langsung oleh para anggota legislatif, mereka bertindak sebagai “wali” bukan “delegasi”. Praktik demikian akan baik apabila para anggota dewan benar-benar tahu dan merasakan apa yang diinginkan masyarakat. Namun pada kenyataannya banyak anggota dewan yang mengatasnamakan rakyat, akan tetapi kebijakannya justru lebih condong untuk kepentingannya sendiri atau lebih jauh untuk kepentingan partainya. Sebagai contoh. PDI-P yang banyak disebut sebagai partai Nasionalis, dalam praktiknya tidak diterjemahkan dalam wujud kongkrit seperti Nasionalisme ekonomi, politik, dan budaya. Demikian pula partai Islam dan partai modern seperti Partai Golkar.

Sebagai organisasi politik, partai merepresentasikan berbagai aspirasi, kepentingan, dan ideologi yang ada dalam masyarakat. Melalui partai, semua aspirasi, kepentingan, dan ideologi diagregasikan menjadi sebuah kebijakan publik. Ketidakjelasan sikap parpol terhadap pemerintah barangkali merefleksikan ketidakkonsistenan partai menjaga haluan perjuangannya. Semangat perjuangan yang biasanya lekat dengan ideologi yang dibawa bisa saja berubah, bergantung kepentingan yang ditawarkan. Sebagian besar responden yang diwawancarai menganggap parpol telah berpaling dari ideologi dan konstituennya.

Tingkat kekritisn parpol dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah melemah, terbukti dari lolosnya proyek pembangunan *Malang Town Square Garden* (Matos) yang menjadi kontroversi dalam masyarakat Kota Malang karena menempati lahan hijau (area resapan air hujan). Hal ini menunjukkan bahwa sikap partai-partai besar—terutama yang terkooptasi oleh pemerintah—yang lebih banyak mengambil posisi sebagai mitra pemerintah. Perjalanan parpol di Malang Raya yang lebih banyak diwarnai dengan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Masih sedikit—bahkan hampir tak ada—partai yang mau menempatkan dirinya sebagai agregator kepentingan masyarakat. Partai-partai politik tampaknya berdiri hanya dengan satu tujuan, yaitu “kekuasaan”. Kegairahan dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat nyaris tak tampak.

Implikasi lebih jauh dari kondisi tersebut, para kader politik baik yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif banyak yang terlibat korupsi. Dewan Perwakilan Rakyat berperilaku korup. Para anggota Dewan seperti berlomba untuk menguras keuangan negara, sementara rakyat hanya jadi penonton dan kadang berlaku sinis karena mereka berlaku mewah sementara rakyat harus hidup melarat.

3. Rekrutmen Politik

Ichlasul Amal (1988), ideologi dan kepentingan merupakan basis sosiologis yang selalu menggerakkan parpol pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Pemanfaatan partai politik (parpol) sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan sebenarnya merupakan hal wajar dalam kehidupan politik. Parpol dan kekuasaan seolah identik satu sama lain karena melalui partai politik suksesi kepemimpinan politik yang absah dilakukan. Di sisi lain, Mark N Hagopian (1978), menyebutkan bahwa parpol merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Oleh karena itu, salah satu proses politik yang penting bagi partai politik adalah rekrutmen politik. Proses ini sangat menentukan bagi kelangsungan aktivitas partai politik dan kualitas demokrasi. Proses rekrutmen yang dilakukan partai politik menjadi titik permulaan yang harus dilakukan partai politik terutama dalam proses pengkaderan anggotanya maupun promosi elite politik baru. Namun bagi sebagian besar partai politik di Indonesia, termasuk juga di Malang Raya, masalah tersebut tidaklah begitu diperhatikan. Kebanyakan partai politik hanya berorientasi bagaimana mendapat kekuasaan secara cepat dengan biaya murah sehingga mengabaikan rekrutmen politik ini. Rekrutmen politik adalah sebagai fungsi mengambil individu dalam masyarakat untuk dididik, dilatih sehingga memiliki keahlian dan peran khusus dalam sistem politik. Diharapkan dari proses rekrutmen ini individu yang dididik dan dilatih tersebut memiliki pengetahuan, nilai, harapan dan kepedulian politik yang berguna bagi konsolidasi demokrasi.

Sebenarnya rekrutmen politik ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktifitas partai politik di manapun berada. Sayangnya hasil temuan di lapangan, fungsi ini baru dapat berjalan ketika pemilu akan diadakan. Lemahnya fungsi rekrutmen politik ini sebenarnya

sudah dapat dijumpai terutama sejak verifikasi partai politik dilakukan oleh KPU. Rekrutmen politik yang baik seharusnya dimulai dengan pendidikan politik yang dilakukan secara berkesinambungan oleh partai politik. Namun banyak partai politik tidak melakukannya karena berbagai kendala. Misalnya masalah keuangan yang memang menjadi masalah besar dalam perkembangan partai politik di Indonesia. Selain itu, tidak jelasnya ideologi partai politik berdampak pula pada visi, misi dan program yang partai politik tersebut. Sukar dinafikan bahwa partai politik yang ada belum memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakatnya berpolitik. Bahkan partai politik tidak dapat melaksanakan rencana strategisnya seperti rekrutmen anggota secara berkesinambungan, pembinaan kader secara konsisten serta pengembangan kader ke tahap pembentukan elite politik. Ini semua merupakan bukti belum maksimalnya fungsi partai politik di negeri ini.

Rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat juga dapat dilihat dari kesulitan partai politik menyusun daftar calon keanggotaan legislatif yang diajukan setiap pemilu. Tidak berjalannya pendidikan politik berdampak pada kualitas wakil rakyat yang diajukan partai politik. Paling tidak dari dua pemilu sebelumnya dapat diambil pelajaran siapa yang dipilih dan bagaimana mekanisme mereka dipilih untuk duduk sebagai wakil rakyat di parlemen masih belum jelas. Kurangnya kader partai dan menguatnya politik kekerabatan berdampak pada proses penentuan calon anggota legislatif ini. Celakanya, dengan munculnya partai baru dalam setiap pemilu membawa dampak pada kualitas wakil rakyat yang akan diajukan partai politik, karena banyak calon yang diajukan tidak punya *treck record* yang jelas.

Penjaringan calon-calon yang akan diajukan dalam pemilu jauh dari demokrasi karena penjaringan dilakukan di dalam mekanisme formal internal partai. Penjaringan di internal partai ini sarat dengan intervensi kepentingan personal dan kelompok sehingga sangat bergantung pada kedekatan personal dan hubungan baik dengan pimpinan teras parpol. Banyak calon yang terdaftar dalam urutan jadi merupakan orang-orang yang punya hubungan dengan petinggi partai politik, atau merupakan orang yang didesakan dari kelompok organisasi tertentu yang dianggap basis konstituen mereka, termasuk juga adanya unsur uang dalam pencalonan. Walaupun dalam lingkungan internal masing-masing partai ada aturan main

untuk menseleksi calon dengan berbagai kriteria, namun dalam kenyataannya aturan tersebut kadang diabaikan atau dimanipulasi. Sebagai kekecualian, rekrutimen calon yang ada di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), proses pencalegan sangat ketat karena penjaringannya dimulai dari tingkat bawah dengan aturan yang ketat.

Kondisi tersebut merupakan bias dari perilaku elit partai politik yang terjadi masa Orde Baru yang sarat dengan nepotisme. Masa Orde Baru, proses rekrutmen sarat dengan restu, surat sakti, nepotisme dan intervensi pemerintah. Partai politik bukan untuk menjaring kandidat anggota legislatif yang dapat menyuarakan aspirasi rakyat, namun hanya akan dijadikan sebagai legitimator bagi kebijakan rezim. Dengan demikian tidak dibutuhkan orang-orang yang punya idealis dan kemampuan yang baik, cukup dengan hanya sikap kooperatif dengan penguasa saja. Di sisi lain, ada hal yang cukup penting untuk dijadikan argumen dari rendahnya kinerja partai politik pasca Orde Baru adalah tingginya kebergantungan partai pada tokoh partai. Sebagai contoh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ada Megawati, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada Gus Dur, Partai Amanat Nasional (PAN) ada Amin Rais, dan Partai Demokrat ada Soesilo Bambang Yudhoyono.

Berdasar hasil temuan di lapangan, kemandegan proses kaderisasi di dalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan dalam masyarakat. Kekecewaan ini diwujudkan dengan banyak kader partai yang beralih ke partai lain karena dalam partainya merasa tidak ada kejelasan dalam proses karerisasi yang dijalankan. Oleh karena itu banyak harapan yang muncul dari masyarakat, agar ada kejelasan dalam proses kaderisasi agar tidak terjadi konflik internal yang sering terjadi dalam proses pencalegan maupun dalam nominasi untuk menjadi calon kepala daerah dari partai. Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik. Selanjutnya, wajah-wajah baru akan muncul dan siap untuk menggantikan posisi generasi lama.

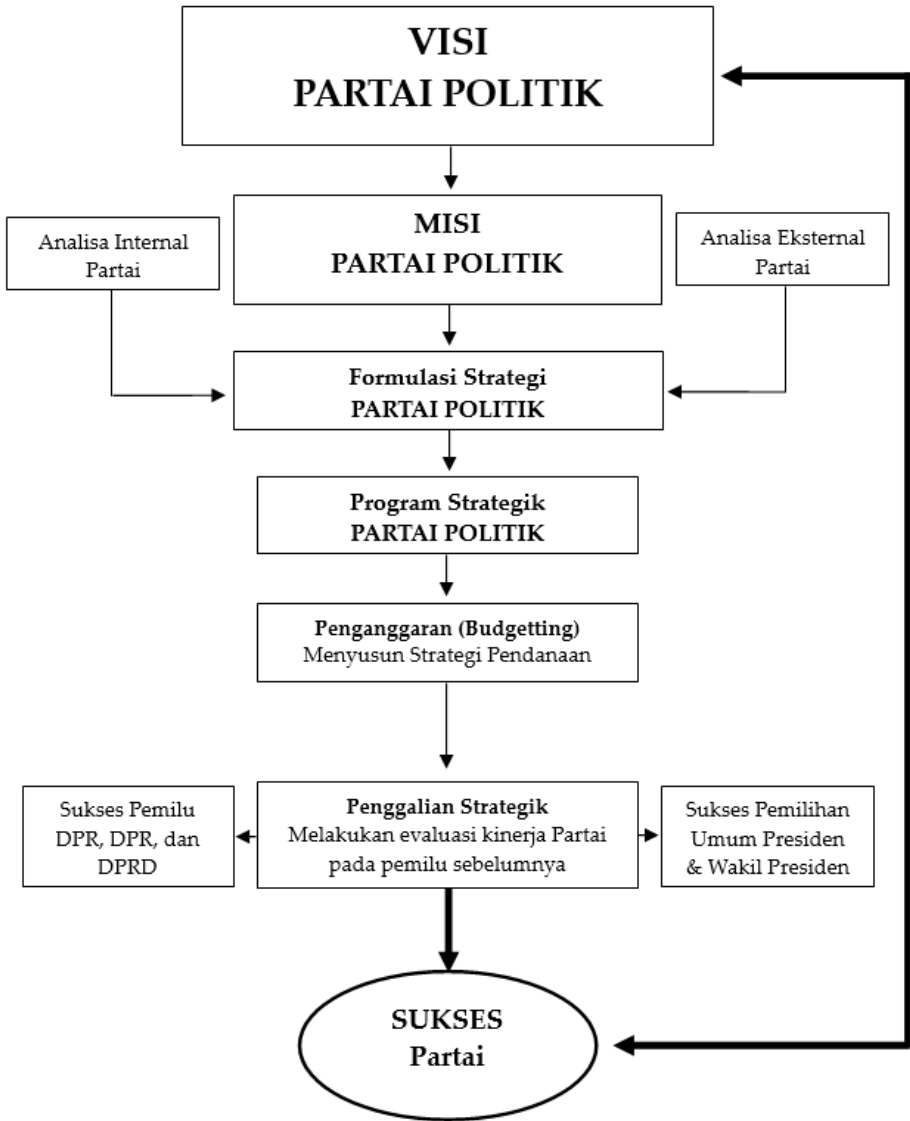
B. Strategi Partai Politik dalam Meraih Simpati Pemilih

Pada dasarnya mekanisme hubungan partai politik dengan masyarakat merupakan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme,

dimana partai politik membutuhkan suara pemilih dalam pemilu dan sebaliknya pemilih membutuhkan partai guna memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka. Maka dari itu, partai politik terpaksa harus memperhatikan keinginan para pemilih sebelum mengambil keputusan mengenai program dan kebijakan partai, sebaliknya pemilih harus dapat menentukan partai mana yang mempunyai *flatfrom* jelas dan sekaligus dapat memperjuangkannya. Dengan demikian, politisi harus mencari informasi tentang kesulitan dan masalah yang sedang dihadapi masyarakat serta kepentingan dan preferensi pemilih. Kemudian partai dapat menawarkan suatu program politik yang menjadi isu dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam kompetisi multi-partai, dibutuhkan partai politik yang responsive terhadap apa yang menjadi agenda masyarakat di tingkat *grassroot*. Dengan demikian, hubungan partai dan pemilih di era multi partai perlu membangun hubungan eksklusif agar partai dapat memaksimalkan hasil di dalam pemilu.

Pengelolaan hubungan dengan masyarakat juga penting bagi keberlangsungan dan survival partai politik. Oleh karena itu dibutuhkan hubungan dan komunikasi dengan masyarakat yang konsisten dan dua arah, sebab pemilih akan merasa lebih akrab dan terikat pada partai dan akan memberikan kontribusi kepadanya. Maka dari itu, partai politik harus berusaha membangun hubungan dengan konstituen yang stabil dan berjangka panjang. Hubungan jangka panjang dengan konstituen dapat dicapai dan dikelola dengan ceta mengembangkan pemahaman ideologi dan nilai-nilai dasar partai, termasuk membangun (infra-) struktur partai.

Ideologi dan nilai-nilai merupakan pondasi hubungan partai politik dengan konstituen. Di samping itu ada tiga pilar yang dapat membangun partai, yaitu sumber daya manusia, prosedur dan mekanisme internal partai, dan sumber daya finansial. Partai harus membangun ideologi sebagai landasan pemikiran dan program partai. Kalau ada ideologi dan nilai-nilai yang jelas, partai dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kurang lebih satu kesamaan dengan ideologi yang mau dikembangkan partai, kemudian pengembangan program dapat dijalankan. Ideologi dan nilai-nilai dihadapkan pada semua masalah untuk mengembangkan tawaran solusi atas masalah-masalah, baik masalah ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ini yang akan membuat ideologi secara terus menerus *applied* atau hidup.



Keterangan: Bagan diadopsi dari Strategi Pemenangan PPP, DPD PPP Kota Malang dalam pemilu 2004.

Gambar 18. Formulasi Strategi Secara umum Partai Politik

1. Penguatan Ideologi Partai

Partai politik menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip dasar kehidupan yang demokratis (Bryce, 1921). Sejalan dengan hal tersebut, Schattsneider (1942), menyatakan *modern democracy is unthinkable save in term of political parties*, dan secara lebih jelas Stokes (1999) menyatakan *parties are endemic to democracy, an unavoidable part of democracy*.

Menurut Riswanda Imawan (2004), di negara Barat partai sulit membangun kerja sama yang sinergis disebabkan karena partai politik diasumsikan sebagai representasi kelompok dengan basis ideologi yang kaku, yang secara diametral sangat berbeda sehingga tidak mungkin disatukan. Ia memberikan contoh partai Liberal dan partai Konservatif di Inggris dan di Kanada, partai Demokrat dan Partai Republik di USA, maupun partai Liberal dan Partai Progresif di era pot-Tokugawa di Jepang. Namun pada kenyataannya di negara kita, basis ideologi dari partai-partai itu semakin mencair, sehingga merubah sifat organisasi yang eksklusif menjadi inklusif. Perubahan ini membuka kemungkinan bagi partai untuk melakukan reposisi dan redefinisi fungsi mereka yang semakin jelas dan efektif dalam dinamika politik (Katz and Mair, 1955). Partai tidak sekedar berfungsi sebagai pencari legitimasi (perspektif partai elit) atau menyalurkan aspirasi massa (perspektif partai massa). Perubahan ini terjadi karena masuknya perspektif perilaku rasional ke dalam wacana perdebatan ilmiah mengenai peran dan fungsi partai politik (Downs, 1957).

Perkembangan aspirasi politik masyarakat telah membangun kesadaran dari para pelaku politik untuk berpikir bagaimana bisa merangkul berbagai kepentingan yang ada. Menurut LaPalombara dan Weiner (1966), kegagalan partai politik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berkembang merupakan penyebab utama matinya sebuah partai politik. Oleh karena itu partai harus aktif dalam menjangkau aspirasi yang berkembang, dan hal ini telah melahirkan format baru dalam partai politik yang dikenal dengan *catch-all party*. Posisinya berada di antara kutub dikotomi partai elit dan partai massa. Menurut Riswanda, format ini meng-agungkan pragmatisme dan rasionalitas sebagai pilar penyangga sistem politik yang demokratis. Dengan prinsip pragmatisme dan rasionalitas ini dimungkinkan bagi masyarakat untuk berpikir tentang "politik tanpa alur" (*politics without cliches*), tidak menjadi tawanan ideologi, sehingga masyarakat mampu menyikapi berbagai

masalah tanpa prakonsepsi, tanpa distorsi idologis, dan tanpa kekakuan bersikap partisan.

Dalam praktiknya, parpol lebih tertarik untuk melakukan pembangunan partai lewat jalan instan dengan perhitungan praktis pragmatis yaitu dengan cara merekrut kader dari figur-figur yang populer di kalangan masyarakat. Hal ini dianggap obat mujarab bagi partai meraih suara dibanding dengan melakukan pembangunan partai lewat pengokohan ideologi sebagai *branding* dari partai tersebut. Padahal dalam jangka panjang memperkuat ideologi partai sebenarnya lebih menguntungkan jika dibanding dengan merekrut figur-figur terkenal yang sifatnya *short term*. Walau demikian, perilaku partai politik yang melakukan pengrekrutan kader-kader populer sangat bisa dipahami. Partai politik dituntut dengan cepat membesarkan partai agar dapat melewati *threshold* yang menjadi momok partai-partai baru yang belum punya akar kuat dalam masyarakat. Selain itu, mengembangkan partai dengan memperkuat ideologi partai walaupun dalam jangka panjang menguntungkan, namun hal ini memerlukan waktu yang lama.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa partai politik berusaha untuk meraih suara pemilih dengan cara merekrut tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memiliki massa. Tokoh agama, tokoh partai, maupun tokoh masyarakat menjadi bahan rebutan partai politik untuk bisa menjadi bagian dari parpol mereka. Sebagai contoh, banyak calon anggota legislatif dari partai-partai pada pemilu 2004 yang awalnya merupakan kader dari partai politik lain, khususnya dari Partai Demokrat yang banyak berasal dari tokoh Golkar dan PDIP. Begitupun calon dari partai-partai Islam, khususnya PKB banyak tokoh agama yang menjadi calon anggota legislatif ataupun menjabat sebagai pimpinan teras partai.

Dengan adanya partai baru memang mempengaruhi partai politik yang ada, khususnya partai Golkar. Hal ini dikarenakan rekrutmen kader-kader dari partai yang baru mengambil kader yang ada yang sudah jadi. Saya kira yang membuat partai baru itu adalah orang-orang pintar sebab yang direkrut adalah orang-orang yang sudah jadi, yang jadi andalan dari partai-partai seperti Golkar, PDI-P dan lain-lain. Dari fakta itu ada kecenderungan berkurangnya jumlah kader maupun maupun pemilih. Akan tetapi pemilih-pemilih, kader-kader yang tidak konsisten itu sifatnya hanya sementara, ketika mereka dihadapkan pada pemilu berikutnya mereka akan terpanggil kembali untuk mendukung partai Golkar. (Hasil wawancara dengan tokoh Golkar).

Padahal penguatan ideologi partai politik (ideologisasi) itu penting, menurut Eep Saefulloh Fatah (Kompas, 2008), penguatan ideologi partai merupakan upaya dari partai politik dalam menanamkan dan memperkuat identitas partai. Hal ini mengandung pengertian sebagai berikut: *pertama*, identitas partai yang pada mulanya masih rapuh diperkuat dengan memantapkan orientasi politik dan *platform* kebijakan. *Kedua*, pemahaman identitas partai (ideologi, pemahaman identitas, atau *platform*) yang pada mulanya hanya menjadi gejala di kalangan elite partai diluaskan sebagai gejala pada anggota, pendukung, dan simpatisan. *Ketiga*, partai menegaskan pemosisian (*positioning*), diferensiasi (pembeda pokok yang dimiliki *vis a vis* partai lain) dan *branding* (penegasan merek atau simbolisasi partai).

Lebih lanjut Eep mengungkapkan bahwa ideologisasi partai dapat dilakukan antara lain melalui pembakuan mekanisme perekrutan politik serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. Berkaitan dengan penentuan calon anggota legislatif, ideologisasi ditandai dengan mengemukakan nama politisi partai yang membina diri dari bawah bersama partai serta membentuk kualifikasinya di tengah calon konstituen mereka. Dalam membangun partai lewat ideologisasi partai, dibutuhkan ketekunan partai dan politisi dalam memupuk dan menyuburkan modal politik mereka dari waktu ke waktu. Di samping itu perlu membangun hubungan pertukaran jangka panjang dan bukan sekedar transaksi jangka pendek dengan konstituen.

Secara teknis, upaya membangun hubungan pertukaran jangka panjang ini, juga telah dilakukan oleh partai-partai di Jepang khususnya kader-kader LDP (*Liberal Democratic Party*). Hampir setiap anggota legislatif atau calon anggota legislatif di Jepang mempunyai "*koenkai*" sebagai basis dukungan yang sifatnya sangat personal, dan ini sangat efektif dengan model sistem pemilu distrik yang diterapkan di Jepang. *Koenkai* secara harfiah dapat dikatakan sebagai kelompok pendukung. Tidak ada aturan tertulis baik dalam konstitusi Jepang maupun peraturan-peraturan dalam sistem kepartaian di Jepang yang menjelaskan tentang keberadaan *Koenkai*. Organisasi tersebut timbul karena kebutuhan setiap masyarakat Jepang pada umumnya, khususnya di desa-desa terlihat dalam kegiatan *Koenkai* (Usmar Salam, 1995).

Koenkai merupakan suatu organisasi dimana dalam organisasi ini mempunyai ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi lainnya. Orang-

orang yang ditunjuk dalam kepengurusan ini biasanya adalah orang-orang kepercayaan para caleg. Fungsi *Koenkai* merupakan organisasi yang bertujuan untuk memenangkan caleg dalam pemilu di Jepang. Untuk itu para pengurus *Koenkai* berusaha mencari anggota baru secara berantai dengan cara pendekatan yang halus. Dengan berbagai macam upaya pengurus *Koenkai* berusaha mencari simpati para anggotanya, misalnya dengan memperhatikan kebutuhan para anggotanya. Tugas *Koenkai* selain mencari masa baru dengan berbagai cara, juga berusaha mengumpulkan dana untuk kepentingan *Koenkai* maupun untuk kepentingan dalam kampanye pemilu. Para pengurus *Koenkai* berusaha mengetahui kebutuhan para anggotanya, dan kebutuhan tersebut harus dilaporkan pada anggota legislatif yang menjadi pemilik *Koenkai* tersebut.

Dari hasil temuan di lapangan juga ditemukan adanya keinginan dari pemilih untuk memperkuat dan memperjelas basis ideologi partai. Kejelasan ideologi partai politik dianggap memberikan kepastian bagi pemilih, terutama bagi oleh pemilih Santri Modernis. Selama ini ada kegamangan dari partai-partai yang cenderung menuju ke pusat/tengah dalam ranah ideologi dengan alasan untuk dapat menjangkau konstituen yang lebih luas dan fleksibel. Akan tetapi bagi sebagian pemilih hal ini dirasakan membingungkan, karena pemilih tidak mempunyai keyakinan dan ketenangan ketika memutuskan partai apa yang harus menjadi pilihannya. Sebagai contoh adalah konstituen yang berlatar belakang Muhammadiyah, di satu sisi PAN merupakan partai bentukan tokoh-tokoh Muhammadiyah, namun di sisi lain partai ini tidak mencantumkan Islam sebagai dasar ideologis partai. Oleh karena itu, sebagian warga Muhammadiyah menjadi gamang, terutama mereka yang Fundamental, dalam menentukan pilihan politik kepada PAN. Hal ini dibuktikan dengan ada sebagian kelompok pemilih dari warga Muhammadiyah yang merasa lebih pas dengan PKS atau PBB karena dianggap secara ideologi lebih jelas, dimana dalam AD/ART PKS maupun PBB Islam secara formal menjadi dasar ideologi partai. Sebagaimana dikemukakan Sekretaris DPC PAN Kota Malang.

".... sebagian besar warga muhammadiyah itu menginginkan partai yang eksklusif dengan nilai-nilai Islam dan butuh waktu panjang untuk memahamkan bahwa partai pluralis yang mengakomodasi berbagai komponen masyarakat seperti orang Kristen dan lain-lain itu butuh waktu yang banyak, contoh kongkrit di Kota Malang. Ada mainstream dalam kemuhammadiyah bahwa warga Muhammadiyah itu pada suatu

titik bagaimana nilai-nilai Islam itu terpatri dalam diri. Sehingga dalam menyalurkan aspirasi politik bagi warga Muhammadiyah yang tidak masuk ke kancah politik sepertinya ada kecocokan dengan PKS, terdapat nilai-nilai yang melekat dalam visi dan misi partai itulah yang membuat orang-orang Muhammadiyah itu dekat dengan PKS."

Berkenaan dengan upaya penguatan ideologi hampir semua partai politik tidak punya agenda yang jelas, kecuali PKS yang memang melakukan pengkaderan dari bawah lewat aktivitas keagamaan yang dinamakan "tarbiah". Hal ini berkaitan dengan keinginan partai politik untuk menjangkau massa konstituen yang lebih luas. Berkenaan dengan hal ini, Abdurohim sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu menyampaikan sebagai berikut:

Dalam perkembangannya partai politik kita sudah mengalami degradasi moral, tidak berani mengusun visi dan misi. Kalau partai yang berbasis Islam ingin maju dan mendapat perhatian serta dukungan dari kalangan umat Islam, maka partai Islam harus sungguh-sungguh memperjuangkan Islam. Partai Islam yang ada sekarang hanya partai Islam yang melulu mengejar kekuasaan.

Akan tetapi menurut Abdurohim, partai tidak boleh terjebak dengan ideologi. Artinya partai tidak hanya jualan ideologi saja kepada masyarakat tanpa ada upaya kongkrit untuk menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Pandangan umum dalam masyarakat Malang Raya menunjukkan bahwa walaupun penguatan ideologi itu penting terutama berkaitan dengan proses kaderisasi partai, namun ada hal yang mereka tidak setuju dengan praktik yang dijalankan partai sekarang ini yang berkaitan dengan penggunaan agama sebagai justifikasi partai politik. Sebagian besar responden yang diwawancarai menganggap partai Islam sekarang ini cuma formalitas saja karena dalam praktiknya antara partai Islam dan partai non-Islam sama saja.

Partai Islam yang bagus tidak hanya menjual ideologi – justru harus memperjuangkan kepentingan riil kebutuhan masyarakat, karena masyarakat tidak memikirkan ideologi. Pada saat ini para pemilih melihat partai Islam hanya namanya saja, karena tidak ada yang bisa membedakan secara kongkrit dimata masyarakat. Partai Islam dan non Islam hampir sama saja, baik visi maupun misi tidak bisa secara tegas dibedakan, dalam keadaan tertentu partai sekuler lebih banyak perhatian pada masyarakat Islam, sementara di sisi lain partai yang mengatasnamakan Islam tidak atau jarang memperjuangkan kepentingan orang-orang Islam.

Apalagi dalam kenyataannya, justru banyak wakil wakil dari partai Islam yang melakukan korupsi, memperkaya diri sendiri dan melupakan masyarakat yang memilihnya. Hal ini menjadi ironis bagi sebagian masyarakat golongan menengah ke atas yang selalu disuguhi oleh ayat-ayat yang menyerukan kebaikan dan kebenaran, namun di sisi lain di media cetak maupun elektronik banyak disuguhi dengan perilaku yang bertolak belakang dengan apa yang sering mereka dengar di setiap pertemuan-pertemuan yang mendatangkan tokoh-tokoh yang sering berbicara kebaikan moral. Menurut Abdurohlim, salah seorang tokoh agama menyampaikan bahwa “dalam Islam juga diajarkan kepada kita, sebagai pemeluk Islam harus memperhatikan masyarakat miskin. Karena setelah menjalankan ibadah, sholat mendoakan fakir miskin ajaran Islam itu sangat berpihak pada masyarakat bawah seperti kelompok duafa, mustadafin. Namun dalam prakteknya banyak kalangan umat Islam, termasuk mereka yang duduk di legislatif, kurang peduli dengan hal itu.”

Walaupun demikian ada sebagian masyarakat yang kurang peduli dengan pemberitaan mengenai citra negatif dari anggota legislatif dari partai mereka, karena yang penting bagi mereka bukan kinerja dalam menjalankan peran dan fungsi partai yang dipentingkan. Bagi mereka calon anggota dewan atau anggota dewan yang penting punya kedekatan dengan mereka dan mereka punya karakteristik perilaku sosial yang sama dengan mereka. Tidak bisa berbuat apa-apa ketika duduk jadi anggota dewan bukan kesalahan dimata masyarakat kecil, yang menjadi masalah apabila mereka tidak bisa menjadi bagian dari mereka. Oleh karena itu bagi masyarakat Abangan, calon yang akan duduk di legislatif harus punya budaya Abangan, begitu pun calon dari partai Islam harus mempunyai karakteristik Keislaman, atau kepekaan sosio-religiusitas.

Hal yang paling menarik, masyarakat Malang Raya punya identifikasi kuat terhadap partai yang mereka pilih. Garis idologis yang dikemukakan Geertz (1960) yang jelas kelihatan dalam alur kehidupan politik masyarakat. Walaupun mereka banyak yang juga tahu dan tidak senang dengan perilaku anggota dewan yang suka melupakan janji-janjinya, namun mereka tetap berpegang pada partai yang telah dipilihnya. Begitupun dalam soal berkomunikasi dengan anggota dewan dari parpol lain, menurut hasil pengamatan penulis, mereka tidak merasa sreg kalau yang diajak komunikasinya itu adalah mereka yang berlatar belakang berbeda. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian perilaku

pemilih di pedesaan Jawa oleh Afan Gaffar (1992), orientasi *sosio-religious* mempunyai korelasi terhadap perilaku pemilih PPP, Golkar dan PDI. Santri cenderung memilih partai Islam dan kaum Abangan memilih partai yang tidak membela dan memajukan Islam.

2. Pendekatan Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, aspek sosial ekonomi dan kemasyarakatan menjadi bagian terpenting dalam komunitas masyarakat di pedesaan. Tidak hanya dalam kehidupan keseharian dalam berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama mereka, namun juga telah menjadi indikator serta tolak ukur bagi kehidupan politik. Komunitas masyarakat yang ada di Malang Raya yang terkenal dengan budaya arek juga telah menjadi ciri khas karakteristik masyarakat. Kehidupan rutin yang mewarnai aktivitas masyarakat pedesaan tidak lepas dari aktivitas ritual keagamaan seperti pengajian, tahlilan, khajatan, yasinan dan lain-lain bagi kelompok Santri, sementara bagi sebagian kelompok Abangan khajatan menjadi ciri khas mereka, ditambah dengan berbagai aktivitas kesenian yang merupakan ciri khas Abangan seperti jaranan (kuda lumping).

Namun di sisi lain, karena masyarakat pedesaan di Malang Raya secara ekonomi kurang, maka dorongan untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomi juga menjadi daya tarik bagi mereka. Walaupun dalam masyarakat di Malang Raya kerukunan, kebersamaan masih menjadi bagian dari tata nilai yang mereka anggap baik, namun dalam praktiknya aspek ekonomi sedikit-demi sedikit telah mengikisnya. Dalam acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, khususnya tentang kegiatan pembangunan di lingkungan yang membutuhkan kerja bersama (gotong royong), tidak semuanya sadar untuk ikut karena dianggap tidak ada uangnya. Akan tetapi kalau ada kegiatan yang sifatnya mendapatkan imbalan, masyarakat banyak yang rebutan dan bahkan menjadi bahan pertentangan di antara mereka. Kondisi ini saya lihat lebih banyak berasal dari kelompok masyarakat Abangan, khususnya kaum muda Abangan.

Sementara dalam kalangan Santri, aktivitas yang mereka lakukan sering berkaitan dengan Mesjid atau Langgar. Kelompok Santri ini, apabila sudah menjadi bagian dari komunitas yang bergelut dalam bidang keagamaan, seperti pengajian rutin, maupun acara-acara lain seperti

mendoa'kan arwah leluhur yang sering dibacakan setiap Kamis dan Jum'at pagi, menunjukkan ada keengganan untuk terjun ke dalam kegiatan yang terkait dengan lingkungan seperti kerja bakti. Menurut hasil pengamatan, aktivitas keagamaan yang mereka lakukan, juga tidak lepas dari aspek-aspek ekonomi. Dalam acara pengajian rutin yang dilaksanakan setiap Jum'at, setiap warga sekitar Masjid atau Langgar selalu memberikan makanan dan minuman "jajanan" untuk mereka yang mengaji. Dan acara mendoa'kan arwah leluhur, ternyata setiap keluarga yang akan minta dibacakan ditarik sejumlah uang. Untuk satu orang yang telah meninggal dipungut dua ribu rupiah dan selebihnya seribu rupiah. Artinya, apa yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya baik sosial maupun agama selalu ada motif ekonomi di balik apa yang mereka kerjakan.

Kondisi di atas berimplikasi pada aktivitas di luar yaitu politik. Setiap kegiatan yang akan melibatkan warga, maka jangan harap akan berhasil atau didukung apabila tidak ada nilai ekonominya. Baik itu kegiatan kampanye, maupun pemilu masyarakat memandang tidak ada gunanya jika tidak ada *reward* ekonomi bagi mereka. Oleh karena itu jangan harap ada calon yang akan dipilih apabila calon itu tidak dikenal secara dekat oleh masyarakat walaupun calon itu punya kapabilitas dan kredibilitas baik tanpa adanya pendekatan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Di samping itu, jangan harap ada calon yang dipilih oleh kelompok yang secara ideologis berbeda. Bagi masyarakat Abangan sangat sulit untuk menerima seorang Santri menjadi calon dari partai Abangan. Begitupun bagi kalangan Santri sangat sulit menerima calon dari kelompok Abangan untuk menjadi calon dari partai Islam.

Kenyataan sekarang masih adanya calon yang punya kapabilitas dan kredibilitas baik dan secara kultur berbeda dengan kultur partainya, tidak lain dan tidak bukan karena masih dipakainya nomor urut dalam sistem pemilu. Masyarakat tidak melihat orang yang akan duduk di parlemen atau calon anggota legislatifnya, namun hanya melihat pada partai yang akan mereka coblos. Pada pemilu 1999 dan 2004 banyak calon yang sebenarnya tidak jelas asal-usul serta *treck record*-nya namun karena *euporia* masyarakat akan perubahan, lantas masih adanya keyakinan bahwa pemilu itu diwajibkan seperti jaman Orde Baru, maka partisipasi masyarakat dalam pemilu cukup tinggi. Namun ke depan, apabila partai politik tidak melakukan pendekatan khusus berupa penguatan ideologis, maupun pendekatan bersifat sosial ekonomi jangan harap partai tersebut

akan mendapatkan suara yang signifikan. Begitupun partisipasi pemilih, apabila partai tidak mampu meyakinkan konstituennya, walaupun mereka tetap mengidentifikasikan dirinya sebagai partai tersebut, tapi dukungan yang mereka berikan belum tentu menjadi suara karena bisa saja mereka akan menghanguskan suaranya dengan cara tidak mendatangi bilik suara.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, partai-partai yang sukses meraih suara yang signifikan tidak lepas dari konsekuensi ideologis dan sosial ekonomi. Walaupun ada hal lain yang menurut hemat penulis, keluar dari alur itu berkenaan dengan partai yang memperoleh suara karena figur, seperti partai Demokrat dengan figur Soesilo Bambang Yudhoyono yang sekarang jadi Presiden. Walaupun sebenarnya di antara masing-masing partai yang besar selalu ada figurnya seperti Gus Dur di PKB, Amin Rais di PAN, Megawati di PDIP, namun itu semua berkaitan dengan simbol personal ideologis yang diusung dan masyarakat menjadikannya dia sebagai representasi / simbolisasi dari ideologi atau kelompok mereka.

Partai Keadilan Sejahtera yang pada pemilu 2004 telah mengejutkan konstelasi politik nasional, ternyata keberhasilan mereka tidak lepas dari dijalankannya kedua hal tersebut yaitu penguatan ideologis dan pendekatan sosial ekonomi. PKS yang didukung kalangan intelektual muda di kampus-kampus, khususnya di kampus negeri seperti Unibraw, Universitas Negeri Malang, STAIN Malang tidak putus melakukan kaderisasi dengan metode Tarbiyahnya sebagai dasar penguatan ideologi. Di samping itu, kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya sosial dan ekonomi juga mereka jalankan. Banyak kader-kader PKS turun ke desa-desa hanya untuk memberikan bantuan berupa pengobatan gratis ataupun bantuan sembako. Banyak masyarakat yang terkesan kepada PKS karena aktivitas sosialnya yang dilakukan oleh kader-kadernya. Tidak jarang, jika terjadi bencana di suatu desa, para kader PKS menjadi kelompok yang pertama dalam memberikan bantuan tanpa memakai atribut partai. Katika mereka tahu bahwa yang melakukan pengobatan gratis, yang melakukan bantuan sembako adalah kader-kader dari PKS warga yang dibantu serta merta dalam pemilu memberikan dukungannya kepada PKS.

Salah seorang aktivis politik dari PAN, menuturkan kepada penulis berkenaan dengan alasan kenapa PKS banyak mendapat simpati dan dukungan.

Secara intensif mereka memang terus mengadakan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat formal ataupun informal, beberapa kali juga didatangi oleh teman teman PKS untuk mengadakan kegiatan pengobatan massal di tempat saya. Mereka juga tahu betul tentang saya meskipun sudah tidak menjabat kepengurusan PAN dan DPC tetapi beberapa kali datang ke rumah diminta untuk dijadikan tempat pembagian sembako, pengobatan gratis dan itu pun dilakukan setelah pemilu dilaksanakan. Justru sebelum pemilu mereka menjaga jarak. Dalam arti bagi mereka yang aktif di partai mungkin hanya pendekatan-pendekatan secara struktural dan aktif intensif pada pertemuan-pertemuan saja.

Bagi yang memilih Golkar, banyak di antara mereka yang telah menikmati keuntungan dari Golkar seperti pembangunan imprastruktur jalan, listrik, air minum, koperasi dan lain lain. Oleh karena itu untuk wilayah-wilayah yang secara ekonomi berkembang seperti di daerah Pujon yang mempunyai koperasi untuk petani, khususnya koperasi susu sapi sangat fanatik mendukung Golkar. Di samping itu memang para anggota dewan dan petinggi partai di Golkar mempunyai kelebihan sumber daya manusianya. Hal ini telah menjadi kelebihan dari Golkar untuk mendapatkan suara cukup signifikan dalam setiap pemilu. Di sisi lain, akbibat monopolitisasi partai politik yang mengharuskan PNS memilih Golkar juga telah berdampak pada dukungan pemilih pasca Orde baru. Sebagian besar keturunan dari orang tua yang bekerja sebagai PNS, dalam setiap pemilu pasca reformasi memberikan pilihan politiknya pada Golkar. Dengan strategi sekasur, sedapur, sesumur sangat efektif menggalang massa di akar rumput untuk kesuksesan Golkar dalam memenangkan pemilu.

Salah satu petikan hasil wawancara penulis dengan warga di Kota Batu mengenai alasan-alasan kenapa masyarakat memilih partai politik, sebagai berikut:

Saya secara pribadi tidak memilih Golkar. Mereka yang memilih Golkar disebabkan pengaruh keluarga, walaupun sekarang mereka tidak menjabat pegawai negeri sipil, namun banyak keluarga yang sudah tersosialisasi cukup lama dengan Golkar pada akhirnya semua keuturunannya banyak yang memilih Golkar dalam pemilu. Kita ketahui bahwa pada jaman Orde Baru mereka yang punya jabatan di pemerintahan secara eksplisit diwajibkan untuk memenangkan Golkar, bahkan banyak tekanan-tekanan dari aparat kepada masyarakat pada saat itu untuk mencoblos Golkar. Di samping itu ABRI didesa dengan memelalui babinsa, juga melakukan tekanan tekanan sehingga babinsa menjadi alat pressure pada masyarakat.

Orang memilih PPP masa Orba karena merupakan partai Islam dan ada gambar ka'bah yang menjadi simbolnya. Oleh karena itu banyak pemilih Tradisional memilih PPP walaupun banyak tekanan dari aparat maupun pemerintah. Banyak dari masyarakat yang rela dan setia untuk mendukung PPP karena mereka menganggap dengan memilih PPP berarti sudah bisa menjalankan dan membela Islam. Apalagi dalam gambar PPP ada ka'bah nya yang merupakan simbolisasi dari Islam. Melihat kenyataan ini pemerintah merasa perlu untuk melakukan rekayasa, sehingga pemerintah meminta diganti, dan berhasil karena PPP bisa di acak-acak.

Keuntungan Golkar punya sumber daya manusia yang bagus, dari etika orang Golkar beda seperti orang-orang PDI. Konsep Golkar adalah sumur dapur, kasur yang sampai sekarang masih ada. Untuk PNS yang milih Golkar umumnya orang-orang lama, PNS baru tidak lagi terikat oleh Golkar dan bebas memilih partai-partai lain.

Kemenangan Golkar pada pemilu 2004 tidak hanya disebabkan oleh warisan Golkar pada masa Orde baru, akan tetapi juga dikarenakan Golkar melakukan berbagai langkah agar partai berlambang pohon beringin ini tetap eksis dalam masyarakat. Di samping melakukan kaderisasi rutin dalam rangka penguatan ideologi partai bagi para kadernya, juga melakukan pendekatan sosial dan ekonomi pada masyarakat. Kegiatan ini menurut salah seorang mantan ketua DPD Golkar yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, Mashuri dilakukan secara rutin oleh setiap anggota dewan di masing-masing daerah pemilihannya. Dalam melakukan kegiatan sosial tersebut didanai oleh individu-individu anggota dewan dari dapil masing-masing, termasuk dia sendiri melakukan hal tersebut untuk dapilnya yang ada di Bumiaji. Mashuri kegiatan membantu lingkungan seperti pembangunan Langgar, Mesjid, perbaikan jalan, gorong-gorong atau pun yang lainnya, Mashuri menamakannya sebagai "shodakoh sosial". Secara lengkap penulis mengutip hasil petikan wawancara dengan mantan Ketua DPD Golkar, sebagai berikut:

Manusia sebagai kader politik Golkar agar sesuai dengan yang kita harapkan ada cara atau model yang dilakukan agar masyarakat tetap mendukung partai yaitu salah satunya melalui kontrak politik untuk memperjuangkan mengenai hal-hal yang diinginkan warga. Sebagai contoh bagi masyarakat yang kampungnya kumuh, partai berjuang untuk menjadikan kampung itu lebih baik agar masyarakat di sekitar itu mempunyai semangat untuk mendukung partai. Di samping itu, partai Golkar melakukan sosialisasi doktrin-doktrin politik lewat dialog agar mereka mempunyai pandangan

yang sama dalam negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agar menjadi masyarakat yang punya moral kader bangsa, yang titik beratnya membela bangsa dan negara, UUD'45.

Program-program Golkar yang dilakukan kepada masyarakat selama ini, antara lain: Melakukan pendidikan dan latihan kepada masyarakat; melakukan pendekatan-pendekatan secara manusiawi; pendekatan-pendekatan dengan memperjuangkan pembangunan kepada komunitas yang mereka tempati; memberikan bantuan, khususnya bantuan finansial kepada mereka. Sebagai contoh kami telah memberikan bantuan kepada komunitas yang ada di wilayah pak Kirun (sambil menunjuk kepada orang yang sedang duduk Di samping saya) berupa bantuan semen, pasir, batu merah sebagai perangsang agar mereka mau melaksanakan pembangunan di kampung-kampung.

Dana untuk memberikan bantuan langsung kepada warga didapat dari fraksi-fraksi, dimana wakil-wakil yang duduk di fraksi harus memberikan sebagian rizkinya untuk kepentingan lingkungan atau yang lebih halusnya uang yang mereka dapat sebagian dishodakohkan kepada dapil-dapil mereka masing-masing. Seperti saya pribadi, sebagai kader partai banyak membantu kampung-kampung, daerah-daerah yang merupakan dapil saya. Sebagai contoh disana ada pak Kirun yang merupakan kader Golkar, saya melalui dia banyak membantu baik berupa semen, pasir, batu merah, dan lain-lain untuk kepentingan kampung, RT-RT, RW-RW, yang sifatnya kecil-kecil seperti 10 sampai 20 sak semen dan dimana-mana ada.

Selain melalui kegiatan yang bersifat fisik, kader Golkar juga melakukan komunikasi sosial kepada seluruh elemen masyarakat. Partai Golkar secara nasional punya ikrar "manabakti" yang salah satu ikrarnya adalah kasing sayang berwatak setia kawan. Oleh karena itu Partai Golkar tidak mau menghujat pihak lawan maupun kawan. Karena punya sifat setia kawan, apa itu orang sini ataupun orang bukan sini kalau perlu dibantu kita akan bantu.

Di sini ada 25 wakil saya kira semua sama, semua ingin memperjuangkan dapil masing-masing. Bagi Golkar tidak hanya memperjuangkan dapil-dapil wakil Golkar tapi menyeluruh. Cuma tulang punggungnya adalah kader-kader Golkar yang ada di daerah tersebut. Dalam masyarakat masih ada kelompok-kelompok yang membina hubungan dengan wakil-wakilnya, karena masing-masing partai tidak mau kehilangan konstituennya. Mereka tetap membina hubungan dengan konstieuenya. Berkurangnya suara partai, selain adanya partai baru, juga karena adanya pemilih yang tidak konsisten akibat dari kesalahan kader-kader partai yang tidak mau memperhatikan dapil-dapilnya, atau mereka tidak mau memberikan sodakohnya kepada dapil mereka.

Berbeda dengan kasus PKS dan Golkar, PKB pada pemilu 2004 mengalami penurunan jumlah suara yang cukup besar. Menurut hemat penulis, Di samping PKB yang sering dilanda konflik, menurunnya suara PKB diakibatkan oleh perilaku elit partai yang hanya mengutamakan pendekatan keagamaan, sementara lalai dalam memberikan kontribusi sosial ekonomi pada konstituennya. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa PKB lebih sering berhubungan dengan tokoh agama secara langsung ketimbang turun kepada masyarakat. Para tokoh agama seperti kyai, Ulama, maupun ustadz menjadi mediator tokoh politik dengan masyarakat. Atau tokoh agama itu menjadi juru kampanye bagi PKB. Di samping itu sudah menjadi kewajiban moral bagi sebagian tokoh agama yang mempunyai ikatan psikologis, namun ada hal lain yang secara ekonomi didapatkan dari para tokoh politik atau partai. Umumnya para tokoh politik datang ke pondok pesantren untuk bersilaturahmi dengan pimpinan pondok, mereka datang tidak tangan hampa. Biasanya tokoh partai politik datang minimum memberikan amplop kepada kyai dengan alasan untuk membantu aktivitas pondok. Akan tetapi tidak jarang, juga berbagai pondok ataupun madrasah yang umumnya dipunyai oleh kyai atau ulama atau ustadz mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah karena perjuangan dari anggota dewan yang didukungnya.

Dengan demikian, para tokoh politik yang ingin berhubungan dengan masyarakat, khususnya kalangan Santri Tradisional, selalu melalui kyai-nya. Dan apabila tokoh politik itu tidak dapat memberikan kontribusi yang bersifat ekonomi, walaupun kedatangan mereka diterima, namun tidak menjadi dukungan riil dalam pemilu. Sementara di sisi lain masyarakat tidak pernah merasakan kebaikan yang diberikan oleh para anggota dewan dari PKB, dan di sisi lain mereka tahu bahwa para tokoh agama itu mendapatkan sesuatu dari para calon, maka pada akhirnya sedikit demi sedikit banyak dari pemilih kalangan Santri itu melakukan perlawanan dengan tidak datang ke bilik suara atau memilih banyak partai, dan paling ekstrim mereka mengalihkan pilihan politiknya ke partai lain. Tidak sedikit dari kalangan Santri Tradisional ini dalam pemilu 2004 memilih partai Islam selain PKB, yaitu ke PKS, Golkar, atau bahkan Demokrat.

Hal yang paling sulit bagi kalangan Santri Tradisional untuk mengalihkan pilihan politiknya ke PAN. Berdasarkan hasil temuan lapangan alasan utama sulitnya pemilih Santri Tradisional mendukung

PAN adalah dikotomisasi kelompok keagamaan antara NU dan Muhammadiyah, Di samping secara sosial dan kultural berbeda dalam kehidupan keseharian di masyarakat. Pertentangan antara NU dan Muhammadiyah di tingkat *grassroot* juga dipelihara oleh elit Santri Tradisional untuk memperkokoh solidaritas dan kekompakan kelompok. Pengaruh yang datang dari kelompok Santri Modernis dianggap akan mengancam eksistensi tokoh agama khususnya kyai di masyarakat. Selama ini, tetap berdirinya wibawa kyai di mata masyarakat karena masih adanya ritual keagamaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan akan selalu melibatkan kyai. Dengan demikian, mau tidak mau, masyarakat akan membutuhkan kyai dari mulai kelahiran, perkawinan, sampai kematian. Oleh karena itu, eksistensi ritual keagamaan ini telah melembaga dan sekaligus menjadi indikator sosial bagi masyarakat untuk menentukan status sosial ekonomi. Banyak yang mereka tidak mampu untuk melakukan khajatan dalam memperingati hari kematian keluarganya, terpaksa mereka mengada-ada dengan cara pinjam tetangga karena takut dikatakan tidak mampu. Mereka sebenarnya tidak mengerti betul bahwa apa yang dilakukan oleh mereka adalah bagian dari kewajiban Islam. Satu jawaban yang sempat terlintas dari warga yang penulis wawancarai, malu kalau tidak melakukan khajatan, takut dikatakan tidak mampu.

Bagi PDIP yang pada pemilu 2004 mengalami penurunan suara yang sangat tajam, pada dasarnya hampir sama aktivitasnya dalam melakukan pendekatan sosial ekonomi kepada masyarakat. Bahkan PDIP dalam setiap pemilu cukup royal dalam “menjamu” pemilihnya dalam setiap kesempatan kampanye. Berbagai bantuan kepada warga juga diberikan, termasuk untuk kepentingan-kepentingan sosial seperti bantuan perbaikan jalan, jembatan, gorong-gorong seperti yang ada di Dusun Caru Kota Batu. Di Dusun Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang sempat penulis survei, PDIP memberikan bantuan berupa pembuatan sumur bor untuk keperluan warga yang membutuhkan air bersih.

Sementara kegagalan PDIP mempertahankan hasil pemilu 1999, menurut salah seorang warga, Aguk yang berprofesi sebagai tukang ojek, yang juga merupakan simpatisan PDIP menyatakan bahwa kekalahan PDIP pada pemilu 2004 akibat dari kebijakan Megawati yang ketika menjabat sebagai presiden tidak memperhatikan *wong cilik*. Pada saat

Megawati menjadi Presiden, di kota-kota, khususnya di Jakarta banyak terjadi penggusuran lahan maupun penertiban pedagang kaki lima yang *nota bene* adalah kebanyakan pendukung PDIP. Pada akhirnya, sebagian pemilih yang mencoblos PDIP pada Pemilu 1999 mengalihkan suaranya ke partai lain, terutama partai baru yang menurut mereka punya harapan untuk perubahan. Hasil survei di Malang Raya yang pernah dilakukan dilakukan penulis sebelum tulisan ini dibuat, pemilih dari PDIP banyak mengalihkan suaranya ke Partai Demokrat dan sebagian lagi ke partai lain.

Walaupun demikian, sebenarnya suara PDIP menurut banyak pemerhati politik, suara pada pemilu 2004 itu merupakan suara rill dari PDIP. Sementara suara pada pemilu 1999 merupakan suara yang datang dari pemilih yang melakukan *swing voters*. Dan pada pemilu 2004 pemilih *swing voters* PDIP itu kembali lagi ke partainya semula atau mengalihkan pilihan politiknya ke partai lain.

Kalau dilihat dari data yang ada, pada saat ini konstituen PDIP masih yang terbanyak. Pada pemilu 2004, Kabupaten Malang dan Kota Malang tetap masih dikuasai oleh PDIP. Sementara Kota Batu, selisih suara antara Golkar yang memenangkan pemilu tidak jauh selisihnya dengan PDIP. Keberhasilan PDIP mendominasi suara pada setiap pemilu di Malang Raya tidak lepas dari kuatnya kelompok Abangan di Malang Raya. Walaupun Malang Raya terkenal dengan masyarakat religius, karena banyaknya pesantren dan pendidikan agama, namun sebenarnya sebagian besar masyarakatnya punya kedekatan secara historis dengan Abangan. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Malang Raya walaupun mereka ikut aktivitas ritual keagamaan yang sering dilakukan oleh kelompok Santri Tradisional, namun pilihan politiknya tetap pada partai politik Abangan yaitu PDIP. Tidak mengherankan apabila di Jawa Timur banyak Kepala Daerah yang (Bupati/Walikota) yang berasal dari partai PDIP.

Walaupun demikian, ada ciri khas yang secara gari besar membedakan setiap wilayah yang ada di Malang Raya yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh Kecamatan Lawang, Singosari dan Pakis. Lawang mayoritas masyarakatnya mempunyai rasa Nasionalisme yang tinggi, dan pendidikan mereka cukup. Singosari, masyarakatnya religius, umat Muslimnya sangat besar, jadi untuk wilayah ini banyak pondok-pondok pesantren, sekolah atau madrasah Islam dan kegiatannya pun banyak terkait dengan keagamaan seperti pengajian.

Sedangkan untuk Pakis, masyarakatnya religius dan Nasionalis, namun masyarakatnya mudah terpecah belah.

Di luar alur identifikasi kepartaian dari kelompok Abangan terhadap PDIP, keberhasilan PDIP mendominasi suara dalam Pemilu, juga karena dilakukannya pendekatan pada masyarakat. Salah seorang tokoh PDIP, yang juga mantan Ketua DPRD Kota Malang menyebutkan bahwa PDIP punya *concern* yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Walaupun demikian ia mengakui bahwa tidak semua program kepada masyarakat itu dapat direalisasikan dengan baik. Beberapa program kerja yang jadi prioritas PDIP, Sri Rahayu mengungkapkan sebagai berikut:

✧Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui perbaikan di sektor ekonomi dengan mendirikan koperasi, memberdayakan pedagang kecil dan usaha-usaha lain yang diinginkan oleh masyarakat. Di samping itu kami juga punya misi lain yaitu: Memberantas korupsi, ✧memperbaiki pendidikan khususnya di wilayah kota Malang, menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional, pemerataan pembangunan di segala bidang, melakukan survey pada masyarakat, memberikan bantuan di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan

Selanjutnya menurut, Sri Rahayu, kegagalan PDIP pada pemilu 2004 banyak diakibatkan oleh tidak ditepatinya janji-janji partai yang disampaikan saat kampanye 1999. Oleh karena itu, menurutnya, sekarang PDIP sudah mulai menyusun agenda bagi peningkatan kehidupan ekonomi, khususnya masyarakat miskin. Beberapa agenda yang dibuat PDIP merupakan hasil serapan dari aspirasi masyarakat dan akan diupayakan lewat berbagai keputusan dan kebijakan yang ada dalam mekanisme di dewan agar sinergi dengan kebijakan eksekutif.

Untuk Partai Demokrat, walaupun selama ini dikenal dengan partainya SBY, karena menjadi daya tariknya utama dalam partai ini, akan tetapi menurut penuturan Eko Budi Prasetyo, sebagai anggota Dewan Kabupaten Malang dari Partai Demokrat, juga telah melakukan berbagai pendekatan pada masyarakat. Menyadari bahwa Partai Demokrat belum mempunyai basis massa yang jelas, partai ini berusaha untuk meraih semua segmen masyarakat baik yang Abangan maupun Santri. Oleh karena itu partai demokrat menyebutkan dirinya sebagai partai "Nasionalis-Religius".

Pada saat seorang wakil rakyat duduk di dewan, mereka harus lentur dan fleksibel, termasuk saya boleh bicara fanatic tapi hanya boleh di kelompok, tapi kalau kita sudah keluar ke masyarakat. Kita harus klenur harus bisa diterima oleh kawan-kawan politik. Misalnya kalau kita bicara dengan tukang ojek, tidak pantas kalau kita ngomong masalah isu politik sekarang, yang pasti terjun ke masyarakat. Tunjukkan bukti ke masyarakat ditanya apapun harus tau, jangan menghindar. Saya juga mencoba fleksibel tidak membeda-bedakan warna baju, warna kulit, kita harus bisa memberikan bantuan, solusi, ada pemikiran-pemikiran yang bisa memecahkan masalah, tidak hanya materi yang diandalkan. Karena masyarakat tidak butuh kader yang mementingkan materi, percuma kalau banyak uang tapi tidak bisa mengerti permasalahan yang terjadi, karena disitulah yang bisa tergalgi yang sebenarnya, dan pada saat sekarang terus saya terapkan.

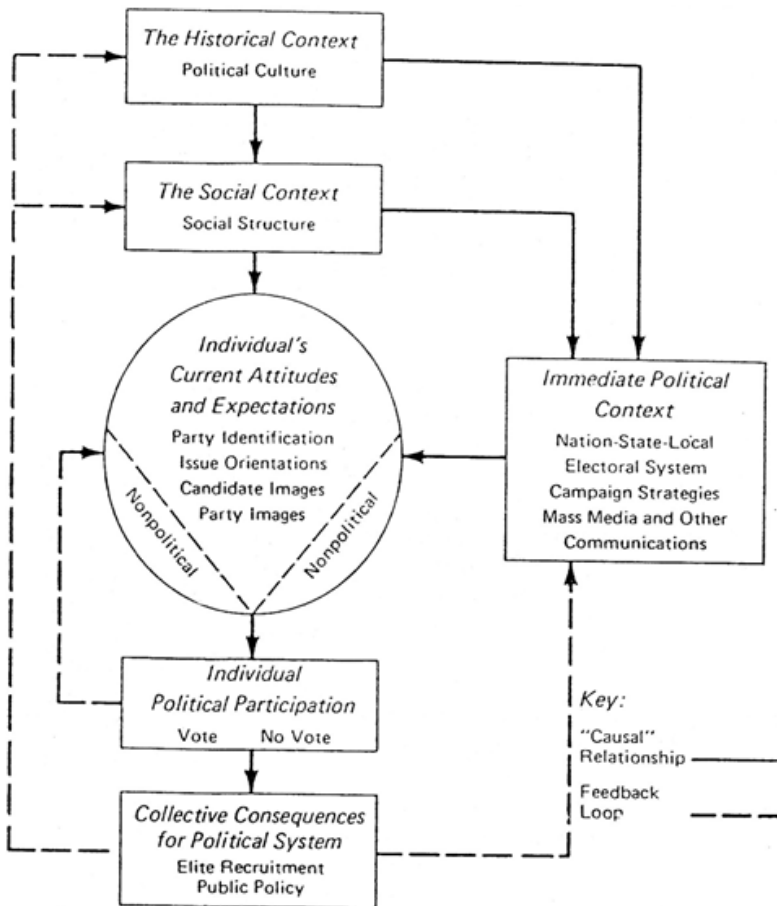
Karena Partai Demokrat sangat diwarnai oleh popularitas SBY, maka citra Partai Demokrat, naik dan turunnya sejalan dengan naiknya citra SBY. Hal ini sangat disadari oleh para kader Partai Demokrat, dimana saat tahun 2004 orang terbius oleh yang namanya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dan pada pemilu 2004 Kabupaten Malang memperoleh 29.162.000. Untuk mempertahankan suara yang diperolehnya, para kader Demokrat berupaya untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat yang memang sudah dilakukan oleh partai-partai lain. Termasuk mensosialisasikan siapa itu SBY, dan keberhasilan-keberhasilan pemerintah yang merupakan nilai positif bagi Presiden SBY, dengan harapan punya imbasan pada citra Partai Demokrat.

Isu yang pertama karena itu ditahun 2004 SBY adalah capres sehingga dari kader saya punya kewajiban untuk mensosialisasikan siapa itu SBY yang penting adalah SBY orang Jawa timur asli dari Pacitan, dan suatu kebanggaan tentu jika pemimpin kita berasal dari Jawa Timur. Kemudian alasan yang kedua SBY adalah berasal dari unsur ABRI, seorang TNI adalah seorang ksatria. Saya berusaha menjaga image citra masyarakat, saya berusaha mengkritisi karena saya yakin masyarakat tidak berharap janji-janji tapi butuh realita, walaupun kecil tapi terwujud, itu yang merupakan kebanggaan bagi masyarakat.

C. Perilaku Voting di Era Multi Partai

Kegiatan memberikan suara (*voting*) merupakan bentuk partisipasi aktif politik yang paling kecil, karena hal itu merupakan bentuk keterlibatan minimal yang akan berhenti kalau kegiatan pemberian suara telah terlaksana (Michael Rush & Philip Althoff, 1983). Keterlibatan seseorang

dalam pemberian suara dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sikap dan harapan individu, identifikasi partai, orientasi isu, *image* kandidat dan partai (Dreyer, 1976). Faktor-faktor tersebut tidak secara otomatis bagi pemilih untuk terlibat dalam pemberian suara karena ada faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi pemilih dalam menentukan datang atau tidaknya ke bilik suara. Faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) adalah luas atau lingkup pemilihan (skala Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional), sistem pemilu, strategi kampanye, mass media serta berbagai media komunikasi lain.



Gambar 19. Hubungan Antar Variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Sumber: Edwar C. Dreyer, *Political Opinion And Behavior, Essays and Studies*, Third Edition, Massachusetts, Duxbury Press, 1976.

Bagi mereka yang tidak turut serta dalam aktivitas pemilihan, sering ditujukan kepada sebuah kelompok kecil yang tidak terlibat aktivitas politik, dengan nama-nama atau konsep negatif seperti *apathy*, *sinis*, *alienasi* (*terasing*), dan *anomi* (*terpisah*) (Althoff, dkk, 1983).

1. *Voting Turnout* dan Non-Partisipan

Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu bisa dilihat dari jumlah pemilih yang datang ke TPS (*voting turnout*) dibanding dengan jumlah pemilih yang terdaftar yang mempunyai hak pilih. Dari data menunjukkan bahwa di tiga wilayah baik Kabupaten Kota Malang, maupun Kota Batu pada pemilu 2004 *voting turnout*-nya rendah. Untuk Kabupaten Malang, *voting turnout*-nya hanya sekitar 1.358.992 pemilih atau 72,66 %. Di sisi lain jumlah angka non partisipan sebanyak 334.189 pemilih yang diperoleh dari Jumlah pemilih dikurangi dengan jumlah pemilih yang mempergunakan hak suara yaitu 1.693.181 dikurangi 1.358.992, maka jumlah non partisipan yang ada di Kabupaten Malang kalau diprosentasekan yaitu sekitar 27,34 persen.

Kota Malang yang terdiri dari lima Kecamatan dengan jumlah pemilih sebesar 603.029 dengan *voting turnout* sebesar 425.435 atau sekitar 70,38%. Dengan demikian angka nonpartisan pemilih Kota Malang hampir mendekati 30%, prosentase ini cukup tinggi. Sementara Kota Batu yang terdiri dari tiga Kecamatan yaitu Batu, Bumiaji dan Batu rata-rata *turnout*-nya sekitar 80%. Rendahnya *voting turnout*, berarti angka non-partisipan pemilih di Malang Raya cukup tinggi. Sebagai mana dikemukakan di atas, sikap non-partisipan bisa dijelaskan dengan beberapa konsep seperti *apathy*, *sinis*, *alienasi* (*terasing*), dan *anomi* (*terpisah*)

Kasus non-partisipan dalam pemilu di negara Indonesia tidak begitu atraktif dalam artian secara terang-terangan mereka tidak datang dalam pemilu, akan tetapi mereka tetap datang ke bilik suara dengan melakukan tindakan pencoblosan tidak sah seperti mencoblos lebih dari satu tanda gambar atau mencoblos diluar gambar. Mereka yang melakukan tindakan seperti itu umumnya disebabkan karena adanya ketakutan kalau mereka tidak mendatangi bilik suara atau pemilu. Kondisi ini terjadi pada umumnya dalam masyarakat pedesaan sebagai akibat dari represi rejim Orde Baru yang membuat masyarakat takut untuk tidak ikut pemilu.

Apatisme publik kian menjadi tatkala parpol yang menjadi tumpuan aspirasi politik, rakyat juga dinilai adalah kelompok orang yang sekadar

mencari ketenaran untuk menggapai iming-iming materi. Penurunan perolehan suara parpol dalam dua kali pemilu mengindikasikan kian menurunnya pamor parpol di mata publik, selain juga menggambarkan kian cairnya preferensi pilihan politik. Kondisi tersebut dapat di lihat dari realitas politik yang terjadi di tingkat lokal, khususnya di Malang Raya yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, khususnya di Malang Raya, dalam kaitannya dengan fenomena kepartaian sekarang ini, masyarakat (pemilih) lebih condong telah terjangkit apa yang oleh Phillip Altoff dan Michael Rush katakan sebagai sikap sinisme. Dalam pemilu 1999 dan 2004 rata-rata hampir 30 persen (termasuk mereka yang melakukan pencoblosan yang tidak benar) para pemilih yang terdaftar tidak melakukan atau menggunakan hak pilihnya secara aktif.

a. Apathy

Apathy politik merupakan bentuk dari sikap seseorang yang tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap calon, situasi politik, atau gejala-gejala politik pada umumnya. Morris Rosenberg (1954) menilai ada tiga alasan kenapa apati politik itu bisa terjadi dalam masyarakat, antara lain: *pertama* adanya konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik; *kedua*, individu menganggap aktivitas politik sebagai sia-sia saja; *ketiga*, tidak adanya rangsangan untuk berpolitik.

Risiko merupakan hal yang paling dihindari oleh masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Risiko ini bisa berbentuk hilangnya pertemanan, dijauhi atau dikucilkan oleh kelompok, kehilangan pendapatan. Dalam kaitannya dengan politik, khususnya kenapa tidak mau terlibat dalam pemilihan, umumnya terkait dengan hilangnya pendapatan yang harus mereka tanggung akibat datangnya ke tempat pemungutan suara. Masyarakat desa yang biasa bekerja di sawah sebagai buruh tani, lebih memilih tidak datang ke TPS dari pada kehilangan pendapatan satu hari.

Di sisi lain, keengganan pemilih untuk datang ke TPS dikarenakan ada anggapan negatif terhadap pemilu. Ungkapan yang terlontar dari pemilih "ada pemilu maupun tidak ada pemilu sama saja". Ungkapan itu jelas menunjukkan bahwa pemilih menganggap bahwa aktivitas politik, dalam hal ini memilih, merupakan kegiatan yang menurut mereka sia-sia. Oleh karena itu, para pemilih akan datang ke TPS, apabila ada rangsangan

kepada mereka. Rangsangan yang diberikan bukan rangsangan politik, melainkan rangsangan yang bersifat ekonomi seperti imbalan memberi uang kepada mereka.

b. Sinisme

Sinisme, hampir mirip dengan apati sebagai suatu kepasipan atau ketidak aktifan. Robert Agger mendefinisikan sinisme sebagai kecurigaan yang buruk dari sifat manusia. Dengan demikian sinisme bisa dikatakan sebagai perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan rasa kecurigaan. Dalam kehidupan politik sinisme menampilkan diri dalam bentuk perasaan bahwa politik itu adalah suatu urusan kotor, bahwa para politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi bulan-bulanan dari kelompok yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan dilaksanakan oleh orang-orang yang tanpa muka, dan lain sebagainya.

Hasil dari studi yang dilakukan terhadap masyarakat Malang Raya, terungkap bahwa para politisi menjadi bagian dari sikap sinis masyarakat. Beberapa ungkapan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut: bahwa kebanyakan calon anggota Dewan mengobral janji untuk mendapatkan suara namun tak pernah ditepati, kebanyakan anggota Dewan lebih mementingkan partai sendiri dari pada negara, para anggota Dewan cuma berbicara melulu dan tanpa tindakan, kebanyakan para calon anggota Dewan yang mencalonkan hanya untuk mencari pekerjaan dan menghabiskan uang rakyat politisi, sekali mereka menjadi anggota Dewan mereka melupakan pemilih-pemilihnya.

c. Alinenasi

Sementara alinenasi didefinisikan oleh Robert Lane (1959) sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan, masyarakat kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain, mengikuti sekumpulan aturan yang tidak adil.² Campbell (dalam Dreyer, 1976) tidak terlibatnya seseorang dalam komunitas masyarakat bukan karena adanya penolakan dari masyarakat tersebut, termasuk keterlibatan dalam dunia politik, namun juga karena adanya perasaan curiga, ketidakpercayaan, permusuhan, dan sinis.

² Robert Lane, *Political Ideology* dalam Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1986, hlm. 151.

Banyak dari kalangan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Malang, yang tidak aktif dalam politik adalah mereka-mereka yang berprofesi sebagai pemulung, gelandangan, peminta-minta, maupun mereka yang bekerja sebagai pekerja sex komersial. Keberadaan mereka teralienasi secara sosial, dan begitupun teralienasi secara politik. Keadaan ini telah menyebabkan mereka untuk menjadi apathy total dalam kehidupan politik. Kecurigaan dan ketidakpercayaan pada sistem politik yang besar telah menempatkan dia pada posisi marginal yang teralienasi dari kehidupan masyarakat.

d. Anomi

Sementara anomie dilukiskan oleh Lane sebagai perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah, dalam mana individu mengalami perasaan ketidak efektifan dan bahwa penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari pada tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak. Kondisi ini banyak terjadi, khususnya di wilayah yang banyak warga minoritasnya. Warga pendatang atau warga dengan etnis berbeda, cenderung tidak aktif dalam kehidupan politik. Hasil dari obeservasi menunjukkan bahwa warga minoritas dari etnis tionghoa cenderung pasif dalam politik, termasuk dalam kegiatan keterlibatan minimal sekalipun yaitu memberikan suara dalam pemilu.

2. Pilihan Politik Pemilih

a. Pemilu Tahun 1999

Pada pemilu di era multipartai Tahun 1999 sebagaian besar pemilih memberikan suaranya pada PDI Perjuangan, sehingga PDIP mendominasi perolehan suara dengan jumlah 35.689.073 suara (33,74 persen) dari 47 peserta partai pemilu. Partai Golkar yang pada saat Orde Baru selalu menjadi pilihan politik pemilih hanya mampu meraup suara sekitar 22,46 %. Sementara partai-partai Islam atau yang punya hubungannya dengan pemilih Islam Santri kalau digabungkan semuanya mendapat sekitar 40 % lebih suara. Pada pemilu 1955, Masyumi dan NU yang pada saat itu merupakan partai Islam memperoleh sekitar 40 % suara. Dengan demikian asumsi yang mengatakan bahwa pemilu 1999 merupakan kelanjutan dari pemilu 1955 bisa dibenarkan.³ Hal ini juga

³ Pada Tahun 1955 dan pemilu Tahun1999 ada perbedaan komposisi partai politik, dimana pada pemilu 1955 ada partai "kiri" yang mapan seperti PKI dan PSI, sementara pada pemilu 1999, partai 'kiri' yang mapan boleh dibilang absen sama sekali, setelah dihancurkannya

pernah diprediksikan oleh Anies Baswedan (2004) dalam artikelnya yang berjudul "*Political Islam in Indonesia: present and future trajectory*" dalam jurnal *Asian Survey* (vol. 44/5, 2004). Menurut Anies dalam pemilu 1955, partai-partai Islam (Masyumi, Nahdlatul Ulama dan lain-lain) menguasai 40 persen suara, sementara pada pemilu 1999, partai-partai Islam (Anies menyebutnya sebagai Islam-friendly) secara total menguasai 50 persen suara.

Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah tidak ada pengaruh pada pola pilihan masyarakat terhadap partai setelah hampir tiga puluh tahun lebih dilakukan pengaburan politik aliran oleh rezim Orde Baru? Memang pada masa Soeharto, pluralisme politik ditekan sehingga akhirnya hanya ada satu partai yang berkuasa yakni Golongan Karya, dan Soeharto sukses menyingkirkan kekuatan politik aliran Santri di satu pihak. Akan tetapi di pihak lain anak-anak Santri ini mulai tertarik terhadap ide politik Islam baru yang mengapresiasi pluralisme politik. Bersamaan dengan itu, Orba sendiri membuat kebijakan yang kondusif bagi tumbuhnya Islam sosial lewat pendidikan agama dan sarana agama ditingkatkan. Santrinisasi lewat pendidikan kemudian tumbuh. Merekalah yang kemudian banyak mengisi birokrasi dan elite Golkar.

Karena pola afiliasi politik yang terjadi Orde baru hanya bersifat artifisial, maka ketika muncul perubahan politik mereka yang Santri tetap memilih partai Islam, sementara mereka yang Abangan tetap memilih partai Nasionalis. Namun demikian, bagi sebagian kalangan pemilih yang berasal dari keluarga yang telah menikmati kebijakan Orde Baru tetap setia memilih Golkar, khususnya dari keluarga PNS, TNI dan sebagian masyarakat umum yang diuntungkan oleh kebijakan Orde Baru. Walaupun demikian, akibat terjadinya rekayasa politik rezim Orde Baru, ada sedikit pergeseran dari pemilih terkait dengan

Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 dan juga dengan ditekannya Partai Sosialis Indonesia (PSI) oleh Sukarno dan juga Suharto. Lantas kemanakah larinya suara dari partai yang berhaluan "kiri" ini? Kalau dilihat dari hasil perolehan suara, jelas bahwa larinya suara dari partai yang berhaluan kiri ini sebagian besar ke PDIP dan sebagian lagi ke Golkar dan partai lainnya. PDIP yang merupakan kelanjutan sejarah PNI pada pemilu 1955, dimana PNI dalam pemilu 1955 memperoleh suara 22,32 %. Kalau melihat hasil perolehan suara PNI pada pemilu 1955, maka sejatinya perolehan suara PDIP itu berada pada kisaran 20 %. Artinya dalam PDIP ada limpahan suara yang oleh Riwardan (2004) dikatan sebagai *Swing Voters*, dengan demikian suara PDIP dalam pemilu 1999 bukan merupakan suara riil.

pemaknaan mereka pada partai politik. Ketika pemilih memaknai partai Islam tidak hanya dilihat dari asas atau Platform partai, tetapi juga dari tokoh dan sejarah berdirinya partai tersebut. Sebagai contoh, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa, walaupun keduanya tidak berasaskan Islam, yakni berasas Pancasila, namun tetap basis massanya adalah dari Islam Santri. Dimana pemilih PKB merupakan pemilih dari kalangan Santri Tradisional, sementara PAN berasal dari pemilih Santri yang tergolong Modernis. Artinya, ada perubahan cara pandang pemilih dalam melihat partai Islam. Mereka melihat partai Islam tidak hanya pada tataran simbolis partai politik, namun pada kader atau pemimpin yang duduk di partai termasuk historis pembentukan partai tersebut.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, pasca orde baru yang terjadi bukan signifikansi politik aliran melemah seperti yang banyak dibicarakan oleh sebagian pengamat politik Indonesia, melainkan terjadi perubahan orientasi cara pandang terhadap apa yang dinamakan partai politik.

Sebagaimana hasil temuan di lapangan yang menunjukkan adanya alur yang sama dengan aliran politiknya Geertz, dimana pemilih Santri memilih partai Islam, pemilih Abangan memilih partai Nasionalis. Masyarakat Abangan di Malang Raya yang cukup besar menunjukkan identitas dirinya dengan memilih partai PDIP, begitupun mereka yang Santri menunjukkan identitas ke-Santrian dengan memilih partai Islam. Jika dibandingkan antara golongan pemilih Abangan dengan pemilih Santri, secara kuantitatif pemilih Abangan lebih besar, walaupun Malang ini terkenal juga dengan masyarakat Islami. Karena besarnya masyarakat Abangan ini, maka PDI-P Malang Raya memiliki pendukung cukup banyak yang dibuktikan dengan pilihan politik pemilih pada PDIP ketika pemilu 1999. Kemenangan PDIP di Malang Raya hampir merata di setiap daerah (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu). Di Daerah Kabupaten Malang pemilih memberikan suaranya kepada PDI-P sebanyak 510.450 pemilih (38,47%) pada pemilu 1999 dan 357.008 pemilih (28,97%) pada pemilu 2004.

Dalam pemilu 1999, dari beberapa partai Islam atau yang mempunyai hubungannya dengan pemilih Islam, yaitu PKB, PPP, PAN, PK, PBB, dan yang lainnya, PKB mempunyai dukungan pemilih

paling besar. Partai Kebangkitan Bangsa menempati urutan kedua terbesar setelah PDIP yaitu 29, 57 % untuk Kabupaten Malang, 19,60 % untuk Kota Malang, padahal secara nasional jumlah pemilih yang memberikan suaranya ke PKB ini pada tahun 1999 hanya 12,62 %. Hal ini bisa dipahami karena wilayah Jawa Timur, khususnya Malang Raya merupakan basis dari Partai NU yang pada pemilu 1955 merupakan pemenang kedua setelah Masyumi. Sementara dukungan pemilih pada partai Islam lainnya tidaklah signifikan, kecuali untuk PAN yang punya basis pemilih golongan Islam Modernis mendapat 10, 53 % di Kota Malang.

Tabel 35. Delapan Besar Partai Politik Pemilu 1999 Di Kabupaten dan Kota Malang

| No | Nama Partai | Kota Malang | | Kabupaten Malang | |
|----|-------------|-----------------|------------|------------------|------------|
| | | Perolehan suara | Prosentase | Perolehan suara | Prosentase |
| 1 | PDI-P | 162.818 | 41,22% | 510.450 | 38,47% |
| 2 | PKB | 77.429 | 19,60% | 392.472 | 29,57% |
| 3 | P. Golkar | 63.362 | 16,04% | 243.110 | 18,32% |
| 4 | PPP | 3157 | 0,78% | 45.939 | 3,46% |
| 5 | PK | 921 | 0,23% | 5.261 | 0,38% |
| 6 | PAN | 41.582 | 10,53% | 38.891 | 2,93% |
| 7 | PDS | 11.080 | 2,80% | 1.179 | 0,086 |
| 8 | PBB | 9.518 | 2,41% | 9.875 | 0,74% |

Sumber: KPUD Malang Raya yang telah diolah penulis

Keterangan: Pada pemilu 1999 Kota Batu masih berstatus Kota Administratif yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Malang.

Sementara partai-partai lainnya, tidak begitu mendapat apresiasi dari pemilih di Kota dan Kabupaten Malang. Partai-partai yang tidak memperoleh apresiasi umumnya adalah partai yang tidak punya basis massa yang jelas. Secara lengkap pilihan politik pemilih di Kabupaten dan Kota Malang, bisa dilihat dalam tabel 35 di atas.

Tabel 36. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu 1999 Kota dan Kabupaten Malang

| No | Nama Partai | Jumlah Suara | |
|----|-------------------------|--------------|-------------|
| | | Kota Malang | Kab. Malang |
| 1 | PIB | 307 | 1.321 |
| 2 | KRISNA | 1.453 | 1.795 |
| 3 | PNI | 778 | 2.782 |
| 4 | PADI | 120 | 337 |
| 5 | KAMI | 462 | 1.484 |
| 6 | PUI | 468 | 1.873 |
| 7 | PKU | 904 | 5.107 |
| 8 | P.MSYUMI BARU | 151 | 994 |
| 9 | PPP** | 11.080 | 45.939 |
| 10 | PSII | 159 | 1.105 |
| 11 | PDI PERJUANGAN** | 162.818 | 510.450 |
| 12 | PAY | 479 | 2.188 |
| 13 | PKM | 87 | 550 |
| 14 | PDKB | 1.059 | 1.906 |
| 15 | PAN** | 41.582 | 38.891 |
| 16 | PRD | 801 | 780 |
| 17 | PSII 1905 | 118 | 572 |
| 18 | PKD | 424 | 384 |
| 19 | PILAR | 68 | 102 |
| 20 | PARI | 87 | 381 |
| 21 | MASYUMI | 625 | 2.961 |
| 22 | PBB** | 9.518 | 9.875 |
| 23 | PSP | 101 | 336 |
| 24 | PK | 3.157 | 5.281 |
| 25 | PNU | 1.796 | 5.487 |
| 26 | PNI PRON MARHAENIS | 609 | 3.905 |
| 27 | IPKI | 402 | 2.802 |
| 28 | P. REPUBLIK | 208 | 604 |
| 29 | PID | 104 | 443 |

| | | | |
|----|---------------------|----------------|------------------|
| 30 | PNI MASSA MARHAEN | 522 | 3.533 |
| 31 | MURBA | 136 | 583 |
| 32 | PDI | 781 | 2.863 |
| 33 | GOLKAR** | 63.362 | 243.110 |
| 34 | PP | 737 | 2.507 |
| 35 | PKB** | 77.429 | 392.472 |
| 36 | PUDI | 435 | 850 |
| 37 | PBN | 278 | 839 |
| 38 | MKGR | 373 | 1.966 |
| 39 | PDR | 701 | 5.239 |
| 40 | P.CINTA DAMAI | 921 | 1.179 |
| 41 | PKP | 5.608 | 12.300 |
| 42 | SPSI | 180 | 740 |
| 43 | PNBI | 284 | 2.003 |
| 44 | PBI | 2.210 | 851 |
| 45 | SUNI | 567 | 3.604 |
| 46 | PND | 334 | 746 |
| 47 | PUMI | 58 | 320 |
| 48 | PPI | 153 | 511 |
| | Jumlah Total | 394.999 | 1.326.962 |

Sumber: KPUD Malang Raya yang telah diolah penulis

Keterangan:

** Partai yang lulus *Electoral Threshold* 3 %.

b. Pemilu Tahun 2004

Pemilu 2004 adalah pemilu kedua dalam masa transisi demokrasi. Pada pemilu 1999 partai politik masih mengikuti alur budaya politik aliran, begitupun para pemilihnya terjebak pada dasar pilihan yang bersifat sektarian. Padahal dengan waktu lima tahun, ada pelajaran yang dapat diambil oleh pemilih untuk lebih rasional. Namun kenyataannya jauh dari harapan, karena pemilu legislatif 2004 ini perilaku politik masyarakat tetap berubah dan tetap sektarian. Pragmentasi dari masyarakat Indonesia yang mengikuti alur budaya primordialisme. Pembilahan sosial yang terjadi dalam masyarakat oleh Liddle (1992)

dikatakannya sebagai sungai budaya tetap menjadi pijakan politik pemilih.⁴

Sungai Budaya yang ada terbelah dalam dua aliran besar, yaitu, Nasionalis dan Islam. Karena itu, manuver yang mereka lakukan pun secara otomatis memusat pada kedua aliran tersebut. Sedangkan tokoh dari aliran lain seperti Sosialis, misalnya, sejauh ini kurang mendapatkan tempat di hati rakyat. Hal ini bisa diidentifikasi dari tidak munculnya nama seorang tokoh pun dari aliran tersebut yang mendapatkan dukungan luas dari responden.

Hasil lapangan menunjukkan bahwa pemilih Abangan tetap mendominasi. Dalam pemilu 2004, walaupun terjadi pergeseran pilihan politik pemilih dimana PDIP yang pada pemilu 1999 mendapatkan dukungan pemilih sebesar 33,76 % secara nasional, turun menjadi 19,58 %, tetapi secara keseluruhan masih menunjukkan dominasinya di Malang Raya. Untuk wilayah Malang Raya, PDIP memperoleh 28,97% untuk Kabupaten Malang, 25,84 % Kota Malang, dan 19,88 % untuk Kota Batu. Sementara urutan kedua diduduki oleh PKB dengan perolah suara 25,72 % untuk Kabupaten Malang, 17,36 % Kota Malang, dan 13,19 % untuk Kota Batu. Sementara Golkar yang banyak disebut mendapat dukungan dari golongan aliran budaya ketiga yang oleh Geertz disebut priyayi, di Malang Raya menempati posisi ketiga untuk perolehan suara Kabupaten dan Kota Malang dengan dengan dukungan pemilih sebesar 16,68 % dan 17,36 %. Akan tetapi, Golkar mampu menjadi nomor satu untuk wilayah Kota Batu yang *notabene* sebagai daerah baru hasil pecahan dari Kabupaten Malang. Di Kota Batu, Golkar mendapat dukungan pemilih sebesar 20,62 %, diikuti oleh PDIP dan PKB yaitu 19,88 % dan 13,19 %.

⁴ Berkaitan dengan pembilahan sosial ini Soekarno (1964), misalnya, membelah masyarakat Indonesia menjadi tiga, yaitu, Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom). Dalam tataran politik praktis, kelompok Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama oleh Masyumi dan NU sedangkan Komunis direpresentasi oleh PKI. Selanjutnya Geertz (1965) menyodorkan trikotomi Santri (PPP)-Abangan (PDI)-Priyayi (Golkar). Pada tahun 1970, Feith dan Castles menyodorkan pembagian yang lebih kompleks untuk Sungai Budaya tahun 1950-an, yaitu, Nasionalisme radikal (PNI), Tradisionalisme Jawa (PNI-PKI-NU), Islam (NU, Masyumi), sosialisme demokratis (PNI-Masyumi) dan komunisme (PKI). Mencoba mengikuti Feith dan Castles, Dhakidae (1999) membagi masyarakat ke dalam 4 kelompok, yaitu, kelompok Nasionalis (PDI-P), Pembangunan (Golkar), Agama (PBB) dan Sosialisme (PRD). Sedangkan Suryadinata (2002) mengkristalkan kembali pemikiran dan aliran politik yang ada ke dalam dua kategori besar, yaitu, Pancasila dan Islam Politik (Political Islam).

Tabel 37. Sembilan Besar Partai Politik Pemilu 2004 di Malang Raya

| No | Nama Partai | Kab. Malang | | Kota Malang | | Kota Batu | |
|----|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | Perolehan suara | Prosen-tase | Perolehan suara | Prosen-tase | Perolehan suara | Prosen-tase |
| 1 | PDI-P | 357.008 | 28,97% | 101.732 | 25,84% | 21.317 | 18,97% |
| 2 | PKB | 316.665 | 25,72% | 68.321 | 17,36% | 14.148 | 12,59% |
| 3 | P. Golkar | 205.505 | 16,68% | 57.278 | 14,55% | 22.110 | 19,67% |
| 4 | P. Demokrat | 95.670 | 7,76% | 48.612 | 12,35% | 13.197 | 11,74% |
| 5 | PPP | 55.597 | 4,51% | 9.271 | 2,36% | 2.688 | 2,51% |
| 6 | PKS | 37.534 | 3,05% | 28.182 | 7,16% | 3.311 | 2,95% |
| 7 | PAN | 32.099 | 2,61% | 26.663 | 6,77% | 6.336 | 5,91% |
| 8 | PDS | 13.261 | 1,08% | 9.271 | 2,36% | 2.731 | 2,43% |
| 9 | PBB | 11.482 | 0,93% | 5.050 | 1,28% | 1.196 | 1,12% |

Sumber: Data Hasil Pemilihan Umum 2004 KPU D Malang Raya yang telah diolah penulis.

3. Ketidakstabilan Electoral

Menurut Riswanda Imawan (2004), perolehan suara partai-partai sangat ditentukan oleh tiga faktor baru yang muncul dalam pemilu 2004: *Civic disengagement*, *swing votes*, dan *spilt voting*. *Civic disengagement* adalah kemampuan rakyat mengambil jarak dengan proses politik, sehingga mampu mereorientasi konsep dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat. *Swing votes*, adalah suara pindah dari satu ke lain partai. *Spilt voting* adalah pola memberi suara yang tidak hanya ke satu parpol untuk berbagai kesempatan memilih yang tersedia.

Ketidakstabilan electoral adalah ketidak konsistenan perolehan suaran dari partai-partai yang ikut dalam pemilu. Dalam pemilu 1999 perolehan suara partai-partai papan tengah ke atas seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB dalam pemilu 2004 mengalami penurunan dan memunculkan partai baru yang masuk ke papan tengah yaitu PKS dan Partai Demokrat. Penurunan suara partai-partai ini merupakan akibat dari adanya pengalihan suara pemilih dari partai yang dipilih pada pemilu 1999 ke partai lain yang ikut dalam pemilu 2004, kondisi ini dinamakan sebagai *swing votes*. Sementara, suara yang diberikan terhadap caleg dan partai politik dalam pemilu legislatif tidak sama dengan pilihan terhadap Presiden. Atau dalam pemilu 2009, ada kemungkinan terjadinya perbedaan pilihan terhadap caleg, misal

untuk tingkat Kota dan Kabupaten memilih caleg dari partai A, tingkat provinsi caleg dari partai B, dan mungkin untuk tingkat Nasional memilih caleg dari partai C. Fenomena pilihan politik demikian disebut dengan *split Voting*.

a. Swing Votes

Kinerja partai yang dianggap rendah, serta tidak tepatnya strategi dalam meraih simpati pemilih seperti lemahnya penguatan ideologi dan pendekatan sosial ekonomi telah berdampak pada dinamika perolehan suara masing-masing partai pada pemilu 2004. Pada pemilu 2004 partai-partai yang meraih suara cukup signifikan mengalami degradasi. Dan kondisi tersebut di atas ditenggarai telah mendorong terjadi pergeseran pilihan politik pemilih yang merasa kecewa dengan partai politik atau adanya pendekatan dari partai lain yang dianggap pas dengan apa yang dimaknai partai oleh pemilih. Sebagaimana hasil penemuan di lapangan, bahwa masyarakat pemilih mengatakan kecewa terhadap kinerja dari partai partai politik dan mengakui bahwa mereka tidak ikut mencoblos serta sebagian lagi mengalihkan pilihan politiknya. Fenomena tersebut berujung pada menurunnya perolehan suara beberapa partai-partai besar yang lulus *electoral threshold*. Sebagai contoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dalam pemilu 1999 memperoleh sekitar 33,67%, dalam pemilu 2004 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi 19,58 %. Yang juga diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan dari 10,72% menjadi 8,32% dan Partai Amanat Nasional dari 7,12% menjadi 6,47%.

Namun demikian secara umum partai-partai yang berbasis Nasionalis tetap mendominasi dalam pemilihan umum baik pada pemilu 1999 maupun 2004. Kondisi ini hampir mirip dengan pemilu demokratis pertama tahun 1995, dimana ada empat partai besar yang berhasil mendominasi dalam pemilu yaitu PNI 22,3 % suara, Masyumi 20,9% suara, NU 18,4 % suara, dan PKI 16,4 % suara. Dari data tersebut menunjukkan bahwa suara mayoritas dipegang oleh PNI yang Nasionalis.⁵

⁵ Alfian, Analisis Hasil Pemilihan Umum 1971, LIPI, Jakarta, 1973.

Tabel 38. Perolehan Suara Nasional Pemilu 1999 dan 2004

| No | Partai Politik | Suara (%) | |
|----|---|-----------|-------|
| | | 1999 | 2004 |
| 1 | PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) | 33,76 | 19,58 |
| 2 | Partai Golkar (Partai Golongan Karya) | 22,46 | 21,7 |
| 3 | PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) | 12,62 | 11,98 |
| 4 | PPP (Partai Persatuan Pembangunan) | 10,72 | 8,32 |
| 5 | PAN (Partai Amanat Nasional) | 7,12 | 6,47 |
| 6 | PBB (Partai Persatuan Pembangunan) | 1,94 | 2,56 |

Sumber: Data Hasil Pemilihan Umum 1999 dan 2004 Komisi Pemilihan Umum Pusat, yang telah diolah penulis.

Dalam pemilu 2004, walaupun hasilnya tidak begitu jauh berbeda dengan pemilu 1999 dimana partai besar tetap dominan, namun ada fenomena yang menarik dengan munculnya partai politik baru yang mendapat simpati sehingga mendapatkan suara yang cukup besar seperti Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan di sisi lain ada partai yang mengalami peningkatan pemilih seiring dengan berkurangnya pemilih yang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam pemilu 2004 telah terjadi pergeseran pemilih walaupun tidak terlalu signifikan. Pola perubahan dalam perilaku politik memilih dalam proses pembangunan politik punya hubungan yang sangat erat dengan berbagai perubahan sosial (*social changes*)⁶ yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil yang diperoleh dalam pemilu 1999, menunjukkan hanya ada 6 parpol yang mendapat simpati para pemilih. Dari keenam parpol tersebut pada Pemilu 2004 menjadi parpol yang lolos dengan tidak melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU, baik administratif maupun faktual. Keenam partai tersebut telah lulus *electoral threshold* (mempunyai 3 % dari jumlah suara secara nasional). Berdasarkan ketentuan UU No. 12/2003 partai yang sudah memenuhi *electoral threshold* tersebut, langsung ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2004 apabila mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu ke KPU. Keenam partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa,

⁶ Persoalan-persoalan yang terkait dengan perubahan sosial dan pembangunan politik banyak dibahas dalam bukunya Jason L. Finkle and Rachard W. Gable, *Political Development and Social Change* (second edition), Canada: John Wiley & Sons, Inc., 1971

Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang. Sementara jumlah partai yang mengikuti proses verifikasi ada 44, dan setelah proses verifikasi selesai, hanya ada 18 partai yang lulus. Ditambah dengan 6 partai yang lulus *threshold*, jumlah keseluruhan partai yang berhak menjadi peserta Pemilu 2004 adalah 24.

Kebanyakan partai politik yang gagal meraih simpati pemilih pada pemilu 1999 karena kurang mampu menjadi representasi politik masyarakat. Berbagai aspirasi, harapan, ketakutan, keinginan yang melekat dengan pemakaian partai oleh masyarakat pemilih tidak ditangkap dan dijadikan dasar dalam melakukan strategi pemenangan pemilu. Buktinya partai keadilan yang pada pemilu 1999 tidak memenuhi batas ambang suara, pada pemilu 2004 dengan mengubah namanya menjadi PKS bekerja secara sistematis dan programatik dengan mendekati diri pada masyarakat mendapatkan simpati dari pemilih pada pemilu 2004.

Kegagalan dalam memenuhi harapan masyarakat pada era pemerintahan Megawati telah membawa dampak pada kekecewaan pemilih pada reformasi yang berujung pada keinginan kembalinya suasana masa lalu (masa Orde Baru). Kondisi ini memberi angin segar bagi Golkar yang merupakan partai pendukung rezim orde baru pada masa itu. Alhasil, pada pemilu tahun 2004 Golkar menjadi pemenang. Masyarakat pemilih menghendaki kembali ke jaman normal (ketika Orba), dimana sandang, pangan dan keamanan terjamin.

Perubahan *political mood* atas era reformasi membawa dampak pada sikap dan perilaku politik pemilih. Dengan bertambahnya pengangguran terbuka, harga-harga terus naik sementara itu lapangan kerja semakin sulit didapat, mendorong masyarakat bertindak praktis pragmatis, termasuk dalam hal berhubungan dengan partai politik. Meminjam istilahnya Seymour Martin Lipset (1960)⁷, "*the higher the level of economic development, the better the prospect for democracy*". Dengan kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini rasanya sulit untuk bisa berdemokrasi dengan baik. Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan demokrasi bisa dibeli dengan uang. Masyarakat bisa diatur agar demonstrasi, atau mengacaukan keputusan-keputusan demokratis.

⁷ Untuk lebih jelasnya, lihat Seymour Martin Lipset, *Political Man, The Social Bases Of Politics*" New York, Feffer & Simons Inc, 1960.

Pengaruh dari adanya kondisi psikologis massa yang buruk terhadap kondisi ekonomi dan para elit politik adalah kekacauan electoral. Partai-partai politik yang ikut dalam pemilu tidak bisa menjamin stabilitas suara yang diperoleh. Pilihan politik masyarakat dari satu pemilu ke pemilu berikutnya bisa berubah, bergantung pada pertimbangan praktis-pragmatis berupa bantuan ekonomi yang bisa dirasakan secara langsung. Perilaku politik demikian lebih menonjol pada pemilih yang mempunyai tingkat afiliasi politik rendah dan menengah, hal ini sebagian diakibatkan oleh massa mengambang (*floating mass*) yang diberlakukan pada masa Orba selama 32 tahun. Walau demikian, masih bisa dilihat pada sebagian pemilih yang konsisten dengan partai politik. Mereka mendasarkan pilihan politik pada alur politik aliran. Bagi yang mengidentifikasi dirinya Santri akan memilih partai Islam, sementara bagi mereka yang mengidentifikasi dirinya Abangan akan memilih partai Nasionalis.⁸

Kondisi tersebut di atas bisa dilacak dari pilihan politik pemilih di tingkat lokal. Dalam pemilu 1999 dan 2004, Malang Raya menjadi miniatur politik yang bisa mewakili alur politik berdasarkan pola aliran tersebut. Masyarakat Malang Raya yang mayoritas beragama Islam, terbagi ke dalam kedua kelompok pemeluk Islam yaitu Santri dan Abangan. Kedua kelompok itu, walaupun dalam aspirasi politik dan perilaku keberagamaannya berbeda, namun dalam konteks tertentu mereka masih bersama-sama. Dengan demikian, keberpihakan politik tidak menjadikan mereka berkonflik dengan sesama pemeluk Islam. Dengan adanya kebebasan politik ini, masyarakat berkecenderungan mengekspresikan kebebasan politiknya secara khas baik yang Santri maupun yang Abangan. Tidak ada tekanan sesama mereka, baik yang Santri maupun yang Abangan sama-sama menunjukkan identitas politik sendiri.

⁸ Penggunaan istilah Santri dan Abangan dalam melihat perilaku pemilih di Indonesia seperti yang dikemukakan Geertz, menurut padangan penulis masih relevan. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, Di samping pembilahan social politik ini telah lama menjadi identitas dari masyarakat Muslim di Indonesia. Adapun perkembangan terkini yang mengkritisi pendapat Geertz, bassicly masih pada alur Abangan, Santri dan priyayi. Artinya perkembangan varian Islam terkini masih dalam pakem pembilahan Geertz implementasinya dalam politik.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Bab 8

KESIMPULAN

Proses pembangunan politik pasca kejatuhan rezim Orde Baru cukup pesat, salah satunya ditandai dengan adanya transformasi dalam sistem kepartaian dan pemilu, serta meningkatnya partisipasi politik. Sistem kepartaian berkembang dari limitasi¹ menjadi multipartai, sementara pemilu dilakukan oleh lembaga independen yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjamin proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Partisipasi masyarakat dalam politik pun meningkat yang ditandai dengan besarnya minat masyarakat untuk mendirikan partai, sekaligus aktif dalam berbagai aktivitas politik, termasuk mereka yang ikut melakukan mobilisasi politik.

Pemilu pada masa Orde Baru hanya diikuti oleh dua partai politik (yaitu, PPP dan PDI) dan satu Golkar, sebaliknya pada pemilu era reformasi diikuti oleh banyak partai (multipartai). Pada pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, dan pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai, sementara pemilu 2009² rencananya akan diikuti oleh 34, dengan empat partai tambahan (jumlah keseluruhan 38 partai), dengan enam partai lokal yang ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Lahirnya partai politik di era multipartai sekarang lebih banyak mengadopsi basis massa yang berlatar primordialisme (aliran) yang secara jamak dipakai partai

¹ Yang dimaksud dengan limitasi partai adalah pembatasan partai politik pada rezim Orde Baru dengan cara mewajibkan partai politik yang ada pasca pemilu 1971 untuk menggabungkan diri (fusi) kelima kelompok partai yang sejenis (se-aliran) yaitu kelompok agama dan kelompok Nasionalis.

² Proses politik yang terjadi di DPR hasil pemilu 2004, pada penghujung masa jabatannya para anggota Dewan, khususnya dari partai kecil, berupaya mendesak agar partainya tidak diverifikasi ulang. Untuk itu mereka mengajukan perubahan system threshold, dari electoral menjadi parliamentary threshold. Hasil verifikasi awal, KPU meloloskan sebanyak 34 partai politik baik yang lolos threshold maupun verifikasi administrative. Namun keputusan ini dianggap tidak adil dan dianggap melanggar perundang-undangan, oleh karena itu sebagian partai peserta pemilu 2004 yang tidak lolos mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan bahwa empat partai politik berhak ikut dalam pemilu 2009.

politik dalam pemilu 1955³ Orde Lama. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kondisi keparpolan di Indonesia saat ini lebih merupakan sistem kepartaian 1995 jilid dua,⁴ dengan situasi dan kondisi berbeda dari jilid pertama (Orde Lama). Hal ini telah mendorong adanya dinamika politik kepartaian yang jauh berbeda dengan ketika masa rezim terdahulu yang represif (Orde Baru).

Berubahnya sistem kepartaian juga berpengaruh pada pola hubungan partai dan pemilihnya, termasuk pada pemaknaan partai politik oleh pemilih. Dinamika politik, pola hubungan, serta pemaknaan baru oleh pemilih tidak diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik oleh partai politik. Hal ini dibuktikan dari jeleknya kinerja partai maupun anggota Dewan.⁵ Akibatnya reformasi politik kepartaian menjadi tidak sejalan dengan harapan masyarakat, lebih jauh reformasi tidak linier dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan reformasi, yang terjadi justru melahirkan bibit-bibit baru korupsi, kolusi dan nepotisme, khususnya di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi ini secara cepat menjalar dan menimbulkan sikap "sinisme"⁶ kepada partai politik. Sikap sinisme ini lantas diikuti oleh perilaku "apathy" dan perasaan "anomi" di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi

³ Pada pemilu 1955 ada empat partai yang mendapatkan suara mayoritas seperti PNI dengan 22,3%, Masyumi 20,9%, NU 18,4%, PKI 16,4%. Keempat partai ini walaupun mendapatkan suara besar, namun tidak jelas berapa besar ikatan afiliasi politik pemilihnya karena tidak dapat dibuktikan konsistensinya akibat punahnya partai tersebut. Masyumi dibubarkan oleh Soekarno karena dicurigai sebagai biang keladi dari banyaknya pemberontakan yang dilakukan oleh kalangan Islam dan menentang diberlakukannya ideologi Nasakom (Bruinessen, 1994), PKI bubar akibat terjadinya peristiwa G.30/S PKI yang membawa korban cukup besar dikalangan partisan politiknya. Sementara PNI dan NU harus mengalami nasib naas ditinggalkan partisan pemilihnya karena terjadinya pusi partai.

⁴ Kenyataan ini menurut Fachry Ali (1996) diakibatkan oleh kelangkaan atau ketiadaan basis material baru untuk membangun partai politik.

⁵ Parpol menggunakan konstituen untuk kepentingan jangka pendek, dimana parpol memakai konstituen sebagai pendulang suara dalam Pemilu, alat legitimasi, alat mobilisasi, tatkala instrument partai membutuhkan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Konstituen diposisikan sebagai sub-ordinat untuk memenuhi keinginan dan kepentingan politik partai. Di samping itu, komunikasi dan hubungan parpol dengan konstituen pada umumnya masih satu arah, yaitu dari parpol kepada konstituen. Desain program parpol tidak mencerminkan harapan dan kebutuhan konstituen yang diwakilinya.

⁶ Sinisme merupakan perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan rasa kecurigaan.... Secara politis, sinisme menampilkan diri dalam berbagai cara: perasaan bahwa politik itu adalah suatu "urusan yang kotor", bahwa para politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu itu menjadi bulan-bulanan dari kelompok yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan 'sebenarnya' dilaksanakan oleh 'orang-orang tanpa muka' dan sebagainya. Michael Rush dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, terjemahan, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

pendorong dari berkembangnya kelompok non-partisan dan massa mengambang (*floating mass*) yang dicirikan dengan pola perilaku praktis-pragmatis dalam memilih partai.

Kondisi tersebut di atas berdampak pada beberapa hal, antara lain: *pertama*, terjadinya pemudaran ikatan pemilih (*de-alignment*) pada partai politik, yang ditandai dengan perilaku *swing voters*. Banyak partai yang memperoleh suara signifikan pada pemilu 1999 namun akhirnya mengalami kemunduran pada pemilu 2004. Transformasi dalam masyarakat baik sosial maupun politik, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kepentingan yang berakibat pada berubahnya pola afiliasi politik seiring dengan berubahnya pola kepentingan tersebut. *Kedua*, selanjutnya terbentuknya pola afiliasi politik baru baik itu yang bersifat natural maupun artifisial. Dan dalam pemilu-pemilu yang dilaksanakan di era reformasi menjadi semacam percampuran, kalau tidak dikatakan "sintesa", dari kesadaran historis pemilu 1955 dan realitas pada setiap pemilu Orde Baru.⁷

Hasil pemilu era reformasi tahun 1999 menunjukkan adanya dominasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung nama besar Soekarno dengan memperoleh suara 33,76 %. Walaupun Megawati sebagai Ketua PDIP menafikan bahwa hasil perolehan PDIP hanya mengandalkan kharisma Bung Karno, namun demikian dalam setiap kampanye terlihat selalu menyertakan poster-

⁷ Pada masa Orde baru, banyak persoalan maupun dinamika yang berkembang, tidak hanya disebabkan oleh adanya regulasi kepartaian, namun juga dinamika politik pemilih yang menunjukan adanya pengalihan pilihan politik besar-besaran kepada partai pemerintah yaitu Golkar. Menjelang pemilu pertama tahun 1971, partai-partai dilakukan pengelompokan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: *pertama*, golongan Nasionalis; *kedua*, golongan spirituil; *ketiga*, golongan karya. Dengan demikian Partai politik yang ikut dalam pemilu 1971 hanya sepuluh, antara lain 9 partai sebagai warisan Orde Lama seperti NU, Parmusi, PSII, Perti, PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba ditambah satu partai baru yaitu Golkar. Dan pada pemilu selanjutnya menjadi tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (Golongan Spiritual), Partai Demokrasi Indonesia (Golongan Nasionalis), dan Golkar (Golongan Karya).

Fenomena politik pada masa rezim Orde Baru setelah terjadinya fusi adalah kemenangan yang konsisten Golkar dalam setiap pemilu dengan dukungan pemilih yang cukup besar. Perolehan suara Golkar berturut-turut dalam pemilu 1971 (62,8%), 1977 (62,1%), dan 1982 (64,3%) (Alfian, 1990:106). Dalam kondisi era Orde Baru, walaupun kita bisa melihat adanya konsistensi pemilih dalam pilihan politiknya, namun hal ini tidak bisa kita serta merta melakukan generalisasi bahwa Golkar mempunyai partisan politik sebagaimana dalam angka. Hal ini dikarenakan pada era Orde Baru situasi politik tidak berjalan secara fair dan bebas, karena faktor Orde Baru yang menjalankan politik *Bureaucrati Authoritarianism*. Pemilu banyak terjadi kecurangan baik dalam proses maupun hasil, begitupun banyak pemilih terintimidasi terutama mereka yang berasal dari golongan sosialis. Banyak pemilih yang mencoblos partai Golkar karena takut dituduh komunis.

poster bergambar Bung Karno. Namun demikian, dalam pemilu 2004 PDIP mengalami penurunan yang sangat drastis dengan perolehan suara 19,76% dibanding pemilu 1999 yang mendapatkan 33,94% (Nasional). Dengan demikian PDIP mengalami penurunan suara yang cukup signifikan yaitu sekitar 14,18%. Sementara Golkar yang pada masa Orde Baru selalu tampil sebagai mayoritas (rata-rata di atas 60%) dalam pemilu di era reformasi mendapatkan suara 22,46% dalam pemilu 1999, dan 21,7% dalam pemilu 2004. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa konsistensi afiliasi politik pemilih Indonesia menunjukkan fluktuasi.

A. Eksistensi Politik Aliran Belum Hilang

Fenomena politik yang selama Orde Baru terjadi, dalam masa Orde reformasi tidak terjadi. Golkar yang selama Orde Baru mendominasi hampir di setiap pemilu, ternyata perolehan suara pada pemilu 1999 kalah jauh dengan PDIP, sebaliknya PDI yang selalu nomor urut buncit dalam pemilu-pemilu Orde Baru, dalam pemilu era Reformasi justru mendapat suara terbesar. Namun demikian, suara pemilu 1999 itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk menentukan besarnya *partisanship* pemilih karena ternyata dalam pemilu 2004 suara PDIP yang besar mengalami kemerosotan. Hal yang bisa dikatakan tetap, para pemilih masih mengikuti dasar politik aliran dalam menentukan pilihan politiknya. Dimana pemilih Santri ada kecenderungan memilih partai Islam, dan pemilih Abangan ada kecenderungan memilih partai Nasionalis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan politik aliran belum hilang dalam kehidupan masyarakat, khususnya tempat penelitian ini dilakukan.

Partai Kebangkitan Bangsa yang berbasis massa Islam Tradisionalis dan PAN yang Modernis, pemilu 1999 mendapat dukungan pemilih yang cukup signifikan di Malang Raya, walaupun ada penurunan pada pemilu 2004. Terjadinya perubahan perolehan suara dari partai Kebangkitan Bangsa ini bisa terjadi karena adanya perubahan pendekatan yang dilakukan partai Islam Modernis (PKS), sehingga bisa mencuri sebagian kecil dari pemilih Tradisional. Di samping itu, munculnya Partai Demokrat yang di bidani oleh Soesilo Bambang Yudhoyono, menarik massa pemilih yang tidak puas dengan reformasi, termasuk dalam hal ini massa pemilih Santri. Kemudian, upaya partai-partai baru yang juga

berupaya meraih dukungan dari kalangan pemilih Santri, khususnya kelompok Tradisional.⁸

Secara Nasional, hasil suara yang diperoleh partai-partai Islam baik pada pemilu 1999 maupun pemilu 2004 tidak begitu menggembirakan. Kenyataan tersebut mendorong Partai Islam untuk merubah strategi dan haluan politiknya. Mengingat makin tipisnya identifikasi pemilih Santri ke partai Islam, juga banyaknya partai berebut Islam Santri yang tidak hanya partai Islam tapi juga yang Nasionalis, maka partai-partai Islam ada kecenderungan bergeser lebih ke tengah dengan harapan bisa menggaet massa dari pemilih Abangan. Dengan demikian ada kecenderungan dikotomi Islam vs Nasionalis, tidak lagi kaku karena baik partai Islam maupun Nasionalis sama-sama membidik pemilih Santri maupun Abangan, sehingga isu yang bersumber politik aliran⁹ semakin melemah.

Di sisi lain, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa politik aliran yang dianggap mempengaruhi kehidupan politik di negara kita, tidak bersifat substansial, namun lebih pada simbolisasi masyarakat yang mayoritas Islam. Hal ini didukung oleh hasil studinya Kahin (1952), yang menunjukkan bahwa partai-partai politik yang secara ideologis menonjol dan mendapat dukungan mayoritas dari para pemilih dalam Pemilu 1955, seperti PNI, Masyumi, NU dan PKI, ternyata tidak sekadar menggambarkan kehidupan politik yang dipengaruhi oleh ideologi-ideologi politik modern dari Barat. Sebagaimana kesimpulannya terhadap perkembangan partai politik di awal revolusi, yang menyebutkan bahwa hanya sedikit dari anggota partai politik pendukung republik memahami benar ideologi dan advokasi *platform* melalui pemimpin mereka.

⁸ Hal-hal yang terkait dengan latar belakang, ideology, dan program partai politik, secara lebih detil bisa dilihat dalam Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009, Jakarta: PTKompas Media Nusantara, 2004.

⁹ Konsep politik berdasarkan pola aliran menjadi menonjol, tatkala kehidupan politik dalam masyarakat bukan didasarkan pada ideologi politik belaka, melainkan antar hubungan organisasi-organisasi sosial dengan kehidupan dari suatu sistem sosial yang kompleks (dari suatu infrastruktur sosial dan kebudayaan di pedesaan dan perkotaan). Karena itu terbentuk suatu aliran politik yang terformulasikan melalui istilah-istilah yang lebih bersifat ideologis. Sebenarnya perumusan tentang aliran politik di Indonesia telah dinyatakan di dalam pemikiran Soekarno tentang rumpun ideologi utama di Indonesia (Nasionalisme, Islam, dan marksisme). Namun klasifikasi tiga kelompok itu dianggap masih mengandung banyak kesulitan. Sebab tiap-tiap kategori sifatnya masih terlalu heterogen. Contohnya, perbedaan yang tajam antara kaum komunis dengan kaum sosialis, kelompok-kelompok yang radikal dan keningratan di kalangan Nasionalis, di samping pengaruh dari kehidupan subkultur terhadap kehidupan politik di kalangan Islam.

Perkembangan politik dan keadaan partai yang seperti itu, menyebabkan partai yang tumbuh berdasar pola aliran ataupun ideologis hingga Pemilu 2004 cenderung kurang berkembang sehingga tidak menjadi faktor politik yang kuat. Keadaan dari tiap partai lebih terkait dengan soal bagaimana pengalaman mereka (selama suatu rezim kekuasaan), serta basis pendukungnya yang berkembang dari pola perekrutannya (karena adanya fasilitas politik atau fasilitas sosial tertentu yang dapat dibudidayakan).

Hal tersebut sering membawa akibat sampingan (ekses) tertentu. Lemahnya kemampuan kelembagaan dan kepemimpinannya untuk merumuskan ideologi dan tampilan politisnya dalam menjawab persoalan masyarakat secara praksis, mengakibatkan keberadaannya justru sering menjadi beban baru bagi para pendukung dan masyarakatnya. Karena itu wajar jika dalam kenyataan umum, kedudukan dari partai politik menjadi dianggap lebih lemah dari kedudukan sosial masyarakatnya. Hingga kini partai politik ternyata belum berkemampuan signifikan untuk merumuskan dirinya menjadi pengarah perkembangan dan perubahan-perubahan sosial politik yang dianggap sebagai jalan demokrasi dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dicita-citakan.

B. Berkembangnya Massa Mengambang dan Swing Voters

Kebijakan Orde Baru yang membatasi kepemimpinan partai politik hanya sampai pada Daerah Tingkat II, bedasar pada UU No.3 Tahun 1973, menunjukkan secara imflisit keinginan Pemerintah Orba untuk membebaskan masyarakat dari pengaruh partai politik. Undang-undang ini secara tidak langsung telah membentuk masyarakat di tingkat pedesaan menjadi pemilih mengambang (*floating mass*) karena tidak punya keterikatan secara langsung dengan partai politik (de-parpolisasi).

Pada era reformasi pengaruh de-parpolisasi Orba tidak serta merta hilang, hasil pemilu 1999 yang menempatkan 6 partai sebagai papan atas, seperti PDIP, Golkar, PKB, PAN, PPP, PBB tidak dapat mempertahankan perolehan suaranya pada pemilu 2004. Kondisi ini menjadi terbukti adanya pemilih mengambang yang tidak terikat pada salah satu partai politik, sehingga melahirkan ketidakstabilan electoral dalam setiap pemilu.

Dalam pemilu 1999, beberapa partai yang dianggap mempunyai hubungannya dengan pemilih Islam, yaitu PKB, PPP, PAN, PKS, PBB,

cukup mendapat dukungan dari pemilih dan PKB mempunyai dukungan pemilih paling besar. Di Malang Raya Partai Kebangkitan Bangsa menempati urutan kedua terbesar setelah PDIP yaitu 29, 57 % untuk Kabupaten Malang, 19,60 % untuk Kota Malang. Sementara dukungan pemilih pada partai Islam lainnya tidaklah signifikan, kecuali untuk PAN yang punya basis pemilih golongan Islam Modernis mendapat 10, 53 % di Kota Malang. Sementara PDIP di Daerah Kabupaten Malang pemilih memberikan suaranya kepada PDI-P sebanyak 510.450 pemilih (38,47%) pada pemilu 1999 dan 357.008 pemilih (28,97%) pada pemilu 2004. Kondisi ini, bagi kalangan elit politik dianggap sebagai kenyataan ideologis yang mungkin disamakan dengan hasil pemilu 1955 dimana partai Islam memperoleh sekitar 40 % suara secara keseluruhan dan partai Nasionalis mendapat 60%, dimana PNI menjadi partai mayoritas nomor satu.

Dalam pemilu 2004, hasil perolehan suara menunjukkan bahwa suara partai-partai besar mengalami penurunan drastis. PDIP kehilangan 14% suaranya secara nasional dan harus kalah dari Partai Golkar. Namun demikian, dominasi PDIP di Malang Raya masih tetap. Di Kabupaten Malang, PDI-P meraih 28,97 persen suara, Partai Golkar 16,68 persen suara, dan PKB 25,72 persen suara. Di Kota Malang PDIP meraih 25,84 persen suara, PKB 17,36 persen suara, dan Partai Golkar mendapat 14,55 persen suara. Sementara di Kota Batu PDIP memperoleh 18,97 persen suara, PKB, 12,59 persen suara, dan Partai Golkar mendapat 19,67 persen suara. Sementara partai-partai baru yang tercatat mampu memperoleh suara pada Pemilu 1999 hanya Partai Amanat Nasional (PAN), PBB. PAN harus merelakan sebagian konstituennya lari ke Partai Lain. Hal ini menurut hasil analisis data yang diperoleh dari KPUD menunjukkan bahwa penurunan suara PAN ini diikuti dengan kenaikan suara PKS. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagian konstituen PAN beralih ke PKS.

Fenomena penurunan suara partai pada pemilu 2004, merupakan penjelasan dari keberadaan massa mengambang. Akibat pemilih tidak punya loyalitas ideologis dengan partai, maka pemilih dapat dengan mudah memindahkan dukungan politiknya ke partai lain, yang dalam konsep politik disebut sebagai *swing voters*. Hasil survei yang dilakukan terhadap 1400 calon pemilih (Lab. IP UMM), ada sekitar 498 atau sekitar 34% pemilih yang tidak akan menggunakan hak pilihnya, ada 259

atau sekitar 18% pemilih yang belum menentukan pilihan politiknya atau masih mengambang. Kalau digabungkan antara yang tidak akan menggunakan hak pilih dan yang belum mempunyai pilihan, ada sekitar 52% yang potensial mempengaruhi naik turunnya hasil pemilu.

Lebih jauh, berkembangnya fenomena *floating mass*, tidak hanya pengaruh dari proses pengkaburan politik aliran pada masa Orde Baru, namun juga akibat tidak adanya dukungan secara langsung dari ormas-ormas Islam terhadap partai politik sebagaimana yang terjadi pada Masyumi dan NU. Oleh karena itu banyak pemilih Islam yang kehilangan pegangan politik sehingga mereka tidak mempunyai identifikasi yang cukup untuk mentranstasikan pilihan politiknya kepada partai-partai Islam.

C. Perluasan Makna Partai

Pada pemilu 2004, pemilih yang meninggalkan partai politiknya, bukan karena alasan ideologis, namun lebih karena dorongan pragmatis. Akibat kondisi ekonomi dan sinisme politik masyarakat pada partai dan elit nya menuntun mereka berperilaku pragmatis, mereka akan menjatuhkan pilihan pada parpol mana pun yang mampu memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sementara pemilih yang masih setia dengan pilihan politiknya, dimana yang Santri masih memilih partai Islam dan yang Abangan masih memilih Partai Nasionalis, tetap mewarnai kehidupan politik.

Dari kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa pilihan partai politik masyarakat sekarang ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah ideologi dalam arti pilihan sejalan dengan aliran politik, namun ada makna lain seperti kesejahteraan ekonomi. Selain kedua hal pemaknaan tersebut, juga tersirat makna lain sebagai manifestasi dari kultur masyarakat desa yaitu kultur paguyuban yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, partai politik yang menjadi pilihan dalam satu komunitas sosial di satu kampung atau desa akan menjadi pilihan individu anggota kelompok sosial tersebut sebagai wujud dari solidaritas kelompok.

Secara garis besar, pemaknaan pemilih pada partai politik mencakup makna ideologis, makna sosial, dan makna ekonomi. Varian makna ideologi yang ada dalam masyarakat pemilih terbagi ke dalam empat hal pemaknaan partai, yaitu alat Perjuangan Islam, Pengejawantahan Keislaman, Pembelaan *Wong cilik*, dan Perlawanan Pada Ideologi

Penguasa. Makna sosial terdiri dari Solidaritas Sosial, Kepatuhan kepada Pemimpin, dan Budaya. Sementara varian makna ekonomi terdiri dari Pemberian Uang Tunai, Bantuan Pembangunan, Panggung Hiburan Rakyat.

D. Partai Mengejar Kepentingan Jangka Pendek

Mencermati persiapan sejumlah parpol di Malang Raya, banyak partai politik yang berusaha mengganti citra sebagai partai orang tua dengan memberi kesempatan munculnya kader-kader muda. Di sisi lain, partai-partai Islam sudah berusaha mengaburkan identitas dirinya sebagai partai Islam dengan tidak banyak memunculkan isu-isu yang bersifat ideologis, terutama perjuangan untuk menjadikan syariat Islam menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara negara.

Adanya kecenderungan partai politik menuju kearah zona abu-abu, juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat pemilih, walaupun politik afiliasi politik berdasar aliran masih eksis (ideologis), namun juga terjadi peningkatan pemilih mengambang (*floating mass*). Di sisi lain, kemampuan partai politik dalam melakukan penguatan ideologis terhadap basis massanya tidak bisa dilakukan dengan cara instant, sementara mereka juga dituntut untuk memenuhi *electoral threshold* (1999) atau *parliamentary threshold* (2004) agar tidak tergugur dalam pentas politik pemilu berikutnya. Hal inilah yang menjadi penyebab utama partai politik berperilaku praktis-pragmatis. Kondisi ini lambat laun telah memperlebar jarak antara partai politik dan konstituennya, sehingga apa yang seharusnya partai politik lakukan tidak jarang berseberangan dengan harapan masyarakat secara umum yang menginginkan kondisi politik menjadi lebih baik.

Salah satu cara yang ditempuh partai politik dalam menghindari ambang batas adalah dengan cara berusaha melakukan pendekatan yang sejalan dengan makna ekonomi bagi pemilih untuk mengambil simpati pemilih dalam pemilu. Hal ini merupakan jalan instan bagi partai untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih. Partai politik walaupun merasakan perlunya penguatan ideologis untuk meraih keuntungan jangka panjang, namun hal ini memerlukan waktu lama. Oleh karena itu hampir semua partai politik, dengan kadar berbeda berusaha melakukan pendekatan dengan cara praktis untuk memenuhi target jangka pendek, yaitu mengejar batas minimum (*threshold*).

Fenomena berkembangnya partai politik yang mengaburkan identitas ideologis untuk mengambil spektrum pemilih yang lebih heterogen (*catch all party*)¹⁰, untuk kasus di negara kita, dalam jangka panjang justru akan merugikan partai itu sendiri. Hal yang penting bagi partai politik sebenarnya bukan merekayasa identitas ideologis kearah abu-abu, melainkan yang penting adalah kejelasan *platform* partai yang ditrasformasikan kedalam bentuk program-program partai yang lebih jelas dan kongkrit. Kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah inkonsistensi partai politik dalam memeperjuangkan aspirasi rakyat. Artinya partai politik yang bernuansa ideologis, tidak harus kehilangan kemampuannya dalam membangun partai yang bersifat programatik.

Menurut Riswanda Imawan (2004), apapun format kepartaian yang dipilih, ideologi tetap dibutuhkan sebagai jati diri dan basis memformulasikan referensi masyarakat. Walaupun definisi ideologi itu banyak jumlahnya, akan tetapi esensinya sama yaitu bahwa ideologi dibutuhkan sebagai acuan rasionalitas individu yang bertebaran di tataran masyarakat. Karena dengan keberadaan ideologi, peran partai politik akan dipermudah. *As a world view, they tell people what to believe; as a prescriptive formula, they tell people what purposes and goals to realize as a nation; and as methodological guide, they describe acceptable means to ultimate purposes* (Mark M. Amstutz, 1982).

Dengan demikian, kejelasan ideologi dalam partai menjadi penting karena posisi partai akan menjadi jelas dalam ranah penyusunan agenda dan perumusan kebijakan publik. Hal ini juga sekaligus melaksanakan fungsi melayani masyarakat akan referensi yang mereka butuhkan, Di samping dapat mendekatkan aktor atau elit partai melalui adanya ikatan kesamaan norma di antara mereka dan masyarakat.

Literatur mengenai sistem politik yang mapan, terutama di Eropa, selalu menampilkan spektrum ideologis partai-partai politik yang konsisten: kiri-tengah-kanan. 'Kiri' berarti mendukung peran negara

¹⁰ Partai jenis ini di permukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai Catch-All mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada pemenangan Pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Partai Catch-All juga sering disebut sebagai Partai Electoral-Professional atau Partai Rational-Efficient. Namun berbesernya posisi ideologis partai politik akan mengakibatkan hilangnya identitas masing-masing partai politik, bisa jadi setiap partai politik punya isu dan bahkan program yang sama sehingga tidak ada preferensi yang akan dijadikan dasar dalam menentukan pilihan politik.

yang dominan dalam ekonomi dan kesejahteraan (bersifat sosialistik, belum tentu sinonim dengan komunis), 'tengah' adalah Moderat, dan 'kanan' adalah kelompok Liberal yang berusaha mengeliminir peran negara (singkatnya tidak setuju subsidi dan pajak yang tinggi misalnya) dan berusaha mengembalikan kapital lewat aktifitas masyarakat (pasar).

Adanya spektrum ideologi yang signifikan itu membuat sistem politik di Eropa menjadi mapan karena partai politik terdorong untuk mengedepankan kebijakan berbasis orientasi ideologis yang jelas. Dengan demikian pemilih juga menjadi rasional, para pemilih memilih partai yang sejalan ideologi nya, terutama dalam masalah substansial seperti peran negara dalam ekonomi dan politik. Pemilih menjadi rasional dalam arti pemilih bisa dipilah preferensinya.

Dengan berubahnya partai politik dari dasar ideologis yang eksklusif, menjadi partai politik yang inklusif dan pluralis mengandung dua kelemahan. *Pertama*, tingkat afiliasi politik dan *partisanship* pemilih menjadi lemah. *Kedua*, kemampuan partai politik dalam melakukan mobilisasi masa akan berkurang. *Ketiga*, konsistensi pemilih dalam jangka panjang tidak bisa dijamin, dan hal ini mendorong berkembangnya *swing voters* dalam pemilu. Walaupun demikian, dengan mengembangkan partai yang pluralis akan mampu mencairkan kebekuan ideologis sehingga partai politik akan dapat lebih leluasa untuk membangun isu politik dan agenda politik tanpa terikat dengan konstituennya.

Dalam jangka pendek, dan untuk kepentingan sesaat hal ini sepertinya menguntungkan, namun sejarah politik Indonesia membuktikan bahwa pondasi dasar pengelompokan dasar sosial politik kita ada pada tataran ideologis, dan akan terus berlangsung karena beberapa alasan. *Pertama*, belum berkembangnya kelompok kepentingan yang didasarkan atas profesi yang mampu menjadi alat mobilisasi sosial dan politik. Walaupun mereka masuk dalam perkumpulan profesi, seperti buruh, guru, dll., namun belum menjadi kekuatan efektif dalam mendorong kebijakan yang terkait dengan kepentingan mereka akibat lemahnya ikatan solidaritas, serta kesadaran politik di antara mereka. *Kedua*, pengorganisasian sosial yang didasarkan pada basis keagamaan yang merupakan pencerminan ideologis, lebih mempunyai daya dan kekuatan dalam memobilisasi massa baik untuk kepentingan sosial maupun politik. *Ketiga*, belum atau tidak tumbuhnya basis sosial baru yang dapat menjadi alat untuk mobilisasi sosial dan politik seperti basis sosial yang didasarkan pada kelas.

Pada dasarnya mekanisme hubungan partai politik dengan pemilih berjalan sesuai dengan hubungan simbiosis mutualisme, dimana partai politik membutuhkan suara pemilih dalam pemilu umum, sementara pemilih membutuhkan partai politik dalam rangka memperjuangkan aspirasinya. Agar para pemilih menjatuhkan pilihannya pada partai tersebut, maka partai politik harus berusaha memperjuangkan aspirasi pemilihnya agar apa yang mereka berikan (dukungan) tidak dianggap percuma. Maka dari itu, partai politik terpaksa harus memperhatikan keinginan para pemilih sebelum mengambil keputusan mengenai program dan kebijakan partai. Artinya, politisi harus mencari informasi tentang kesulitan dan masalah yang sedang dihadapi masyarakat serta kepentingan dan preferensi pemilih. Kemudian partai dapat menawarkan suatu program politik yang membicarakan persoalan-persoalan yang aktual.

Dengan demikian, dalam kompetisi multi-partai, yang dibutuhkan partai politik adalah *responsiveness*; kemampuan untuk mendengar dan menjawab. Tanpa mekanisme pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang eksklusif partai politik tidak dapat memaksimalkan hasil di dalam pemilu. Pengelolaan hubungan dengan masyarakat juga penting bagi keberlangsungan dan survival partai politik sebagai organisasi sosial. Seluruh organisasi berusaha untuk menstabilkan dan mengontrol lingkungannya. Lingkungan yang sangat sentral bagi partai politik adalah konstituennya. Hubungan dan komunikasi dengan masyarakat yang konsisten dan dua arah dapat merupakan stabilisator bagi partai, sebab pemilih merasa lebih akrab dan terikat pada partai dan akan memberikan kontribusi kepadanya. Maka dari itu, partai politik harus berusaha membangun hubungan dengan konstituen yang stabil dan berjangka panjang. Agar hubungan dengan konstituen dapat didirikan dan dikelola dengan baik partai harus mengembangkan pemahaman ideologi dan nilai-nilai dasar partai dan membangun (infra-) struktur partai dulu.

E. Diskusi Teoretik

Dikotomi aliran politik yang dikemukakan Geertz (1960) yaitu Santri dan Abangan, dalam kehidupan politik, ditransformasi menjadi ideologi partai berhaluan Islam dan Nasionalis. Santri yang dikonsepsikan Geertz sebagai kelompok masyarakat yang taat dalam menjalankan ajaran Islam terbagi ke dalam dua varian yaitu kelompok santri modernis dan kelompok santri tradisional (Jackson, 1984). Kedua varian santri

ini, terutama santri yang mempunyai identifikasi kesantrian yang kuat (Afan Gaffar, 1992), pilihan politik terhadap partai sangat kental dengan nuansa ideologis, mereka cenderung akan memilih partai Islam. Walaupun demikian, karena ada perbedaan pemahaman serta kultur keagamaan dari kedua varian santri ini telah melahirkan perilaku politik yang berbeda walaupun dasarnya sama yaitu ideologi Islam. Begitupun mereka yang abangan, dasar pertimbangan ideologis dalam memilih partai politik cukup kental. Pemilih abangan umumnya memilih partai yang berhaluan nasionalis, yang juga sering dikonsepsikan sebagai partai sekuler.

Dalam tataran praksis, kosep aliran Geertz masih menunjukkan relevansinya, khususnya di Jawa Timur. Kecenderungan pilihan politik kelompok Santri ke partai Islam dan Abangan ke Partai Nasionalis berjalan sebagaimana terlihat dari hasil pemilu baik 1999 maupun 2004. Fakta ini dapat dijelaskan dengan konsep identifikasi diri, yang merupakan hasil dari proses panjang sosialisasi dari mulai keluarga, kelompok, maupun lingkungan (Hyman, 1959).

Persoalan yang terjadi pada pemilu 2004, dimana partai-partai yang memperoleh suara cukup besar dalam pemilu 1999 mengalami penurunan suara, bukan berarti bahwa identifikasi diri pemilih pada partai tidak berlaku. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut: Karena dalam beberapa kasus dimana berbagai isu dan kandidat tidak begitu menonjol, peran identifikasi kepartaian mungkin menurun atau menjadi kurang signifikan dalam menjelaskan perilaku *voting*. Namun sebaliknya, dalam situasi dimana individu tidak punya pemahaman terhadap berbagai isu, catatan partai politik, atau kandidat, peran dari identifikasi kepartaian akan menjadi sangat kuat.

Oleh karena itu untuk membangun identifikasi diri terhadap partai, maka komitmen ideologis partai harus tersurat dalam *platform* partai dan sekaligus menjadi agenda politik partai untuk diperjuangkan. Akan tetapi, karena lemahnya pemahaman ideologi dalam partai berdampak pada model solusi persoalan bangsa yang relatif seragam dan tidak ada korelasinya dengan ideologi yang diperjuangkan. Program penyelesaian terhadap persoalan bangsa, hampir tidak menunjukkan adanya perbedaan yang substansial antara partai satu dengan yang lainnya. Seharusnya ketika ideologi menjadi suatu sistem nilai partai, cara berpikir dan bertindak dalam menyelesaikan persoalan akan

menjadi ciri khas dari parpol yang membedakannya dengan partai lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anthony Downs (1957), bahwa ideologi politik merupakan himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ketertiban (*order*) masyarakat tertentu termasuk menawarkan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan.

Di samping itu, tampilan ideologis menjadi hal yang sangat penting bagi suatu partai politik, sebagai suatu *platform* yang menjadi basis perjuangan politiknya di legislatif dan pemerintahan. Sebab ideologi partai dianggap sebagai sistem kepercayaan yang menciptakan pola tingkah laku politik yang penuh makna (sebagai pilihan-pilihan moral dan filosofis yang relatif koheren dan berpengaruh untuk membangun hubungan individu dengan masyarakat. Juga sebagai prinsip moral yang menjadi dasar pemakaian kekuasaan), selain sangat membantu partai untuk memahami sebagian determinan pendapat umum serta merumuskan kepentingan-kepentingan dan pilihan-pilihan politik yang akan diperjuangkan bagi rakyat.

Lemahnya ideologi partai berkorelasi pada perilaku politik partai yang cenderung praktis-pragmatis dalam mensikapi semua persoalan bangsa. Ideologi sebagai *the right of conduct* dan juga berperan untuk mengkritisi ide, gagasan serta program dari partai yang berlainan ideologi menjadi mandul. Tidak mengherankan bahwa akhirnya konstituen menjadi lebih pragmatis juga dan punya kecenderungan memilih figur, kedekatan, atau yang banyak uang dan sumbangannya. Hal ini merupakan ciri dari fenomena yang oleh Nugent (2003) disebut sebagai defisit demokrasi, karena para pemilih lebih suka figur dari pada kemampuan kandidat yang berfokus pada muatan politik.

Kondisi tersebut bisa dimaknai sebagai ketidakpercayaan pada partai politik. Hal itu mendorong masyarakat untuk berperilaku nonpartisan, Di samping mendorong terjadi *swing voters*, yaitu berpindahnya pilihan partai politik dari satu partai dalam pemilu ke partai lain dalam pemilu berikutnya. Apabila hal ini berlangsung terus, maka identifikasi diri pemilih terhadap partai akan mengalami kehancuran. Secara teoretik, kondisi ini dijelaskan oleh Harrop sebagai proses *dealignment*, yaitu suatu proses memudarnya identifikasi kepartaian dari seseorang kepada partai yang telah lama diikutinya atau sebagai "*the wakening of party loyalties*".

Memudarnya dukungan terhadap partai akan berarti hilangnya suara partai yang bersangkutan. Hal tersebut akan mendorong tumbuhnya partai baru, atau meningkat kekuatan partai sebagai akibat dari bergesernya identifikasi diri partai dari pemilih. Di dalam negara-negara demokrasi liberal, termasuk Indonesia, fenomena memudarnya dukungan atau menurunnya identifikasi partai akan menyebabkan berpindahnya pemilih ke partai lain atau/dan terbentuknya partai baru sebagai wadah baru untuk menyampaikan aspirasinya.

Sebagaimana yang terjadi pada pemilu 1999 dan 2004, dimana massa PDIP, massa PKB, massa PAN harus yang hilang telah memunculkan partai politik baru yaitu Partai Demokrat, sementara PKS menjadi partai yang menjadi besar pada 2004 setelah pada pemilu 1999 tidak lulus *electoral threshold*.

Kenyataan tersebut berimplikasi pada eksistensi, pola-pola aliran seperti model Soekarno, Geertz, dan Feith. Meski menarik secara teoretik, tetapi banyak mendapatkan kritik keras, karena dianggap sudah tertinggal (perkembangan tentang pemikiran politik yang lebih baru). Hal tersebut diperkuat pula oleh kenyataan-kenyataan di lapangan bahwa sebenarnya partai-partai politik di Indonesia tidak mampu menggambarkan secara memadai terhadap gagasan-gagasan politiknya. Misalnya, klaim-klaim politiknya terhadap rakyat (sebagai publik dan warga negara pemegang hak pilih dalam pemilu), yang menampilkan identitas diri secara seimbang, antara sikap-sikap politik partai yang rasionalitas ideologis dan tampilan-tampilan kepribadian politik para petinggi partai sebagai implementasinya.

Setiap partai politik yang memang benar-benar mengembangkan identitas politiknya, tentunya akan berkemampuan yang fleksibel untuk menyeimbangkan antara kedua tuntutan politik itu. Tampilan ideologis menjadi hal yang sangat penting bagi suatu partai politik, sebagai suatu platform yang menjadi basis perjuangan politiknya di legislatif dan pemerintahan. Sebab ideologi partai dianggap sebagai sistem kepercayaan yang menciptakan pola tingkah laku politik yang penuh makna (sebagai pilihan-pilihan moral dan filosofis yang relatif koheren dan berpengaruh untuk membangun hubungan individu dengan masyarakat. Juga sebagai prinsip moral yang menjadi dasar pemakaian kekuasaan), selain sangat membantu partai untuk memahami sebagian determinan pendapat umum serta merumuskan kepentingan-kepentingan dan pilihan-pilihan politik yang akan diperjuangkan bagi rakyat.

Partai politik yang berfungsi sebagai agregasi dan arikulasi kepentingan, tidak lagi menawarkan *flatform* dan program partai yang penuh kualitas dan bergaransi sebagai produk politik yang akan dijual. Sebaliknya, partai politik lebih banyak terjebak pada kepentingan jangka pendek saat pemilu, berbagai program yang ditawarkan hanya bersifat karikatif dan tidak mendidik. Kalau dilihat dari perspektif rasional dalam menjelaskan pemilih, maka sebenarnya masyarakat akan berusaha untuk mencari produk partai politik yang akan meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Akan tetapi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik, masyarakat lebih cenderung mengabaikan produk politik partai yang sifatnya substantif, berupa tawaran program yang berkualitas, dan lebih memilih produk partai yang sifatnya karikatif.

Pola hubungan partai dengan konstituen sudah terjebak pada pola transaksional, sehingga untuk mendapatkan suara dalam pemilu, parpol membeli konstituen lewat uang, sembako, kaos, pembangunan Mesjid, pembangunan jalan dan lain-lain. Hal ini dilestarikan oleh hubungan anggota dewan dengan konstituennya, yang terhanyut dalam pola politik sejenis pasca Pemilu. Anggota dewan terjebak untuk memberikan bantuan dan sumbangan yang bersifat karitatif dan berbiaya tinggi. Hal ini ditenggarai juga sebagai sebuah ketakutan dari pimpinan partai politik akan kehilangan dukungan konstituennya sebagaimana yang dikemukakan Feith (1974), “...party leaders were afraid that their members would desert them if not given sufficient reward...”

Kalau masyarakat memilih partai yang bisa memberi kaos, sembako, uang masuk ke dalam kategori perilaku politik rasional, maka hal ini tidak sejalan dengan makna rasional politik yang dimaksud Enelow dan Hinich. Sebab yang dimaksud dengan pilihan politik rasional harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *pertama*, *voting* dianggap sebagai sebuah instrumen, dalam arti untuk pencapaian tujuan selanjutnya; *kedua*, pendekatan pilihan rasional umumnya memfokuskan pada *voter's political goals*; dan *ketiga*, pendekatan pilihan rasional mengasumsikan para pemilih (*voters*) sebagai jembatan dalam pendekatan mereka terhadap informasi politik yang *nota bene* sebagai suara (*vote*) itu sendiri.

Dampak lain dari jeleknya kinerja partai politik yaitu, mendorong masyarakat berlaku apatis terhadap situasi politik yang berkembang. Perilaku apatis masyarakat ditandai dengan keengganan masyarakat

terlibat aktif dalam politik (non-partisipan), terutama dalam pemilu. Michael Rush dan Phillip Althoff (1986) melukiskan secara berbeda-beda terhadap mereka yang tidak mau berpartisipasi dalam politik. Mereka yang tidak berpartisipasi bisa dikategorikan sebagai apatis, sinis, alienasi (terasing), dan anomi (terpisah). Akan tetapi masing-masing kategori itu mempunyai latar belakang, motif, atau ciri yang berbeda-beda kenapa melakukan tindakan tidak partisipatif.

Terjadinya pergeseran pilihan politik pemilih yang terjadi dalam masyarakat, oleh elit partai tidak ditanggapi dengan cara yang konsisten, dan langsung pada persoalan. Justru partai politik berlomba-lomba menangkap “pelarian politik pemilih” yang disebut massa mengambang, dengan cara bergeser ke tengah, sehingga tampak lebih moderat (*catch all party*). Padahal persoalan utamanya bukan itu, persoalannya terletak pada ketidakpercayaan masyarakat pada partai politik, akibat kinerja partai dan anggota parlemen yang jauh panggang dari api. Banyak janji-janji manis dalam kampanye saat pemilu, tidak pernah terbukti dan dapat dirasakan oleh masyarakat setelah pemilu usai.

Dari latar seperti itulah, maka dalam masyarakat mengalami pelebaran dalam memaknai partai politik. Masyarakat tidak lagi hanya memaknai partai politik sebagaimana yang dikonsepsikan Geertz sebagai politik aliran, yang selalu linier antara pembilahan sosial yang berbasisi keberagaman (Santri, Abangan, Priyayi) dengan tipologi partai politik (Islam dan Nasionalis). Makna kekinian yang juga berkembang adalah makna ekonomi, Di samping makna sosial kemasyarakatan. Pandangan praktis-pragmatis pada partai politik, bagi pemilih menjadi hal yang rasional untuk saat ini melihat dari keberadaan partai politik yang tidak bisa dipercaya tapi tidak bisa mengelak dari keberadaannya.

Dalam perjalanannya, kualitas demokrasi tidak selamanya berjalan linier dengan perkembangan politik di suatu negara (Huntington, 1983) karena terjadi pembusukan politik (*political decay*). Suatu negara dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi bisa mengalami kemandegan atau pun berjalan dengan tanpa gairah. Kondisi ini secara konseptual dinamakan defisit demokrasi.¹¹ Berkaitan dengan persoalan defisit

¹¹ Wacana demokrasi defisit bisa dianalisis dalam dua level. *Pertama*, melalui analisis terhadap tingkat partisipasi warga negara dalam demokrasi elektoral atau pemilu (*input legitimacy*). *Kedua*, analisis bisa difokuskan pada tingkat pengambilan keputusan dan kontrol nasional atau rakyat secara langsung dalam proses tersebut (*output legitimacy*).

demokrasi, kasus yang terjadi di Eropa menunjukkan: (1). Penurunan jumlah anggota partai; (2). Penurunan hubungan mereka dengan konstituen yang stabil; (3). Penurunan partisipasi rakyat dalam pemilu; (4). Penurunan orang yang berminat menjadi kandidat dalam aktivitas publik dan politik; (5). Bertambahnya massa mengambang (*floating mass*) yang menyebabkan peningkatan ketidakstabilan elektoral; dan (6). Pemilih lebih suka figur dari pada kemampuan kandidat yang berfokus pada muatan politik (Nugent, 2003).

Defisit demokrasi di negara Indonesia, yang terjadi hanya terjadi dalam sisi massa. Di tingkat elit politik justru yang terjadi sebaliknya. Banyak elit-elit, khususnya elit di Jakarta berlomba-lomba untuk membuat partai politik, sepak terjang elit di Jakarta beresonansi kuat dengan elit di tingkat lokal. Pada akhirnya terjadi gayung bersambut antara ambisi elit pusat dengan hasrat politik elit di daerah, sehingga menggairahkan politik kepartaian. Lantas diikuti dengan persaingan elit di tingkat lokal untuk berebut menjadi calon anggota legislatif, sehingga tidak ada ruang kosong yang tersisa dari daftar urut calon yang tersedia di masing-masing partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik ed. 1983. *Agama dan perubahan Sosial*. Jakarta : Rajawali Press.
- Alfian, 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- , (1973) *Analisa Hasil Pemilihan Umum 1971*, LIPI, Jakarta.
- , dan Nazaruddin Syamsuddin, (1988) *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta.
- , 1990, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Kumpulan Karangan, Jakarta: PT. Gramedia
- Ali, Fachry 1994 *How State Comes to the People?: the Acehnese and the New Order State*. A Paper presented at the Indonesian Study group, Research School of Pacific and Asian Studies, ANU, Canberra, 8 June 1994.
- 1994 *Keharusan Demokratisasi dalam Islam di Indonesia*. A paper presented at a seminar held in LIPI by Majelis Sinergi Kalam, ICMI, Jakarta.
- , (1996) *Pengaruh Aliran Dalam politik Indonesia*, unpublished paper.
- Alford, Roberth R., (1963) *Party and Society*, Rand McNally and Company, Chicago.
- Almond, Gabriel and Sidney Verba, (1963) *The Civic Culture*. New Jersey: Prenceton Univerity Press,
- 1966. *Comparative Politics, A Developmental Approach*. Boston: Little, Brown and Company.
- Amal, Ichlasul, Dr., (1988) *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Amstutz, R., Mark, (1982) *An Intorduction to Political Science, The Management of Conflict*. USA: Foreman and Company.

- Anderson, Benedict R. O'G., (1990) *The Idea of Power in Javanese Power*, dalam Benedict R. O'G. Anderson *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- , (1990) *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Andrews, Mac, Collin, dan Mohtar Mas'ud. 1990. "*Perbandingan Sistem Politik*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anotony Black, 2006. *Pemikiran Politik Islam*, Terj. Abdullah Ali, Cet, I, Jakarta.
- Anderson, B. and Kahin, Andrey 1982 *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution to the Debate*. Ithaca : Cornell Modern Indonesian Project.
- Arifin, Imron 1993 *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang : Kalimasahada Press.
- As'ad, M.Z. Widjaja 1991 *Elit Agama dan Massa Pemilih dalam Perspektif Budaya Politik*. Unpublished MA thesis. Yogyakarta: Gadjahmada University.
- Azra, Azyumardi, 2002. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- , dkk. 2004, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Barness, Douglas F. 1978 "*Charisma and Religious Leadership: An Historical Analysis*", *Journal of the Scientific Study of Religion*, 17(1): 1–18.
- Barton, Greg and Fealy, Greg ed. (1996, forthcoming) *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*. Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Bernard Lewis, 2002 *Islam Liberalisme Demokrasi*, Terj. Mu'im A Sirry, Cit. I. Jakarta: Para Madina,
- Berelson, Bernard R., et.al, (1954) *Voting*, University of Chicago Press, Chicago.
- Binder, Leonard 1959 "*Islamic Tradition and Politics: The Kyai and the Alim*", *Comparative Study in Society and History*, (2): 250–256.
- , et al. 1971. *Crises and Sequences in Political Development*, New Jersey: Princeton University Press.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1992, *Pengantar metoda penelitian kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, (Diterj. Arief Furchan) Surabaya: Usaha Nasional.

- Bogdan, R.C. And Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciencies*. New York: John Wiley & Sons.
- Bone and Ranny, (1980) *Politics and Voters*, Mc. Graw-Hill inc. Illiones.
- Bourchier and Legge John (editor). 1994. *Democracy In Indonesia 1950 and 1990s*. Australia: Aristoc press Pty.
- Brannen, Julia. 1993. *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*. USA: Ashgate Publishing Company.
- Bruinessen, Martin van 1994 *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru*. Yogyakarta : LKIS.
- 1992 *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung : Mizan.
- 1995 *Kitab Kuning, Pesantren dan tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung : Mizan.
- Budiarjo, Miriam, (1992) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bulkin, Farchan. 1983. *State and Society: Indonesian Politics Under the New Order (1966-1978)*. Ph.D. Diss. University of Wahsington, Seattle.
- Campbell, Angus, Gerald Gurin, and Warren Miller, (1954) *The Voter Decides*, Evanston: Row, Peterson and Co.
- , et al., (1960) *The American Voter*. New York: John Wiley and Sons.
- ,, et al., (1966) *Election and the Political Order*, John Willey and and Sons, New York.
- Clifford Geertz, (1986) *Mojokuto, Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- Crouch, Harold. 1978. *Patrimonialism and Military Rule In Indonesia*. *World Politics* Vol. 31, No. 4, USA.
- . 1994. *Democratic Prospects in Indonesia*, in David Bourchier & John Legge (eds.) *Democracy in Indonesia, 1950s and 1990s*, Clayton, Victoria: Center of Southeast Asian Studies, Monash University, (Monash Papers on Southeast Asia No. 31).
- Cumming, Milton, (1956) *Congressmen and the Electorate*, The Free Press.
- Czudnowski, Moshe, M. (1976) *Comparing Political Behavior*, London: Sage Publication Inc, New York.
- Dahl, Robert, (1956) *A Preface to Democracy Theory*. Chicago: University of Chicago Press.

- Deliar Noer, 2006, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Cet. I, Bandung: Mizan.
- Dhofier, Zamakhsyari 1980 *The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java*. Ph.D. Thesis, ANU, Canberra .
- Dhofier, Zamakhsyari 1982 *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta : LP3ES.
- , 1998. *On Democrac*. New Haven: Yale University Press.
- Dankwart, A., Rustow, *Transition to Democracy. To Ward To Dynamic Model*, Comparative Politics Vol. 2. No. 3: 337-363.
- Deutch, Karl, W. 1961. "*Social Mobilization and Political Development*". American: Science Review, LV.
- Dhakidae, Daniel. 1999 "*Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*". Dalam Tim Penelitian Litbang Kompas (editor). *Edisi Pemilihan Umum*. Jakarta: Litbang Kompas.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy, Toward Consolidation*, terjemahan. Yogyakarta: IRE Press.
- , (1966) *Political Opposition in Western Democracies*. New Haven: Yale University Press.
- Dalton, Russel J., (1988) *Citizen Politics in Western Democracies: Public Opinion and Political Parties in the United States*. Great Britain, Chatam House, West Germany, and France, Chatam, NJ.
- Denver, David,. 1989 *Election and Voting Behavior in Britain*. London: Philip Allan Published.
- Dhakidae, Daniel, 1981, *Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*, Dalam Prisma 12 Des., LP3S.
- Dreyer, C., Edward and Rosenbaum, A., Walter, (1976) *Political Opinion and behavior*, Essay and Studies (Third Edition), Wadsworth Publishing Company, Inc. California.
- Down, Anthony, 1957, *An Economic Theory of Democracy*, Harver and Brothers.
- Drijarkara, N., 1978, *Percikan Filsafat*, Jakarta: Pembangunan Jaya.
- Easton, David, 1953, *The Political System*. Yew York: Alfred A Knopt
- Echols, J.M. and Shadily, Hassan 1975 *An English Indonesian Dictionary*. Ithaca, London : Cornell University Press.

- Effendy, Bahtiar 1998, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Paraktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Eickelman, Dale F 1976 *Moroccan Islam: Tradition and Society in a Pilgrimage Center*. Austin and London : University of Texas Press.
- Eickelman, Dale F and Piscatori, J. 1990 "Social Theory in the Study of Muslim Societies". In Eickelman, Dale F and Piscatori, James ed., *Muslim Travelers: Pilgrimage, Migration, and the Religious Imagination*. London : Routledge.
- Emerson, D.K. 1978 "The Bureaucracy in Political Context: Weakness in Strength". In Jackson, Karl D and Pye, Lucian ed., *Political Power and Communication in Indonesia*. Los Angeles : University California Press.
- Emmerson, Donald K., (1976) *Indonesia's Elite: Political Cultural and Cultural Politics*, Ithaca: Cornell University Press.
- Eriyanto, 1999, *Metogologi Polling, Memberdayakan Suara Rakyat*, Bandung, PT Rosakarya Offset Bandung.
- Eulau, Heinz, 1965 *The Behavior Persuation in Politics*, New York: Random House, New York.
- Fajar, Mukti, 2008. *Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: In-TRANS Publishing.
- Farganis, James, 2000, *Reading In Social Theory, The Clasic Tradition to Post-Modernism*, USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Fathoni, Khoerul and Zen, Muhammad 1992 *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwwah dengan Muhammadiyah*. Yogyakarta : Media Widya Mandala.
- Feith, H. 1970 "Introduction". In Feith and Castle, Lance ed. *Indonesian Political Thinking, 1945–1965*. Ithaca : Cornell University Press.
- , 1978, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press.
- , 1957, *Indonesian Elections of 1955*, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Ithac, New York: Cornell niversity.
- Fisher, Michael M.J. 1980 *Iran: From Religious Dispute to Revolution*. Cambridge : Harvard University Press.
- Flaniagan, H. W. 1968. *Political Behaviro of the American Electorate*, Boston: Allyn and Bacon.

- Fox, James J. 1991 "Ziarah Visits to the Tombs of the Wali, the Founders of Islam on Java". In Ricklefs, M.C. *Islam in the Indonesian Context*. Clayton, Victoria : Centre for Southeast Asian Studies, Monash University.
- Fox, James J. and Dirjosanjoto, P. 1989 "The Memories of Village Santri from Jombang in East Java". In May, R.J. and O'Malley, William J. ed. *Observing Change in Asia*. Bathurst : Crawford House Press.
- Friedrich, Carl J. 1961 "Political Leadership and the Problem of the Charismatic Power", *The Journal of Politics*, No. 1 February: 3–24.
- Finer, E., S. 1970. *Comparative Government, An Introduction to the Study of Politics*. New York: Allen Lane The Penguin Press.
- _____. 1985. *Comparative Government*. New Zealand: Penguin Books.
- Finkle L., Jason and Rachard W. Gable, (1971) *Political Development and Social Change* (second edition), John Wiley & Sons, Inc. Canada.
- Flanagan, Scoot, C. *et.al.*, (1991) *The Japanese Voters*. New York: Yale University Press.
- Free, Lioyd A. and Hadley Cantril, (1968) *The Political Beliefs of Americans*. New York: Simon and Schuster.
- Gaffar, Afan, 1992, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under Party a Hegemonic Party System*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Geertz, Clifford 1960 *The Religion of Java*. Glencoe : The Free Press.
- Clifford 1959 "The Javanese Kyai: The Changing Role of a Cultural Broker", *Comparative Studies in Society and History*, (2): 250–256.
- , Clifford 1965 *The Social History of an Indonesian Town*. Cambridge, Massachusetts : MIT Press.
- , Clifford, (1981) *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya
- Gellner, Ernest 1969 *Saints of the Atlas*. London : Weidenfeld and Nicolson.
- Gilsenen, Michael 1973 *Saint and Sufi in Modern Egypt: An Essay in the Sociology of Religion*. Oxford Monograph on Social Anthropology.
- Greenstein, Fred J., (1969) *Personality and Politics*. Chicago: Markham Publishing.
- Haidar, M Ali 1994 *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Hammond, J.L. 1979 *The Politics of Benevolence: Revival Religion and American Voting Behaviour*. Norwood : Ablex Publishing Corporation.
- Haryanto, (1984) *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hague, Rod, Martin Harrop and Shaun Breslin. 1992. *Political Science, A comparative Introduction*. Great Britain: The Macmillan Press LTD.
- Harrop, M. And William L.M. 1987. *Election and Voters*, London: The McMillan Press.
- Hefner, Robert W. 1987 "Islamizing Java?: Religion and Politics in Rural East Java", *The Journal of Asian Studies*, 46(3): 533-553.
- Heijer, Johannes den 1992 *A Guide to Arabic Transliteration: Comparative Transliteration Tables and a List of Selected Arabic Terms Related to Islamic Studies*. Jakarta : INIS.
- Heywood, Adrew 2000, *Key Concepts In Politics*:London, MacMillan Press LTD
- Hill, Michael 1973 *A Sociology of Religion*. Hampshire : Avebury.
- Hidayat, Komarudin dan Yudhie Latif, *Manuver Politik Ulama*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hindess, Barry 1989 *Political Choice and Social Structure: An Analysis of Actors, Interests and Rationality*. England : Edward Elgard.
- Hodgson, Marshal G.S. 1974 *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*. Vol. 1 and 2 Chicago : University of Chicago Press.
- Huntington, Samuel P. 1983. *Tertib Politik di Negara Yang Sedang Berkembang*. Cetakan I dan II, Jakarta: CV. Rajawali .
- _____.1991. *The Third Wave, Democratization in The Late Twentieth Century*. Norman and London: University of Oklahoma Press.
- _____. 1995. "Gelombang Demokratisasi Ketiga". terjemahan, Jakarta: PT. Intermasa.
- Husserl, Edmund, 1965, *Phenomenology and the Crisis of Philosophy*, New York: Harper & Row, Publishers, Inc.
- , 1970, *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology* (Translated by: David Carr), Evanston: Northwestern University Press.
- ,1976, *Ideas, General Introduction to Pure Phenomenology*, (translated by: W.R. Boyce Gibson), London: Routledge & Kegan Paul.

- Hyman, Herbert H., (1969) *Political Socialization*. Yogyakarta: Collier Mcamillan Canada, Ltd.
- Imawan, Risranda, 2004, *Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Hati Mencari Jati Diri*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta, UGM
- Jackson, Karl D. 1973 *Traditional Authority, Islam and Rebellion*. Berkeley : University of California Press.
- , dan Lucian, W. Pye, 1978, *Political Power and Communication in Indonesia*, London, University of Californis Press.
- Jenkins, D. 1984 *Suharto and His General: Indonesian Military Politics 1975–1983*. Cornell Modern Indonesian Project.
- , 1978. *Political Power and Communication in Indonesia*. London: University of California Press.
- , 1980, *Traditional Authority, Islam and Rebellion*. Berkeley: University of California Press.
- Jaros, Dean (1974) *Explaining the Political Behavior of Individual: Group or Social Factors*, Dean Jaros, Political Behavior, Choices and Perspective, St Martin's Press, New York.
- Jenning, M. Kent and L. Harmon Zeigler, eds., (1966) *The Electoral Proses*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- J.C Wahlke, dkk, *The Legislative System*, New York, 1962 dalam Prof. Dr. A. Dalam Hoogerwerf, Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Kartodirdjo, Sartono 1973 *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Century*, Kuala Lumpur : Oxford University Press.
- Kazhim, M. dan Alfian Hamzah, 1999, *Lima Partai Dalam Timbangan*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Key, Jr., V.O., 1958. *Politics, Parties, and Pressure Groups*, New York: Vail-Ballou Press.
- , (1966) *The Responsible Electorate*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambrige, Mass.
- Kompas, 2004, *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- .(1961) *Public Opinion and American Democracy*, Alfred A. Knopf,. New York.

- Kristiadi, Joseph, (1994) *Pemilihan Umum dan Pemilih*, Desertasi Doktor Di Universitas Gadjah Mada.
- Lane, Robert E., (1959) *Political Life*, The Free Press, New York.
- Langton, Kenneth P., (1969) *Political Socialization*. New York: Oxford University Press.
- Lazarsfeld, Paul, Berbard Berelso, and Hazel Gaudet, (1944) *The People Choice*. New York: Columbia University Press.
- , (1962) *Political Ideology*. New York: The Free Press.
- , (1969) *Political Thinking and Consciousness*. Chicago: Markham Publishing.
- Lev, S. D. 1966. *The Transition to Guide Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*, Monograph Series, Modern Indonesian Project, New York: Cornell University.
- Liddle, W.R. 1978 *Participation and the Political Parties*. In Jackson, Karl D and Pye, Lucian ed. *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley : University of California Press.
- , 1978, *The 1977 Indonesia Election and New Orde Legitimasy*, Southeast Asian Affair (Singapura: Institute for Southeast Asia Affair Asia Studies, 1978.a)
- , (1974) *"Power, Participation and The Political Party in Indonesia"*, Center for International Studies, MIT.
- , 1992. "Sungai Budaya. *Tempo*. 12 April.
- Lipset, Saymore M., (1960) *Political Man*, Garden City, N.Y.:Doubleday and Company,
- and Stein Rokkan, (1967) *Party System and Voter Alignments: Cross National Perspectives*. New York: The Free Press.
- Liddle, William, R. Soeharto's Indonesia: *Personal Rule and Political Institutions*. Leirissa, RZ.. 1994. PRRI Permesta. Jakarta: Grafiti .Pers.
- Mackenzie, W J M, (1978) *Political Indentity*. New York: As. Martin's Press.
- Mackie, J.A.C., (1990) *"Property and power in Indonesia"*, dalam Richard Tanter dan Kenneth Young, *The Politics of Middle Calss Indonesia*, Clayton: Center of Southeast Asian Sudies, Monash University.
- Mas' oed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.

- Max Boboy, SH. *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Mintadireja, S., M., 1971, *Masyarakat Islam dan Politik Indonesia*, Djakarta: Permata Djakarta.
- Mochtar, Hilmy 1989 *Dinamika Nahdlatul Ulama: Suatu Study tentang Elite Kekuatan Politik Islam di Jombang Jawa Timur*. Unpublished MA thesis, Gadjahmada University, Yogyakarta .
- Moelang, Lexy, J. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moore, B. 1966. *Social Origin Dicttorship and Democracy: Lord and Peasants in the Making of the Modern World*. Boston: Beacon Press.
- Muhaimin, Yahya, dan Andrews, Mac Colin. 1985. *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mujani, Saeful, 2007, *Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, Dan Partisipasi Politik Indonesia Pasca Demokrasi*, Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama.
- Mulkan, M. A. 1988. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam, Dalam Prespektif Sosiologis*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Neill Nugent, 2003, *The government and Politics of the European Union*, Edisi ke-5, Hampshire: Palgrave MacMillan
- Nimo, Dan.,1970. *The Political Persuades*, Tokyo: Prentice-Hall.
- Nurjaman, Asep, (1998) *Kepolitikan Orde Baru Dalam Prespektif Struktural Dan Kultural*, Malang: UMM Press.
- O'Donnel, Gulillermo. 1978. *Reflection on the Paterns of Change in the Bureaucratic Autnoritarian State*", *Latin American Research Review*,8.
- Palma, Di. 1990. *To Craft Democracies, An Essay on Democratic Transitions* Berkeley. Los Angelo
- Pomper, Gerald, 1966. *Politics: Essay and Reading*, USA: Rinehart and Winston, Inc.
- , (1975) *Voter's Choice: Varieties of American Electoral Behavior*. New York: Dodd, Med Company.
- Pool, Ithiel de Sola, Robert Abelson, and Samuel Popkin, (1964) *Candidates, Issues, and Strategies*. Cambrige: The M.I.T. Press..
- Ramage, E. Douglas. 1995. *Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London and New York: Routledge.

- Ranney, Austin, (1962) *Essay on the Behavioral Studi of Politics*. Urbana: University of Illiois Press.
- Ricklefs, M. C. 1981. *A History of Modern Indonesia*. London: Macmillan.
- Ritzer, George, 1985, *Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan. Jakarta: CV. Raja Wali.
- Ricklefs, M.C. 1979 Six Centuries of Islamization in Java. In Levtzian, N. ed. *Conversion to Islam*. New York : Holmes and Meir.
- Rose, Ricard dan Ian Mc. Allister, (1990) *The Loyalties of Voters: A Life Time Learning Model*, Sage, London and Newburry Park, CA.
- Rush, M. And Phillip A., 1986, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Samuel, And Joan M. Nelson, (1976) *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*, Harvad University Press, USA.
- Samson, Allan A. 1978 Conception of Politics, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian Islam. In Jackson, Karl D and Pye, Lucian ed. *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley : University of California Press.
- Sartori, Geovanni, 1959, *Parties and Party System, A Framework fo analisis*. New York: Cambridge University Press.
- Smith, D.E. 1971 *Religion, Politics, and Social Change in the Third World*. New York: Free Press.
- Steenbrink, Karel A. 1974 *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta : LP3ES.
- Suhardjo, Achmad 1991 *Kemerosotan Perolehan Suara PPP Pada Pemilu 1987, Studi Kasus di Kabupaten Jombang*. Unpublished MA Thesis, Gadjahmada University, Yogyakarta.
- Sukamto 1992 *Kepemimpinan Kiai dan Kelembagaan Pondok Pesantren*. Unpublished MA Thesis, Gadjahmada University, Yogyakarta .
- Sundhaussen 1978 "The Military: Structure, Procedures and Effects on Indonesian Society". In Jackson, Karl D. and Pye, Lucian ed., *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley : University of California Press.
- Sherman, Arnold, K. dan Aliza Kolker, (1987) *The Social Bases of Politics*. California: Division of Worswath.
- Shin, Hwan, Yoon. 1989. *Desmitisfying the Capitalist State: Political Patronage, Bureaucratic Interests, and Capitalists-In-Formation in Soeharto's Indonesia*. A Dissertation.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Silalahi, Harry Tjan, *The 1977 General Election: The Result and The Role of Traditional Authority Relations in Modern Indonesian Society*, Indonesian Quarterly, Vol. V, No. 3 (July, 1977).
- Siregar, A. (penyunting). 1985. *Pemikiran Politik dan Perubahan Sosial, Seri Pemikiran Politik 1*, Jakarta: CV. Akademi Pressindo.
- Surakhmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmia. Dasar Metode Teknik*. Bandung: TARSITO.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Indonesia: Gramedia Widya Sarana.
- Sulistyo, Hermawan. 2000. *Palu Arit Di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Soemargono, Soejono, 1988, *Filsafat Abad 20*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Syamsuddin, D. (editor). 1990. *Muhammadiyah Kini dan Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Thohari, Hajriyanto Y., (2002) *Kepemimpinan Nasinal, Antara Primodialisme dan Akuntabilitas*, dalam Maruto MD dan Anwari WMK, (editor), *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, Pustaka LP3ES Indoensia, Jakarta.
- Thomson, John B., 1981, *Critical Hermeneutics, A Study in the thoug of Paul Ricoeur and Jurgen Habermas*, New York: Cambridge University Press.
- Viorina, Morris F. 1978 *Restrospective Voting in American National Election*. Edward Brother Inc.
- Ward, K.E. 1974 *The 1971 Election in Indonesia: An East Java Case Study*. Monash Paper on Southeast Asia No. 2. Melbourne : Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Weber, Max 1976 *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London : Allen & Unwin.
- Wilson, Bryan 1983 *Religion in Sociological Perspective*. New York : Oxford University Press.
- Willner, Ann Ruth, (1984) *The Spellbinders: Charismatics Political leadership*. Yale: Yale university Press.

Woshinsky, A., Oliver H., (1995). *Culture and Politics, Introduction to Mass and Elite Political behavior*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Sumber Lain:

KPUD Kabupaten Malang, Rekapitulasi Hasil pemilu 1999 dan 2004.

KPUD Kota Malang, Rekapitulasi Hasil pemilu 1999 dan 2004.

KPUD Kota Batu, Rekapitulasi Hasil pemilu 1999 dan 2004.

Kompas, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Jawa Pos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD.

Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

GLOSARIUM

| | |
|-----------|---|
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| GOLKAR | : Golongan Karya |
| HANKAM | : Departemen Pertahanan dan Keamanan |
| HMI | : Himpunan Mahasiswa Indonesia |
| ICMI | : Ikatan Cendekiawan Indonesia |
| KAMMI | : Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia |
| KASAD | : Kepala Staf Angkatan Darat |
| KASSOSPOL | : Kepala Staf Sosial Politik |
| KEPPRES | : Keputusan Presiden |
| KKN | : Korupsi Kolusi dan Nepotisme |
| KNIL | : Koninklijke Netherlands Indische Leger |
| KNPI | : Komite Nasional Pemuda Indonesia |
| KODAM | : Komando Daerah Militer |
| KODIM | : Komando Distrik Militer |
| KORAMIL | : Komando Rayon Militer |
| KOREM | : Komando Resort Militer |
| KOSGORO | : Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong royong |
| KPK | : Komisi Pemberantasan Korupsi |
| KPU | : Komisi Pemilihan Umum |
| LEMHANAS | : Lembaga Ketahanan Nasional |
| LIPI | : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
| MALARI | : Malapetaka 15 Januari |
| MARA | : Majelis Amanat Rakyat |
| MASYUMI | : Majelis Syuro Muslimin Indonesia |

| | |
|----------|---|
| MPR | : Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| MUI | : Majelis Ulama Indonesia |
| NGO | : Non-Governmental Organisation |
| NU | : Nahdlatul Ulama |
| PAN | : Partai Amanat Nasional |
| Pansus | : Panitia Khusus |
| Parindra | : Partai Indonesia Raya |
| Parkindo | : Partai Kristen Indonesia |
| Parmusi | : Persaudaraan Muslimin Indonesia |
| PBB | : Partai Bulan Bintang |
| PBN | : Partai Buruh Nasional |
| PD | : Partai Demokrat |
| PDI P | : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| PDS | : Partai Damai Sejahtera |
| Persis | : Persatuan Islam |
| Perti | : Pergerakan Tarbiyah Islamiyah |
| PETA | : Pembela Tanah Air |
| Pilkada | : Pemilihan Kepala Daerah |
| Pilpres | : Pemilihan Presiden |
| PK | : Partai Keadilan |
| PKB | : Partai Kebangkitan Bangsa |
| PKI | : Partai Komunis Indonesia |
| PKP | : Partai Karya Pembangunan |
| PKPI | : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |
| PKS | : Partai Keadilan Sejahtera |
| PKU | : Partai Kesatuan Umat |
| PNBK | : Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan |
| PNI | : Partai Nasionalis Indonesia |
| PNU | : Partai Kesatuan Umat |
| PPP | : Partai Persatuan Indonesia |
| PRD | : Partai Rakyat Demokratik |

| | |
|-------|---|
| PSI | : Partai Sosialis Indonesia |
| PSB | : Partai Solidaritas Buruh |
| PSBSI | : Partai Solidaritas Buruh Seluruh Indonesia |
| PSI | : Partai Sosialis Indonesia |
| PSII | : Partai Syarikat Islam Indonesia |
| SARA | : Suku, Agama, Ras, Antar Golongan |
| SBSI | : Serikat Buruh Seluruh Indonesia |
| SMID | : Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi |
| SOKSI | : Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia |
| TNI | : Tentara Nasional Indonesia |
| UMM | : Universitas Muhammadiyah Malang |
| UI | : Universitas Indonesia |
| SUNI | : Solidaritas Uni Nasional Indonesia |

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

INDEKS

A

Abangan 26, 28, 36, 43-44, 73-92, 95-99, 102, 103, 109-111, 116, 117, 121, 129, 139.
 Aliran 3, 25-29, 32, 45, 74, 78, 81-88.
 Amin Rais 85, 94, 121, 126, 171, 208, 219.

B

Bantuan 4-6, 159, 165, 174, 175, 185, 185, 189, 192-197, 209, 222-227, 243, 253, 260.
 Basis 2, 19, 22, 25, 29, 44, 45, 48, 49, 57, 61, 63, 73, 85, 88, 119, 126, 129, 133, 135, 139, 154, 201, 210, 213, 254.
 Batu 19, 35, 37, 44, 45, 62, 72, 86, 93, 114, 144, 149, 183, 187, 194, 215, 220, 225, 229.

C

Constituency 4, 5.

E

Electoral 6, 18, 22-24, 49, 121, 149, 158, 273, 259.
 Elite 11, 12, 148, 151, 194, 205-207, 213, 233.

D

Dapil 47-50, 62, 195, 221, 222.
 Da'wah 107, 112, 120, 171.
 Demokrasi 3, 6, 7, 9-18, 29, 45, 62, 66, 124, 157.
 DPR 5, 11, 12, 73, 149, 153, 154, 183, 245, 246.
 DPRD 11, 12, 49, 52, 58, 60-62, 64, 70, 73, 216.

F

Fanatik 2, 97, 141, 173, 187, 220.
 Fatayat 113.
 Feith 1, 26, 123-125, 136, 137, 157, 259, 260.
 Fenomena 1, 4, 6-8, 29-33, 42, 43, 74, 75, 78-93, 108, 109, 115, 165, 230.

G

Geertz 25-28, 32, 43, 44, 74-82, 86, 91, 92, 137, 185.
 GOLKAR 1-4, 7, 19, 29, 44, 45, 48, 52, 56, 57, 63-65, 69.
 Golput 60-62, 70, 106.
 Gus Dur 85, 105, 112, 114, 121, 126, 174, 208, 219.

H

Hasyim As'ari 114, 174.

I

Ideologi 10, 18, 20-22, 25, 29, 45, 79, 107, 114, 119, 120, 209, 211.

Identifikasi 89, 100-104, 109, 130, 148, 168, 178, 216, 259.

Islam 1-4, 7, 22, 26-29, 36, 38, 41-44, 49, 75, 83, 85, 126, 129.

J

Jackson 1, 74, 76-83, 93, 109, 110, 115, 186, 256.

Jamaah 91, 187.

Jawa, 28, 36, 38-40, 43, 74, 75, 77, 78, 90, 109, 111, 140, 173.

K

KKN 4, 12, 116.

Komisi 46, 47, 57, 63, 64, 68, 69, 72, 153, 241, 245.

Konsevatif 2, 3, 18, 26, 76, 77, 80, 91-93, 104, 112, 211.

KPU 47, 153, 207, 241, 245.

KPU D 7, 45, 61, 70, 86, 239.

Kyai 36, 41-44, 46, 54, 76, 77, 79, 81, 92, 95, 102, 111-115, 148, 187, 189, 223, 224.

Kristen 128, 129, 131, 132, 135, 170, 214.

L

Lokal 6, 38, 40, 65, 92, 95, 110, 112, 113, 115, 116, 137, 138, 147, 173,

185, 186, 189, 230, 243, 246, 262.

M

Malang 7, 8, 32, 35-62, 135, 147, 149, 251.

MASYUMI 3, 27, 28, 76, 82, 83, 91, 92, 105-108, 120, 123.

Modernis 3, 4, 49, 76, 77, 79-89, 91, 102, 105.

Muhammadiyah 4, 76, 77, 83, 85, 91, 92, 94, 104-108, 112, 121, 126, 150, 172.

MUI 140.

N

Nahdiliyin 26, 27, 146.

Nasionalis 29, 36, 43-46, 70, 77, 84, 85, 108, 123, 158, 163, 252.

NU 2, 3, 28, 36, 46, 82-85, 91, 105, 111, 113, 114, 124, 249, 252.

O

Organisasi 4, 9, 15, 16, 21, 27, 28, 32, 82, 85.

Ormas 25, 85, 104, 140, 150, 158, 252.

P

PAN 3, 7, 8, 29, 45, 49, 50, 57, 59, 63, 64 70, 84-86.

PBB 3, 7, 45, 56, 57, 64, 70, 86, 87, 105, 106, 108, 120, 121.

- PBN 127, 237.
- Partai Demokrat 7, 8, 18, 49-52, 56-58, 63-70, 86, 88, 97, 109, 122, 128, 131, 212, 226.
- PDI P 36, 44, 46-48, 52, 55, 57, 63, 70, 84-88, 97, 106, 109, 129, 172, 179, 180.
- PDS 45, 46, 57, 64, 70, 132, 134, 141, 144, 149, 153, 235, 239.
- Pergeseran Politik 6, 7.
- Pilkada 5, 65, 162, 180, 204.
- PK 29, 45, 49, 105, 107, 120, 121, 123, 127, 129.
- PKB 3, 7, 29, 45, 46, 48, 52, 55, 63, 67, 113, 120.
- PKI 1, 27, 82, 123, 124, 139, 156, 157, 179, 249.
- PKP 127, 273.
- PKPI 64, 153.
- PKS 8, 45, 49, 52, 56, 59, 63, 70, 86, 88, 106.
- PKU 120, 126, 236.
- PNBK 56, 64, 69, 70, 128, 130, 132, 134, 144, 153.
- PNI 1, 27, 28, 82, 83, 123, 124, 155.
- PNU 105, 120, 127, 236.
- PPP 1-3, 7, 8, 29, 45, 49, 52, 56, 64, 70, 86, 112
- PRD 123, 126, 129, 236.
- Pragmatis 4, 5, 17, 91, 97, 123, 160-163, 193, 211, 252.
- Priyayi 26, 28, 44, 74-79, 98, 109, 136, 140, 147, 261.
- PSI 56, 63, 64, 70, 124, 134, 144, 149, 153.
- ## R
- Rasional 12, 29, 32, 45, 94, 159, 173, 190, 191, 203, 255.
- Reformasi 3, 4, 12, 46, 62, 79, 116, 119, 120, 125, 155, 165, 245, 248, 250.
- Religius 17, 32, 36, 42, 86, 91, 125, 129, 131, 137, 154, 163.
- Representasi 3, 14-16, 85, 121, 124, 145, 172, 219.
- Riswanda 6, 12, 20, 128, 129, 132, 159, 160, 161, 211, 239, 254.
- ## S
- Santri 26, 28, 36, 42-44, 73, 79-99, 111, 115, 173, 256.
- Sartori 18, 20, 140, 155, 164.
- Sosialis 21, 138, 139, 161, 179, 180, 238.
- Sosiologis 36, 66, 85, 86, 120, 132, 151, 163, 181, 206.
- SUNI
- Swings Votes 7, 239, 240.
- ## T
- Tahlilan 44, 94, 95, 102, 105, 111, 113, 189, 190, 204, 217.
- Tradisional 2, 16, 29, 35, 41, 41, 44-46, 61, 75, 129, 135, 168.
- Threshold 6, 23, 49, 56, 121, 158, 237, 240, 253, 259.

U

Uang 5, 12, 165, 175, 183, 185, 190,
194, 218, 260.

Ustad 81, 223.

V

Voting 60, 101, 104, 199, 227, 229,
239, 257, 260.

W

Week 88.

Y

Yasinan 43, 44, 94, 95, 102, 189, 217.

Z

Zafin 41.

Ziarah 43, 112.

TENTANG PENULIS



Dr. Asep Nurjaman, M.Si., merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Malang sejak tahun 1993. Riwayat pendidikan formal di sekolah dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Garut; SMPN 2 Garut; SMAN 1 Garut, sementara pendidikan perguruan tinggi dimulai dengan menyelesaikan S1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung pada tahun 1992; pada tahun 1998 bertepatan dengan reformasi politik di Indonesia menyelesaikan S2 pada Program Studi Ilmu Politik UGM Yogyakarta; dan pada tahun 2012 di almamater yang sama (UGM) menyelesaikan program Doktorat (S3) dalam bidang Ilmu Politik dengan judul Desertasi *“Electoral Volatility Nasional dan Lokal: Studi Tentang Ketidakstabilan Sistem Kepartaian Indonesia”*.

Selain menulis buku, Dr. Asep Nurjaman, M.Si yang kelahiran Garut 17 April 1968, juga sering mengisi acara *talk-show* politik di radio dan rajin menulis makalah pada jurnal nasional maupun internasional. Jabatan yang pernah disandang mulai dari Pembantu Dekan sampai Dekan di FISIP-UMM. Pada saat ini menjabat sebagai Direktur *Center for Election and Political Party* (CEPP) uni-link Universitas Muhammadiyah Malang.